



**PEMERINTAH  
DAERAH PAPUA**

# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024**

---

**BAPPEDA PROVINSI PAPUA**

Kantor Gubernur Papua  
Jl. Soa Siu Dok II, Kota Jayapura  
Papua



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 27 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 1 (satu)

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun RKPD Tahun 2024 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
22. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 8 Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefiskasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76.PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua
2. Provinsi adalah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir tahun 2022 atau 2023.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pemerintah nasional periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
  - b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
  - c. prioritas pembangunan daerah Tahun 2024;
  - d. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - e. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi (*covid-19*) di Daerah.
- (3) RKPD Provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan RKPD Provinsi.
- (4) Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran.
- (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (6) Program prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.

- (7) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber pada APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2024.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas :
  - a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - b. rancangan akhir RKPD;
  - c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD;
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan
  - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD;
  - f. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
  - g. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2024.
- (4) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 4**

- (1) Penjabaran dari RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja SKPD yang berpedoman pada Renstra SKPD dan RPD.
- (3) Penyusunan Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja SKPD sebagaimana tercantum pada RPD dan Renstra SKPD.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Maksud**  
**Pasal 5**

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan :
  - a. RKPD, KUA, PPAS, dan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024; dan
  - b. RKPD, KUA, PPAS, dan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- (2) Penyusunan RKPD Provinsi sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Tahun 2024;
  - b. penyusunan rancangan awal RKPD, KUA, PPAS, dan APBD Provinsi Tahun 2024;
  - c. penyusunan rancangan RKPD, KUA, PPAS, dan APBD Provinsi Tahun 2024;
  - d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
  - e. perumusan rancangan akhir RKPD, KUA, PPAS, dan APBD Provinsi Tahun 2024;
  - f. penetapan RKPD, KUA, PPAS, dan APBD Provinsi Tahun 2024;
- (3) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (4) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
- (5) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 6**

Penetapan RKPD Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 21 Agustus 2023

**Pih. GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 22 Agustus 2023  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM**



**SOFIA BONSAPIA, SH, M,HUM**  
**NIP. 19700912 199712 2 001**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Papua dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ini. Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2024 ini tetap memedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024–2026, Dokumen RKP, program-program prioritas dan strategis nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan telah selesainya penyusunan RKPD Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, para Kepala Perangkat Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan kekuatan bagi kita semua dalam membangun Provinsi Papua demi mewujudkan Visi Provinsi Papua pada RPJPD **yaitu** **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen	8
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>15</b>
2.1 Kondisi Umum Daerah	15
2.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100
2.3 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	120
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah	142
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>149</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	149
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	157
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>172</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	172
4.2 Perumusan Tema RKPD Tahun 2024	182
4.3 Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	193
4.4 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024	200
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN</b>	<b>214</b>
5.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	214
<b>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	<b>223</b>
6.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024	224
6.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pendanaannya	224
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>226</b>
7.1 Indikator Kinerja Utama	226
7.2 Indikator Kinerja Kunci	239
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>285</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>287</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua .....
Tabel	2.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua .....
Tabel	2.1	Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua .....
Tabel	2.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua .....
Tabel	2.1	Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua .....
Tabel	2.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua .....
Tabel	2.1	Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua .....
Tabel	2.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua .....
Tabel	2.1	Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua .....
Tabel	2.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua .....



## DAFTAR GAMBAR

Tabel	2.1	Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua .....
Tabel	2.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua .....



Lampiran : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 27 Tahun 2023  
Tanggal : 21 Agustus 2023

## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 telah mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah yang disebutkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 260 juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen- dokumen perencanaan ini dipedomani oleh Visi Provinsi Papua dalam RPJPD yaitu **"Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik"** untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan.

Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Papua saat ini berada dalam era baru pelaksanaan otonomi khusus, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi





Khusus bagi Provinsi Papua. Adanya perubahan Undang-undang ini mengubah proporsi, mekanisme, dan tata kelola keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dana Otonomi Khusus. Perubahan pasal terkait pengelolaan keuangan juga dimaksudkan untuk mendorong sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Wilayah Papua. Hal ini membawa konsekuensi perubahan perencanaan dan penganggaran di Provinsi Papua, secara khusus anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota di Provinsi Papua telah menyusun **Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)** tahun 2022-2041, dimana Dokumen RIPPP ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Wilayah Papua. Selain itu, RIPPP ini juga menjadi dasar pengelolaan Otonomi Khusus guna optimalisasi pembangunan dan mensejajarkan Wilayah Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Sehingga RKPD Provinsi Papua tahun 2024 ini juga harus berpedoman kepada dokumen RIPPP selain dokumen perencanaan pembangunan yang telah dipedomani.

RKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 juga merupakan RKPD yang sangat strategis, karena merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026, sehingga harus memastikan semua rencana pembangunan yang disusun dalam RKPD Tahun 2023 dapat menjamin pencapaian target indikator pembangunan akhir Periode RPJMD.

RKPD disusun berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Sedangkan perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.





Adapun perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Terakhir, untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, penyusunan RKPD 2024 juga diperkuat dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan memperhatikan pada beberapa hal yaitu:

1. Pengendalian perencanaan;
2. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran;
3. Perencanaan berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Integrasi sumber pendanaan.

Selanjutnya, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, penyusunan RKPD 2024 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Melalui penerapan berbasis IT (Informasi dan Teknologi) tersebut diharapkan RKPD 2024 akan lebih berkualitas, yang dapat memenuhi beberapa kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan penjabaran dari RPJMD;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. Program dan kegiatan dalam RKPD dilengkapi dengan pendanaan yang terukur dan menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD 2024 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi tahapan sebagai berikut :





1. **Persiapan Penyusunan RKPD**, Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :
  - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD;
  - b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun;
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. **Penyusunan Rancangan Awal RKPD**, Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri dari perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD
  - a. Perumusan rancangan awal RKPD, Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :
    - 1) Pengolahan data dan informasi;
    - 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
    - 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
    - 4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
    - 5) Penelaahan terhadap kebijakan nasional;
    - 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
    - 7) Perumusan permasalahan pembangunan;
    - 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
    - 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
    - 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
    - 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik;
    - 12) Penyelerasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
  - b. Penyajian rancangan awal RKPD, Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :
    - 1) Pendahuluan;
    - 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;





- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan;
- 5) Rencana program prioritas daerah.

3. **Penyusunan Rancangan RKPD**, Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Papua.

4. **Pelaksanaan Musrenbang RKPD**, Musrenbang RKPD Provinsi Papua dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 2 forum musrenbang yaitu musrenbang otonomi khusus dan musrenbang RKPD, dimana musrenbang otonomi khusus akan difokuskan untuk penyiapan pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sesuai sasaran dan ketentuan penggunaannya. Sedangkan Musrenbang RKPD akan mengelaborasi hasil musrenbang otsus untuk kewenangan Provinsi yang harus disepakati dalam rancangan RKPD bersama perangkat daerah, Bappeda Provinsi dengan perangkat daerah dan Bappeda kabupaten/kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah Provinsi maupun melalui musrenbang kabupaten/kota;
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi Papua
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, serta sinergi semua sumber pendanaan yang dikelola Provinsi Papua;
- e. Implementasi pendekatan THIS dalam program prioritas pembangunan Provinsi Papua (kolaborasi program/kegiatan dan pendanaan lintas sektor);
- f. Sinergi dengan RKP.

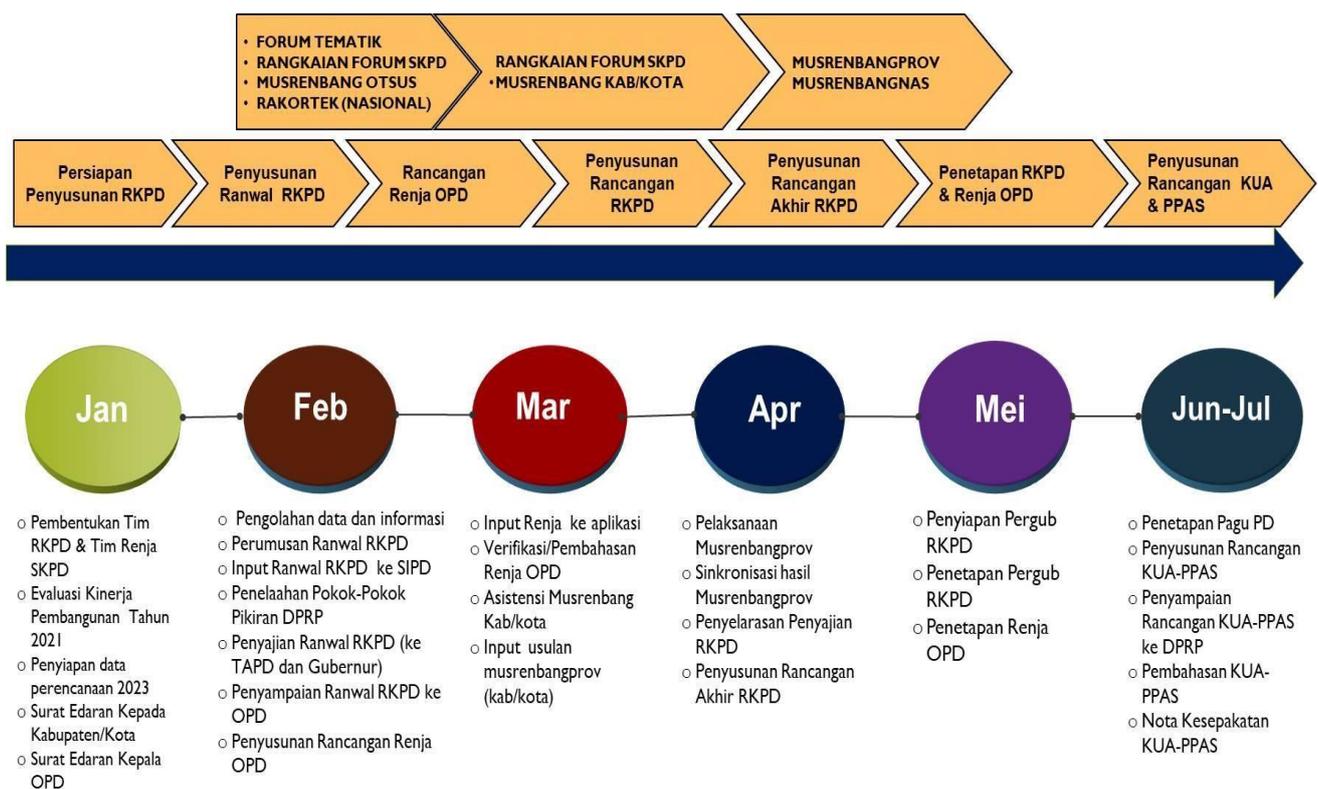




5. **Perumusan Rancangan Akhir RKPD**, Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
6. **Penetapan RKPD**, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, agar terjadi keselarasan antara perencanaan nasional dan daerah.

Semua ini dijabarkan dalam jadwal dan tahapan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Papua 2024 sebagai berikut :

Gambar 1.1  
**Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2024**



Untuk itu pondasi yang dibangun melalui RKPD 2024 harus lebih baik yang diwujudkan dengan perumusan prioritas daerah yang komprehensif dan holistik, yang dijabarkan secara integratif dan spasial, serta disusun secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Semua ini merupakan rangkaian proses sistematis dan terstruktur yang diimplementasikan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi inovasi dari penyusunan RKPD Provinsi Papua saat ini, oleh karena hirarkinya semakin bertambah kuat dan terkendali yang akan menjamin dan memastikan terintegrasinya RKPD





2024 dengan Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026, dan kepentingan seluruh stakeholder pembangunan.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang





Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan;
17. Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;





25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefiskasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5998 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
35. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 28 Januari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022;
36. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2019 sampai dengan 2023
37. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022.





### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 selain disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program.

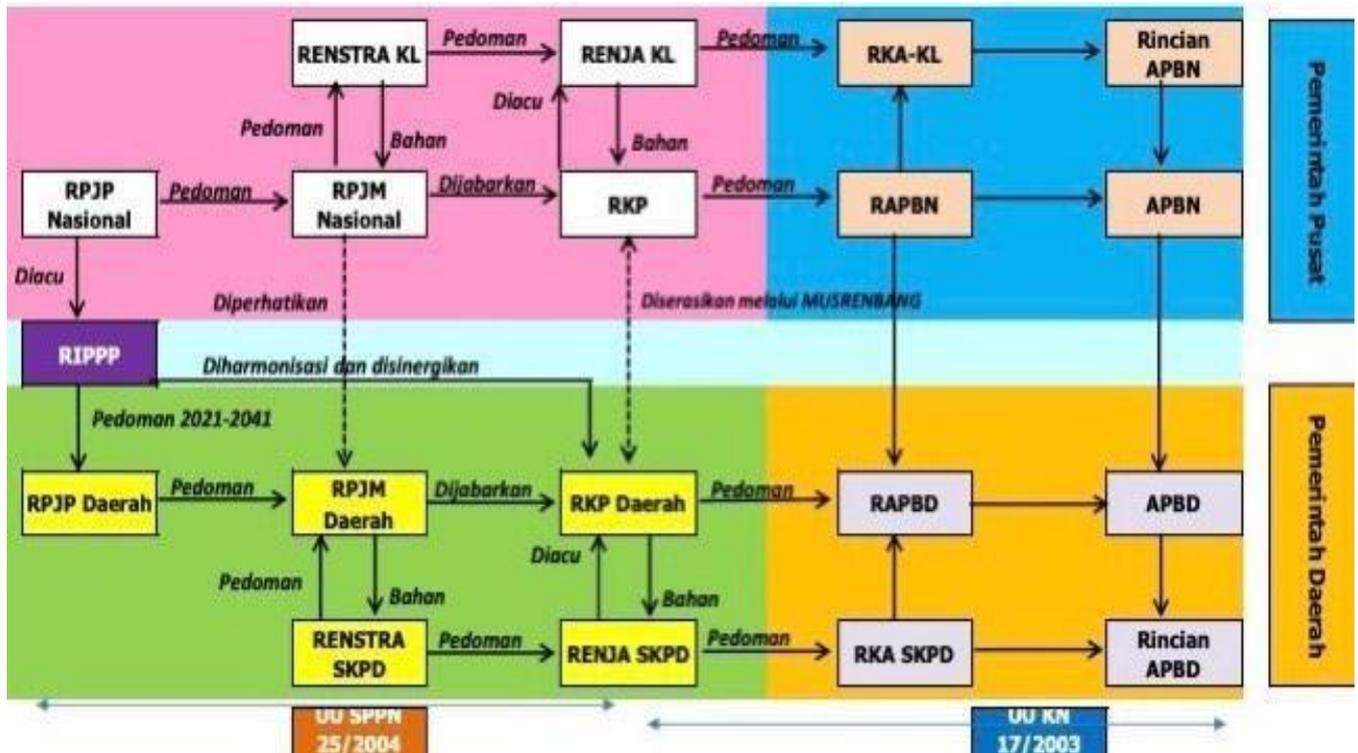
Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2024 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Diagramatis keterkaitan hubungan RKPD



dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2  
**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-undang 17 Tahun 2003

Mengacu pada Gambar 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah:

RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas, (2) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. (3) selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi OPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2024, menjadi acuan





dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Papua tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2024.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen- dokumen perencanan di kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Sedangkan tujuannya adalah : (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024; (2). Menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024; (3). Menjadi acuan penyusunan RKPD tahun 2024 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua; (4). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.

#### 1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana





Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2024 meliputi :

**BAB I PENDAHULUAN**, Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**, Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan otonomi Khusus.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**, Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, termasuk pendapatan dan belanja dana otonomi khusus.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**, Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional serta sasaran dan prioritas pembangunan otonomi khusus.

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**, Memuat mengenai aspek-aspek prioritas pengembangan kewilayahan yang perlu diperhatikan kabupaten/kota dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan Provinsi Papua.





**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**, Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**, Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan RKPD.

**BAB VIII PENUTUP**, Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2024 yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Kondisi Umum Daerah

#### 2.1.1. Aspek Geografi

Aspek geografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana.

##### 2.1.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Secara astronomis, Wilayah provinsi Papua berada pada Posisi geografis di antara  $1^{\circ} 8' 20.8752''$  LU -  $4^{\circ} 6' 58.626''$  LS dan  $134^{\circ} 5' 58.8444''$  -  $141^{\circ} 0' 37.5912''$  Bujur Timur. Batasan wilayah dengan luas kurang lebih 13.158.285,38 hektar meliputi:

- a. wilayah darat; dan
- b. wilayah laut.

Wilayah Darat seluas kurang lebih 8.268.837,32 (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma tiga dua) hektar, yang meliputi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

1. Kota Jayapura;
2. Kabupaten Jayapura;
3. Kabupaten Keerom;
4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Kabupaten Mamberamo Raya;



6. Kabupaten Sarmi;
7. Kabupaten Supiori;
8. Kabupaten Biak Numfor; dan
9. Kabupaten Waropen.

Wilayah Provinsi Papua tidak hanya mencakup wilayah daratan namun juga memiliki wilayah laut dan pulau-pulau kecil yang ada dalam batas wilayahnya. Dari 9 (sembilan) kabupaten/kota tersebut terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

1. Kota Jayapura;
2. Kabupaten Jayapura;
3. Kabupaten Biak Numfor;
4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Kabupaten Sarmi;
6. Kabupaten Waropen;
7. Kabupaten Supiori; dan
8. Kabupaten Mamberamo Raya.

Wilayah Laut sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Papua dengan luas kurang lebih 4.889.447,97 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan empat ratus empat puluh tujuh koma Sembilan tujuh) hektar. Umumnya sebaran pulau-pulau tersebar di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Jayapura. Pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di Provinsi Papua terdapat adalah 4 (empat) pulau yaitu Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Bepondi, Pulau Liki di Kabupaten Sarmi (BIG, 2018).

Wilayah adat di Provinsi Papua mencakup 2 (dua) wilayah adat di ruang darat maupun laut yaitu Wilayah adat Mamta/TABI dan wilayah adat Saireri yang secara budaya memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat yang tersebar di:



**a. Wilayah Mamta/TABI** meliputi:

1. Kota Jayapura,
2. Kabupaten Jayapura,
3. Kabupaten Keerom,
4. Kabupaten Sarmi, dan
5. Kabupaten Mamberamo Raya

**b. Wilayah Saireri** meliputi:

1. Kabupaten Biak Numfor,
2. Kabupaten Supiori,
3. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
4. Kabupaten Waropen.

**Batas Wilayah Provinsi Papua** meliputi:

- a. Sebelah Utara : Samudra Pasifik;
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
- c. Sebelah Barat : Provinsi Papua Barat; dan
- d. Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea.

Luas wilayah Provinsi Papua kurang lebih 13.158.285,28 (tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima koma dua delapan) hektar. Luas wilayah darat terbesar yang terdapat di Provinsi Papua ialah Kabupaten Mamberamo Raya dengan luas wilayah 2.804.347,07 Ha atau sebesar 21,31% dari luas wilayah Provinsi Papua. Sedangkan wilayah darat terkecil yaitu Kabupaten Supiori seluas 66.069,33 Ha atau 0,50% dari luas wilayah Provinsi Papua. Luasan kabupaten/kota serta pembagian wilayah administrasi di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.



Gambar 2.1  
**Peta Batas Administrasi Provinsi Papua**



Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Tabel 2.1  
**Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS (Km <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
1.	Jayapura	1.408.261.62	17,03
2.	Kepulauan Yapen	242.842.21	2,94
3.	Biak Numfor	226.001.7	2,73
4.	Sarmi	1.406.901.96	17,01
5.	Keerom	952.631.53	11,52
6.	Waropen	1.078.212.89	13,04
7.	Supiori	66.069.32	0,80
8.	Mamberamo Raya	2.804.347.07	33,91
9.	Kota Jayapura	83.568.99	1,01
<b>Jumlah</b>		<b>8.268.837.32</b>	<b>100</b>

Sumber : Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

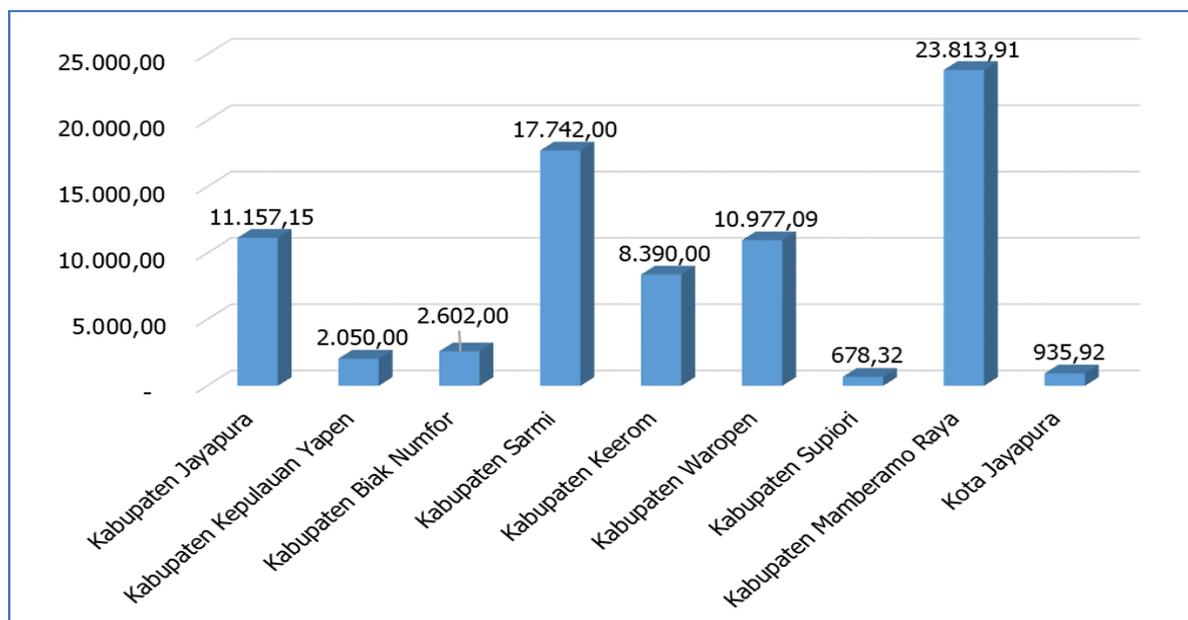


Tabel 2.2  
Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua

NO	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	DISTRIK	KELUARAHAN	KAMPUNG
1	Kab. Jayapura	Sentani	19	5	139
2	Kab. Kepulauan Yapen	Serui	16	5	160
3	Kab. Biak Numfor	Biak	19	14	254
4	Kab. Sarmi	Sarmi	10	2	92
5	Kab. Keerom	Waris	11	0	91
6	Kab. Waropen	Botawa	11	0	100
7	Kab. Supiori	Sorendiweri	5	0	38
8	Kab. Mamberamo Raya	Biurmeso	8	0	60
9	Kota Jayapura	Jayapura	5	25	14
<b>TOTAL</b>			<b>104</b>	<b>51</b>	<b>948</b>

Sumber : Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Gambar 2.2  
Grafik Luas Kabupaten/Kota Provinsi Papua



Sumber : Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan



### 2.1.1.2. Kondisi Fisik Dasar

Kondisi fisik dasar wilayah Provinsi Papua menggambarkan kondisi alam guna mengetahui daya dukung lingkungan terhadap perencanaan ruang. Kondisi fisik dasar di Provinsi Papua meliputi topografi, jenis tanah, geologi, klimatologi dan hidrologi.

#### A. Topografi

Kondisi topografi dipengaruhi oleh faktor morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Sebagian besar morfologi wilayah Provinsi Papua berupa dataran (39,20%) dan pegunungan (60,79%). Dataran terdapat di bagian pesisir selatan yang merupakan bagian yang paling luas, dan pesisir utara. Pegunungan terdapat di bagian tengah wilayah Provinsi Papua. Bagian morfologi dataran dengan ketinggian lebih dari 100 m menjadi bagian terluas di wilayah Provinsi Papua, yaitu 5.027.142,57 ha (53,3%), serta ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut menjadi bagian tersempit, yaitu 3.241.694.74 ha (39,20%).

Sedangkan kelerengan yang mendominasi wilayah Provinsi Papua adalah lereng landai (0-8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%. Wilayah di Provinsi Papua memiliki ketinggian dengan elevasi 0-100 mdpl, 100-3000 mdpl dan >3000 mdpl. Ketinggian wilayah yang memiliki elevasi 0-100 mdpl seluas 3.241.694.74 ha, elevasi 100-3000 mdpl adalah seluas 5.025.909 ha dan elevasi >3000 mdpl adalah seluas 1.233,57 ha. Ketinggian wilayah 0-100 mdpl terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1.360.180,62 ha, ketinggian wilayah 100-3000 mdpl terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1.444.166,45 ha dan ketinggian wilayah >3000 mdpl terluas berada di Kabupaten Keerom seluas 1.233,57 ha.

Tabel 2.3  
**Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua**

ELEVASI (MDPL)	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
0-100	Mamberamo Raya	1,360,180.62
	Sarmi	626,262.05
	Waropen	746,554.32
	Jayapura	185,319.99
	Biak Numfor	116,564.00
	Keerom	75,299.98
	Kepulauan Yapen	69,214.21

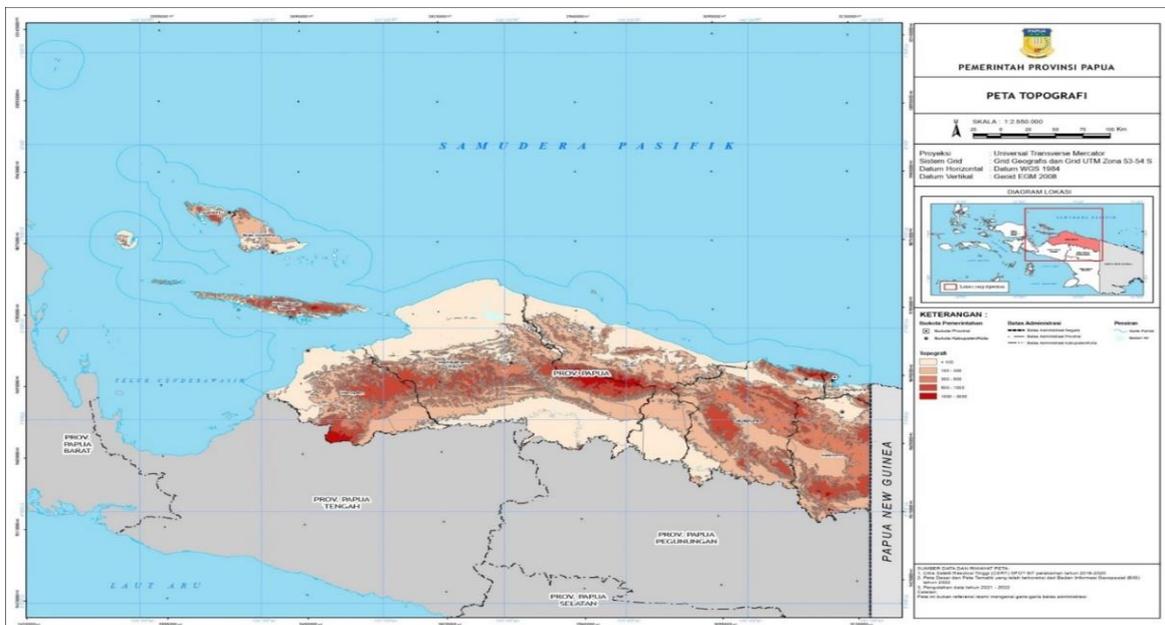




ELEVASI (MDPL)	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
	Supiori	25,702.05
	Kota Jayapura	36,597.52
<b>0-100 Total</b>		<b>3.241.694.74</b>
100-3000	Jayapura	1,222,941.63
	Mamberamo Raya	1,444,166.45
	Keerom	876,097.99
	Sarmi	780,639.91
	Waropen	331,658.57
	Kepulauan Yapen	173,628.00
	Biak Numfor	109,437.70
	Kota Jayapura	46,971.47
Elevasi (mdpl)	Kabupaten	Area (ha)
	Supiori	40,367.28
<b>100-3000 Total</b>		<b>5.025.909</b>
>3000	Keerom	1,233.57
>3000 Total		1,233.57
<b>Grand Total</b>		<b>8.268.837.32</b>

Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Gambar 2.3  
Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua



Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022



Wilayah Provinsi Papua memiliki klasifikasi kemiringan lereng yaitu 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% dan >45%. Kelerengan wilayah di Provinsi Papua dengan kemiringan lereng 0-8% seluas 3.849.082,03 ha, kemiringan lereng 8-15% seluas 1.034.503,65 ha, kemiringan lereng 15-25% seluas 1.531.173,89 ha, kemiringan lereng 25-45% seluas 1.013.710,94 ha dan kemiringan lereng >45% seluas 134.759,41 ha. Kabupaten dengan kemiringan lereng 0-8% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 1.517.691,61 ha, kemiringan lereng 8-15% terluas berada di Kabupaten Jayapura seluas 360.181,45 ha, kemiringan lereng 15-25% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 484.150,73 ha, kemiringan lereng 25-45% terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya seluas 310.648,06 ha dan kemiringan lereng >45% terluas berada di Kabupaten Sarmi seluas 57.217,56 ha.

Tabel 2.4  
**Kelerengan Provinsi Papua**

NO	KEMIRINGAN LERENG	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
1	0-8 %	Mamberamo Raya	1,517,691.61
		Sarmi	786,828.96
		Jayapura	550,385.44
		Keerom	433,272.53
		Waropen	516,193.64
		Biak Numfor	186,892.61
		Kepulauan Yapen	38,772.07
		Supiori	19,971.85
		Kota Jayapura	56,722.06
		<b>Total 0 – 8 %</b>	
2	8-15%	Jayapura	295,881.08
		Mamberamo Raya	478,660.73
		Sarmi	191,828.18
		Keerom	179,566.75
		Waropen	257,370.93



NO	KEMIRINGAN LERENG	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
		Kepulauan Yapen	26,625.90
		Biak Numfor	18,831.22
		Supiori	13,209.59
		Kota Jayapura	13,741.82
<b>Total 8–15 %</b>			<b>1,475,716.20</b>
3	15-25%	Mamberamo Raya	484,150.73
		Jayapura	350,131.45
		Sarmi	215,357.06
		Keerom	194,529.88
		Waropen	200,660.97
		Kepulauan Yapen	60,503.87
		Supiori	19,902.39
		Biak Numfor	12,683.64
		Kota Jayapura	17,129.85
<b>Total 15-25%</b>			<b>1,555,049.84</b>
4	25-45%	Mamberamo Raya	310,648.06
		Jayapura	188,532.54
		Sarmi	155,670.20
		Keerom	129,997.55
		Waropen	101,890.17
		Kepulauan Yapen	96,899.04
		Supiori	11,410.49
		Biak Numfor	6,625.39
		Kota Jayapura	12,037.50
<b>Total 25-45%</b>			<b>1,013,710.94</b>
5	>45%	Sarmi	47,217.56
		Jayapura	16,331.11
		Kepulauan Yapen	19,911.49
		Keerom	15,264.83
		Mamberamo Raya	13,195.94
		Waropen	2,097.18
		Supiori	1,575.01



NO	KEMIRINGAN LERENG	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
		Biak Numfor	968.84
		Kota Jayapura	1,067.61
<b>&gt;45% Total</b>			<b>117,629.57</b>
<b>Grand Total</b>			<b>8,268,837.32</b>

Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

## B. Jenis Tanah

Jenis tanah di Provinsi Papua meliputi jenis tanah alfisol, entisol, inceptisol, mollisol, histosol, ultisol. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis tanah yang terdapat di Provinsi Papua, sebagai berikut :

### 1) Entisol

Adalah tanah yang baru berkembang dari bahan asal atau bahan induknya. Pembentukan tanah ini dapat sebagai akibat dari iklim yang sangat kering sehingga pelapukan dan reaksi kimia sangat lambat, adanya erosi yang kuat sehingga bahan-bahan yang tererosi lebih banyak dari yang terbentuk, pengendapan yang terus menerus, selalu jenuh air sehingga menghambat perkembangan horison. Tanah Entisol banyak digunakan untuk pertanian terutama di daerah endapan sungai yang umumnya subur. Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Entisols adalah seluas 322.217,71 hektar yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori.



Gambar 2.4  
**Jenis Tanah Entisol**



*Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022*

## 2) Inceptisol

Tanah ini merupakan tanah yang belum matang, perkembangan profilnya lemah dan masih banyak menyerupai bahan induknya. Penggunaannya untuk pertanian dan non pertanian adalah beragam, daerah berlereng untuk hutan dan untuk pertanian perlu didrainase jika drainase buruk.

Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Inceptisol adalah seluas 3.326.850292 hektar yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, dan Kabupaten Supiori.



Gambar 2.5  
**Jenis Tanah Inceptisol**



*Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022*

### **3) Molisol**

Tanah ini terbentuk dari adanya proses pembentukan tanah yang berwarna gelap karena penambahan bahan organik. Akibat pelapukan bahan organik di dalam tanah membentuk senyawa-senyawa yang stabil dan berwarna gelap. Warna gelap yang terbentuk, dengan adanya aktivitas mikroorganisme tanah maka terjadi pencampuran bahan organik dan bahan mineral tanah sehingga terbentuk kompleks mineral-organik yang berwarna kelam. Tanah ini merupakan tanah yang subur dengan hanya sedikit pencucian sehingga kejenuhan basa tinggi. Sebagian besar tanah ini digunakan untuk pertanian. Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Molisol adalah seluas 231.294,22 hektar yang berada Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Sarmi.



Gambar 2.6  
**Jenis Tanah Molisol**



*Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022*

#### **4) Histosol**

Tanah ini terbentuk akibat penimbunan bahan organik lebih besar dari mineralisasinya. Keadaan ini terbentuk pada tempat-tempat yang selalu tergenang air sehingga sirkulasi oksigen terhambat dan terjadi akumulasi bahan organik. Untuk dapat digunakan bagi usaha pertanian, tanah Histosol harus dilakukan perbaikan drainase. Tanah ini biasanya sesuai untuk sayur-sayuran, bawang merah, padi dan sebagainya.

Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Histosol adalah seluas 762.867,67 hektar yang berada Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Jayapura.



Gambar 2.7  
**Jenis Tanah Histosol**



*Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022*

## 5) Ultisol

Tanah ini merupakan tanah yang sudah berkembang dan dicirikan dengan adanya horison argilik, bersifat masam dan kejenuhan basa rendah (<35%). Tanah ini umumnya terbentuk dari bahan induk batuan liat. Untuk pemanfaatan tanah ini ada beberapa kendala yaitu reaksinya masam, kejenuhan basa rendah, kadar aluminium yang tinggi sehingga dapat meracuni tanaman, ketersediaan unsur hara rendah dan adanya fiksasi fosfor yang tinggi. Dengan demikian untuk pemanfaatannya diperlukan pemupukan dan pengapuran untuk mengatasi kemasaman tanah dan keracunan aluminium. Wilayah Provinsi Papua yang memiliki jenis tanah Histosol adalah seluas 2.768.019,01 hektar yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura.



Gambar 2.7  
**Jenis Tanah Ultisol**



Sumber : Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Tabel. 2. 5  
**Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua**

JENIS TANAH	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
Entisols	Kabupaten Sarmi	95.060,48
	Kabupaten Mamberamo Raya	57.806,27
	Kabupaten Waropen	48.955,23
	Kabupaten Jayapura	45.312,74
	Kota Jayapura	34.151,52
	Kabupaten Keerom	31.502,84
	Kabupaten Supiori	9.428,63
	<b>Entisols Total</b>	
Inceptisols	Kabupaten Mamberamo Raya	1.477.352,81
	Kabupaten Sarmi	913.496,30
	Kabupaten Jayapura	620.843,28



JENIS TANAH	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
	Kabupaten Waropen	166.698,33
	Kabupaten Keerom	98.038,18
	Kabupaten Kepulauan Yapen	26.293,22
	Kota Jayapura	17.811,94
	Kabupaten Supiori	6.316,86
<b>Inceptisols Total</b>		<b>3.326.850,92</b>
Mollisols	Kabupaten Biak Numfor	163.713,81
	Kabupaten Jayapura	57.414,34
	Kabupaten Kepulauan Yapen	9.020,44
	Kabupaten Supiori	834,76
	Kabupaten Sarmi	310,87
<b>Mollisols Total</b>		<b>231.294,22</b>
Histosols	Kabupaten Mamberamo Raya	597.148,74
	Kabupaten Waropen	128.925,63
	Kabupaten Sarmi	29.634,57
	Kabupaten Keerom	3.690,51
	Kabupaten Biak Numfor	959,97
	Kabupaten Kepulauan Yapen	957,40
	Kota Jayapura	891,31
	Kabupaten Supiori	448,21
	Kabupaten Jayapura	211,33
<b>Histosols Total</b>		<b>762.867,67</b>
Ultisols		
	Kabupaten Keerom	795.344,59
	Kabupaten Jayapura	702.901,07
	Kabupaten Mamberamo Raya	359.557,57
	Kabupaten Sarmi	356.243,64
	Kabupaten Waropen	238.450,11



JENIS TANAH	KABUPATEN/KOTA	AREA (ha)
	Kabupaten Kepulauan Yapen	204.626,59
	Kabupaten Biak Numfor	60.764,33
	Kabupaten Supiori	50.073,73
	Kota Jayapura	57,38
<b>Ultisols Total</b>		<b>2.768.019,01</b>
Tidak Ada Data	Kota Jayapura	8.428,14
	Kabupaten Sarmi	2.345,23
	Kabupaten Waropen	294,52
	Kabupaten Supiori	3,96
	Kabupaten Biak Numfor	0,40
	Kabupaten Jayapura	0,12
Tidak Ada Data Total		11.072,37
Tubuh Air	Kabupaten Mamberamo Raya	71.983,24
	Kota Jayapura	21.692,73
	Kabupaten Sarmi	13.701,46
	Kabupaten Keerom	13.341,30
	Kabupaten Waropen	3.463,13
	Kabupaten Kepulauan Yapen	83,22
	Kabupaten Biak Numfor	14,21
<b>Tubuh Air Total</b>		<b>124.279,29</b>
<b>Grand Total</b>		<b>7.546.601,19</b>

Sumber : Revisi RTRWP Papua, Tahun 2022

### C. Geologi

Provinsi Papua terletak di paling Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di bagian tengah tengah pulau Papua atau Nugini (New Guinea Island). Pulau New Guinea telah diakui sebagai hasil dari tumbukan Lempeng Australia dengan Lempeng Pasifik. Menurut Pigram dan Davies (1987), konvergensi dan deformasi bagian tepi utara lempeng



Australia yang berada di bagian timur Papua New Guinea dimulai sejak Eosen hingga sekarang. Bentuk pulau Papua yang unik berkaitan dengan peristiwa geologi yang pernah terjadi selama jutaan tahun. Dengan kondisi geologi yang kompleks sehingga menghasilkan sumber daya mineral yang potensial dan karakteristik fisik lahan yang khas menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan wilayah.

Informasi geologi untuk keperluan perencanaan penataan ruang diperoleh dengan memahami kondisi geologi regional dalam skala pulau. Peristiwa geologi yang terjadi membentuk dimensi ruang dan waktu sebuah pulau yang dibatasi oleh lempeng-lempeng bumi yang bergerak secara vektor dan konsisten. Geologi regional Papua membahas tentang geomorfologi, litologi, stratigrafi dan tektonik.

### **1) Geomorfologi**

Bagian Utara terdapat lembah dan dataran antar perbukitan yang lebih dipengaruhi oleh proses denudasional dan fluvial, dikenal sebagai lembah sungai Mamberamo atau Merenvlakte. Lembah ini terbentuk diantara Pegunungan Tengah Papua di sebelah Selatan dan, Pegunungan Ruffaer, Gaultler dan Nawa di sebelah Utara. Di samping itu, terdapat dataran rendah yang berupa rawa di sekitar Waropen dan muara Mamberamo, dan pesisir pantai Utara Papua. Di pesisir Utara ini dijumpai sebuah morfologi pegunungan yang terpisah atau terisolir yaitu Pegunungan Cyclops

### **2) Litologi**

Berdasarkan litologi penyusun wilayah Provinsi Papua menurut pembagian fisiografinya, maka satuan litologi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut :

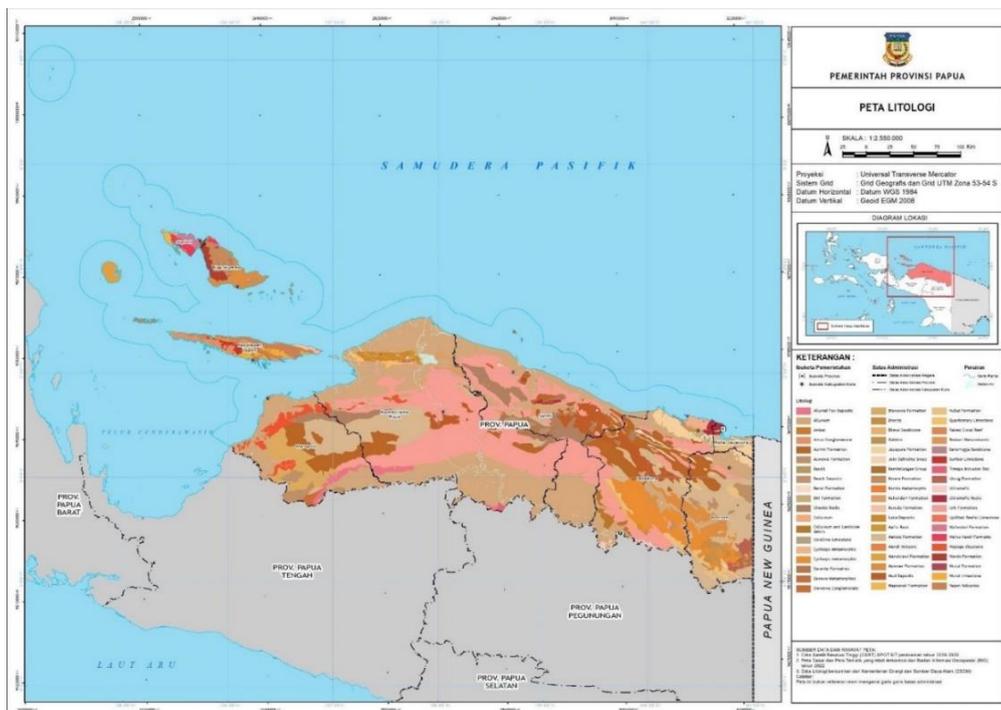


Tabel 2.6  
**Satuan Litologi Menurut Fisiografi**

WILAYAH FISIOGRAFI	LITOLOGI	SIMBOL WARNA
Pesisir Utara dan kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Batuan sedimen Kuartar bersifat klastika darat, dan karbonat, serta sebagian klastika vulkanik, klastika laut dan karbonat.</li> <li>➤ Batuan sedimen Tersier berupa klastika laut, karbonat, dan sebagian klastika vulkanik serta sedikit klastika darat.</li> <li>➤ Batuan vulkanik Tersier yang berisi breksi, lava, tufa dan klastika vulkanik dari lingkungan sebagian laut dan darat.</li> </ul>	

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar 2.9  
**Peta Litologi Provinsi Papua**



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022



### 3) Stratigrafi

Stratigrafi regional Papua secara garis besar dibedakan ke dalam 3 kelompok yaitu: a) batuan Kraton Australia, b) batuan Lempeng Pasifik, dan c) batuan campuran dari kedua lempeng tersebut. Batuan yang berasal dari Kraton Australia terutama tersusun oleh batuan alas, batuan malihan berderajat rendah hingga tinggi dan sebagian telah diintrusi oleh batuan granit di sebelah barat.

### 4) Tektonik

Dari peristiwa tektonik secara regional, berkembang 3 mandala struktur geologi yang penting, yaitu :

#### ❖ Jalur Sesar Naik Pegunungan Tengah (JSNPT)

Jalur sesar sungkup yang berarah timur barat dengan panjang 100 km, menempati daerah Pegunungan Tengah Papua. Batuannya dicirikan oleh kerak benua yang terdeformasikan sangat kuat. Sesar sungkup telah menyeret batuan alas yang berumur Perm, batuan penutup berumur Mesozoikum dan batuan sedimen laut dangkal berumur Tersier Awal ke arah Selatan. Di beberapa tempat kelompok batuan ini terlipat kuat. Satuan litologi yang paling dominan di JSNPT ialah batu gamping New Guinea dengan ketebalan mencapai 2000 meter. Sesar sungkup JSNPT dihasilkan oleh gaya pemampatan yang sangat intensif dan kuat dengan komponen utama berasal dari arah utara.

Gaya ini juga menghasilkan beberapa jenis antiklin dengan kemiringan curam bahkan sampai mengalami pembalikan (over turning). Proses ini juga menghasilkan sesar balik yang bersudut lebar (Reverse Fault). Penebalan batuan kerak yang diduga terbentuk pada awal Pliosen ini memodifikasi bentuk daerah JSNPT. Periode ini juga menandai perkembangan kerak yang bergerak ke arah utara membentuk Sesar Sungkup Mamberamo (The Mamberamo Thrust Belt) dan mengawali alih tempat Gautier (The Gautier off set).

#### ❖ Jalur Sesar Naik Mamberamo

Jalur sesar ini memanjang 100 km ke arah selatan dan terdiri dari sesar anjak dan sesar geser (shear) sehingga menyesarkan batuan Plio – Plestosen Formasi – Mamberamo dan batuan kerak Pasifik yang ada di bawahnya. Wiliam, dkk 1984 mengenali daerah luas



dengan pola struktur tak teratur. Di sepanjang jalur sesar sungkup dijumpai intrusi Poton-poton batuan serpih (shale diafirs) dengan radius 50 km. Hal ini menandakan zona lemah (sesar). Poton-poton lumpur ini biasanya mempunyai garis tengah beberapa kilometer. Umumnya terdiri dari lempung terkeringkan dan komponen batuan tak terpilahkan dengan sesar ukuran fragmen beberapa milimeter hingga ratusan meter. Sekarang poton lumpur ini masih aktif dan membentuk teras-teras sungai.

#### D. Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik menurut waktu dan ruang tentang kuantitas dan kualitas air di bumi termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan dan manajemen. Sungai yang terdapat di Provinsi Papua meliputi :

Sungai Mamberamo-Tami-Apauvar melintasi Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya; dan

Sungai Wapoga-Mimika melintasi Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen.

Tabel 2.7  
**Wilayah Sungai di Provinsi Papua**

NO.	KEWENANGAN WILAYAH SUNGAI	KABUPATEN	DAS
<b>Wilayah Sungai Lintas Negara</b>			
A.	<b>WS Mamberamo- Tami- Apauvar</b>	Kabupaten Keerom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Tami (Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kota Jayapura)</li> <li>• DAS Sepik (Kab. Keerom dan Pegunungan Bintang)</li> </ul>
		Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Wiru (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura)</li> <li>• DAS Toarim (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura)</li> <li>• DAS Nano (Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Keerom)</li> <li>• DAS Sentani (Kab. Jayapura dan Kota Jayapura)</li> </ul>



NO.	KEWENANGAN WILAYAH SUNGAI	KABUPATEN	DAS
		Kabupaten Sarmi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Muwar (Kab. Sarmi dan Mamberamo Raya)</li> <li>• DAS Nenkam</li> <li>• DAS Woske</li> <li>• DAS Bu</li> <li>• DAS Bier</li> <li>• DAS Biri (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura)</li> <li>• DAS Niki</li> <li>• DAS Orai</li> </ul>
		Kabupaten Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Rambori</li> <li>• DAS Gesa</li> <li>• DAS Andarwaren</li> <li>• DAS Manembo</li> <li>• DAS Wakamba</li> <li>• DAS Waremburi</li> <li>• DAS Idomba</li> <li>• DAS Apiri</li> <li>• DAS Mamberamo (Kab. Mamberamo Raya, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Kab. Jayapura, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah)</li> <li>• DAS Marest</li> <li>• DAS Apauvar</li> <li>• DAS Kurudu</li> </ul>
<b>Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</b>			
<b>A</b>	<b>WS Wapoga-Mimika</b>	Kabupaten Supiori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Bepondi</li> <li>• DAS Rusdori</li> <li>• DAS Wafordori</li> <li>• DAS Waradokdo</li> </ul>
		Kabupaten Biak Numfor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Surdori</li> <li>• DAS Sarwodari</li> <li>• DAS Korem</li> <li>• DAS Wardo</li> <li>• DAS Owi</li> <li>• DAS Auki</li> <li>• DAS Pai</li> <li>• DAS Padaidori</li> <li>• DAS Bromsi</li> <li>• DAS Numfor</li> </ul>



NO.	KEWENANGAN WILAYAH SUNGAI	KABUPATEN	DAS
		Kabupaten Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Sorabi</li> <li>• DAS Bariworo</li> <li>• DAS Barapasi</li> <li>• DAS Naduboai</li> <li>• DAS Rawiwa</li> <li>• DAS Wankai</li> <li>• DAS Sosoro</li> </ul>
		Kabupaten Waropen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Waron</li> <li>• DAS Wanasanu</li> <li>• DAS Boi</li> <li>• DAS Binatanaboa</li> <li>• DAS Sanoringga</li> <li>• DAS Sabia</li> <li>• DAS Rombak</li> <li>• DAS Rondisi</li> <li>• DAS Dambo</li> <li>• DAS Serami</li> </ul>
		Kabupaten Kepulauan Yapen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Wadapi</li> <li>• DAS Menawi</li> <li>• DAS Borai</li> <li>• DAS Amboi</li> <li>• DAS Mariadey</li> <li>• DAS Warui</li> <li>• DAS Pamawari</li> <li>• DAS Sumbu</li> <li>• DAS Koanda</li> <li>• DAS Sasawa</li> <li>• DAS Parida</li> <li>• DAS Papuma</li> <li>• DAS Ansus</li> <li>• DAS Marau</li> <li>• DAS Antunai</li> <li>• DAS Jauri</li> <li>• DAS Aibondeni</li> <li>• DAS Kairawi</li> <li>• DAS Wooi</li> </ul>

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Cekungan air tanah (CAT) di Provinsi Papua dibagi berdasarkan 2 (dua) kewenangan yaitu CAT dalam wilayah provinsi dan CAT lintas negara. CAT dalam wilayah Provinsi Papua meliputi CAT Numfor, CAT Warsa, CAT Biak, CAT Pom, CAT Ansar, CAT Serui, CAT Samberdada, CAT Waren-Demta, CAT Taritatu, Cat Hulu S. Senggi, CAT Timur Arso, CAT Lereh-Leweh dan CAT Ubrub.



Tabel 2.8  
**Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua**

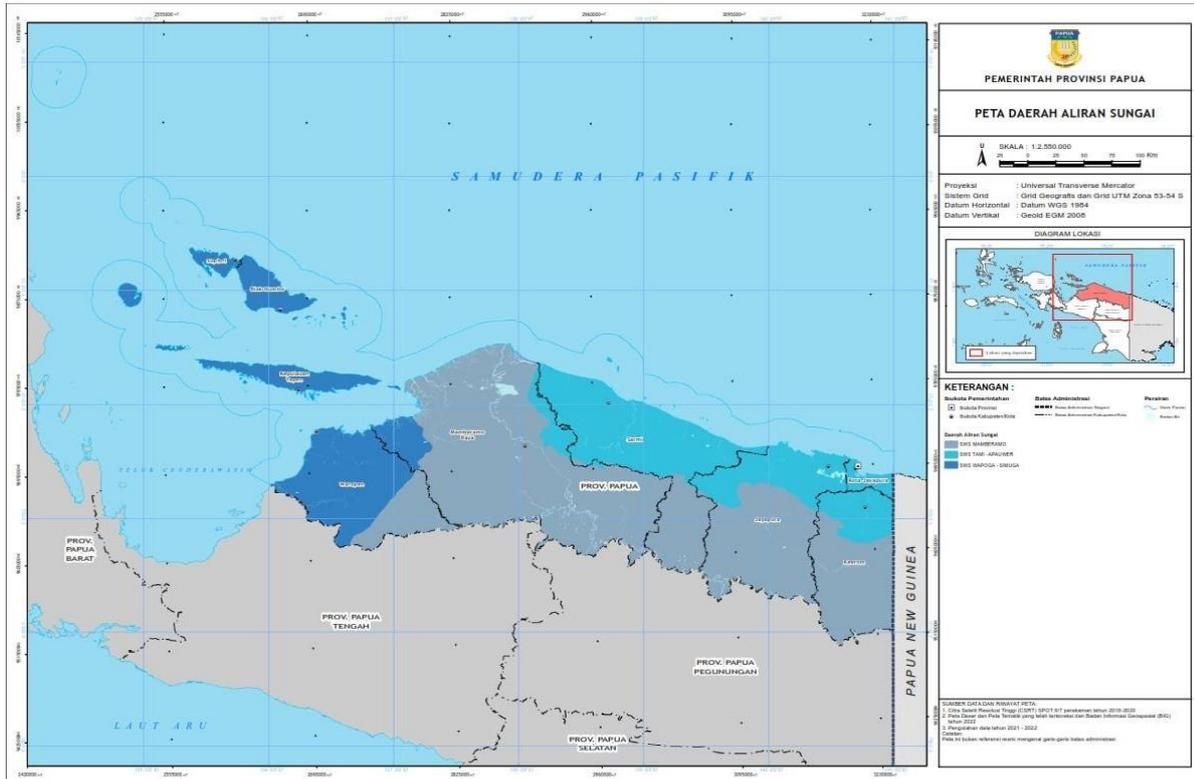
NO.	KEWENANGAN	CEKUNGAN AIR TANAH
1.	CAT dalam wilayah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ CAT Numfor di Kabupaten Biak Numfor</li> <li>✚ CAT Warsa di Kabupaten Biak Numfor</li> <li>✚ CAT Biak di Kabupaten Biak Numfor</li> <li>✚ CAT Pom di Kabupaten Yapen Waropen</li> <li>✚ CAT Ansar di Kabupaten Yapen Waropen</li> <li>✚ CAT Serui di Kabupaten Yapen Waropen</li> <li>✚ CAT Samberdada di Kabupaten Kepulauan Yapen</li> <li>✚ CAT Waren-Demta di Kab. Nabire, Waropen, Sarmi, Jayapura</li> <li>✚ CAT Taritatu di Kab. Waropen, Sarmi, Jayapura, Keerom</li> <li>✚ Cat Hulu S. Senggi di Kabupaten Keerom</li> <li>✚ CAT Timur Arso di Kabupaten Keerom</li> <li>✚ CAT Lereh-Leweh di Kabupaten Keerom dan Jayapura</li> <li>✚ CAT Ubrub di Kabupaten Keerom</li> </ul>
2.	CAT lintas negara	✚ CAT Jayapura di Kabupaten Jayapura dan Keerom

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022





Gambar 2.10  
**Peta Aliran Sungai (DAS) Provinsi Papua**



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

### E. Klimatologi

Pengukuran iklim di Provinsi Papua oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua dilakukan di 9 kabupaten/kota. Pada tahun 2019, secara rata-rata suhu di seluruh stasiun pengamatan berkisar antara 27.70-34.80 oC

Tabel 2.9  
**Curah Hujan di Provinsi Papua**

CURAH HUJAN RATA-RATA (MM/HARI) (KLASIFIKASI)		KABUPATEN	AREA (ha)
13.6 - 20.7	rendah	Kabupaten Mamberamo Raya	2.061.000,76
		Kabupaten Jayapura	231.827,70
		Kabupaten Waropen	598.620,64
		Kabupaten Biak Numfor	142.571,76

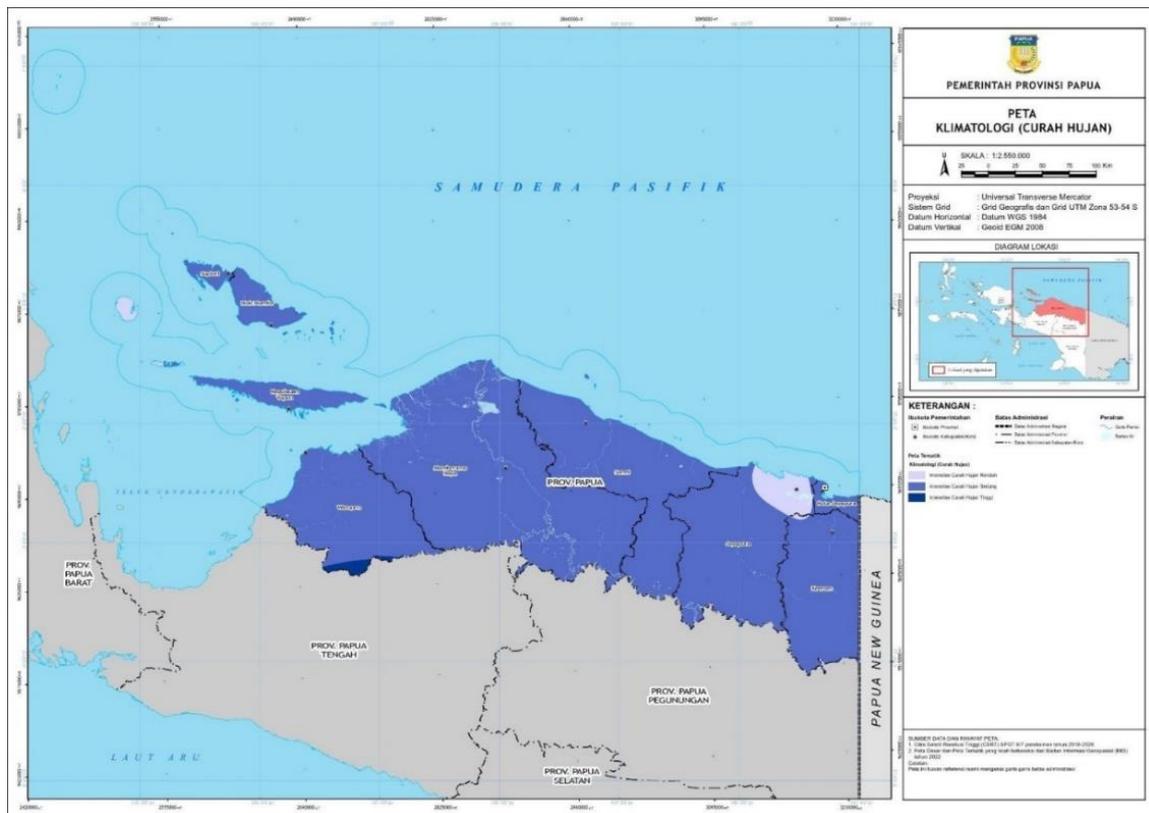


CURAH HUJAN RATA-RATA (MM/HARI) (KLASIFIKASI)		KABUPATEN	AREA (ha)
		Kabupaten Sarmi	80.590,06
		Kabupaten Kepulauan Yapen	70.456,50
<b>13.6 - 20.7 Total</b>			<b>3.185.067,42</b>
20.7 - 27.7	sedang	Kabupaten Sarmi	1.326.311,90
		Kabupaten Jayapura	1.155.495,19
		Kabupaten Mamberamo Raya	743.346,31
		Kabupaten Waropen	479.592,25
		Kabupaten Keerom	188.503,46
		Kabupaten Kepulauan Yapen	172.385,71
		Kabupaten Biak Numfor	83.429,94
		Kabupaten Supiori	66.069,33
		Kota Jayapura	29.999,49
<b>20.7 - 27.7 Total</b>			<b>4.245.133,58</b>
27.7 - 34.8	tinggi	Kabupaten Keerom	764.128,08
		Kota Jayapura	53.569,50
		Kabupaten Jayapura	20.938,73
<b>27.7 - 34.8 Total</b>			<b>838.636,31</b>
<b>Grand Total</b>			<b>8.268.837,31</b>

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua



Gambar 2.11  
**Peta Klimatologi Provinsi Papua**



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

## F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Papua terdiri dari atas :

### 1) Kawasan Hutan Provinsi Papua

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Sampai Tahun 2020 maka luas Kawasan hutan Provinsi Papua seluas 7.657.651,91 ha dengan luas kawasan lindung sebesar 3.596.655,67 ha (43,5%), luas hutan budidaya (HP, HPT dan HPK) seluas 4.060.996,24 ha (49,11%), sedangkan areal penggunaan lainnya seluas 7,38% dari luas wilayah Provinsi Papua.



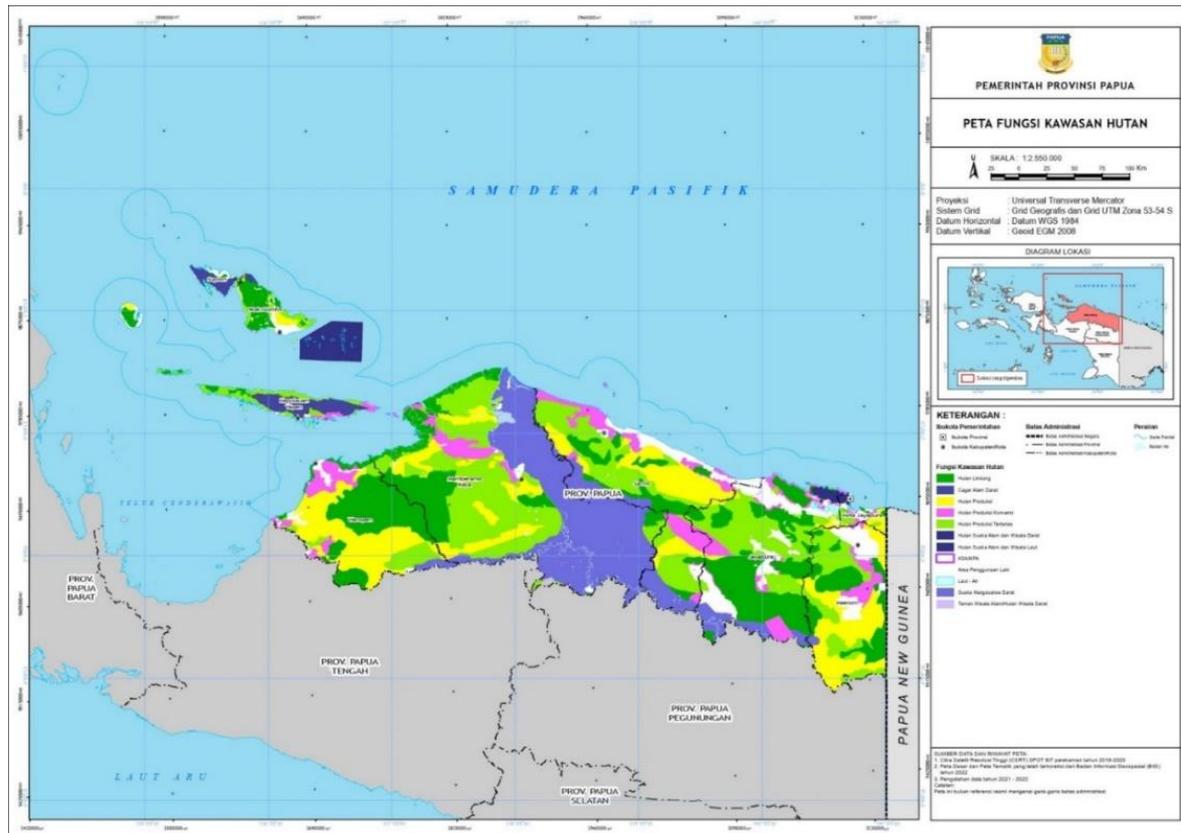
Tabel 2.10  
**Luas Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tahun 2022**

NO	SK 6632	JUMLAH (ha)
1.	Areal Penggunaan Lain	610.437,83
2.	Belum terdefinisi	5,60
3.	Cagar Alam Darat	158.697,21
4.	Hutan Lindung	1.894.420,25
5.	Hutan Produksi	1.381.384,15
6.	Hutan Produksi Konversi	605.133,78
7.	Hutan Produksi Terbatas	2.074.478,31
8.	Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat	36.378,44
9.	Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut	0,00
10.	Laut – Air	10.768,19
11.	Suaka Margasatwa Darat	1.496.051,31
12.	Taman Nasional Laut	0,00
13.	Taman Wisata Alam/Hutan Wisata Darat	340,27
<b>TOTAL</b>		<b>8.268.095,34</b>

Sumber: Keputusan Menteri KLHK Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



Gambar 2.12  
**Peta Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Papua**



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

## 2) Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Provinsi Papua didominasi oleh peruntukkan hutan rimba sebesar 7.878.548,02 ha atau 95,28% terhadap luas wilayah provinsi. Tutupan lahan di Provinsi Papua selain hutan rimba meliputi badan air yang berupa air danau, air sungai dan air rawa sebesar 205.741,87 ha (2,49%), bukit pasir sebesar 1.223,84 ha (0,015%), pelabuhan udara sebesar 753,26 ha (0,009%), permukiman sebesar 24.316,08 ha (0,29%), perkebunan sebesar 51.907,5 ha (0,63%), sawah sebesar 10.795,94 ha (0,13%), tegalan sebesar 14.714,49 ha (0,18%) dan semak belukar sebesar 80.835,33 ha (0,98%).





Gambar 2.13  
**Peta Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022**



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022





Tabel 2.11  
**Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022**

TUTUPAN LAHAN	BIAK NUMFOR	JAYAPURA	KEEROM	KEP. YAPEN	MAMBERAMO RAYA	SARMI	SUPIORI	WAROPEN	KOTA JAYAPURA	GRAND TOTAL
Air Danau/Situ	147.9	9,736.09	1.24	85.88	23,161.06	1,947.76	7.75	293.84	225.95	35,607.47
Air rawa	114.99	325.03	41.4		87,168.44	1,434.87		2,499.34	393.5	91,977.57
Air Tawar Sungai	41.8	8,053.29	3,281.83	3.37	50,055.65	10,364.59	5.47	5,899.04	451.79	78,156.83
Hutan Rimba	203,707.74	1,336,427.4	904,413.2	240,166.29	2,616,480.42	1,378,715.7	64,415.9	1,066,834,9	67,386.41	7,878,548.02
Pasir/Bukit Pasir Darat	-	-	-	-	28.83	-	-	992,25	-	1,021.08
Pasir/Bukit Pasir Laut	92.39	1.71	-	44.43	5.91	-	58.01	0.93	0.38	203.76
Pelabuhan Udara Domestik	227.93	-	-	-	-	-	-	-	-	227.93
Pelabuhan Udara Internasional	253.33	-	-	-	-	-	-	-	-	253.33
Pelabuhan Udara Perintis	41.61	146.11	11.01	50.75	11.83	5.2	-	5.49	-	272
Perkebunan/ Kebun	254.85	24,307.52	26,974.8	-	-	135.46	200.13		34.74	51,907.5





TUTUPAN LAHAN	BIAK NUMFOR	JAYAPURA	KEEROM	KEP. YAPEN	MAMBERAMO RAYA	SARMI	SUPIORI	WAROPEN	KOTA JAYAPURA	GRAND TOTAL
Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,943.33	5,622.88	4,032.09	1,802.32	510.38	2,267.09	637,25	962.14	4,538.6	24,316.08
Sawah	45.51	1,512.76	5,180.16	165.39	-	-	-	215.16	3,676.96	10,795.94
Semak Belukar/Alang-Alang	15,798.96	17,848.07	2,740.42	463.25	26,921.01	10,883.73	731.84	424.27	5,023.96	80,835.33
Tegalan/Ladang	1,331.35	4,280.74	5,955.35	60.53	3.55	1,147.59	12.95	85.54	1,836.89	14,714.49
Grand Total	226,001.7	1,408,261.6	952,631.5	242,842.21	2,804,347.07	1,406,902	66,069.3	1,078,212.9	83,568.99	8,268,837.31

Sumber: Keputusan Menteri KLHK Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



### 2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Skenario pengembangan wilayah provinsi Papua, dibagi dalam 3 wilayah pengembangan, yang meliputi:

- ✿ **Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya dengan fokus pengembangan, yaitu (1) Kabupaten Keerom dengan pertanian (food estate, tanaman pangan dan perkebunan) dan pertambangan; (2) Kabupaten Sarmi dengan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (PICO/Papua Home industri Coconut Oil); (3) Kabupaten Jayapura dengan pertanian dan industri; serta (4) Kota Jayapura sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata;
- ✿ **Wilayah pengembangan II**, yaitu (1) Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari; serta (2) Kabupaten Supiori dengan pengembangan perikanan dan pariwisata; dan
- ✿ **Wilayah pengembangan III**, yaitu (1) Kabupaten Mamberamo Raya dengan pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta (2) Kabupaten Waropen meliputi pariwisata, perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.

Gambar 2.14  
**Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua**



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022



#### 2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Papua yang berada di pulau Nugini (New Guinea Island) terbentuk akibat interaksi tumbukan lempeng benua Australia dan lempeng samudera Pasifik yang aktif. Pulau Papua juga diapit oleh 2 samudera besar, yaitu samudera Indonesia dan samudera Pasifik yang mempunyai pengaruh besar terhadap keadaan cuaca disekitarnya. Karena kondisi geologi dan posisi geografis ini menyebabkan kerawanan terjadinya bencana yang cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, yang dirinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya, meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan dengan memasukkan unsur-unsur potensi alam di daerahnya.

Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana yang dimulai dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pada dasarnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dibagi dalam empat tahapan yakni:

1. Tahap prabencana yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana;
2. Tahap prabencana yang dilakukan dalam situasi terdapat potensi bencana;
3. Tahap saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana; dan
4. Tahap pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana.



Tahapan bencana yang diuraikan di atas di atas, sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang. Dalam setiap tahapan tersebut di atas, agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam konteks kebencanaalaman, ada empat kriteria bencana alam yang potensi terjadinya dalam skala besar maupun kecil perlu diwaspadai yaitu gempa bumi, gunung api, tsunami dan gerakan tanah. Menurut BNPB (2009) keempat bencana alam tersebut termasuk bencana alam utama; di samping banjir. Keempat yang disebut pertama termasuk bencana geologi sedangkan banjir dan kekeringan adalah pengaruh iklim (musim). Di Provinsi Papua, tidak terdapat indikasi adanya gunung api. Namun sebaliknya, kekeringan adalah salah satu bencana alam yang penyebarannya cukup luas.

Bencana didefinisikan sebagai suatu rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan/hilangnya harta benda, merusak lingkungan, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang datangnya secara tiba-tiba. Sedangkan bencana geologi adalah secara spesifik bencana yang disebabkan oleh dinamika geologi seperti antara lain letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah (longsor).

Di wilayah Provinsi Papua bencana geologi yang perlu diwaspadai adalah gempa bumi dan gerakan tanah sedangkan gunung api tidak dijumpai. Bencana tsunami tercatat di Pulau Biak, Yapen dan Bagian Utara Kabupaten Waropen. Khusus untuk kejadian gempa bumi, Provinsi Papua cukup labil tercatat beberapa kali terjadi gempa dengan skala besar. Dari statistik Direktorat Bencana Alam Geologi, gempa dengan skala > 6 SR tercatat 16 kali dari tahun 1600-2006 dibandingkan dengan Pulau Sumatera 45 kali. Persentase pertahunnya 4,26 persen dan kejadian dalam 30 tahun ke depan diperkirakan hanya 1 kali.

Pada Peta Potensi Bencana Alam yang dibuat untuk menunjang perencanaan kawasan yang didasarkan pada kondisi geologinya, maka Provinsi Papua di bagi ke dalam 6



(enam) pembagian wilayah yaitu 1, Stabil, 2, Lemah, 3, Menengah, 4, Kurang kuat, 5, Kuat dan 6, Sangat Kuat. Daerah yang sangat kuat dilanda gempa bumi adalah Kabupaten Nabire memanjang hingga ke Kota Jayapura namun tidak semua pantai Utara Papua rawan gempa; daerah Kabupaten Sarmi tergolong kuat hingga menengah.

Sifat dinamika geologi yang kompleks menggambarkan situasi wilayah yang rawan terhadap potensi bencana alam, terutama bencana geologi. Bencana geologi berkembang dari bahaya geologi (geohazard) yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Geohazard adalah bahaya-bahaya atau resiko-resiko yang berhubungan dengan fenomena bumi atau beraspek geologi. Geohazard merupakan potensi inheren terkandung di dalam fenomena geologi. Bahaya yang beraspek geologi akan terus berulang di daerah yang sama, tetapi posisi detail, waktu dan besar kekuatan (parameter) sangat sulit ditentukan. Yang terpenting dalam mensikapi kondisi wilayah yang memiliki keanekaragaman bencana geologi adalah selalu waspada, menerapkan upaya preventif (mitigasi) bencana dan upaya penyelamatan diri. Upaya mitigasi bencana geologi menjadi sangat penting untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang kondisi tektonik yang membentuk pulau Papua, bahwa wilayah provinsi Papua yang menempati sebagian sebelah barat pulau Papua terletak pada 2 lempeng raksasa yang berinteraksi saling bertubrukan menyudut (oblique convergent). Lempeng benua Australia bergerak relatif ke utara dengan kecepatan 7 cm/tahun, dan lempeng samudera Pasifik bergerak relatif ke arah barat dengan kecepatan 11 cm/tahun, berinteraksi dan menyusup ke bawah lempeng benua Australia di sebelah utara Papua. Akibat pertemuan kedua lempeng ini maka terbentuk palung di utara Papua, reaktivasi sesar Sorong yang bergerak relatif mengiri, pembentukan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 4000 m, pensesaran di sepanjang jalur pegunungan tengah Papua, cekungan yang mengandung potensi hidrokarbon, kegiatan intrusi plutonik yang menghasilkan jalurjalur mineralisasi, dan zona subduksi yang menjadi sumber gempabumi, Apabila zona subduksi dan pusat gempabumi (kurang dari 33 km) dengan magnituda lebih dari 6 Skala Ritcher (SR), serta menyebabkan deformasi permukaan dasar laut (cenderung patahan naik) maka berpeluang atau berpotensi membangkitkan tsunami.



Di samping itu, hasil interaksi lempeng akan membentuk pegunungan dengan topografi yang tidak rata, bahkan dapat ekstrim (berlereng sangat terjal) yang berpotensi menyebabkan longsor, serta membentuk punggung dan lembah akibat lipatan dan sesar yang jika aktif dapat menimbulkan kombinasi bencana alam, seperti gempa bumi, longsor dan tsunami.

Dalam pandangan geohazard sebagai kehidupan normal, bencana dianggap sebagai konsekuensi dari cara-cara masyarakat membangun dirinya sendiri, baik secara ekonomi, sosial, interaksi antara masyarakat dan negara, serta pola dan arahan pemanfaatan ruang. Gambaran berikut menunjukkan bencana sebagai bagian dari kehidupan normal.

Gambar 2.15  
**Rangkaian Kerentanan Berpadu dengan bahaya yang Menimbulkan Bencana**



Gambar di atas menyatakan dengan tegas perbedaan bahaya (hazard) dan bencana (disaster). Bahaya yang berpengaruh terhadap bencana sebagai tolak ukur penting untuk mengetahui kerentanan masyarakat. Kerentanan dipandang sebagai gerak maju dari 3 tahap, yaitu penyebab yang mendasari, tekanan-tekanan yang dinamis, dan kondisi-kondisi yang tidak aman.





Beberapa daerah di Provinsi Papua memiliki kawasan rawan bencana alam dengan resiko tinggi. Beberapa jenis bencana dengan tingkat resiko kerawanan tinggi diantaranya: banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, tsunami, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, dan karhutla.

## A. Gempa Bumi

Tatanan tektonik Pulau New Guinea menyebabkan sebagian wilayah Provinsi Papua rawan terhadap gempa bumi. Tingkat kerawanan gempa bumi di Provinsi Papua berada di jalur Pegunungan Tengah hingga bagian utara Papua, tergolong pada zona bahaya gempa bumi menengah hingga tinggi dengan percepatan tanah maksimal (0,3–0,7 g) (Peta Bahaya Gempabumi Indonesia, 2007). Tercatat antara rentang waktu 1914 – 2007 terjadi 30 kali gempa bumi dengan magnituda antara 5,2 – 8,3 SR dan skala kerusakan antara V–IX MMI dengan jumlah korban meninggal mencapai 318 orang dan 1106 orang luka-luka (<http://www.vsi.esdm.go.id>). Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah V Jayapura mencatat gempa bumi (episentrum) yang terjadi di wilayah Provinsi Papua dalam periode 1988-2007 sebanyak lebih dari 2600 kali. Gempa bumi yang banyak terjadi (85,3%) adalah gempa tektonik dengan kekuatan (magnitude) yaitu kurang dari 5 Skala Ritcher (SR) atau gempa ringan dan tidak merusak. Sedangkan gempa bumi kuat dan dapat merusak (5-7 SR) frekuensi terjadinya sekitar 14,5% dan berpusat di sekitar Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, dan Jayapura. Berdasarkan kajian kerawanan bencana gempa bumi di Indonesia, Provinsi Papua berada dalam zona XXV, XXVI dan XXVII Peta Wilayah Rawan Gempa Bumi Indonesia, dan zona XVI Peta Wilayah Rawan Tsunami Indonesia, yang berarti termasuk kategori wilayah rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami (Atlas Nasional Indonesia, Bakosurtanal, 2008).

Di Provinsi Papua yang menjadi rawan gempa bumi terdapat di satu wilayah, yaitu wilayah pulau Biak–Yapen. Secara umum wilayah-wilayah ini berada di bagian utara pegunungan tengah Papua. Gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi tektonik yang diakibatkan oleh tubrukan dua lempeng. Pusat lokasi gempa bumi (episentrum) sebagian besar terjadi di darat dengan kedalaman sekitar 33 km (gempa dangkal). Gempa tipe ini sering berhubungan dengan aktivitas sesar (patahan) yang ada di jalur pegunungan tengah



Papua. Gempa di pulau Biak dan Yapen merupakan kontinuitas sesar Sorong dan dapat terjadi di darat maupun di bawah laut.

Jika terjadi di bawah laut dengan kekuatan lebih dari 7 SR dan merupakan gempa dangkal, maka berpotensi terjadi tsunami. Wilayah rawan tsunami diprediksi hanya terjadi di bagian pesisir utara Papua, termasuk semenanjung Wondama (teluk Cenderawasih).

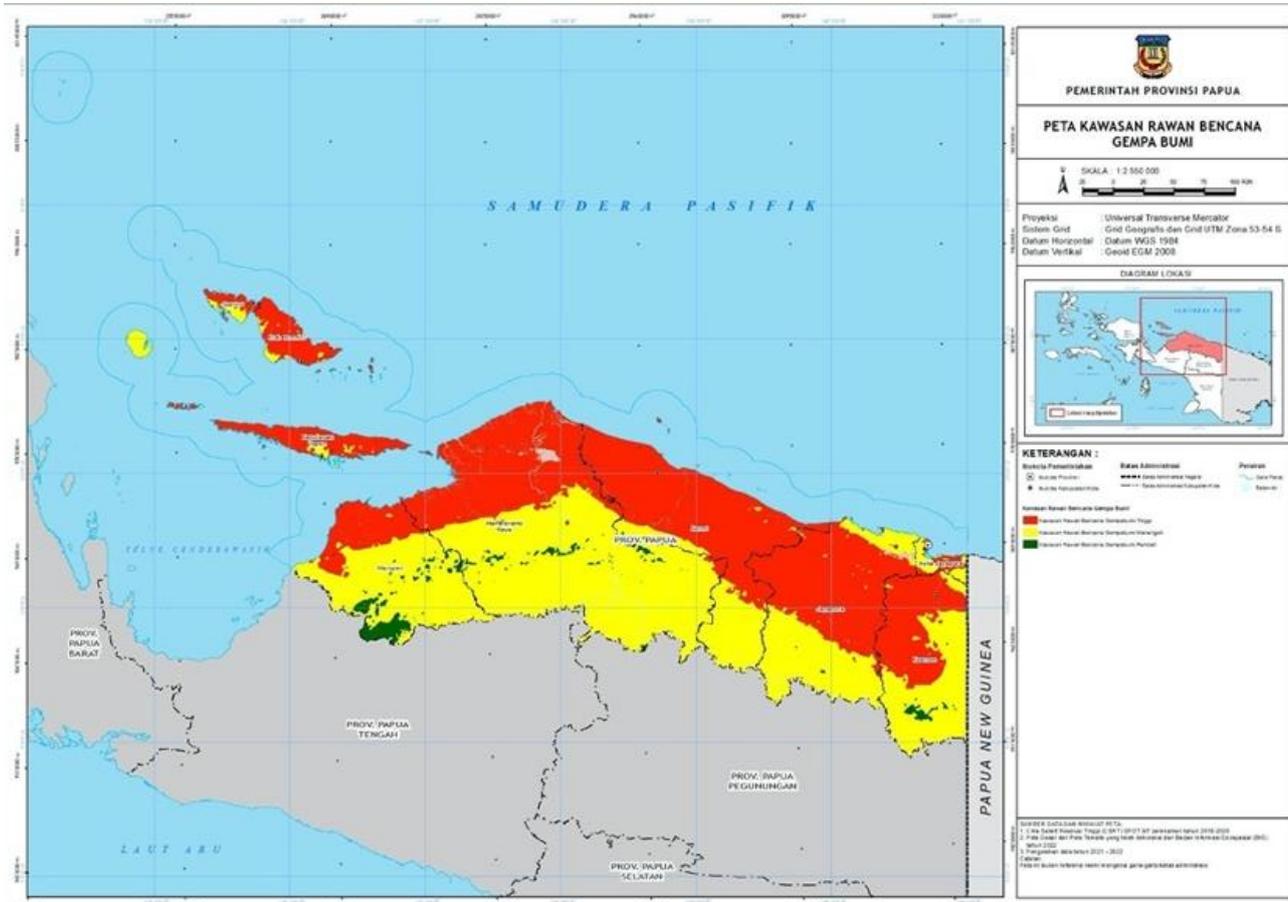
Tabel. 2.12  
**Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi Tinggi**

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1.	Jayapura	667,913.15	19.94
2.	Kepulauan Yapen	195,268.72	5.83
3.	Biak Numfor	124.55	0.00
4.	Sarmi	624,831.77	18.66
5.	Keerom	36,642.82	1.09
6.	Waropen	65,968.39	1.97
7.	Supiori	30.85	0.00
8.	Mamberamo Raya	1,698,934.93	50.73
9.	Kota Jayapura	59,148.48	1.77
<b>TOTAL</b>		<b>3,348,863.66</b>	<b>100</b>

Sumber: Revisi RTRWP Provinsi Papua, Tahun 2022



Gambar 2.16  
**Peta Kawasan Rawan Bencana**



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

## B. Longsor

Longsor dapat terjadi pada wilayah yang memiliki topografi miring hingga curam dengan material penutup yang cukup tebal, serta kondisi air tanah yang relatif dangkal. Selain itu, faktor geologi juga dapat menimbulkan longsor seperti kontak batuan yang kedap sehingga menjadi bidang gelincir, kondisi fisik batuan yang mengandung banyak kekar, serta kondisi kegempaan. Wilayah rawan longsor ditentukan berdasarkan kriteria kerentanan terhadap gerakan tanah yang dapat dibedakan menjadi 3 kategori atau zona, yaitu:



### **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi**

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat.

### **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah**

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah perbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jala atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat.

### **Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah**

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Di wilayah Provinsi Papua zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi berada di jalur pegunungan tengah dan pegunungan di utara Papua. Zona ini berhubungan erat dengan kondisi geologi yang dikendalikan oleh struktur lipatan dan sesar yang berarah relatif timur-barat. Keadaan topografi yang datar sangat terbatas sehingga pemukiman cenderung berkembang di bagian yang miring hingga agak terjal yang menjadi daerah aliran rombakan atau longsor. Disamping itu, tingkat curah hujan sangat tinggi di bagian pegunungan menyebabkan laju longsor menjadi lebih cepat. Bahaya longsor tinggi terdapat di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Wilayah dengan indeks bahaya longsor tinggi terluas berada di Kabupaten Jayapura, diikuti Kota Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

Tabel 2.13  
**Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi**

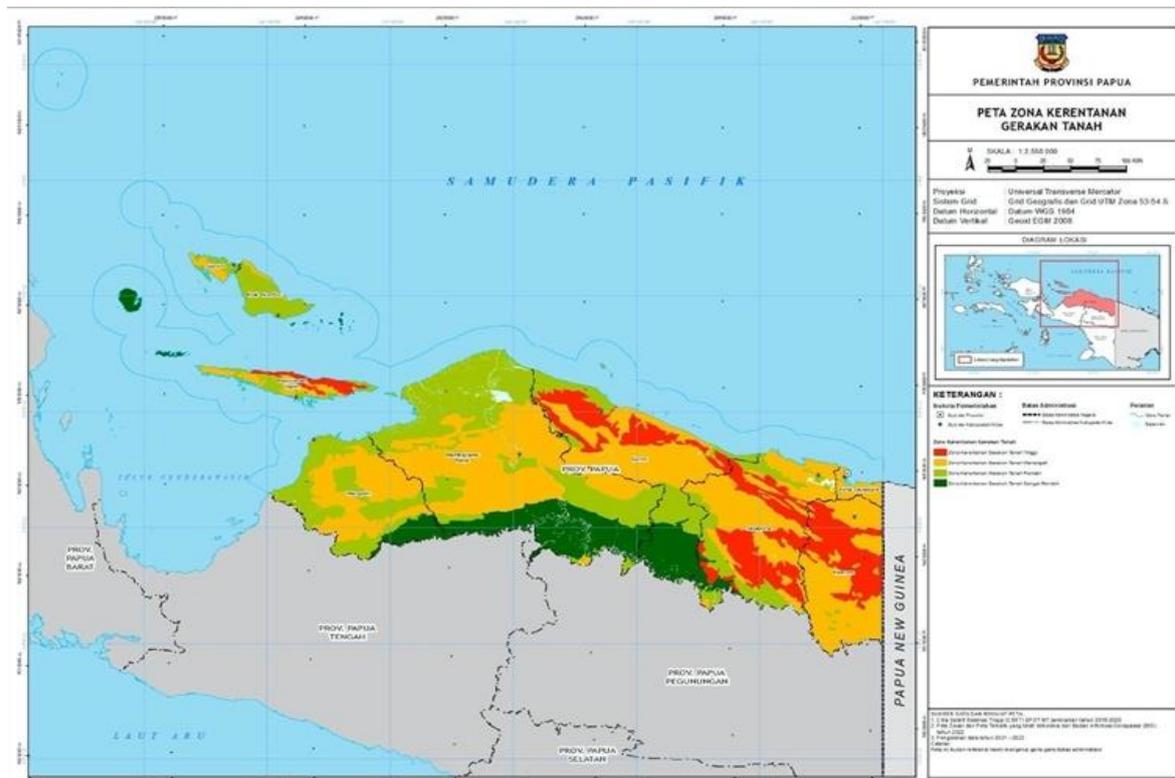
No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1.	Jayapura	219,388.10	51.68
2.	Kepulauan Yapen	58,886.97	13.87



No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
3.	Biak Numfor	0	0.00
4.	Sarmi	53,175.90	12.53
5.	Keerom	87,688.31	20.66
6.	Waropen	0	0.00
7.	Supiori	0	0.00
8.	Mamberamo Raya	3,044.21	0.72
9.	Kota Jayapura	2,314.49	0.55
<b>TOTAL</b>		<b>424,497.98</b>	<b>100</b>

Sumber: Revisi RTRWP Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar 2.17  
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022



### C. Banjir

Bahaya banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap tahun pada saat musim hujan yang panjang dan sering mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan benda. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang akibatkannya.

Banjir dapat terjadi akibat faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan lama, lokasi banjir berada pada topografi yang relatif datar dengan pola sungai yang berbelok-belok (meandering) dan dataran banjir yang luas, keadaan struktur tanah atau batuan yang lambat meresapkan air, dan kapasitas sungai yang tidak dapat menampung dan mengalirkan air ke laut. Di samping itu, faktor manusia juga berperan menyebabkan banjir, di antaranya bertambahnya penduduk sehingga menempati daerah bantaran sungai dan dataran banjir alamiah sehingga mengurangi kantong-kantong air dan daerah parkir banjir, dan hilang atau berkurangnya daerah resapan akibat perubahan fungsi lahan untuk berbagai keperluan.

Di Provinsi Papua wilayah yang menjadi rawan bahaya banjir terdapat di bagian pesisir utara, yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya dan Waropen. Dalam skala setempat banjir juga terjadi di morfologi yang agak miring, terutama pada daerah aliran sungai yang telah terganggu. Akibatnya air sungai melimpah dari badan sungai dan mengisi daerah dataran yang lebih rendah (cekungan). Bila kejadian banjir ini membawa material padat, seperti lumpur, batubatuan atau bahkan kayu sisa pohon, umumnya menjadi bencana yang sangat dahsyat. Banjir seperti ini terjadi secara singkat dan sangat merusak, dikenal sebagai banjir bandang.

Sementara itu, bahaya banjir tinggi terdapat di 9 kabupaten/kota di Papua, dimana kabupaten dengan wilayah bahaya banjir terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya, diikuti Kabupaten Sarmi dan Waropen.



Tabel 2.14  
**Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi**

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1	Jayapura	48,859.59	8.24
2	Kepulauan Yapen	739.34	0.12
3	Biak Numfor	1,318.71	0.22
4	Sarmi	63,365.16	10.68
5	Keerom	26,972.71	4.55
6	Waropen	62,418.33	10.52
7	Supiori	282.66	0.05
8	Mamberamo Raya	385,285.77	64.95
9	Kota Jayapura	3,939.93	0.66
<b>TOTAL</b>		<b>593,182.20</b>	<b>100</b>

Sumber: Revisi RTRWP Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar 2.18  
**Peta Rawan Bencana Banjir**



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

## D. Tsunami

Tsunami dapat terjadi apabila terjadi gempa bumi tektonik di sekitar zona subduksi dengan pusat gempa bumi (kurang dari 33 km) dan magnituda lebih dari 6 Skala Richter (SR), serta menyebabkan deformasi permukaan dasar laut (cenderung patahan naik). Wilayah rawan tsunami di Provinsi Papua diprediksi terjadi di bagian pesisir utara Papua, termasuk semenanjung Wondama (Teluk Cenderawasih). Tsunami yang pernah tercatat terjadi di Provinsi Papua berada di pulau Yapen tahun 1900, 1914, 1957, 1979 dan 1996 (Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2006).

Tsunami yang pernah terjadi termasuk kategori tsunami yang berbahaya hingga sangat berbahaya, dengan runup lebih dari 5 meter. Ada delapan Kabupaten/Kota yang memiliki resiko tsunami tinggi di Provinsi Papua, yaitu: Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Sarmi, Supiori, Waropen, dan Kota Jayapura. Daerah yang memiliki area rawan tsunami tinggi terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya, diikuti Kepulauan Yapen dan Sarmi.

Tabel 2.15  
**Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi**

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1.	Jayapura	503.16	2.37
2.	Kepulauan Yapen	3,429.65	16.13
3.	Biak Numfor	2,749.78	12.93
4.	Sarmi	3,062.08	14.40
5.	Keerom	1,171.63	5.51
6.	Waropen	1,812.36	8.52
7.	Supiori	7,886.21	37.09
8.	Mamberamo Raya	544.89	2.56
9.	Kota Jayapura	503.16	2.37
<b>TOTAL</b>		<b>21,159.76</b>	<b>100</b>

Sumber: Revisi RTRWP Provinsi Papua, Tahun 2022



## E. Kekeringan

Jika banjir dan tanah longsor terjadi pada musim hujan, maka kekeringan terjadi pada musim kemarau yang sangat panjang. Kekeringan terjadi bila curah hujan sangat rendah dan kelembaban udara berada di bawah normal dalam jangka waktu tertentu. Bahaya kekeringan merupakan jenis bahaya yang memiliki sifat serangan atau kejadian yang lambat dan dampaknya secara tidak langsung bisa berakumulasi selang beberapa waktu serta menimbulkan trauma yang dapat bertahan bertahun-tahun.

Dampak langsung yang dirasakan adalah berkurangnya produksi pangan dan terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat secara signifikan. Bahan makanan sulit ditemukan dan jika ada maka harganya menjadi mahal. Air bersih sulit diperoleh dan sering menimbulkan konflik. Hewan ternak banyak yang mati dan menimbulkan wabah penyakit. Demikian parahnya bahaya kekeringan sehingga menimbulkan dampak yang besar dan mempengaruhi kehidupan manusia. Kekeringan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

- Kekeringan meteorologis, yaitu kekeringan akibat curah hujan yang di bawah normal dan berlangsung dalam waktu lama;
- Kekeringan hidrologis, yaitu kekeringan yang disebabkan oleh berkurangnya sumber-sumber air sehingga ketersediaannya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar;
- Kekeringan pertanian, yaitu kekeringan yang berdampak pada produksi tanaman pangan dan ternak.

Di wilayah Provinsi Papua, jenis bahaya kekeringan pertanian lebih menonjol dibanding jenis kekeringan yang lain. Kekeringan jenis ini banyak terjadi di bagian pegunungan yang bertopografi tinggi dan curam, serta kondisi dan perubahan cuaca yang sangat ekstrem, namun memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Kebutuhan bahan makanan berasal dari kebun atau ladang yang bersifat tadah hujan, serta hanya mengandalkan pada satu jenis makanan pokok. Bentuk kekeringan pertanian yang ekstrem adalah munculnya bencana kelaparan.

Berdasarkan laporan Yayasan Sosial untuk Masyarakat Tertinggal/ YASUMAT (2006) telah terjadi kekeringan pertanian yang menyebabkan kondisi rawan pangan di Wamena



pada Oktober 1997. Peristiwa serupa juga terjadi di Yahukimo pada periode September - Desember 2005 yang menyebabkan 57 orang meninggal dunia. Peristiwa terakhir ini cukup mengejutkan banyak pihak, baik di tingkat lokal (daerah) maupun nasional. Seperti telah dijelaskan di atas, bahaya kekeringan bersifat lambat dan sistematis, sehingga antisipasi bahaya sedini mungkin dapat dilakukan. Menjadi sangat ironi mengingat peristiwa ini terjadi pada era otonomi khusus diberlakukan, serta terjadi pada daerah yang masyarakatnya mayoritas berkebun dan dikenal sebagai petani ulet.

Hingga saat ini wilayah rawan kekeringan di Provinsi Papua belum dipetakan secara rinci dan lengkap. Informasi kekeringan lebih banyak diperoleh dari instansi teknis pertanian yang mengulas dampak dari kekeringan. Informasi tentang penyebab dan antisipasi serta penanganan bahaya kekeringan belum tertangani dengan baik.

## **F. Bencana Alam Lainnya**

Bencana-bencana lain dengan resiko tinggi yang juga terdapat di Provinsi Papua diantaranya adalah banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan karhutla.

### **2.1.1.5. Kondisi Kawasan**

Sesuai posisi geografisnya, wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah pesisir, wilayah kepulauan, wilayah dataran rendah dan wilayah pegunungan. Untuk daerah pesisir, Provinsi Papua berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik sehingga Papua memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan laut tangkap. Dengan kewenangan sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, Provinsi Papua memiliki luas wilayah laut sebesar 4.889.447,97 ha yang terdapat pada 8 Kab/Kota, yaitu Kab. Jayapura, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Mamberamo Raya dan Kota Jayapura. Sebagai wilayah pesisir utara Pulau Papua, Provinsi Papua memiliki pulau sebanyak 515 pulau yang tersebar di 8 Kab/Kota, dengan jumlah terbanyak berada di Kab. Supiori dengan jumlah 171 pulau, Kab. Kepulauan Yapen dengan jumlah 148 pulau dan Kab. Biak Numfor dengan jumlah 124 pulau.



### 2.1.2. Aspek Demografi

Pada tahun 2020 Jumlah Penduduk Laki-laki di Provinsi Papua lebih tinggi yaitu 530.261 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan yang hanya sebesar 477.825 jiwa, dengan perbandingan sebesar 10,97 persen. Jumlah penduduk terendah di Provinsi Papua adalah Kabupaten Supiori sebanyak 22.547 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling tertingginya adalah Kota Jayapura sebanyak 398.478 jiwa berdasarkan tabel 2.8 dibawah. Hal tersebut dikarenakan Kota Jayapura merupakan Ibukota Provinsi Papua dengan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan yang cukup memadai dan juga merupakan pusat pemerintahan dari Provinsi Papua.

Tabel 2.16  
**Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Keteringgalan di Provinsi Papua**

No	WILAYAH ADAT	KAB/KOTA	PENYEBAB UTAMA KETERTINGGALAN (MENURUT URUTAN)					
			1	2	3	4	5	6
1.	Mamta	Keerom	Aksesibilitas	Ekonomi	Keuangan	SDM		
		Mamberamo Raya	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM			
2.	Saereri	Waropen	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik	Keuangan	
		Supiori	Ekonomi	Aksesibilitas	Keuangan	Karakteristik	SDM	

Sumber: *Strategis Daerah, Tahun 2022*

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan 54 kampung di Provinsi Papua sebagai kampung yang diprioritaskan dalam sasaran pembangunan kampung dan pembangunan daerah tertinggal serta daerah transmigrasi yang terdiri dari 8 kampung dengan status Berkembang dan 46 kampung dengan status Tertinggal.



Tabel 2.17  
**Kampung Prioritas Sasaran Pembangunan Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

WILAYAH ADAT	KABUPATEN	DISTRIK	KAMPUNG	STATUS PERKEMBANGAN
MAMTA	Keerom	Web	Umuaf	Tertinggal
	Keerom	Web	Dubu	Tertinggal
	Keerom	Web	Yuruf	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Molof	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Senggi	Berkembang
	Keerom	Senggi	Warlef	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Jabanda	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Woslay	Berkembang
	Keerom	Waris	Kalimo	Tertinggal
	Keerom	Waris	Yuwainda	Tertinggal
	Keerom	Waris	Banda	Tertinggal
	Keerom	Waris	Kalifam	Tertinggal
	Keerom	Waris	Ampas	Tertinggal
	Keerom	Arso	Sawyatami	Tertinggal
	Keerom	Arso	UPT Pir III / Bagia	Tertinggal
	Keerom	Arso	Ubiyau	Tertinggal
	Keerom	Arso	Asiaman	Berkembang
	Keerom	Arso Timur	Kriku	Tertinggal
	Keerom	Skanto	UPT Arso XIV / Wulukubun	Berkembang
	Keerom	Skanto	Arsopura	Berkembang
	Keerom	Skanto	UPT Arso IX / Intaimilyan	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Waropen Atas	Barapasi	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ilir	Trimuris	Tertinggal



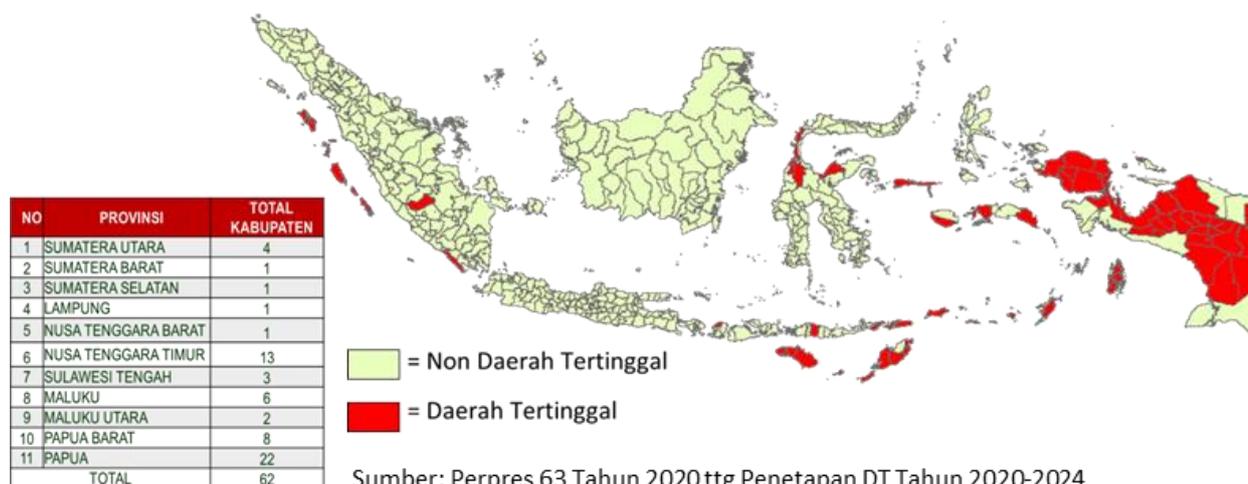
WILAYAH ADAT	KABUPATEN	DISTRIK	KAMPUNG	STATUS PERKEMBANGAN
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ilir	Warembori	Tertinggal
	Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Burmeso	Berkembang
	Mamberamo Raya	Mamberamo Ulu	Dabra	Tertinggal
<b>SAERERI</b>	Waropen	Waropen Bawah	Sawara Jaya SP VI	Berkembang
	Waropen	Waropen Bawah	Waren Satu	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Waren Dua	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Sarafambai	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Nonomi	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Awaso	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Soimiangga	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Harapan Jaya SP II	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Demisa SP III	Tertinggal
	Waropen	Urei Faisei	Kemon Jaya SP V	Tertinggal
	Waropen	Urei Faisei	Apainabo	Tertinggal
	Waropen	Oudate	Botawa	Berkembang
	Waropen	Kirihi	Dairi	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	SooH	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Diwa	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kawari	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kuaisa	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Foida	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Dirou	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Antu Aru	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Wauka	Tertinggal
	Supiori	Supiori Selatan	Biniki	Tertinggal
	Supiori	Kepulauan Aruri	Rayori	Tertinggal



WILAYAH ADAT	KABUPATEN	DISTRIK	KAMPUNG	STATUS PERKEMBANGAN
	Supiori	Supiori Utara	Warsa	Tertinggal
	Supiori	Supiori Utara	Warbor	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Koiryakam	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Wayori	Tertinggal
	Supiori	Supiori Timur	Douwbo	Tertinggal

Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No 126 Tahun 2017

Gambar 2.19  
Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Tahun 2020-2040



Sumber: Perpres 63 Tahun 2020 ttg Penetapan DT Tahun 2020-2024

Tabel 2.18  
Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2022

No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jayapura	123.780	125.975	128.587	131.802	166.171	168.476	169,97
2	Kep.Yapen	93.114	95.007	97.412	101.204	112.676	114.210	115,47
3	Biak Numfor	141.801	144.697	148.404	152.401	134.650	135.231	137,67
4	Sarmi	37.511	38.210	39.406	40.515	41.515	41.849	42,28



No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	Keerom	54.130	55.018	55.799	57.100	61.623	62.157	62,82
6	Waropen	28.803	29.480	30.612	31.514	33.943	34.414	34,83
7	Supiori	18.486	19.104	20.018	20.710	22.547	22.860	23,48
8	Mamberamo Raya	21.821	22.313	23.307	24.086	36.483	36.989	37,88
9	Kota Jayapura	288.786	293.690	297.775	300.192	398.478	404.004	408,99
Provinsi Papua		808.232	823.494	841.320	859.524	1.008.086	1.020.190	1.033,39

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Pada Tahun 2022 Total Orang Asli Papua di Provinsi Papua sebanyak 738.208 Jiwa, dengan jumlah penduduk Orang Asli Papua terbanyak ada pada Kota Jayapura sebanyak 217.767 Jiwa dan terendah ada pada Kabupaten Supiori sebanyak 23,591 Jiwa.

Tabel 2.19  
**Jumlah Penduduk Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2022**

No.	KAB/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Kota Jayapura	118.037	99.730	217.767
2.	Jayapura	75.916	68.839	144.755
3.	Biak Numfor	62.029	58.865	120.894
4.	Kepulauan Yapen	49.490	47.014	96.504
5.	Keerom	19.728	16.442	36.170
6.	Mamberamo Raya	18.416	16.911	35.327
7.	Sarmi	17.474	15.397	32.871
8.	Waropen	15.916	14.413	30.329
9.	Supiori	12.238	11.353	23.591
<b>Provinsi Papua</b>		<b>389.244</b>	<b>348.964</b>	<b>738.208</b>

Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022



Tabel 2.20  
**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jayapura	88,46	81,54	169,97
2.	Kepulauan Yapen	59,80	55,66	115,47
3.	Biak Numfor	70,55	67,11	137,67
4.	Sarmi	22,49	19,83	42,28
5.	Keerom	33,09	29,73	62,82
6.	Waropen	18,44	16,38	34,83
7.	Supiori	12,19	11,29	23,48
8.	Mamberamo Raya	19,82	18,08	37,88
9.	Kota Jayapura	217,30	191,72	408,99
<b>Provinsi Papua</b>		<b>542.14</b>	<b>491,34</b>	<b>1.033,48</b>

Sumber : BPS Provinsi Papua , 2021

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua periode 2010-2020 sebesar 3,32 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2020-2022 sebesar 2,51 persen. Kabupaten Supiori menjadi kabupaten yg laju pertumbuhan penduduknya paling tinggi di Provinsi Papua dengan nilai 4,82 Persen.

Tabel 2.21  
**Laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua**

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
		Jumlah Penduduk (2020)	Jumlah Penduduk (2022)	LPP 2010-2020	LPP 2020-2021
1	Jayapura	166.171	169,97	3,9	2,16
2	Kepulauan Yapen	112.676	115,47	3,01	2,91
3	Biak Numfor	134.650	137,67	0,58	2,66



No.	Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
		Jumlah Penduduk (2020)	Jumlah Penduduk (2022)	LPP 2010-2020	LPP 2020-2021
4	Sarmi	41.515	42,28	2,25	2,15
5	Keerom	61.623	62,82	2,34	2,30
6	Waropen	33.943	34,83	3,15	3,11
7	Supiori	22.547	23,48	3,45	4,82
8	Mamberamo Raya	36.483	37,88	6,87	4,41
9	Kota Jayapura	398.478	408,99	4,35	3,07
<b>Provinsi Papua</b>		<b>1.008.086</b>	<b>1.033.48</b>	<b>3,32</b>	<b>2,52</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua sebesar 8,30 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Kota Jayapura 436,99 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Waropen yaitu sebesar 1,09 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun rincian kepadatan penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.22  
**Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2022**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 2022	Luas Wilayah Kabupaten/ Kota	Kepadatan Penduduk
1.	Kota Jayapura	169,97	11,157	436,99
2.	Kepulauan Yapen	115,47	2,050	56,33
3.	Biak Numfor	137,67	2,602	52,91
4.	Supiori	42,28	17,742	34,61
5.	Jayapura	62,82	8,390	15,23
6.	Keerom	34,83	10,977	2,60
7.	Mamberamo Raya	23,48	678	1,59



No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 2022	Luas Wilayah Kabupaten/ Kota	Kepadatan Penduduk
8.	Sarmi	37,88	23,814	1,56
9.	Waropen	408,99	936	1,09
<b>Total</b>		<b>1.033,48</b>	<b>67,189</b>	<b>8,30</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

## 2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

### 2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan kinerja pemerintah daerah melalui capaian makro dan indikator penyusun capaian makro. Capaian yang dinilai pada aspek ini meliputi dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Adapun masing-masing penjelasan untuk tiap capaian adalah sebagai berikut :

#### 2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB Provinsi Papua dalam periode 5 (lima) tahun terakhir terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.23

#### Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Miliar rupiah) 2018-2021

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Milliar Rp) 2018-2022				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jayapura	14531,36	16381,31	15974,73	17024,61	18214,76
2.	Kepulauan Yapen	3907,66	4250,57	4150,23	4472,79	4657,80
3.	Biak Numfor	5183,89	5486,11	5223,67	5500,04	5885,76



No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Milliar Rp) 2018-2022				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	Sarmi	2534,43	2819,69	2937,45	3117,17	3304,37
5.	Keerom	2701,91	2855,77	2925,04	3060,43	3206,20
6.	Waropen	1916,37	2052,79	2044,75	2114,27	2313,60
7.	Supiori	946,75	1009,18	1042,05	1087,35	1139,20
8.	Mamberamo Raya	1484,86	1646,55	1722,34	1835,56	1976,41
9.	Kota Jayapura	30422,58	32325,75	32019,13	33138,99	35428,72
<b>Provinsi Papua</b>		<b>63.629,81</b>	<b>68.827,72</b>	<b>68.039,39</b>	<b>71.351,21</b>	<b>76.126,82</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Dari tabel 2.20 terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Papua tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi. Namun secara keseluruhan, menunjukkan adanya pergeseran dan perbaikan struktur perekonomian Provinsi Papua dari tahun ke tahun selama periode tersebut. PDRB ADHB Provinsi Papua tahun 2018 sebesar 63.629,81 miliar rupiah dan meningkat sebesar 12.497,01 miliar rupiah menjadi 76.126,82 miliar rupiah di tahun 2022. Kota Jayapura memiliki PDRB ADHB tertinggi dan Kabupaten Supiori memiliki PDRB ADHB terendah selama periode 2018-2022.

Tabel 2.24  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar rupiah) 2018-2021**

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK (Miliar Rp.) 2018-2022				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jayapura	9312,18	9978,84	9729,66	10206,02	10.587,41
2.	Kepulauan Yapen	2767,99	2898,82	2767,49	2900,02	3.014,75
3.	Biak Numfor	3355,45	3429,60	3255,91	3336,57	3.502,67
4.	Sarmi	1732,12	1833,63	1834,11	1864,96	1.905,09
5.	Keerom	1916,26	1991,01	1993,55	2047,50	2.106,47
6.	Waropen	1430,75	1508,37	1465,79	1485,61	1.557,74



No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK (Miliar Rp.) 2018-2022				
		2018	2019	2020	2021	2022
7.	Supiori	729,41	760,97	769,12	781,18	804,11
8.	Mamberamo Raya	957,67	1013,95	1017,23	1030,71	1.062,65
9.	Kota Jayapura	21778,32	22857,30	22117,78	22819,09	23.703,01
<b>Provinsi Papua</b>		<b>43.980,15</b>	<b>46.272,49</b>	<b>44.950,64</b>	<b>46.471,66</b>	<b>48.243,90</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Tabel 2.23 menunjukkan PDRB ADHK Provinsi Papua selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan PDRB ADHK tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 48.243,90 miliar rupiah dan terendah di tahun 2020 sebesar 44.950,64 miliar rupiah. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian Provinsi Papua secara makro mengalami peningkatan. Selama periode 2018-2022, PDRB ADHK tertinggi terjadi di Kota Jayapura dan yang terendah di Kabupaten Supiori.

### 2.2.1.2. Laju Inflasi Daerah

Tabel 2.25  
**Tingkat Inflasi Provinsi Papua (Kota Jayapura) 2021-2023**

No	Tahun	Inflasi (angka persen (%))
1.	2018	6,70
2.	2019	0,60
3.	2020	0,75
4.	2021	1,70
5.	2022	5,81

Sumber : BPS Provinsi Papua

Tingkat inflasi Kota Jayapura yang selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi yang signifikan dengan lonjakan yang tinggi terjadi di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan rilis BPS, kelompok pengeluaran dengan inflasi tertinggi di Kota Jayapura selama tahun 2022, yaitu transportasi (15,60 persen); pendidikan (12,62



persen); rekreasi, olahraga, dan budaya (6,62 persen); perawatan diri dan jasa lainnya (6,17 persen); kesehatan (5,53 persen); makanan, minuman, dan tembakau (5,16 persen); perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (5,05 persen); penyediaan makanan dan minuman/restoran (3,59 persen); perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (2,34 persen); dan pakaian dan alas kaki (0,44 persen). Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-0.33 persen).

### 2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Tabel 2.26  
**Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Papua Menurut kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	2018		2019		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Jayapura	17,19	13,37	17,19	13,04	16,61	12,38	15,56	9,24
2.	Kepulauan Yapen	26,3	27	27,19	26,87	27,04	26,17	25,67	22,48
3.	Biak Numfor	37,93	25,56	38,60	25,33	38,02	24,45	36,38	26,90
4.	Sarmi	5,67	14,39	5,80	14,32	5,70	13,81	5,56	13,29
5.	Keerom	9,4	16,85	9,55	16,73	9,42	16,27	9,30	14,96
6.	Waropen	9,26	30,25	9,68	30,72	9,44	29,41	9,69	28,16
7.	Supiori	7,76	38,77	7,97	38,48	7,78	36,72	7,83	34,25
8.	Mamberamo Raya	6,94	29,78	6,96	28,90	6,98	28,18	7,04	19,03
9.	Kota Jayapura	33,74	11,33	34,42	11,47	33,80	11,13	34,79	8,61
<b>Provinsi Papua</b>		<b>154,19</b>	<b>18,33</b>	<b>157,36</b>	<b>18,31</b>	<b>154,79</b>	<b>17,71</b>	<b>151,82</b>	<b>14,88</b>

Berdasarkan tabel diatas, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 14,88 persen. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan periode tahun 2018-2020. Sementara itu, Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi selama periode 2018-2021 adalah Kabupaten Supiori dan yang terendah adalah Kota Jayapura. Untuk tahun 2021, persentase kemiskinan Kabupaten Supiori sebesar 34,25 persen dan Kota Jayapura sebesar 8,61 persen.



#### 2.2.1.4. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Tabel 2.27  
**Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2017-2022**

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jayapura	9.60	9.79	10.04	10.05	10.27
2.	Kepulauan Yapen	9.07	9.19	9.46	9.47	9.69
3.	Biak Numfor	10.00	10.22	10.33	10.34	10.53
4.	Sarmi	8.52	8.53	8.82	8.83	9.15
5.	Keerom	7.83	8.00	8.01	8.02	8.31
6.	Waropen	8.87	9.18	9.20	9.21	9.40
7.	Supiori	8.39	8.60	8.81	8.87	9.09
8.	Mamberamo Raya	5.46	5.65	5.66	5.87	6.12
9.	Kota Jayapura	11.3	11.55	11.56	11.57	11.74
<b>Provinsi Papua</b>		<b>8.78</b>	<b>8.97</b>	<b>9.10</b>	<b>9.14</b>	<b>9.37</b>

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Daerah di Provinsi Papua yang memiliki RLS tertinggi pada tahun 2022 berada di Kota Jayapura dengan nilai RLS 11,74 artinya sudah mencapai target program Pendidikan. Sedangkan daerah yang memiliki nilai RLS terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten Mamberamo Raya dengan nilai 6,12.



### 2.2.1.5. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tabel 2.18.  
**Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2017-2022**

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jayapura	14.17	14.19	14.20	14.39	14.40
2.	Kepulauan Yapen	12.24	12.72	12.73	12.74	12.80
3.	Biak Numfor	13.94	13.95	13.96	14.20	14.21
4.	Sarmi	11.55	11.81	12.05	12.29	12.32
5.	Keerom	12.14	12.41	12.42	12.43	12.45
6.	Waropen	12.77	12.78	12.79	12.80	12.83
7.	Supiori	12.72	12.73	12.74	13.00	13.18
8.	Mamberamo Raya	11.30	11.78	11.79	11.80	11.82
9.	Kota Jayapura	14.99	15.00	15.01	15.02	15.04
<b>Papua</b>		<b>12.87</b>	<b>13.04</b>	<b>13.08</b>	<b>13.19</b>	<b>13.23</b>

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

### 2.2.1.6. Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.



Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini. Berikut ini merupakan perkembangan AHH di Provinsi Papua.

Tabel 2.29  
**Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua  
Tahun 2017-2022**

No	Kabupaten/Kota	Harapan Hidup (AHH)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jayapura	70,00	70,15	70,38	70,45	70,52	70,76
2.	Kepulauan Yapen	68,71	68,85	69,06	69,12	69,17	69,39
3.	Biak Numfor	67,87	68,00	68,20	68,25	68,29	68,50
4.	Jayapura	66,47	66,66	66,93	67,05	67,16	67,45
5.	Keerom	66,18	66,35	66,60	66,69	66,78	67,04
6.	Sarmi	65,82	66,00	66,26	66,36	66,46	66,74
7.	Waropen	65,82	65,99	66,24	66,33	66,42	66,68
8.	Supiori	65,33	65,53	65,81	65,94	66,06	66,36
9.	Mamberamo Raya	56,90	57,18	57,55	57,77	58,00	58,29
<b>Provinsi Papua</b>		<b>65.90</b>	<b>66.08</b>	<b>66.34</b>	<b>66.44</b>	<b>66.54</b>	<b>66.80</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua

### 2.2.1.7. Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. selanjutnya dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang dapat terlihat sebagai berikut.



Tabel 2.30  
**Pengeluaran Perkapita Masyarakat di Provinsi Papua Tahun 2017-2022**

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita Masyarakat					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Jayapura	14.781	14.922	15.176	14.763	14.937	15.189
2.	Jayapura	10.055	10.160	10.375	9.898	9.989	10.230
3.	Biak Numfor	9.812	9.969	10.211	9.705	9.607	9.788
4.	Keerom	8.824	8.918	9.136	8.910	8.926	9.153
5	Kepulauan Yapen	7.605	7.739	7.785	7.484	7.491	7.685
6.	Waropen	6.810	6.978	7.018	6.732	6.788	6.919
7.	Sarmi	6.723	6.814	6.860	6.600	6.617	6.864
8.	Supiori	5.655	5.769	5.820	5.677	5.708	5.904
9.	Mamberamo Raya	4.596	4.755	4.807	4.581	4.603	4.806
<b>Provinsi Papua</b>		<b>8.318</b>	<b>8.447</b>	<b>8.576</b>	<b>8.261</b>	<b>8.296</b>	<b>8.504</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua mengalami kenaikan dalam jangka waktu 5 tahun dari 2017 hingga 2022 di setiap kabupaten kota di Provinsi Papua. Kabupaten dengan nilai tertinggi berada di tahun 2022 sebesar 15.189 oleh Kota Jayapura sedangkan kabupaten Mamberamo Raya yg terendah dengan nilai 4.806.

#### 2.2.1.8. Persentase Balita Gizi Buruk

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase balita gizi buru di provinsi papua dapat melihat tabel berikut.



Tabel 2.31  
**Status Gizi Anak Balita Umur 0-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua**

Kabupaten/Kota	BB/U				TB/U			
	Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
Jayapura	38	226	2130	169	88	292	2030	9
Kepulauan Yapen	48	154	1614	16	58	212	1546	14
Biak Numfor	106	460	2680	129	131	294	2830	22
Sarmi	11	66	529	51	15	82	554	6
Keerom	34	152	1339	108	34	169	1419	3
Waropen	37	112	445	13	28	70	393	5
Supiori	27	100	419	15	22	93	445	0
Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Jayapura	167	776	6788	558	248	653	7187	58

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Tabel 2.32  
**Status Gizi Balita Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan (%)**

Kab/Kota	BB/TB			
	Underweight	Wasting	Stunting	Overweight
Jayapura	14,1	9,7	20,6	4,7
Kepulauan Yapen	24,6	15,3	31,1	4,2
Biak Numfor	20,6	7,9	27,3	2,9
Sarmi	21,6	14,3	25,6	1,3
Keerom	15,9	8,3	25,9	3,3
Waropen	22,6	13,8	22,2	2,1
Supiori	26	7,9	40,2	2,0
Mamberamo Raya	11,0	10,9	29,0	6,2



Kab/Kota	BB/TB			
	Underweight	Wasting	Stunting	Overweight
Kota Jayapura	15,8	9,7	20,6	4,7

Sumber: Dinas Kesehatan Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

### 2.2.1.9. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

Jumlah penduduk diatas 15 tahun pada Provinsi Papua mencapai 652,046 jiwa, yang terdiri dari 597,410 jiwa angkatan kerja atau sebanyak 61,10% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 218,902 bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada Provinsi Papua mencapai 34,484 jiwa atau sebanyak 5,77% dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kota Jayapura memiliki jumlah penduduk diatas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua dengan jumlah mencapai 241,422 jiwa, yang terdiri dari 210,625 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,75% dan 87,522 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kota Jayapura mencapai 11,67%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua berada pada Kabupaten Keerom. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten Keerom mencapai 76,91% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 1,41%.

Kota Jayapura memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Provinsi Papua. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kota Jayapura mencapai 11,67% atau sebanyak 17,961 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2.33  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tahun 2021**

No	Kab/Kota	Penduduk 15+	Angkatan Kerja	Beke rja	Pengangg uran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1.	Jayapura	97.424	90.845	61.008	5.208	31.208	67,97	7,87
2.	Kep. Yapen	71.762	64.755	44.751	1.134	25.877	63,94	2,47



No	Kab/Kota	Penduduk 15+	Angkatan Kerja	Beke rja	Pengangg uran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
3.	Biak Numfor	111.388	109.947	70.036	7.344	34.008	69,47	9,49
4.	Sarmi	30.202	28.329	19.984	725	9.493	68,57	3,50
5.	Keerom	44.430	47.019	33.690	481	10.259	76,91	1,41
6.	Waropen	23.870	17.009	12.309	1.152	10.409	56,39	8,56
7.	Supiori	14.575	14.270	9.726	266	4.583	68,56	2,66
8.	Mamberamo Raya	16.973	14.611	10.962	213	5.543	66,84	1,91
9.	Kota Jayapura	241.422	210.625	135.939	17.961	87.522	63,75	11,67

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua, (BPS Papua)

### 2.2.1.10. Indeks Pembangunan Manusia

Selama tahun 2017-2022, Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. Kondisi ini berdampak pada terjadi perubahan status pembangunan manusia Papua dari berstatus "rendah" menjadi berstatus "sedang". IPM kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua sepanjang tahun 2017-2022 sebagian masuk dalam kategori IPM rendah. Kota Jayapura selama periode tersebut dapat dikatakan yang paling konsisten dalam peringkat pertama di Provinsi Papua, dimana sampai dengan tahun 2022 nilai IPM Kota Jayapura telah mencapai 80,61 poin, kemudian di ikuti dengan Kabupaten Biak Numfor pada urutan ke-2, dan Kabupaten Jayapura di urutan ke-3. Adapun pada tahun 2022 daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Mamberamo Raya. Untuk lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2022**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jayapura	70,97	71,25	71,84	71,69	72,03	72,67



No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.	Kepulauan Yapen	66,07	67	67,76	67,66	67,72	68,41
3.	Biak Numfor	71,56	71,96	72,57	72,19	72,33	72,85
4..	Sarmi	62,31	63	63,45	63,63	63,94	64,86
5.	Keerom	64,99	65,75	66,59	66,40	66,49	67,24
6.	Waropen	64,08	64,80	65,34	64,94	65,10	65,67
7.	Supiori	61,23	61,84	62,30	62,30	62,72	63,65
8.	Mamberamo Raya	50,25	51,24	52,20	51,78	52,18	53,10
9.	Jayapura	79,23	79,58	80,16	79,94	80,11	80,61
<b>Provinsi Papua</b>		<b>64.87</b>	<b>65.63</b>	<b>66.27</b>	<b>66.91</b>	<b>66.73</b>	<b>66.96</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua

### 2.2.1.11. Indeks Gini

Indeks gini rasio pada umumnya digunakan untuk mengukur kesenjangan pembagian pendapatan relative antar penduduk pada suatu wilayah tertentu. Berikut ini terlihat data rasio gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam 5 (Lima) tahun terakhir yang terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.35  
**Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021**

No	Kabupaten/Kota	Rasio Gini				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jayapura	0,281	0,337	0,401	0,432	0,378
2.	Kepulauan yapen	0,325	0,374	0,381	0,400	0,387
3.	Biak Numfor	0,361	0,430	0,372	0,401	0,374
4.	Sarmi	0,400	0,420	0,436	0,424	0,409
5.	Keerom	0,358	0,382	0,432	0,396	0,393
6.	Waropen	0,344	0,279	0,369	0,346	0,405
7.	Supiori	0,252	0,382	0,364	0,319	0,320
8.	Mamberamo Raya	0,203	0,405	0,411	0,211	0,324



No	Kabupaten/Kota	Rasio Gini				
		2017	2018	2019	2020	2021
9.	Kota Jayapura	0,317	0,310	0,305	0,278	0,276
<b>Provinsi Papua</b>		<b>0.316</b>	<b>0.369</b>	<b>0.386</b>	<b>0.356</b>	<b>0.363</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua

### 2.2.2. Aspek Daya Saing

Perekonomian Provinsi Papua dapat diidentifikasi dari akumulasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk melihat proporsi lapangan usaha dalam mengidentifikasi sektor basis, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.36  
**PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021**  
(juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.387.174,48	6.607.796,12	6.743.567,28	6.731.111,36	6.849.317,46
B.	Pertambangan dan Penggalian	381.647,05	396.811,03	412.537,82	422.502,76	434.868,91
C.	Industri Pengolahan	1.359.306,63	1.416.941,71	1.431.617	1.425.165,06	1.451.509,11
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	26.187,63	27.412,58	28.508,97	28.378,66	29.355,47
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54.993,70	57.511,45	57.568,85	57.258,99	58.227,51
F.	Konstruksi	7.248.136,78	7.583.140,16	8.109.169,01	8.180.838,31	8.563.907,27
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.842.812,85	6.198.002,36	6.583.747,59	6.049.632,16	6.892.304,45
H.	Transportasi dan Pergudangan	3.224.177,50	3.457.360,65	3.673.256,25	2.467.803,62	2.686.529,75
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	623.925,13	653.042,78	682.743	545.653,70	577.486,67





No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
J.	Informasi dan Komunikasi	2.912.841,85	3.040.273,37	3.137.810,76	3.399.464,50	3.560.063,69
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.282.025,49	1.376.171,95	1.450.551,75	1.420.411,14	1.450.249,37
L.	Real Estate	1.981.508,29	2.069.589,28	2.157.697,49	2.177.507,76	2.271.894,89
M,N.	Jasa Perusahaan	1.008.914,61	1.095.037,74	1.178.184,96	1.111.542,69	1.183.941,29
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.674.555,20	6.074.717,41	6.488.340,51	6.292.418,90	6.305.169,15
P.	Jasa Pendidikan	1.610.069,72	1.708.182,42	1.764.970,50	1.748.311,59	1.718.038,17
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.218.330,83	1.297.923,60	1.388.814,86	1.465.160,67	1.523.478,42
R,S,T,U.	Jasa lainnya	861.718,38	920.228,14	983.411,05	971.860,57	1.005.088,22
<b>PDRB</b>		<b>41.698.326,12</b>	<b>43.980.142,75</b>	<b>46.272.497,65</b>	<b>44.495.022,44</b>	<b>46.561.429,80</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tabel. 2.37  
**Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (persen)**

No	Lapangan usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,32 %	15,02 %	14,57 %	15,13 %	14,71 %	14,95%
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,92%	0,90%	0,89%	0,95%	0,93%	0,92%
C.	Industri Pengolahan	3,26%	3,22%	3,09%	3,20%	3,12%	3,18%
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13%	0,13%	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%
F.	Konstruksi	17,38 %	17,24 %	17,52 %	18,39 %	18,39 %	17,79%
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,01 %	14,09 %	14,23 %	13,60 %	14,80 %	14,15%
H.	Transportasi dan Pergudangan	7,73%	7,86%	7,94%	5,55%	5,77%	6,97%





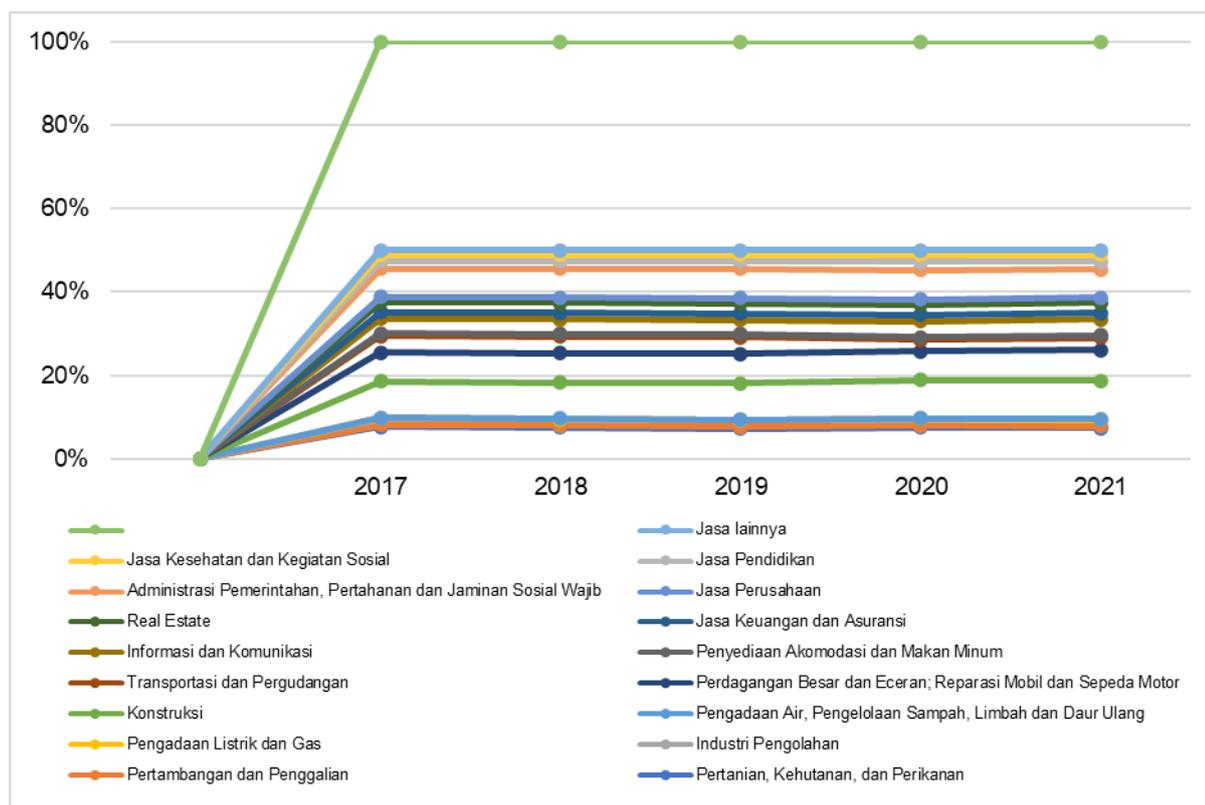
No	Lapangan usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50%	1,48%	1,48%	1,23%	1,24%	1,38%
J.	Informasi dan Komunikasi	6,99%	6,91%	6,78%	7,64%	7,65%	7,19%
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,07%	3,13%	3,13%	3,19%	3,11%	3,13%
L.	Real Estate	4,75%	4,71%	4,66%	4,89%	4,88%	4,78%
M,N.	Jasa Perusahaan	2,42%	2,49%	2,55%	2,50%	2,54%	2,50%
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,61 %	13,81 %	14,02 %	14,14 %	13,54 %	13,83%
P.	Jasa Pendidikan	3,86%	3,88%	3,81%	3,93%	3,69%	3,84%
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,92%	2,95%	3%	3,29%	3,27%	3,09%
R,S,T, U.	Jasa lainnya	2,07%	2,09%	2,13%	2,18%	2,16%	2,13%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tabel diatas menunjukkan kontribusi sektor lapangan usaha (%) selama tahun 2017-2021, dengan sektor konstruksi yang memiliki kontribusi rata-rata terbesar yakni 17,79%, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,95% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,83%.



Gambar 2.19  
**Grafik Fluktuasi Kontribusi Sektor lapangan Usaha terhadap Total PDRB ADHK Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sektor konstruksi merupakan sektor yang sangat mendominasi jumlah PDRB di Provinsi Papua, berbeda dari sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang menjadi sektor yang berkontribusi rendah dalam PDRB.

Tabel 2.38  
**PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (juta rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.925.821,09	9.459.130,54	9.982.090,28	10.126.614,17	10.523.447,31
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.248.838	1.327.957,24	1.423.264,11	1.467.062,07	1.520.335,38
C.	Industri Pengolahan	1.864.694,96	2.026.876,03	2.117.034,21	2.155.933,65	2.239.326,32





No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	36.442,71	40.221,72	43.518,91	43.038,81	45.341,38
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	69.288,67	74.076,90	75.200,11	73.230,40	76.107
F.	Konstruksi	11.432.510,66	12.417.078,67	13.559.578,46	14.127.333,72	15.010.948,76
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.080.900,31	8.885.602,85	9.672.241,98	9.994.327,96	10.687.140,95
H.	Transportasi dan Pergudangan	5.235.042,24	5.967.961,97	6.672.824,22	4.298.253,34	4.752.423,22
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	899.747,52	961.779,46	1.045.975,44	862.573,57	909.381,07
J.	Informasi dan Komunikasi	3.477.009,43	3.697.340,25	3.894.208,58	4.267.786,35	4.522.228,35
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.862.465,62	2.064.224,26	2.194.267,02	2.177.179,02	2.293.191,26
L.	Real Estate	2.763.155,74	2.925.458,44	3.156.695,94	3.212.644,87	3.435.254,79
M,N.	Jasa Perusahaan	1.309.212,85	1.475.750,33	1.616.996,03	1.613.801,17	1.683.728,34
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.545.992,05	8.322.958,48	9.077.278,16	9.229.800,85	9.248.396,05
P.	Jasa Pendidikan	1.829.991,07	1.967.529,74	2.073.211,07	2.078.824,98	1.995.674,80
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.573.016,28	1.697.288,73	1.827.814,39	2.048.209,48	2.197.133,45
R,S,T ,U.	Jasa lainnya	1.040.593,55	1.126.901,01	1.228.147,60	1.258.251,56	1.327.873,49
<b>PDRB</b>		<b>59.194.722,75</b>	<b>64.438.136,62</b>	<b>69.660.346,51</b>	<b>69.034.865,97</b>	<b>72.467.931,92</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua



Tabel 2.39  
**Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua  
Tahun 2017-2021 (persen)**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,08 %	14,68 %	14,33 %	14,67 %	14,52 %	14,66%
B	Pertambangan dan Penggalian	2,11%	2,06%	2,04%	2,13%	2,10%	2,09%
C	Industri Pengolahan	3,15%	3,15%	3,04%	3,12%	3,09%	3,11%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
F	Konstruksi	19,31 %	19,27 %	19,47 %	20,46 %	20,71 %	19,85%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,65 %	13,79 %	13,88 %	14,48 %	14,75 %	14,11%
H	Transportasi dan Pergudangan	8,84%	9,26%	9,58%	6,23%	6,56%	8,09%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,52%	1,49%	1,50%	1,25%	1,25%	1,40%
J	Informasi dan Komunikasi	5,87%	5,74%	5,59%	6,18%	6,24%	5,92%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15%	3,20%	3,15%	3,15%	3,16%	3,16%
L	Real Estate	4,67%	4,54%	4,53%	4,65%	4,74%	4,63%
M,N	Jasa Perusahaan	2,21%	2,29%	2,32%	2,34%	2,32%	2,30%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,75 %	12,92 %	13,03 %	13,37 %	12,76 %	12,97%
P	Jasa Pendidikan	3,09%	3,05%	2,98%	3,01%	2,75%	2,98%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,66%	2,63%	2,62%	2,97%	3,03%	2,78%
R,S,T, U	Jasa lainnya	1,76%	1,75%	1,76%	1,82%	1,83%	1,78%
<b>PDRB</b>		<b>100 %</b>	<b>100%</b>				

Sumber: BPS Provinsi Papua



Distribusi persentase PDRB ADHB terbesar menurut lapangan usaha tahun 2021 di Provinsi Papua pada sektor Konstruksi 19,85%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 14,66%, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,11%.

### **2.2.3. Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada : (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

#### **2.2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

##### **A. Urusan Pendidikan**

###### **1) Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 2.40  
**Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua**

No	Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)								
		7-12			13-15			16-18		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Kota Jayapura	97.76	97.75	98.03	97.94	98.07	97.69	92.78	92.21	97.12
2.	Jayapura	96.36	95.92	95.95	94.70	94.63	95.23	83.75	82.25	84.32
3.	Keerom	90.83	90.74	89.40	89.09	88.82	88.74	74.93	70.33	77.88
4.	Sarmi	92.97	92.95	91.02	91.33	91.00	91.38	72.08	71.99	71.75
5.	Mamberamo Raya	97.41	97.41	96.44	96.11	96.27	96.57	64.91	68.94	68.88
6.	Kepulauan Yapen	94.69	94.67	93.78	95.90	95.03	95.12	78.06	78.73	78.86
7.	Biak Numfor	94.77	97.62	97.50	97.49	97.96	97.47	82.48	84.96	89.11
8.	Waropen	93.21	96.87	96.52	94.10	93.71	93.45	79.00	77.72	78.60
9.	Supiori	94.54	96.57	96.20	91.93	92.19	92.11	77.03	76.55	76.46
<b>Provinsi Papua</b>		<b>94.73</b>	<b>95.61</b>	<b>94.98</b>	<b>94.29</b>	<b>94.19</b>	<b>94.20</b>	<b>78.34</b>	<b>78.19</b>	<b>80.33</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

## 2) Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Provinsi Papua terdiri dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi. Jumlah TK/RA yang terdapat di Provinsi Papua sebanyak 237 unit, SD/MI sebanyak 849 unit, SMP/MTs sebanyak 279 unit, SMA/SMK/MA sebanyak 168 unit dan Perguruan Tinggi sebanyak 30 unit.

Tabel 2.41  
**Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua (unit), 2021/2022				
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT
1.	Jayapura	52	141	50	34	5
2.	Kepulauan Yapen	14	124	36	18	3
3.	Biak Numfor	18	167	55	26	6



No	Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua (unit), 2021/2022				
		TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	PT
4.	Sarmi	6	65	19	9	0
5.	Keerom	51	81	20	13	0
6.	Waropen	2	54	18	8	0
7.	Supiori	29	40	13	8	0
8.	Mamberamo Raya	2	71	20	6	0
9.	Kota Jayapura	63	106	48	46	16
<b>Total</b>		<b>237</b>	<b>849</b>	<b>279</b>	<b>168</b>	<b>30</b>

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2020

Gambar 2.20  
**Kondisi Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua**



### 3) Perkembangan Guru dan Murid

Jumlah guru di Provinsi Papua stabil dari tahun 2021 sampai 2022. Pada tahun 2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua mencapai 17.543 dan mengalami peningkatan menjadi 17.859 pada tahun 2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan guru di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.42  
**Perkembangan Guru di Provinsi Papua**

No	Kabupaten / Kota	Negeri		Swasta		Total (Negeri+Swasta)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Jayapura	1.708	1.756	1.592	1.542	3.300	3.298
2.	Kepulauan Yapen	962	1022	679	745	1641	1767
3.	Biak Numfor	1.497	1.493	1340	1343	2.837	2.836
4.	Sarmi	582	622	274	250	856	872
5.	Keerom	964	1033	502	485	1466	1518
6.	Waropen	528	499	175	175	703	674
7.	Supiori	443	490	182	202	625	692
8.	Mamberamo Raya	287	358	64	71	351	429
9.	Kota Jayapura	2.930	3.009	2.834	2.764	5.764	5.773
<b>Total</b>						<b>17.543</b>	<b>17.859</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Jumlah murid di Provinsi Papua stabil dari tahun 2021 sampai 2022. Pada tahun 2021 jumlah murid yang tersedia di Provinsi Papua mencapai 226.845 dan mengalami peningkatan menjadi 229.344 pada tahun 2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan murid di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43  
**Perkembangan Murid di Provinsi Papua**

No	Kabupaten/Kota	Negeri		Swasta		Total (Negeri+Swasta)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Jayapura	22.787	23.284	18.785	19.096	41.572	42.380
2	Kepulauan Yapen	14.475	14.503	12.337	13.170	26.812	27.673
3	Biak Numfor	22.936	23.008	17.080	17.094	40.016	40.102
4	Sarmi	7.360	7.626	3.891	3.842	11.251	11.468
5	Keerom	11.139	11.274	5.264	4.970	16.403	16.244



No	Kabupaten/Kota	Negeri		Swasta		Total (Negeri+Swasta)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
6	Waropen	5.959	6.024	1.837	1.796	7.796	7.820
7	Supiori	5.123	5.148	2.709	2.712	7.832	7.860
8	Mamberamo Raya	7.460	7.502	1.006	952	8.466	8.454
9	Kota Jayapura	38.890	39.537	27.807	27.806	66.697	67.343
Total						226.845	229.344

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

## B. Urusan Kesehatan

### 1) Angka Kematian bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2.44  
Angka Kematian Bayi

No	Kabupaten / Kota	Angka Kematian Bayi		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah kematian bayi	Jumlah kelahiran hidup	Per 1000 KH
1.	Jayapura	12	2.041	6
2.	Kepulauan Yapen	37	2.010	18
3.	Biak Numfor	14	1.453	10
4.	Sarmi	0	235	0
5.	Keerom	13	793	16
6.	Waropen	2	30	67
7.	Supiori	3	387	8
8.	Mamberamo Raya	0	86	0
9.	Kota Jayapura	10	4.955	2
10.	Provinsi Papua (Akumulasi 29 Kab/Kota)	373	33.589	11

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021





Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua merupakan akumulasi dari 29 Kab/kota.

## 2) Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab- sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Tabel 2.45  
**Angka Kematian Ibu**

No	Kabupaten / Kota	Angka Kematian Ibu		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah kematian ibu	Jumlah kelahiran hidup	Per 100.000 KH
1.	Jayapura	4	2041	196
2.	Kepulauan Yapen	3	2010	149
3.	Biak Numfor	2	1453	138
4.	Sarmi	0	235	0
5.	Keerom	4	793	504
6.	Waropen	1	30	3333
7.	Supiori	1	387	258
8.	Mamberamo Raya	0	86	0
9.	Kota Jayapura	4	4955	81
10.	Provinsi Papua (Akumulasi 29 Kab/Kota)	78	33589	232

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021



Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2021 angka kematian ibu mencapai angka 232 (Akumulasi dari 29 Kab/Kota )

### 3) Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Provinsi Papua meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik dan puskesmas. Rumah sakit di Provinsi Papua sebanyak 20 unit, rumah sakit bersalin 2, poliklinik sebanyak 25 unit dan puskesmas sebanyak 118 unit (Akumulasi dari 9 Kab/Kota). Rincian fasilitas kesehatan di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.46  
**Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua**

No.	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan 2021			
		RS	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas
1.	Jayapura	1	2	7	21
2.	Kepulauan Yapen	1	0	2	15
3.	Biak Numfor	4	0	2	21
4.	Sarmi	1	0	2	11
5.	Keerom	0	0	2	9
6.	Waropen	2	0	1	11
7.	Supiori	2	0	0	5
8.	Mamberamo Raya	1	0	0	11
9.	Kota Jayapura	8	0	9	14
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>118</b>

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2020



Gambar 2.21  
**Kondisi Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua**



#### 4) Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan ibandingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut WHO stunting atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat. Gambaran prevalensi angka stunting Provinsi Papua dari tahun 2018 – 2022 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.47  
**Prevalensi Balita Stunting**

Tahun	Prevalensi Stunting (%)	Keterangan
2018	33,1	Survei SSGI terhambat, akibat dampak Covid 19
2019	29,4	
2020	- (NA)	
2021	29,5	
2022	34,6	



Sumber : SSGI, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, 2023

NA : Not Available (Tidak Tersedia)

### C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1) Jaringan Jalan

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Provinsi Papua yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Jayapura dengan total 384,1 km (31,42%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Kabupaten Sarmi merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua dengan 37,7 km (3,08%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48  
**Panjang Jalan di Provinsi Papua (km)**

Kab/Kota	Panjang Jalan (Km)		
	Aspal	Lainnya	Total
Jayapura	178	206.1	384.1
Kepulauan Yapen	58	117.01	175.01
Biak Numfor	164.4	7.6	172
Sarmi	0	37.7	37.7
Keerom	12	79.8	91.8
Waropen	45.5	57	102.5
Supiori	30	49.21	79.21
Mamberamo Raya	0	75.6	75.6
Kota Jayapura	96.38	8	104.38
<b>Provinsi Papua</b>	<b>584.28</b>	<b>638.02</b>	<b>1.222.3</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023 (Data diolah)

#### 2) Penyelenggaraan Penataan Ruang



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik tingkat nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP) maupun RTRW kab/kota. Tujuan RTRW merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dan yang terpenting adalah, RTRW menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang.

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Papua sampai tahun 2022 sudah menunjukkan hasil yang maksimal salah satunya adalah indikator capaian ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW mencapai 94% dan terbentuknya Forum Penataan Ruang Daerah Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi Papua telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2013-2033. Tahun 2023 telah dilakukan Revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nomor 23 Tahun 2013 yang salah satunya adalah melakukan penyesuaian terhadap terbentuk 3 (tiga) DOB baru yaitu Provinsi Papua Selatan dengan UU Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah dengan UU Nomor 15 Tahun 2022 dan Provinsi Papua Pegunungan dengan UU Nomor 16 Tahun 2022. Untuk itu Pemerintah Provinsi Papua melakukan Revisi RTRW hanya mengakomodir 9 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penataan ruang tahun 2013-2022 dapat diidentifikasi permasalahan penyelenggaraan ruang di Provinsi Papua adalah: 1). belum terintegrasinya Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW, 2). terjadinya tumpang tindih antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota, 3). tumpang tindih antara RTRW dengan Perijinan, 4). Permasalahan batas administrasi provinsi maupun kabupaten/kota, 5). RTRW belum menjadi acuan dalam pembangunan maupun perijinan.

### 3) Status RTRW dan RDTR Provinsi, Kabupaten/Kota di Papua



Berdasarkan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang khususnya Implementasi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota dan kurangnya kesadaran pemerintah daerah terkait penyiapan dokumen rencana tata ruang sehingga ketersediaan dokumen Rencana Umum maupun Rencana Detail Tata Ruang masih sangat kurang. Hal ini membuat pelaksanaan pembangunan dan perijinan/investasi di provinsi maupun kabupaten/kota di Papua belum berjalan dengan maksimal. Adapun progress status RTRW dan RDTR Provinsi, Kabupaten/Kota di Papua sebagai berikut :

Tabel 2.49  
**Status RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota Dan RDTR**

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	STATUS RTRW		STATUS RDTR	KETERANGAN
		PERDA	REVISI PERDA		
1.	Provinsi Papua	Perda No. 23 Tahun 2013	Proses Persetujuan Substansi & Penetapan RTRW	-	-
2.	Jayapura	Perda 21 Tahun 2009	Proses Penyusunan	Perkada 24 Tahun 2021 tentang RDTR Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041	sudah terintegrasi dengan Online Single Submissin (OSS)
3.	Keerom	Perda 16 Tahun 2013	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan RDTR Perkotaan Arso Swakarsa & RDTR Perkotaan Yowong	-
4.	Sarmi	Perda 2 Tahun 2013	-	-	-
5.	Mamberamo Raya	Perda 2 Tahun 2015	-	Proses Penyusunan RDTR Perkotaan Burmeso-Kasonaweja	-
6.	Waropen	Perda 2 Tahun 2012	-	-	-
7.		Perda 15 Tahun 2013	Proses Penyusunan	-	-
8.	Biak Numfor	Perda 11	Proses	Proses	





NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	STATUS RTRW		STATUS RDTR	KETERANGAN
		PERDA	REVISI PERDA		
		Tahun 2011	Penyusunan	Penetapan PERKADA RDTR Perkotaan Biak	
9.	Supiori	Perda 4 Tahun 2013	-	-	
10.	Kota Jayapura	Perda 1 Tahun 2014	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan RDTR Perkotaan Abepura & RDTR Jayapura Selatan	

Sumber : Inventarisasi Status RTRW maupun RDTR Provinsi, Kab/Kota Tahun 2022

#### D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Terdapat akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua semenjak tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 500 unit. Adapun jumlah rumah layak huni selama tahun 2017 – 2021 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.





Tabel 2.50  
**Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2022**

No.	KABUPATEN / KOTA	RUMAH SWADAYA (UNIT)							RUMAH KHUSUS (UNIT)							BANTUAN PSU	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
1.	Biak Numfor	300	320	450	160	100	-	35	87	25	10	-	-	-	-	-	-
2.	Jayapura	200	-	725	431	261	66	162	50	25	25	-	12	-	-	60	92
3.	Keerom	-	-	615	190	100	129	177	-	-	-	25	-	-	-	-	-
4.	Kepulauan Yapen	-	-	290	166	250	165	165	110	25	-	-	-	-	20	-	-
5.	Mamberamo Raya	-	270		70	150	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
6.	Sarmi	-	200		196	185	-	-	-	10	-	-	20	-	-	-	-
7.	Supiori	200	550		180	100	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
8.	Waropen	-	190	160	170	250	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-
9.	Kota Jayapura	300	150	460	205	444	20	550	-	-	-	-	-	-	-	235	454
<b>Total Unit Per/Tahun</b>		<b>1000</b>	<b>1680</b>	<b>2700</b>	<b>1768</b>	<b>1840</b>	<b>380</b>	<b>1089</b>	<b>247</b>	<b>129</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>295</b>	<b>546</b>

Sumber : data RTLH dari aplikasi e-RTLH yang sudah di input oleh Kabupaten/ Kota (Periode 12 September 2022)



## **E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pengamanan di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat

## **F. Urusan Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.



## 2.2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

### A. Urusan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk di atas 15 tahun pada Provinsi Papua mencapai 652,046 jiwa, yang terdiri dari 597,410 jiwa angkatan kerja atau sebanyak 61,10% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 218,902 bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada Provinsi Papua mencapai 34,484 jiwa atau sebanyak 5,77% dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kota Jayapura memiliki jumlah penduduk di atas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua dengan jumlah mencapai 241,422 jiwa, yang terdiri dari 210,625 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,75% dan 87,522 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kota Jayapura mencapai 11,67%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua berada pada Kabupaten Keerom. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten Keerom mencapai 76,91% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 1,41%. Kota Jayapura memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Provinsi Papua. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kota Jayapura mencapai 11,67% atau sebanyak 17,961 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua dapat melihat tabel berikut

Tabel 2.51  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tahun 2021**

Jenis Kegiatan Utama		Penduduk 15+	Angk. Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angk. Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1.	Jayapura	97,424	90,845	618	5,208	31,208	67,97	7,87
2.	Kep. Yapen	71,762	64,755	44,751	1,134	25,877	63,94	2,47
3.	Biak Numfor	111,388	109,947	70,036	7,344	348	69,47	9,49
4.	Sarmi	30,202	28,329	19,984	725	9,493	68,57	3,50
5.	Keerom	44,430	47,019	33,690	481	10,259	76,91	1,41
6.	Waropen	23,870	179	12,309	1,152	10,409	56,39	8,56
7.	Supiori	14,575	14,270	9,726	266	4,583	68,56	2,66



Jenis Kegiatan Utama		Penduduk 15+	Angk. Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angk. Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
8.	Mamberamo Raya	16,973	14,611	10,962	213	5,543	66,84	1,91
9.	Kota Jayapura	241,422	210,625	135,939	17,961	87,522	63,75	11,67
<b>Provinsi Papua</b>		<b>652,046</b>	<b>597,410</b>	<b>398,405</b>	<b>34,484</b>	<b>218,902</b>	<b>61.10</b>	<b>5.77</b>

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua (BPS Provinsi Papua)

## B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua mencapai 12,918 jiwa atau sebesar 47,69% dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Papua. Kota Jayapura merupakan wilayah dengan jumlah pegawai negeri sipil perempuan tertinggi, yaitu mencapai 2.592 atau sebesar 20.07% pegawai negeri sipil perempuan berasal dari Kota Jayapura. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang berada di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2020**

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jayapura	1.970	2.384	4.354
2.	Kepulauan Yapen	2.036	1.539	3.575
3.	Biak Numfor	2.193	2.081	4.274
4.	Sarmi	1.247	910	2.157
5.	Keerom	1.474	1.277	2.751
6.	Waropen	1.217	742	1.959
7.	Supiori	1.304	958	2.262
8.	Mamberamo raya	1.003	435	1.438
9.	Kota Jayapura	1.725	2.592	4.317
<b>Provinsi Papua</b>		<b>14.169</b>	<b>12.918</b>	<b>27.087</b>

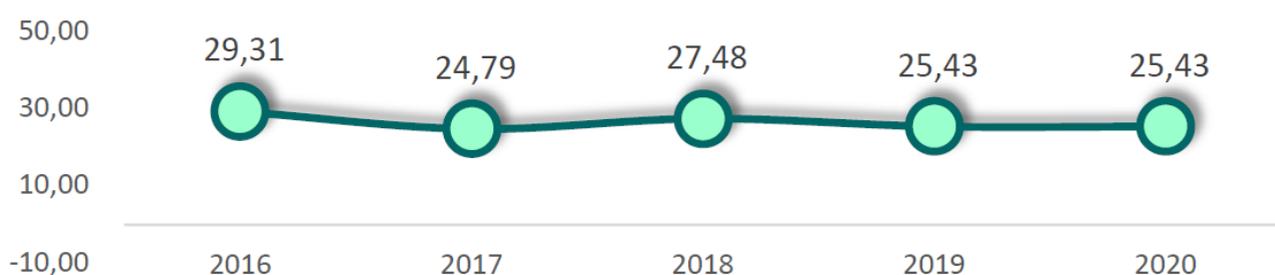
Sumber: BPS Provinsi Papua



### C. Urusan Pangan

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 Kkal/Kapita/Hari tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 sebesar 29,3, turun menjadi 24,79 di tahun 2017. Kemudian meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 27,48 selanjutnya kembali menurun hingga tahun 2020 menjadi 25,43.

Gambar 2.22  
**Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS RI,2022

Untuk konsumsi kedelai atau setara kedelai pada tahun 2020 sebesar 2,23 kg/kapita/tahun untuk Tahu, sementara konsumsi tempe sebesar 1,65 kg/kapita/tahun dan untuk kecap sebesar 0,34 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.53  
**Konsumsi kedelai yang terdapat pada tahu, tempe dan kecap di Provinsi Papua Tahun 2020**

Uraian	Konsumsi setara kedelai (kg/kapita/tahun)			
	Tahu	Tempe	Kecap	Total
Papua	2,23	1,65	0,34	4,22
Indonesia	2,78	3,64	0,74	7,17

Sumber : BPS RI,2022

Selanjutnya bila dilihat pertahunnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 3,42 kg/kapita/tahun, meningkat menjadi 3,66 kg/kapita/tahun dan pada



tahun 2020 meningkat menjadi 4,22 kg/kapita/tahun, dengan laju pertumbuhan sebesar 11,09 per tahun.

Tabel 2.54  
**Konsumsi total setara kedelai (tahu, tempe dan kecap)  
per Provinsi Tahun 2018 – 2020**

Uraian	Konsumsi setara kedelai (kg/kapita/tahun)			Pertumbuhan
	2018	2019	2020	
Papua	3,42	3,66	4,22	11,09
Indonesia	7,51	7,14	7,17	-2,29

Sumber : BPS RI,2022

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Dimana angka tertinggi pada tahun 2018 sebesar 15,12 dan yang terendah pada tahun 2021 sebesar 7,58.

Gambar 2.55  
**Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat,  
Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan  
Tahun 2017-2021 (Persen)**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	9,85	15,12	10,98	8,68	7,58
Indonesia	8,66	6,86	5,42	5,12	4,79

Sumber : BPS RI,2022

Selanjutnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di provinsi papua sepanjang tahun 2017-2020 juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2017 sebesar 34,27 meningkat menjadi 37,37 di tahun 2021, meskipun pada tahun 2018 sempat mencapai 38,35.



Tabel 2.56  
**Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021 (Persen)**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	34,27	38,35	38,21	31,49	37,37
Indonesia	8,23	7,92	7,63	8,34	8,49

Sumber : BPS RI, 2022

#### D. Urusan Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Pada tahun 2015, program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pertanahan adalah Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan Basis Data Pertanahan sesuai dengani bidang tanah/persil/kapling di tingkat Kelurahan, pengoperasian Program Data Pertanahan serta pemberian pelatihan kepada staf kelurahan

Capaian Kegiatan PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Pelaksanaan PTSL di Papua sampai dengan tahun 2019 mampu merealisasikan sebanyak 128.701 bidang Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) atau sebesar 87.70% dari target 146.750





Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian tanah yang bersumber dari Objek Redistribusi Tanah kepada Subjek Redistribusi Tanah dengan pemberian tanda bukti hak (sertipikat). Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Papua telah dilaksanakan walaupun didalam pelaksanaannya tidak terlalu optimal dikarenakan tantangan di Provinsi Papua yang untuk beberapa kasus terhadap tanah bekas hak (HGU), apabila jangka waktunya habis akan kembali kepada masyarakat adat sebagaimana menurut hukum adat yang berlaku. Untuk Target pada Tahun 2019 sebesar 11.000 bidang Tanah dan realisasinya sebesar 8.505 atau sebesar 77,31%. Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Papua sampai Tahun 2019 telah dilaksanakan Kabupaten/Kota secara stimultan dengan realisasi sebanyak 7.639 bidang. Pengadaan tanah di Provinsi Papua untuk kepentingan umum berupa pengadaan Tanah untuk infrastruktur melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik program PSN maupun Non PSN di Papua sampai dengan tahun 2019. Pelaksanaan pengadaan di Satker Papua yaitu Perluasan PLBN RI – PNG di Skow Kota Jayapura, Stadion Kriket di Bambar Kabupaten Jayapura, Stadion Hoki Indoor di Kabupaten Jayapura, Lokasi Pembangunan Wisma Atlet PON di Kota Jayapura dan Arena Sirkuit Bermotor di Kabupaten Merauke.

Capaian penanganan permasalahan pertanahan tahun 2019 yang mencakup penanganan sengketa, perkara dan layanan pengaduan pada umumnya masih dibawah target, sehingga diupayakan pada Tahun 2019-2024 untuk kegiatan-kegiatan pada penyelenggaraan penanganan masalah agraria dan tata ruang di daerah lebih didasarkan dari kemampuan masing-masing satuan kerja yang ditinjau dari segi SDM dan infrastruktur lainnya, dan yang lebih penting lagi harus bottom-up. Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 7.057 ha yang dialihkan turun menjadi 5.887 ha yang dialihkan pada tahun 2017, dimana peralihan tanah paling banyak adalah jual-beli sebanyak 6.208 ha ditahun 2016 dan 5.211 ha ditahun 2017.



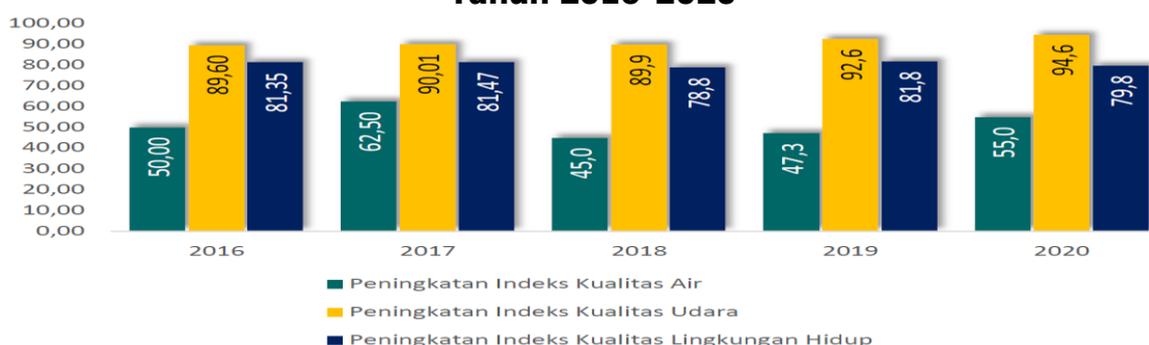
Tabel 2.57  
**Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)**

Tahun	Jual-beli	Pewarisan	Hibah	Tukar menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7.057
2017	5.211	451	197	3	25	5.887

## E. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting di Provinsi Papua ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua, yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dalam gambar di bawah ini diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Papua memiliki trend dengan pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu dari 81,36 menjadi 79,80 di tahun 2020. Adapun Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki trend yang cenderung meningkat yaitu dari 89,60 poin menjadi 94,6 poin di tahun 2020. Selanjutnya kontribusi IKA yaitu 50 poin di tahun 2016 dan meningkat menjadi 79,8 poin di tahun 2020.

Gambar 2.23  
**Indeks Kualitas Air, Udara dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016-2020**



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (data diolah, 2021)



## F. Urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase Penduduk usia 0-17 Tahun yang memiliki akte kelahiran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua tahun 2020 rata-rata sudah diatas 50%. Namun terdapat satu Kabupaten dengan persentase dibawah 50% yaitu Kabupaten Mamberamo Raya.

Tabel 2.58  
**Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Akte Kelahiran, 2020**

No	Kabupaten / Kota	Persentase (%)
1.	Jayapura	75.94
2.	Kepulauan Yapen	60.91
3.	Biak Numfor	58.93
4.	Sarmi	73.28
5.	Keerom	76.88
6.	Waropen	78.87
7.	Supiori	68.54
8.	Mamberamo Raya	11.16
9.	Kota Jayapura	90.49

Sumber: Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua, BPS

Selain kepemilikan terhadap akta kelahiran, persentase penduduk berbasis NIK di salah satu Kabupaten terlihat masih rendah di Papua. Sampai dengan tahun 2020, tercatat persentase penduduk yang memiliki KTP rata-rata sudah diatas 80%. Sampai dengan tahun 2020 juga tercatat salah satu daerah dengan kepemilikan KTP terbilang rendah yaitu kurang dari 50% adalah Kabupaten Mamberamo Raya.

Tabel 2.59  
**Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020**

No	Kabupaten / Kota	Persentase Kepemilikan NIK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jayapura	86.98	86.68	86.84
2	Kepulauan Yapen	84.86	83.41	84.16
3	Biak Numfor	89.47	88.69	89.09





No	Kabupaten / Kota	Persentase Kepemilikan NIK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
4	Sarmi	88.47	88.75	88.59
5	Keerom	82.25	84.46	83.24
6	Waropen	87.94	87.69	87.82
7	Supiori	99.42	98.84	99.15
8	Mamberamo Raya	39.72	41.12	40.36
9	Kota Jayapura	94.95	95.6	95.24

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

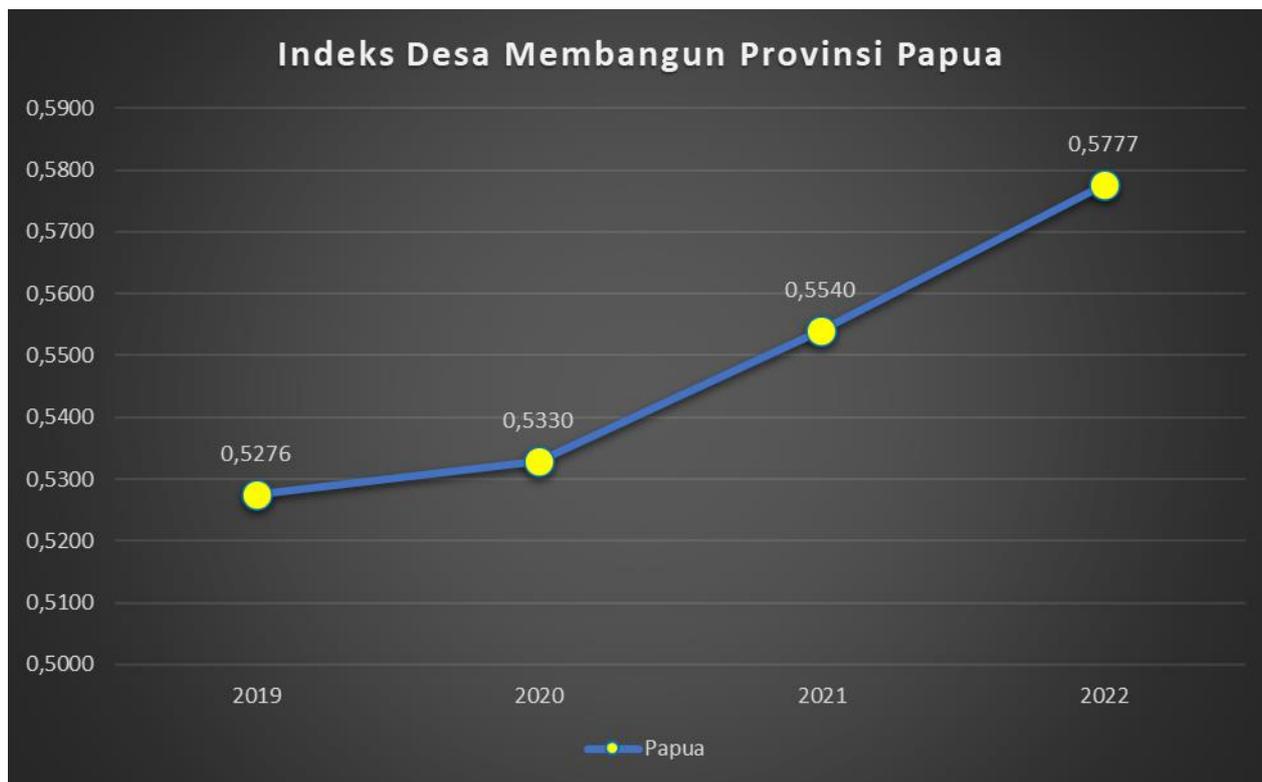
## G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak pada 2022. Hal itu tecermin dari rata-rata indeks desa membangun (IDM) di Papua nilainya paling rendah di antara provinsi yang lain, yakni 0,5777.

Angka tersebut meningkat sebesar 1,04% dibandingkan tahun 2021 dengan rata-rata IDM sebesar 0,5540. Hingga 2022, sebanyak 3.604 atau 66,6% desa di Papua berstatus sebagai desa sangat tertinggal dari total 5.411 desa yang ada di wilayah tersebut. Sisanya sebanyak 1.464 atau 27,05% merupakan desa tertinggal, 316 desa atau 5,8% berstatus berkembang, 26 desa atau 0,48% berstatus maju, dan hanya 1 desa berstatus sebagai desa mandiri.



Gambar 2.25  
**Indeks Desa Membangun Provinsi Papua**



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, (data diolah)

Catatan : Data Provinsi Papua (9 Kabupaten/Kota)

Tabel 2.60  
**Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar)**

Tahun	Uraian	Dana Desa	Total TKDD	% DD Terhadap TKDD
2020	Anggaran	964.17	7817.78	12.33
	Realisasi	964.14	7765.70	12.42
	Realisasi Capaian	100.00	99.33	100.67
2021	Anggaran	985.10	7807.25	12.62
	Realisasi	983.54	7735.30	12.71
	Realisasi Capaian	99.84	99.08	100.77
2022	Anggaran	802.71	9218.91	8.71
	Realisasi	802.12	9576.53	8.38
	Realisasi Capaian	99.93	103.88	96.19

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2021, (data diolah)



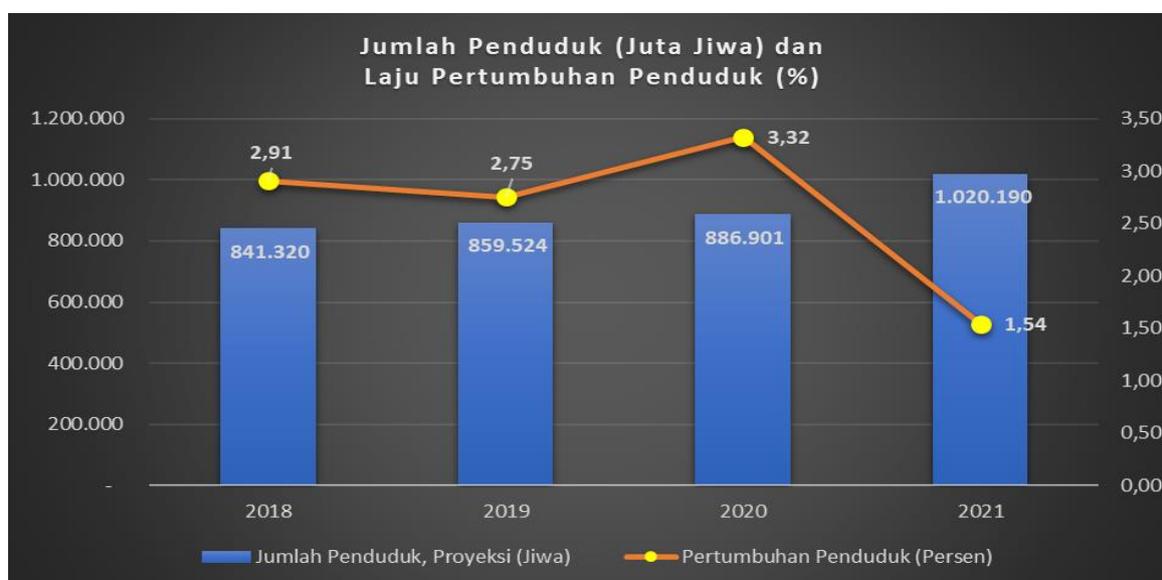
Catatan: Data Provinsi Papua (9 Kab/Kota)

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya. Sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan Desa tahun sebelumnya.

## H. Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

### 1) Pengendalian Penduduk

Gambar 2.25  
**Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)**



Sumber: BPS Provinsi Papua

Catatan: Data Provinsi Papua (9 Kab/Kota)



Gambar 2.26  
**Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang)**



Sumber: BPS Provinsi Papua  
2) Keluarga Berencana

Tabel 2.61  
**Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa)**

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jayapura	22,729	24,189	13,814	1,143	1,865
2	Kepulauan Yapen	5,113	7,474	478	5,209	6,426
3	Biak Numfor	13,378	15,189	18,031	1,653	7,568
4	Sarmi	514	1,354	19,093	19,093	7,901
5	Keerom	2,863	4,588	6,824	8,225	8,984
6	Waropen	865	2,340	5,602	5,977	7,179
7	Supiori	463	651	876	889	76
8	Mamberamo Raya	961	171	299	907	907
9	Kota Jayapura	60,326	33,394	48,066	46,727	50,876
<b>Provinsi Papua</b>		<b>107,212</b>	<b>89,350</b>	<b>113,083</b>	<b>89,823</b>	<b>91,782</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua



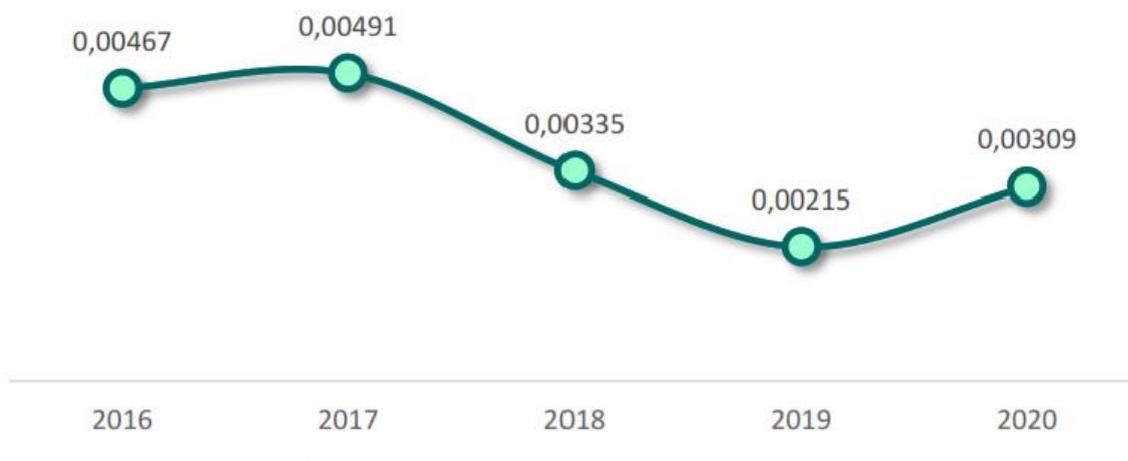
## I. Urusan Perhubungan

### 1) Transportasi Darat

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 rata-rata perbandingan Panjang jalan dengan kendaraan bermotor adalah 1 km/467 unit kendaraan, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2020 sebesar 1 km/309 unit kendaraan bermotor. Dalam pelayanan transportasi darat di Provinsi Papua, terdapat 5 terminal tipe C, yaitu:

- ✦ Entrop di Kota Jayapura;
- ✦ Wamenadi Kabupaten Jayawijaya;
- ✦ Oyehe di Kabupaten Paniai;
- ✦ Merauke di Kabupaten Merauke; dan
- ✦ Biak di Kabupaten Biak Numfor.

Gambar 2.27  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua  
Tahun 2016-2020 (km/unit)**



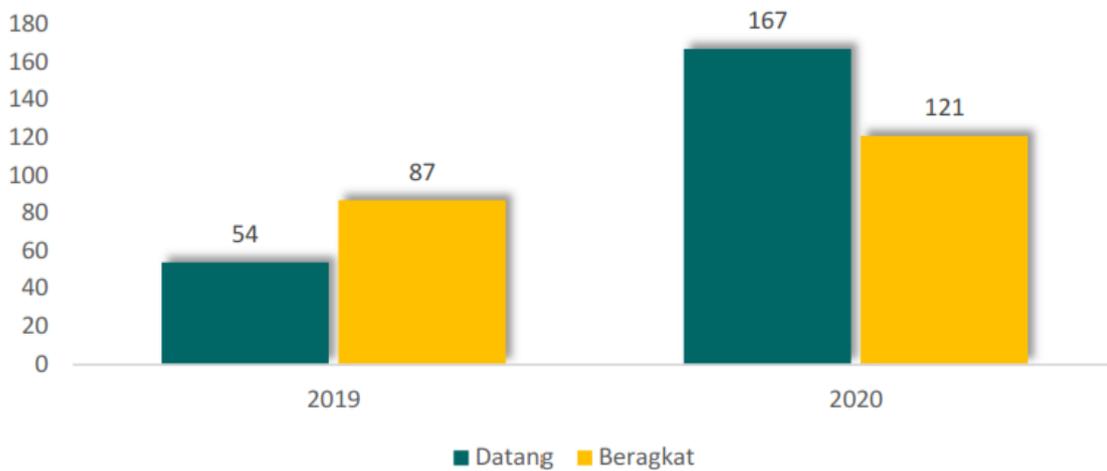
Sumber: BPS Provinsi Papua



## 2) Transportasi Udara

Jumlah penumpang internasional berdasarkan moda transportasi pesawat terbang di Provinsi Papua mengalami lonjakan dari tahun 2019 sebanyak 54 penumpang meningkat di tahun 2020 menjadi 167 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 87 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 121 penumpang yang berangkat.

Gambar 2.28  
**Jumlah Penumpang Internasional Berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (orang)**

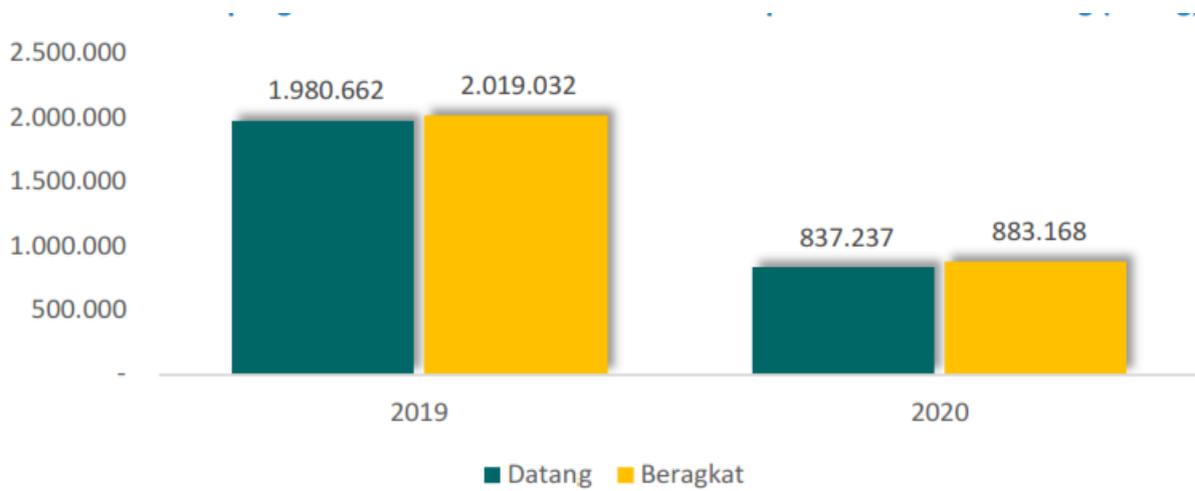


Sumber: BPS RI, 2022

Berbeda dengan jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi pesawat terbang di Provinsi Papua yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 1.980,66 penumpang turun di tahun 2020 menjadi 837,23 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 2.019,03 penumpang yang berangkat turun menjadi 883,16 penumpang yang berangkat.



Gambar 2.29  
**Jumlah Penumpang Domestik  
Berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (orang)**



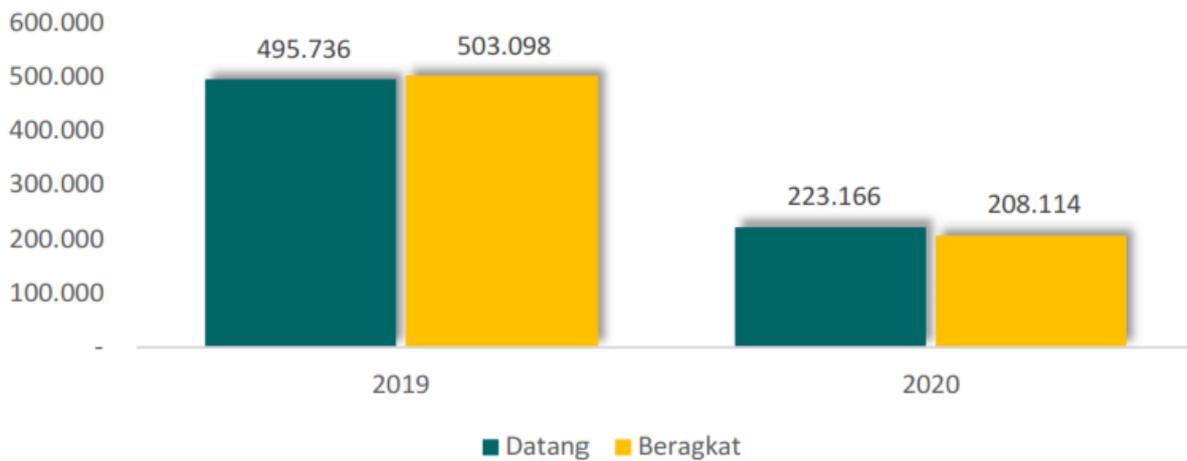
Sumber: BPS RI, 2022

### 3) Transportasi Laut

Jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi kapal di Provinsi Papua mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 495,73 penumpang turun di tahun 2020 menjadi 223,16 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 503,09 penumpang yang berangkat turun menjadi 208,114 penumpang yang berangkat menggunakan kapal laut.



Gambar 2.30  
**Jumlah Penumpang Domestik Berdasarkan Moda Transportasi Kapal (orang)**



Sumber: BPS RI, 2022

## J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Gambar 2.31  
**Persentase Penduduk dan Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler**



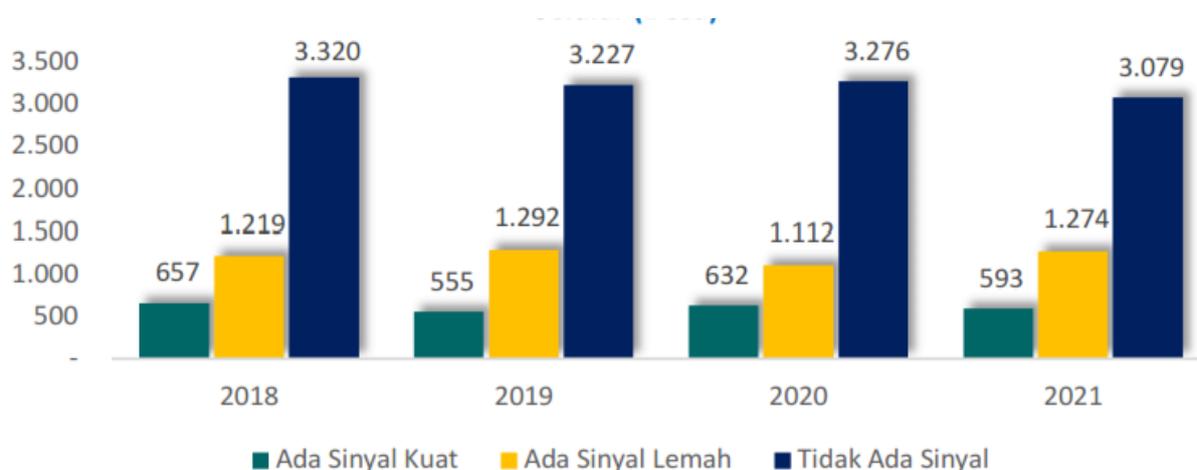
Sumber : BPS RI, 2022

Catatan : Belum dipisah 29 Kab/Kota



Persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon seluler juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 50,37% meningkat ditahun 2021 menjadi 55,59%. Demikian halnya dengan presentasi penduduk memiliki/menguasai telepon seluler juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 36,31% meningkat menjadi 38,94% pada tahun 2021. Demikian halnya dengan presentasi penduduk memiliki/menguasai telepon seluler juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 36,31% meningkat menjadi 38,94% pada tahun 2021

Gambar 2.32  
**Banyaknya Desa/Kelurahan Yang memiliki Menara BTS Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Seluler (Desa)**



Sumber : BPS RI, 2022

Sedangkan jumlah desa/kelurahan yang memiliki menara BTS menurut penerimaan sinyal telepon selular, mengalami penurunan penerimaan sinyal kuat dimana pada tahun 2018 sebanyak 657 desa dan pada tahun 2021 turun menjadi 593 desa.



Gambar 2.33  
**Banyaknya Desa/Kelurahan Yang memiliki Menara BTS (Desa)**



Sumber : BPS RI, 2022

Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki menara Base Transceiver Station (BTS) di desa mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2018 sebanyak 356 desa yang memiliki BTS mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 609 desa yang memiliki BTS.

Gambar 2.34  
**Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah (Desa)**



Sumber : BPS RI, 2022

Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor desa mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 270 desa meningkat menjadi 363 desa di tahun 2021.



Gambar 2.35  
**Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki/Menguasai Komputer**

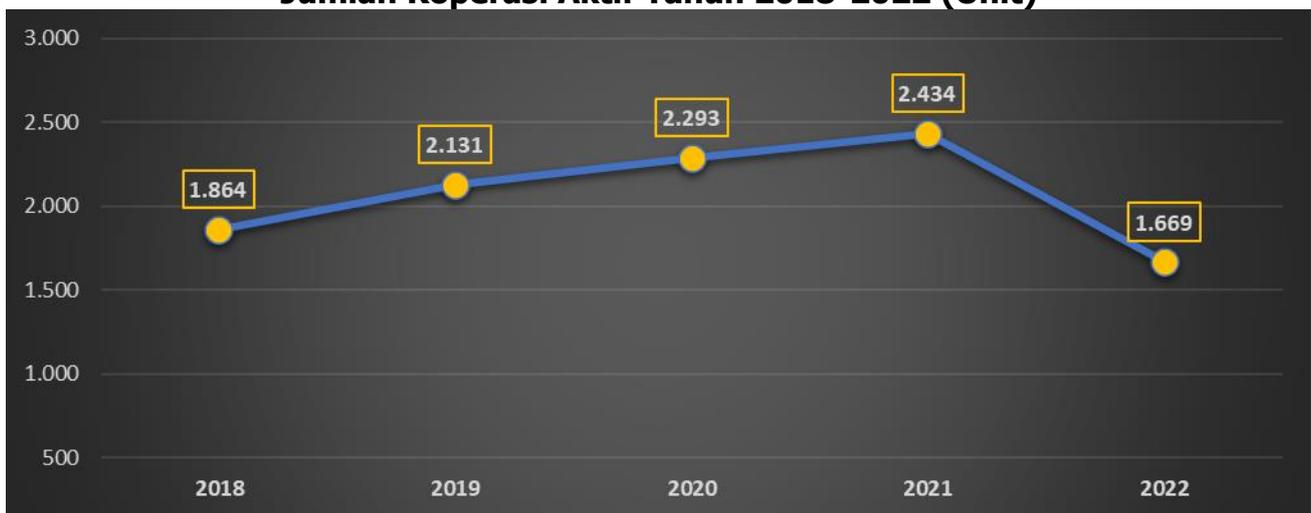


Sumber : BPS RI, 2022

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa presentasi Rumah Tangga yang memiliki/menguasai computer mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 sebanyak 12,87% turun menjadi 9,61% pada tahun 2021.

### K. Urusan Koperasi Usaha kecil dan menengah

Gambar 2.36  
**Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2018-2022 (Unit)**



Sumber: BPS RI, 2018-2021 dan Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi,Ukm dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, 2022



Tabel 2.62  
**Koperasi Aktif, Tidak Aktif dan Persentase Koperasi Aktif 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Koperasi			
		Aktif	Tidak Aktif	Total	%
1	Jayapura	91	129	220	41.36
2	Kepulauan Yapen	40	106	146	27.40
3	Biak Numfor	74	188	262	28.24
4	Sarmi	33	4	37	89.19
5	Keerom	55	80	135	40.74
6	Waropen	18	12	30	60.00
7	Supiori	37	4	41	90.24
8	Mamberamo Raya	18	5	23	78.26
9	Kota Jayapura	90	146	236	38.14
<b>Provinsi Papua</b>		<b>456</b>	<b>674</b>	<b>1130</b>	<b>40.35</b>

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Ukm dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, (Data Diolah 2023)

#### L. Urusan Penanaman Modal

Sepanjang tahun 2017-2021 jumlah investor PMA di Provinsi Papua mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2021 jumlah investor PMA adalah sebanyak 95 proyek. Selain itu, realisasi investasi PMA dinilai sangat tinggi. Realisasi investasi PMA adalah sebesar 1,49 miliar US\$.

Tabel 2.63  
**Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Tahun 2017-2021  
(Unit)(Juta US\$)**

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Juta US\$)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	135	102	127	184	95	1.924	1.132	941	568	1.489
Indonesia	26.257	21.972	30.354	56.726	27.271	32.240	29.308	28.209	28.666	31.093

Sumber: BPS RI, 2022



Selanjutnya realisasi penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dimana sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.218 unit proyek dengan nilai investasi mencapai 911 miliar rupiah.

Tabel 2.64  
**Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri  
Tahun 2017-2021 (Unit) (Milyar Rupiah)**

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (juta Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	33	23	68	323	473	1.218	105	568	2 722,2	911
Indonesia	8.838	10.815	30.451	96.623	106.002	262.351	328.605	386.498	413.536	447.064

Sumber: BPS RI, 2022

## M. Urusan Kepemudaan dan olahraga

### 1) Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan

Dengan semakin banyaknya event olahraga baik pada tingkat kabupaten, nasional maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir tercatat klub olahraga di Provinsi Papua juga kian bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan klub-klub olahraga berbagai cabang olahraga sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata bertumbuh sebesar 3,41% per tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan tercatat klub olahraga di Provinsi Papua ada 130 klub dengan berbagai macam cabang. Jumlah tenaga dan keolahragaan yang berkualitas Provinsi Papua secara konsisten juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 223 orang tenaga keolahragaan dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 365 orang. Bertambahnya klub-klub olahraga tersebut diikuti dengan semakin bertambahnya atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga baik pada ajang kabupaten, nasional maupun internasional dalam waktu beberapa tahun terakhir ini.



Tabel 2.65  
**Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga	31	36	42	45	45
Jumlah atlet berprestasi	115	495	401	500	650
Jumlah club olahraga	114	125	129	130	130
Jumlah tenaga keolahragaan	223	253	275	365	365

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

## 2) Organisasi Kepemudaan

Dari 4 (empat) indikator di atas 3 (tiga) indikator pemberdayaan pemuda mengalami peningkatan yang positif diantaranya adalah Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina dan Jumlah Organisasi Pemuda. Sedangkan pelatifa kewirausahaan terjadi penurunan dalam lima tahun terakhir. Tercatat organisasi pemuda di Provinsi Papua terus bertambah dari tahun-ke tahun, sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 52 oraganisasi pemuda yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga konsisten melakukan pembinaan maupun kegiatan pelatihan lainnya terhadap lembaga maupun organisasi kepemudaan, pada tahun 2019 sudah ada 33 lembaga/oraganisasi yang terbina.

Tabel 2.66  
**Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2016-2019 (unit)**

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Olahraga	47	47	52	52
Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina	30	33	33	33
Jumlah Organisasi Pemuda	32	32	32	32
Jumlah Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda	30	115	35	35

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021



### 3) Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam menunjang capaian olahraga yang terus konsisten, perlu juga didukung dengan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Provinsi Papua saat ini memiliki sarana dan prasarana olahraga terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019. Tercatat sarana olahraga masyarakat dan ruang publik bermutu sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 186 unit, kemudian gedung olahraga 34 unit dan sarana olahraga untuk pusat pertandingan sebanyak 190 unit.

Tabel 2.67  
**Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2016-2019 (Unit)**

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	186	186	186	186
Jumlah Gedung olahraga	15	15	16	34
Jumlah sarana olahraga untuk pusat pertandingan	175	176	177	190

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

## N. Urusan Statistik

Kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Di Provinsi Papua selain didukung dengan adanya instansi BPS, Provinsi Papua juga saat ini memiliki pusat data pembangunan yang merupakan salah satu unit di bawah Bappeda yaitu Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua, yang disingkat PUSDALISBANG. PUSDALIBANG Provinsi Papua adalah Wadah yang berfungsi sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah. Selain itu Pusat Data dan Analisa Pembangunan berfungsi untuk : (1) menjembatani jaringan-jaringan dengan pemangku kepentingan pembangunan, (2) mendukung dipergunakannya data dan informasi tersebut oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, (3) mendorong pengembangan kapasitas dan secara



proaktif menyebarkan data dan informasi (terutama dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran) kepada publik dan pemerintah.

Muatan utama dari produk PUSDALISBANG adalah statistik hasil-hasil pembangunan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua, penyediaan data SIPD, analisis data statistik kinerja pembangunan, dan penyajian data statistik secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Selama tahun 2016-2018, PUSDALISBANG Provinsi Papua telah menghasilkan beberapa dokumen statistik dan analisis pembangunan, antara lain : (1) Infografis Potret Capaian Pembangunan Papua, (2) Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (3) Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (4) Pencapaian Indikator Makro Provinsi Papua, (5) Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua.

Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, PUSDALISBANG Provinsi Papua juga telah mengembangkan e-Government yang dapat diakses melalui website : [https://pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang\\_devel](https://pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang_devel).

## **O. Urusan Kebudayaan**

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh;



peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua.

Tabel 2.68  
**Perkembangan Warisan Tak Benda Papua**

Tahun	No	Nama Karya Budaya	Asal Daerah	Kategori
2013	67	Yosim Pancar	Papua	Seni Pertunjukan
2013	68	Ukiran Asmat	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2013	69	Barappen	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
2013	70	Tifa	Papua	Seni Pertunjukan
2013	77	Noken	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	119	Papeda	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	120	Tomako Batu	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	121	Koteka	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	141	Wor Biak	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
2016	142	Elha	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	143	Aker	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	144	Honai	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	145	Khombow	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	146	Terfo	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
2017	143	Yu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan
2017	144	Pokem	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018'



Catatan : Belum dipisah 29 Kab/Kota

Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan perlindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Gambar 2.38  
**Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019**



Sumber :

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2016 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.



## P. Urusan Perpustakaan

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2016 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.

Gambar 2.39  
**Kondisi Perpustakaan Provinsi Papua**



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

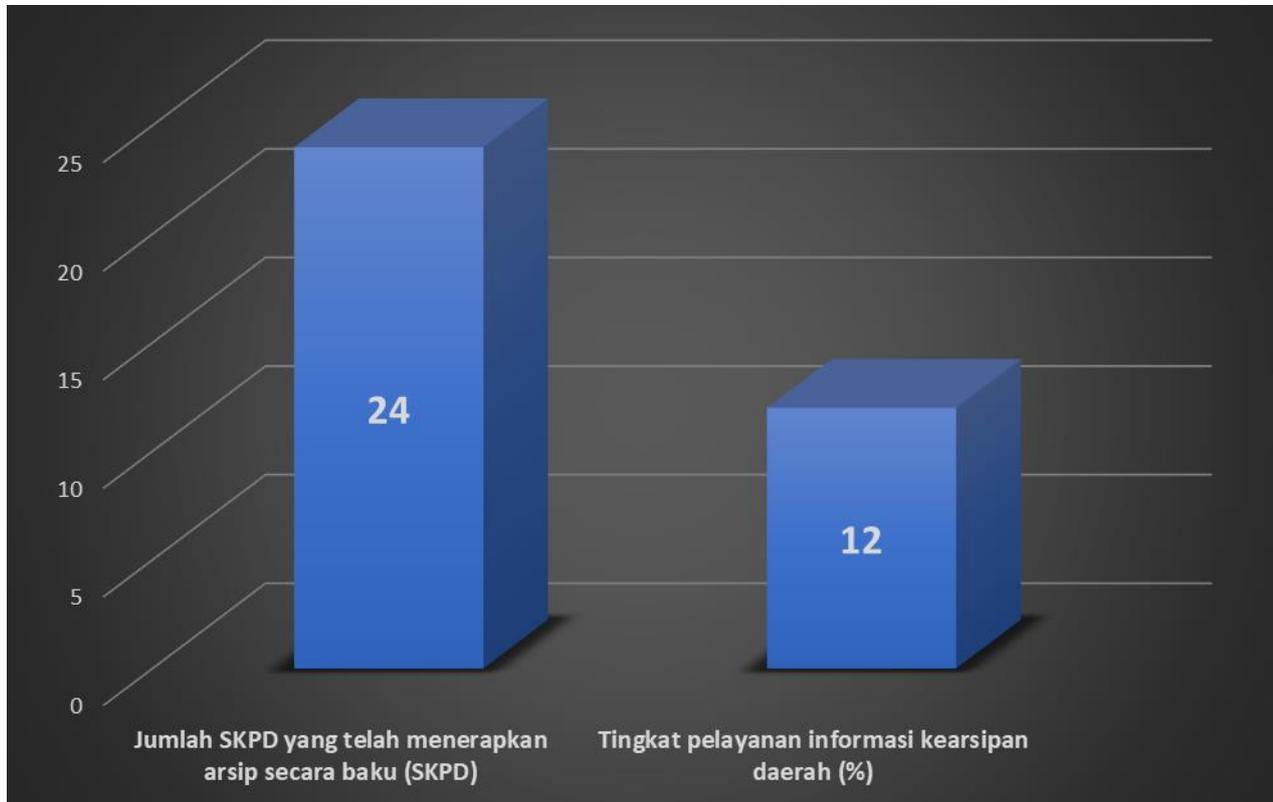
## Q. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perangkat daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku merupakan perangkat yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Diketahui bahwa perangkat daerah (PD)



yang telah menerapkan arsip secara baku baru mencapai 24 PD, dengan kata lain masih terdapat beberapa OPD yang belum menerapkan arsip masing-masing PD secara baku.

Gambar 2.40  
**Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016**



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

### 2.2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

#### A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai produksi tercatat sesuai data BPS diantaranya adalah hasil perikanan tangkap di laut dan juga perikanan umum di daratan. Dari wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak memiliki hasil produksi perikanan tangkap di laut, sedangkan wilayah dengan hasil yang lengkap adalah di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen. Produksi hasil perikanan tangkap di laut Provinsi Papua tahun 2021 ada sebanyak 126.675 ton.



Tabel 2.69  
**Produksi Komoditas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

Kabupaten	Perikanan tangkap di laut		Perikanan perairan umum daratan	
	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai/value (000 Rp)
1. Jayapura	19.015	690.399.360	741	6.704.392
2. Yapen	6.165	193.500.017	-	-
3. Biak Numfor	41.124	1.474.923.137	-	-
4. Sarmi	16.396	489.494.238	-	-
5. Keerom	-	-	-	-
6. Waropen	831	21.100.857	511	4.602.888
7. Supriori	1.889	54.290.770	-	-
8. Mamberamo Raya	-	-	-	-
9. Kota Jayapura	41.255	1.496.675.020	-	-
<b>Provinsi Papua</b>	<b>126.675</b>	<b>4.420.383.399</b>	<b>1.252</b>	<b>11.307.280</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, 202





## B. Urusan Pariwisata

Provinsi Papua memiliki jumlah akomodasi sebanyak 28 unit, 2148 kamar dan 3019 tempat tidur yang tersebar pada Kabupaten Jayapura, kepulauan Yapen, Biak Numfor dan kota Jayapura pada tahun 2021. Kota Jayapura merupakan wilayah yang paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang pariwisata.

Tabel 2.70  
**Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua**

No	Kabupaten	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
1.	Jayapura	4	293	463	5	231	611	5	428	695
2.	Kepulauan Yapen	1	31	50	1	26	51	1	30	51
3.	Biak Numfor	2	78	106	2	57	106	2	78	111
4.	Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Keerom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Waropen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Supiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Mamberamo raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kota Jayapura	15	1170	1886	15	1093	1756	20	1612	2162
<b>PROVINSI PAPUA</b>		<b>22</b>	<b>1572</b>	<b>2505</b>	<b>23</b>	<b>1407</b>	<b>2524</b>	<b>28</b>	<b>2148</b>	<b>3019</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua



### C. Urusan Pertanian

Produksi komoditas di Provinsi Papua paling tinggi berupa Produksi Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua mencapai 6.340,06 Ton dan produksi padi setara beras mencapai 2.601,42 Ton Tahun 2021. Produksi komoditas tertinggi berada di Kabupaten Jayapura. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian produksi komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71  
**Produksi Komoditas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

Kabupaten / Kota		Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)
1.	Jayapura	3193.21	813.87	591	1044
2.	Yapen	-	-	167	162
3.	Biak Numfor	-	-	764	-
4.	Sarmi	78.94	44.84	209	37
5.	Keerom	135.92	77.21	517	290
6.	Waropen	56.49	32.08	64	38
7.	Supriori	-	-	12	-
8.	Mamberamo Raya	-	-	-	-
9.	Kota Jayapura	2875.5	1633.42	321	5
<b>Provinsi Papua</b>		<b>6340.06</b>	<b>2601.42</b>	<b>2645</b>	<b>1576</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

### D. Urusan Kehutanan



## E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan data Papua dalam angka tahun 2023, daya listrik terpasang di Provinsi Papua adalah 271.635 KW dengan produksi listrik sebesar 693.684.781 KWh. Listrik terjual sebesar 614.472.107 KWh, dipakai sendiri sebesar 8.903.206 KWh, susut/ hilang sebesar 70.309.468 KWh.

Tabel 2.74  
**Produksi Komoditas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

Kabupaten / Kota		Daya terpasang	Produksi listrik	Listrik terjual	Dipakai sendiri	Susut hilang
		KWh	KWh	KWh	KWh	KWh
1.	Jayapura	32.876	114.740.369	104.309.426	-	10.430.943
2.	Yapen	1.400	34.819.284	28.826.054	2.015	5.991.215
3.	Biak Numfor	49.892	79.862.556	71.349.975	995.682	7.516.899
4.	Sarmi	4.890	12.730.661	11.366.662	-	1.363.999
5.	Keerom	306	24.068.325	22.121.622	-	1.946.703
6.	Waropen	1.172	8.206.725	7.147.972	-	1.058.753
7.	Supriori	-	10.068.731	8.832.220	-	1.236.511
8.	Mamberamo Raya	-	-	-	-	-
9.	Kota Jayapura	181.099	409.188.130	360.518.176	7.905.509	40.764.445
<b>Provinsi Papua</b>		<b>271.635</b>	<b>693.684.781</b>	<b>614.472.107</b>	<b>8.903.206</b>	<b>70.309.468</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

## F. Urusan Perdagangan

Perihal perdagangan di Provinsi Papua, penjelasan disampaikan mengenai kegiatan ekspor dan impor. Provinsi Papua melakukan ekspor bijih tembaga dan konsentrat (HS26) dengan volume ekspor mencapai 1.728.475.100 ton atau sekitar 90,99 persen dari total volume ekspor provinsi Papua pada tahun 2021. Total volume ekspor Provinsi Papua sendiri adalah sekitar 1.899.612.101 ton di tahun tersebut. Negara penerima ekspor terbesar dari Papua adalah Negara Jepang, dengan nilai ekspor ke negara tersebut sekitar US\$





1.366.460.621. Selain Jepang, dua negara lain yang menjadi penerima ekspor terbesar Papua adalah negara Asia lainnya dan Korea Selatan dengan nilai eksport masing-masing mencapai US\$ 648.696.536 dan US\$ 637.536.734. Perkembangan impor di Provinsi Papua cukup fluktuatif, dengan mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir. Nilai impor Papua mengalami peningkatan dari US\$ 191.719.492 di tahun 2020 menjadi US\$ 272.239.487 di tahun 2021

## **G. Urusan Perindustrian**

Jumlah perusahaan pada industri besar dan sedang di Provinsi Papua pada tahun 2020 sebanyak 21 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.165 orang. Apabila dilihat dari kelompok industri, maka industri besar dan sedang didominasi kelompok industri makanan dan kelompok industri minuman. Sementara itu, untuk jumlah perusahaan pada industri mikro dan kecil pada tahun 2020 sebanyak 9.708 perusahaan dan menyerap tenaga kerjanya mencapai 16.833 orang.

### **2.2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

#### **A. Urusan Perencanaan**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Periode RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013.





Sementara itu, RPJMD Tahun 2019-2023 merupakan RPJMD IV atas RPJPD Provinsi Papua. dan Selanjutnya, sesuai Inmendagri nomor 52 Tahun 2023 yang mengharuskan setiap daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir di tahun 2023, wajib menyusun dokumen transisi. Dokumen transisi tersebut yaitu RPD (Rencana Pembangunan Daerah) tahun 2024-2026 merupakan dokumen sebagai pedoman selama kepala daerah masih dijabat oleh Pejabat Gubernur.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Papua selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Papua, RPJMD Provinsi Papua, RTRW Provinsi Papua, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

## **B. Urusan Keuangan**

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor .... Tahun .... Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor ...Tahun .... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas,



konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, updating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Provinsi Papua agar dapat tetap mempertahankan Opini WTP pada tahun berikutnya

### **C. Urusan Kepegawaian**

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II , serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Jumlah ASN pada Pemerintah Provinsi Papua mengalami penambahan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 97.895 orang PNS intansi daerah dan 13.544 PNS instansi Pusat, dari tahun 2020 sebanyak 93.164 Orang PNS instansi daerah dan PNS instansi pusat sebanyak 13.693 sedangkan tahun 2022 PNS instansi daerah sebanyak 97.585 orang dan 14.465 orang PNS intansi pusat. Penambahan ini antara lain adalah karena adanya penerimaan ASN baru pada tahun 2022, walaupun juga ada pengurangan dari ASN yang purna tugas dan meninggal dunia, namun secara keseluruhan terdapat penambahan sebanyak .... orang. Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.75 berikut.



Tabel 2.75  
**Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua  
Tahun 2020 – 2022**

No	Tahun	PNS Instansi Daerah		Jumlah	PNS Instansi Pusat		Jumlah
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1.	2020	53.782	39.382	93.164	8.927	4.766	13.693
2.	2021	56.098	41.797	97.895	8.820	4.724	13.544
3.	2022	55.781	41.804	97.585	9.450	5.015	14.465

Sumber : BKN Pusat, 2022

#### D. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting sebagai problem solving permasalahan yang ada di daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian.

Tabel 2.76  
**Riset Unggulan Daerah/Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Papua  
Tahun 2020 – 2022**

No	Tahun	Judul	Lembaga/Institusi/Pelaksana
1.	2021	Evaluasi pemanfaatan Hutan Rakyat dan Dampaknya terhadap Pendapatan Masyarakat dan Pelestariannya di Provinsi Papua	Bappeda
2.	2021	Evaluasi terhadap kualitas Kinerja Pelayanan Publik pada masa Pandemi Covid-19	Bappeda



No	Tahun	Judul	Lembaga/Institusi/Pelaksana
3.	2022	Kajian Kebijakan Penanganan Stunting di Provinsi Papua	Bappeda
4.	2022	Kajian Kebijakan Pengembangan Wisata di Provinsi Papua	Bappeda
5.	2023	Kajian Kebijakan Penanganan Penyakit Menular, Malaria (dan dampak penghentian KPS terhadap Penduduk Orang Asli Papua)	Bappeda

Sumber : Litbang Bappeda Provinsi Papua, 2022

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.77

**Riset Bersama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 – 2021**

No	Tahun	Judul	Lembaga/Institut/ Pelaksana
1.	2021	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa	Bappeda Provinsi Papua
2.	2021	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappeda Provinsi Papua
3.	2022	Penelitian dan Pengembangan Dampak kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Bappeda Provinsi Papua

Sumber : Litbang Bappeda Provinsi Papua, 2022

Dalam pelaksanaan riset unggulan tidak terdapat kendala yang berarti, namun demikian perlu dilakukan pemetaan kebutuhan riset yang sistematis serta publikasi yang lebih luas untuk mendapatkan penelitian yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Bappeda dengan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Nasional ataupun dengan Badan Riset Inovasi Nasional.

RUD dan Riset Bersama yang dilakukan dalam kerangka menjembatani penelitian terhadap kebijakan (bridging knowledge to policy) di Provinsi Papua. Tema RUD dan Riset





Bersama yang dilakukan didasarkan atas isu strategis pembangunan, yaitu isu strategis RKPD Provinsi Papua. Seleksi pelaksana RUD dan Riset Bersama didasarkan atas inovasi yang akan dikembangkan oleh pelaksana terhadap isu strategis pembangunan. RUD dan Riset Bersama memiliki sasaran merumuskan kebijakan pembangunan, sebagai inovasi pembangunan, dalam kerangka pembangunan di Provinsi Papua. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pemangku kepentingan pembangunan serta memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan

Disisi lain, tantangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah bagaimana terus meningkatkan peran perguruan tinggi untuk semakin besar berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Provinsi Papua lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik, dalam pengembangan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua.

#### **E. Unsur Pengawasan**

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah adalah :

- (1) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
- (2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- (3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tugas dan fungsi organisasi.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Dalam Maturitas SPIP terkandung unsur Manajemen Resiko Indeks/MRI, yaitu Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sasaran Program terkait Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko yaitu Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Penguatan APIP diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. 3 (tiga) area penguatan pengawasan APIP Inspektorat Provinsi Papua adalah: Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP; Aspek Sumber Daya (Sumber daya anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan Sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis) dan Aspek Tata Kelola (Pelaporan pengawasan berindikasi KKN, Standar Pengawasan, dan Penjaminan Mutu).



Tabel 2.78  
**Tingkat Kematangan SPIP Tahun 2017-2021**

Tingkat Maturitas SPIP	2018	2019	2020	2021	2022
Level	Berkembang Level 2	Berkembang Level 2	Berkembang Level 2	Berkembang Level 2	Berekembang Level 2

Sumber : Inpektorat Provinsi Papua, 2023

## F. Urusan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD/DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD/DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperdasus) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2021, usulan Raperda yang masuk ke Propemperda sebanyak Raperda yang terdiri dari Raperda inisiatif dan Raperda usulan Gubernur Papua.

Dalam pelaksanaan pembahasan Raperda, tidak semua usulan Raperda menjadi Perda. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah Raperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda yaitu sebanyak Perda, terdiri dari ....Perda inisiatif dan Perda usulan Gubernur

## G. Urusan Sekretariat MRP

Sekretariat MRP adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang MRP. Sekretariat MRP membantu pencapaian kinerja MRP, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperdasus (Rancangan Peraturan Daerah Khusus) menjadi Perdasus (Peraturan Daerah Khusus). Usulan Raperdasus yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perdasus. Pada tahun 2022, usulan Raperdasus yang masuk ke Propemperdasus sebanyak .... Raperdasus.

Dalam pelaksanaan pembahasan Raperdasus, tidak semua usulan Raperdasus menjadi Perdasus. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah ..... Raperdasus yang berhasil ditetapkan menjadi Perdasus yaitu sebanyak ..... Perdasus.



## 2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

### 2.3.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2022

Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi Kinerja Tahun 2022 masih berkisar pada capaian target kinerja realisasi fisik dan keuangan Perangkat Daerah, dalam hal ini, memberi penilaian hanya pada capaian target kinerja realisasi anggaran program/kegiatan khusus kinerja realisasi fisik dan keuangan.

Evaluasi kinerja RKPD tahun 2022 dilakukan mempedomani Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan didasarkan pada urusan wajib yang terbagi atas urusan wajib terkait pelayanan dasar dan tidak terkait serta urusan pilihan. **Terkait pelayanan dasar** terbagi: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan (7) Sosial. **Tidak terkait pelayanan dasar**, meliputi: (1) Tenaga Kerja, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak, (3) Pangan, (4) Pertahanan, (5) Lingkungan Hidup, (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (7) Pemberdayaan Masyarakat dan desa, (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (9) Perhubungan, (10) Komunikasi dan Informasi, (11) Koperasi dan UKM, (12) Penanaman Modal, (13) Keper mudaan dan Olahraga, (14) Statistik, (15) Persandian, (16) Kebudayaan, (17) Perpustakaan, dan (18) Kearsipan. Kemudian **Urusan Pilihan** meliputi: (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Pariwisata, (3) Pertanian, (4) Kehutanan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral, (6) Perdagangan, (7) Perindustrian.

Evaluasi kinerja RKPD tahun 2022 dilakukan dengan perhitungan peringkat kinerja, menggunakan formula berikut :



- a. Rata-rata kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja;
- b. Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud;
- c. Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.79  
**Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja**

No.	Interval	Kriteria Penilaian	Notasi
1.	$91 \% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	ST
2.	$76 \% \leq 90\%$	Tinggi	T
3.	$66 \% \leq 75\%$	Sedang	S
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	R
5.	$\leq 51\%$	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Jika dianalisis secara parsial pada masing-masing indikator, maka kriteria penilaian yang Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) tersebut sangat baik pada capaian kinerja realisasi penyerapan anggaran pada program/kegiatan sehingga dapat diinterpretasikan bahwa capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja. Sedangkan dengan kategori Sedang (S) Baik dengan interpretasi capaian perlu ditingkatkan, dan untuk kategori Rendah (R) dan Sangat Rendah (SR) interpretasikan kinerja buruk dan sangat buruk.



### 2.3.1.1. Organisasi Perangkat Daerah dengan pagu terbesar sampai dengan yang terkecil

Beberapa OPD yang mendapatkan pagu paling besar dikarenakan amanat dari regulasi karena merupakan OPD teknis dalam pencapaian program prioritas daerah dan Nasional yang diamanatkan juga merupakan mandatori regulasi. Walaupun OPD tersebut terlihat agak sulit mencapai kinerja keuangan dan fisik dalam kategori Sangat Tinggi dalam penyerapan anggaran yang nanti terlihat dalam pencapaian kinerja fisik dan keuangan OPD pada uraian dibawah. Berikut pagu dana OPD yang terbesar sampai dengan pagu yang terkecil menurut table jumlah pagu OPD berikut :

Tabel 2.80  
**Pagu dana OPD Tahun 2022**

No	SKPD	Pagu (Rp)	Serapan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	3,598,577,573,964	911,363,147,652	911,363,147,652
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,180,786,563,311	247,855,423,339.15	247,855,423,339.15
3.	Sekretariat Daerah	1,559,395,472,492	83,832,179,720.35	83,832,179,720.35
4.	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	1,399,929,226,625	143,491,100,210.44	143,491,100,210.44
5.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	602,324,222,000	39,670,311,875	39,670,311,875
6.	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	453,624,509,967	161,503,131,395.86	161,503,131,395.86
7.	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	240,127,679,444	92,206,800,613.02	92,206,800,613.02





No	SKPD	Pagu (Rp)	Serapan (Rp)	Sisa (Rp)
8.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	206,589,160,006	15,077,314,766.69	15,077,314,766.69
9.	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	156,367,933,500	1,509,197,458	1,509,197,458
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	156,536,119,794	18,560,449,324	18,560,449,324
11.	Dinas Olahraga dan Pemuda	143,340,518,247	6,558,126,687.81	6,558,126,687.81
12.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	140,174,089,321	14,250,445,059.19	14,250,445,059.19
13.	Dinas Perhubungan	126,555,991,129	29,422,300,321	29,422,300,321
14.	Dinas Kesehatan	102,843,929,179	6,212,706,266	6,212,706,266
15.	Dinas Pertanian dan Pangan	90,918,125,455	11,257,602,193	11,257,602,193
16.	Inspektorat	80,672,371,600	17,833,612,185	17,833,612,185
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	69,287,270,960	4,568,964,392.88	4,568,964,392.88
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	67,820,401,142	14,005,547,240	14,005,547,240
19.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	64,871,625,524	5,987,402,146	5,987,402,146
20.	Rumah Sakit Jiwa	59,551,398,050	750,887,500	750,887,500
21.	Badan Kepegawaian Daerah	55,069,563,338	3,101,595,535	3,101,595,535
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika	53,076,271,300	632,306,889.18	632,306,889.18



No	SKPD	Pagu (Rp)	Serapan (Rp)	Sisa (Rp)
23.	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52,562,081,730	2,095,603,600	2,095,603,600
24.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51,095,262,650	10,741,625,513	10,741,625,513
25.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	46,803,055,290	986,525,832	986,525,832
26.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	36,312,408,556	3,403,419,586.92	3,403,419,586.92
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	33,627,160,330	662,182,946	662,182,946
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28,916,739,168	10,185,035,617	10,185,035,617
29.	Badan Penghubung Daerah	20,749,500,340	1,736,599,704	1,736,599,704
30.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16,466,162,110	595,923,168	595,923,168
<b>JUMLAH</b>		<b>1.669.154.841.918</b>	<b>1.502.610.894.851.02</b>	<b>166.543.947.066.98</b>

Sumber : Laporan Bappeda Provinsi Papua, (diolah)

Secara keseluruhan jika fokus pada kinerja dengan kategori Sangat Tinggi, maka terindikasi ada 15 OPD yang dinilai mempunyai rata-rata capaian kinerja anggaran Sangat Tinggi (rasio  $91\% \leq 100\%$ ), dimana rasio yang tertinggi adalah Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar 99,79%. Sementara untuk capaian kinerja fisik, jumlah OPD yang mendapat predikat Sangat Tinggi sebanyak 12 OPD, dengan angka rasio tertinggi adalah





Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 99,68%. Dari kedua klaster tersebut, ternyata hanya 5 OPD saja yang bisa memperoleh dua predikat Sangat Tinggi sekaligus untuk anggaran dan fisik, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kelautan dan Perikanan; Badan Kepegawaian Daerah; SATPOL PP dan PB Daerah; RSUD Jayapura.

### **2.3.1.2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **A. Urusan Pendidikan**

##### **(1) Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah**

Alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.399.929.226.625,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 89,79%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 89,75%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip tidak terserap 100%, berdasarkan kriteria dengan kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

#### **B. Urusan Kesehatan**

Urusan Kesehatan di ampu oleh beberapa perangkat daerah, yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa yang capaian Kinerja Anggarannya sebagai berikut:

##### **(1) Dinas kesehatan**

Alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2022 adalah sebesar Rp. 102.843.929.179,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 93,96%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 93,96% atau Rp. 96.631.222.913,- yang terserap. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas Kesehatan belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

##### **(2) RSUD Jayapura**

Alokasi anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura tahun 2022 sebesar Rp. 453.624.509.967,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 64,40%, sedangkan capaian kinerja



realisasi keuangan sebesar Rp. 292.121.378.571,14 atau sebesar 64,40%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi RSUD Jayapura tidak terserap 100%. berdasarkan kriteria penyerapan/ progress maka dengan kategori Rendah (R) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

### **(3) RSUD Abepura**

Alokasi anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abepura tahun 2022 sebesar Rp. 240.127.679.444,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 61,60%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 61,60% atau terserap dana sebesar Rp. 147.920.878.830.98. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura tidak terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian/Gradasi intensitas dengan kategori Rendah (R) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

### **(4) Rumah Sakit Jiwa Abepura**

Alokasi anggaran untuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura tahun 2022 sebesar Rp. 59.551.398.050,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 98,74%, dan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 98,74%. Dengan penyerapan dana sebesar Rp. 58.800.510.550 Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Rumah Sakit Jiwa belum terserap 100%, berdasarkan kriteria penilaian dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

### **(1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai nomenklatur di Provinsi Papua, juga mengampu urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang disatukan menjadi satu Perangkat Daerah yang melakukan beberapa urusan.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 sebesar Rp. 3.180.786.563.311,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 92,21%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp.2.932.931.139.971,85 atau sebesar 92,21%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau



diperuntukkan bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman tidak terserap 100%. Namun berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

#### **D. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

##### **(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Alokasi anggaran untuk Satpol PP dan Badan Bencana Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 46.803.055.290,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 97,89%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 45.816.529.458,- atau sebesar 97,89%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terserap 100%. Namun berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

#### **E. Urusan Sosial, Urusan Kependudukan, Urusan Perindungan Anak**

##### **(1) Dinas Sosial, Kependudukan, Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Sosial diampu oleh Dinas Sosial, juga urusan Kependudukan, Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digabungkan menjadi satu perangkat Daerah/SKPD. Adapun Alokasi anggaran untuk Dinas Sosial, Kependudukan, Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 sebesar Rp. 52.52.081.730,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 96,01%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 96,01% atau sebesar Rp. 50.466.478.130,-. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terserap 100%. Namun berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

### **2.3.1.3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

#### **A. Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja**



## **(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja**

Alokasi anggaran untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga kerja tahun 2022 adalah sebesar Rp. 67.820.401.142,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 79,35%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 79,35% atau sebesar Rp. 53.814.853.902,-. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tidak terserap 100%, berdasarkan kriteria penilaian dengan kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan

### **(2) UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM**

Alokasi Anggaran untuk UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM, tahun 2022 sebesar Rp. 2.009.563.816,-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(3) UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi**

Alokasi Anggaran untuk UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM, tahun 2022 sebesar Rp. 299.994.220,- Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(4) UPTD Balai Pengujian Mutu dan Normalisasi Produk Industri**

Alokasi Anggaran untuk UPTD Balai Pengujian Mutu dan Normalisasi Produk Industri, tahun 2022 sebesar Rp. 299. 998.630,- Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST).

## **B. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

### **(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan OAP**

Alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan OAP tahun 2022 adalah sebesar Rp. 33.627.160.330,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 98,03%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 32.964.977.384, atau sebesar 98,03%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan



bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan OAP tidak terserap 100%, berdasarkan kriteria penilaian dengan kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **C. Urusan Perhubungan**

### **(1) Dinas Perhubungan**

Alokasi anggaran untuk Dinas Perhubungan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 126.555.991.129,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 76,75%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 97.133.690.808,- atau sebesar 76,75%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas Perhubungan tidak terserap 100%, berdasarkan kriteria penilaian dengan kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **D. Urusan Komunikasi dan Informasi**

### **(1) Dinas Komunikasi dan Informatika**

Alokasi anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua tahun 2022 adalah sebesar Rp. 53.076.271.300,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 98,81%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan dari pagu sebesar Rp.52.443.964.410,82 atau sebesar 98,81%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Komunikasi dan Informatika belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan

## **E. Urusan Penanaman Modal**

## **F. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

### **(1) Dinas Olah Raga dan Pemuda**

Alokasi anggaran untuk Dinas Olah Raga dan Pemuda tahun 2022 adalah sebesar Rp. 143.340.518.247,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 95,42%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 136.782.391.559,19 atau sebesar 95,42%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas Olah Raga dan





Pemuda belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **G. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata**

### **(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Alokasi anggaran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua tahun 2022 adalah sebesar Rp. 36.312.408.556,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 90,63%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 32.908.988.969,08 atau sebesar 90,63%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Kebudayaan dan Pariwisata belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **H. Urusan Politik**

### **(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 adalah sebesar Rp. 28.916.739.168.-. Capaian kinerja realisasi fisik sebesar 64,78%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 18.731.703.551,- atau sebesar 64,78%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sepenuhnya belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, kategori Sedang (S) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan

#### **2.3.1.4. Urusan Pilihan**

### **A. Urusan Kelautan dan Perikanan**

#### **(1) Dinas Kelautan dan Perikanan**

Alokasi anggaran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 69.287.270.960,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 93,41%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp.64.718.308.567,12 atau sebesar 93,41%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas



Kelautan dan Perikanan belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **B. Urusan Pertanian**

### **(1) Dinas Pertanian dan Pangan**

Alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 90.918.125.455,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 87,62%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 87,62%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas Pertanian dan Pangan belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **C. Urusan Kehutanan**

### **(1) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

Alokasi anggaran untuk Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah sebesar Rp. 206.589.160.006,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 92,70%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp.191.511.845.239,31 atau sebesar 92,70%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup belum terserap 100%, berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan

### **(2) Cabang Dinas Kehutanan Jayapura**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Jayapura tahun 2022 sebesar Rp. 2.316.175.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 96,77%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST).

### **(3) Cabang Dinas Kehutanan Sarmi**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Sarmi tahun 2022 sebesar Rp. 849.921.127.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,70%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST).



#### **(4) Cabang Dinas Kehutanan Keerom**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Keerom tahun 2022 sebesar Rp. 1.600.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 98,85%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

#### **(5) Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya tahun 2022 sebesar Rp. 599.823.150.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,19%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

#### **(6) Cabang Dinas Kehutanan Nabire**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Nabire tahun 2022 sebesar Rp. 850.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

#### **(7) Cabang Dinas Kehutanan Mimika**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Mimika tahun 2022 sebesar Rp. 1.026.382.959.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,58%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

#### **(8) Cabang Dinas Kehutanan Asmat**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Asmat tahun 2022 sebesar Rp. 826.240.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 97,08%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST).

#### **(9) Cabang Dinas Kehutanan Mappi**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Mappi tahun 2022 sebesar Rp. 3.229.955.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,59%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

#### **(10) Cabang Dinas Kehutanan Merauke**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Merauke tahun 2022 sebesar Rp. 3.759.499.505.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 26,30%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 26,30%, dengan kriteria penilaian Sangat Rendah (SR)



### **(11) Cabang Dinas Kehutanan Boven Digul**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Boven Digul tahun 2022 sebesar Rp. 1.914.990.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,30%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(12) Cabang Dinas Kehutanan Yalimo**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Yalimo tahun 2022 sebesar Rp. 500.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,76%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(13) Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo tahun 2022 sebesar Rp. 599.973.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 98,42%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(14) Cabang Dinas Kehutanan Dogiyai-Deiyai**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Gogiyai-Deiyai tahun 2022 sebesar Rp. 599.990.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,79%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(15) Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya tahun 2022 sebesar Rp. 599.182.850.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,03%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(16) Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Tengah**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Tengah tahun 2022 sebesar Rp. 699.996.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 96,80%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(17) Cabang Dinas Kehutanan Paniai**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Paniai tahun 2022 sebesar Rp. 600.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,51%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)





### **(18) Cabang Dinas Kehutanan Tolikara**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Tolikara tahun 2022 sebesar Rp. 599.094.290.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,79%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(19) Cabang Dinas Kehutanan Puncak Jaya**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Puncak Jaya tahun 2022 sebesar Rp. 549.985.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(20) Cabang Dinas Kehutanan Puncak**

Alokasi Anggaran untuk Cabang Dinas Kehutanan Puncak tahun 2022 sebesar Rp. 550.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 95,10%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(21) KPHL Unit II Nabire**

Alokasi Anggaran untuk KPHL Unit II Nabire tahun 2022 sebesar Rp. 500.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(22) KPHL Unit VI Mimika**

Alokasi Anggaran untuk KPHL Unit VI Mimika tahun 2022 sebesar Rp. 899.755.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 98,36%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(23) KPHP Unit XVII Waropen**

Alokasi Anggaran untuk KPHP Unit XVII Waropen tahun 2022 sebesar Rp. 749.965.029.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(24) KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya**

Alokasi Anggaran untuk KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya tahun 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,19%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)





### **(25) KPHP Unit XXIII Sarmi**

Alokasi Anggaran untuk KPHP Unit XXIII Sarmi tahun 2022 sebesar Rp. 699.995.000, Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(26) KPHP Unit XIX Kep Yapen**

Alokasi Anggaran untuk KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen tahun 2022 sebesar Rp. 599.995.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 88,93%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(27) KPHL Unit XX Biak**

Alokasi Anggaran untuk KPHL Unit XX Biak tahun 2022 sebesar Rp. 2.388.105.172.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 99,92%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(28) KPHP Unit XXVII Kota Jayapura**

Alokasi Anggaran untuk KPHP Unit XXVII Kota Jayapura tahun 2022 sebesar Rp. 1.599.067.500.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST).

### **(29) KPHP Unit XXIX Keerom**

Alokasi Anggaran untuk KPHP Unit XXIX Keeromi tahun 2022 sebesar Rp. 600.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(30) KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang**

Alokasi Anggaran untuk KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang tahun 2022 sebesar Rp. 1.654.667.500.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(31) KPHL Unit XLII A Jayawijaya**

Alokasi Anggaran untuk KPHL Unit XLII A Jayawijaya tahun 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)



### **(32) KPHL Unit XLII B Lanny Jaya**

Alokasi Anggaran untuk KPHL Unit XLII B Lanny Jaya tahun 2022 sebesar Rp. 599.997.750.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(33) KPHP Unit XLIII Nduga**

Alokasi Anggaran untuk KPHP Unit XLIII Nduga tahun 2022 sebesar Rp. 599.989.500.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(34) KPHP Unit XLIII Boven Digul**

Alokasi Anggaran untuk KPHP Unit XLIII Boven Digul tahun 2022 sebesar Rp.

999.997.950.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(35) UPTD Kebun Raya Koya Koso**

Alokasi Anggaran untuk UPTD Kebun Raya Koya Koso tahun 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(36) BPTH Papua**

Alokasi Anggaran untuk BPTH Papua tahun 2022 sebesar Rp. 1.999.996.947.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(37) UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek**

Alokasi Anggaran untuk TPTD Taman Burung dan Taman Anggrek tahun 2022 sebesar Rp. 999.980.000.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST)

### **(38) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua**



Alokasi Anggaran untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua tahun 2022 sebesar Rp. 499.996.950.-. Capaian realisasi Kinerja Anggaran fisik, 100%, dan kinerja anggaran yang terserap juga telah 100%, dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi (ST).

## **D. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

### **(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Alokasi anggaran untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 adalah sebesar Rp. 64.871.625.524,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 90,77%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 58.884.223.378 atau 90,77%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

#### **2.3.1.5. Urusan Penunjang**

### **A. Urusan Perencanaan**

#### **(1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**

Alokasi anggaran untuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 156.536.119.794,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 88,14%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 137.975.670.470, atau sebesar 88,14%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah belum sepenuhnya terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

### **B. Urusan Keuangan**

#### **(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Alokasi anggaran untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 140.174.089.321,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 89,83%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 125.923.644.261,81 atau sebesar





89,83%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum terserap 100%, berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **C. Urusan Kepegawaian**

### **(1) Badan Kepegawaian Daerah**

Alokasi anggaran untuk Kepegawaian Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 55.069.563.338,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 94,37%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 51.967.967.803 atau sebesar 94,37%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Badan Kepegawaian Daerah belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, dengan kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan

### **(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Alokasi anggaran untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 adalah sebesar Rp. 51.095.262.650,-. Capaian kinerja realisasi fisik sebesar 78,98%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 40.353.637.137, atau sebesar 78,98%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum terserap sepenuhnya 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **D. Urusan Pengawasan**

### **(1) Inspektorat Provinsi Papua**

Alokasi Anggaran untuk Inspektorat Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 80.672.371.600,- . Capaian Kinerja realisasi fisik 78,00%, dan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 62.838.759.415,- atau sebesar 78.00%. Dari capaian kinerja dapat dilihat bahwa dana belum sepenuh terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.





## **E. Urusan Sekretariat**

### **(1) Sekretariat DPRD**

Alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRD tahun 2022 adalah sebesar Rp. 602.324.222.000,- capaian kinerja realisasi fisik sebesar 89,79%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 89,75%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, belum terserap 100%, berdasarkan kriteria dengan kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

### **(2) Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP)**

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Majelis Rakyat Papua tahun 2022 adalah sebesar Rp. 156.367.933.500,-. Capaian kinerja realisasi fisik sebesar 99,03%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 154.858.736.042, atau sebesar 99,03%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Sekretariat Majelis Rakyat Papua belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

### **(3) Sekretariat Daerah**

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.559.395.472.492,-. Capaian kinerja realisasi fisik sebesar 94,62%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 1.475.563.292.771,65,- atau sebesar 94,62%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Sekretariat Daerah belum sepenuhnya terserap menjadi 100%. Namun berdasarkan kriteria penilaian, kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

### **(4) Badan Penghubung Daerah**

Alokasi anggaran untuk Kantor Badan Penghubung Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 20.749.500.340,-. Capaian kinerja realisasi fisik sebesar 91,63%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 19.012.900.636,- atau sebesar 91,63%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Kantor Penghubung Daerah belum terserap 100%, Namun, berdasarkan kriteria penilaian, kategori Sangat Tinggi (ST) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.



### **(5) Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama**

Alokasi anggaran untuk Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri tahun 2022 adalah sebesar Rp. 15.536.863.205,-. Capaian kinerja realisasi fisik sebesar 90,44%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 14.050.975.302, atau sebesar 90,44%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama belum terserap 100%. Namun berdasarkan kriteria penilaian, kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan

### **(6) Badan Pengelolan Pendapatan Daerah**

Alokasi anggaran untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 140.174.089.321,-. Capaian kinerja realisasi fisik sebesar 89,83%, sedangkan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar Rp. 125.923.644.261,81,- atau sebesar 89,83%. Dari capaian ini, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan atau diperuntukkan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum terserap 100%. Berdasarkan kriteria penilaian, kategori Tinggi (T) kinerja capaian realisasi fisik dan keuangan.

## **2.3.2. Review capaian Kinerja RPJMD**

Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian prioritas dan target program RPJMD dilakukan melalui langkah-langkah:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program prioritas dan target kinerja program.





2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan terhadap target kinerja RPJMD.
3. Sajikan dalam bentuk matrik analisis.
4. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program RPJMD.identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan, misalnya sektor atau program apa yang perlu dipacu pembangunannya, yang perlu dipertahankan kinerjanya, dan yang dapat ditunda/dikurangi target kinerjanya.

### 2.3.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.





5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah dianggap suatu permasalahan daerah yang memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam konteks ini, permasalahan pembangunan daerah yang ditemukan di Provinsi Papua terbagi dua besar, yaitu :

### 2.4.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan sasaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah.

Tabel 2.81  
**Permasalahan Daerah**

Indikator Kinerja Prioritas Daerah	Permasalahan Daerah
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rendahnya tingkat aksesibilitas, mutu dan Tata Kelola penyelenggaraan Pendidikan
Harapan Lama sekolah	
Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf	
Angka Harapan Hidup	Masih Rendahnya tingkat derajat kesehatan masyarakat
Jumlah atlet berprestasi pada iven olah raga Nasional	Belum Optimalnya pembinaan, mutu dan tata kelola Olah Raga
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	
Cakupan daerah rawan pangan	Kurangnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan	
Indeks kerukunan umat beragama	Masih Rendahnya tingkat keharmonisan dan kohesifitas masyarakat dalam kerukunan Umat beragama
Nilai skor aspek kebebasan sipil	Masih rendahnya Kebebasan Sipil



Indikator Kinerja Prioritas Daerah	Permasalahan Daerah
Nilai skor aspek hak-hak politik	Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi
Nilai skor aspek Lembaga demokrasi	
Tingkat capaian realisasi program program Otsus yang direncanakan	Belum Optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Otsus
Capaian Nilai Sakip	Kualitas Pelayanan Publik masih harus ditingkatkan
Capaian Implementasi E - Government	
Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD	Masih rendahnya tingkat kualitas pengendalian terhadap konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran
Tingkat Konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD	
Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RAP	
Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Masih Rendahnya dan belum optimalnya sistem akuntabilitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	
Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	
Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	
Indeks Kualitas Udara	Tingginya pencemaran Lingkungan yang berdampak pada penurunan Kualitas Udara, berdampak pada penurunan kualitas Air dan pada Intensitas penurunan emisi
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
Intensitas penurunan emisi	
Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Belum Optimalnya pendayagunaan potensi sumber daya sector Pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
Kontribusi (STC) Sail Teluk Cenderawasih terhadap pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan,Perdagangan, Perindakop, (UMKM)	Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
Tingkat Kesempatan Kerja	Tingginya tingkat partisipasi Angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja
Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Masih rendahnya tingkat daya saing dan realisasi investasi pada sektor- sektor andalan daerah
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Rendahnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan dalam kondisi mantap
Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Belum Optimal Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Kurangnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah



Indikator Kinerja Prioritas Daerah	Permasalahan Daerah
Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Masih rendahnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan permukiman
Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	
Indeks Kampung Membangun	Rendahnya Kontribusi Kampung dalam Pembangunan Ekonomi
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Masih rendahnya tingkat Pemenuhan Dasar OAP
Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Rendahnya Angka Harapan Hidup , Pengeluaran per kapita dan Belum Optimalnya mutu dan akses pendidikan wilayah perbatasan
Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	
Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	
Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	Masih Kurangnya pemberdayaan KAT dan pemberian bantuan Sosial PMKS
Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	
Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Masih rendahnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
Indeks Pembangunan Gender	Rendahnya Tingkat PUG (Partisipasi Pengarusutamaan Gender)
Indeks Pemberdayaan Gender	

Sumber : RPD Provinsi Papua, 2024-2026

#### 2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah ini, menyangkut pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat daerah. Permasalahan yang dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang menjadi masalah dimasa yang lalu, dan masa mendatang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah.

Tabel 2.82  
**Permasalahan Urusan Pemerintah Daerah**

Urusan	Permasalahan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	



Urusan	Permasalahan
Urusan Pendidikan	Masih rendahnya angka partisipasi sekolah disemua jenjang Pendidikan, sesuai usia sekolah
	Masih rendahnya mutu, ketercukupan Tenaga pendidik dan fasilitas dukungan Pendidikan
Urusan Kesehatan	Masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan Angka kematian ibu melahirkan (AKI)
	Rendahnya mutu, ketercukupan tenaga kesehatan dan fasilitas dukungan kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rendahnya ketersediaan akses transportasi, berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan dalam kondisi baik
Urusan Perumahan dan Permukiman	Rendahnya ketersediaan rumah layak huni dengan tingkat kecukupan fasilitas yang mendukung kesehatan lingkungan
Urusan Sosial	Belum optimalnya pelayanan pada komunitas PMKS dan KAT
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	
Urusan Tenaga Kerja	Masih Tingginya Angkatan kerja yang belum terserap sesuai produktif
Urusan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan
	Masih rendahnya tingkat Pengarusutamaan Gender (PUG)
Urusan Pangan	Masih rendahnya tingkat pemenuhan kalori dan konsumsi kedelai oleh masyarakat
	Masih tingginya Prevalensi kerawanan dan ketidak cukupan konsumsi pangan masyarakat
Urusan Pertanahan	Masih Tingginya tingkat peralihan tanah adat bersertifikat maupun tidak bersertifikat
Urusan Lingkungan Hidup	Masih Tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan Kualitas Udara, penurunan kualitas Air dan pada Intensitas  penurunan emisi
Urusan administrasi Kependudukan dan Catatan	Masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan/akta diri berbasis NIK



Urusan	Permasalahan
Sipil	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum optimalnya kontribusi kampung terhadap pertumbuhan ekonomi
Urusan pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Belum optimalnya advokasi/sarana pengenlaian penduduk melalui KB aktif
Urusan Perhubungan	Masih kurangnya tingkat ketersediaan sarana angkutan laut maupun udara
	Masih kurangnya tingkat ketersediaan tingkat keterseddiaan jalan dengan rasio ketersediaan kendaraan
Urusan Komunikasi dan Informatika	Masih tingginya angka penggunaan telepon seluler pada rumah tangga penduduk
	Belum optimalnya pelayanan internet bagi penduduk dan rumah tangga dalam kelurahan/ kampung
	Masih rendahnya kepemilikan/penggunaan komputer bagi rumah tangga penduduk
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belum optimalnya tingkat ketersediaan Lembaga Koperasi aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kampung
	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas
	Masih rendahnya usaha mikro yang menjadi wirausaha
Urusan Penanaman Modal	Belum optimalnya ringkat pelayanan publik sesuai regulasi untuk mendukung penanaman modal
	Masih rendahnya nilai investasi baru pertahun
	Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
Urusan Olah Raga dan Pemuda	Masih rendahnya ketersediaan sarana olah raga dan tingkat partisipasi pemuda sesuai cabor
	Belum optimalnya tingkat pembinaan untuk atlet berprestasi dan keberlanjutan dijenjang organisasi keolahragaan
Urusan Kebudayaan	Belum optimalnya penanganan terhadap nilai-nilai budaya maupun peninggalan situs bersejarah
	Rendahnya tingkat promosi budaya dan ketersedianya tenaga



Urusan	Permasalahan
	bersertifikat pengelola budaya
	Masih rendahnya pelestarian cagar budaya
	Masih rendahnya prosentase komunitas/ sanggar kesenian yang difasilitasi
Urusan Perpustakaan	Belum optimalnya tingkat pelayanan publik
	Masih kurangnya ketersediaan literasi baru/terupade/terkini
Urusan Kearsipan	Belum optimalnya tingkat pelayanan public dan ketersediaan tenaga khusus
<b>Layanan Urusan Pilihan</b>	
Urusan Pertanian	Masih rendahnya produksi pertanian pertahun
	Masih rendahnya produksi peternakan pertahun
	Masih rendahnya kegiatanpelaksanaan pembangunan prasarana pertanian
	Masih tingginya kasus penyakit hewan menular
	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Belum optimlanya pendataan kelompok tani
Urusan Kelautan dan Perikanan	Masih rendahnya produksi perikanan pertahun
	Masih rendahnya kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perikanan dan kelautan
	Belum optimalnya pendataan kelompok tani ikan
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rendahnya tingkat penggunaan daya listrik bagi rumah tangga konsumtif
Urusan Perencanaan	Tngkat kepatuhan pada konsistensi dokumen perencanaan masih rendah
	Capaian realisasi indikator-indikator dan target serta realisasi menurut prioritas masih rendah
	Capaian kinerja dan kinerja capaian anggaran serta fisik SKPD/OPD,





Urusan	Permasalahan
	tidak seimbang (balance)
	Rendahnya tingkat pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah secara berkala
<b>Urusan Kekhususan</b>	
Kontribusi Pelaksanaan Otsus Papua	Belum optimalnya implementasi pemanfaatan dana OTSUS dengan diringi asas transparansi dan akuntabilitas

Sumber : Bappeda Provinsi Papua, (olahan)





## BAB III

# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada era masa pandemic Covid 19, terutama pada kondisi perekonomian mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktifitas perekonomian. Kebijakan yang diterapkan dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan dan menekan penyebaran Covid 19. Hal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk tetap dan terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian masyarakat.

#### 3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

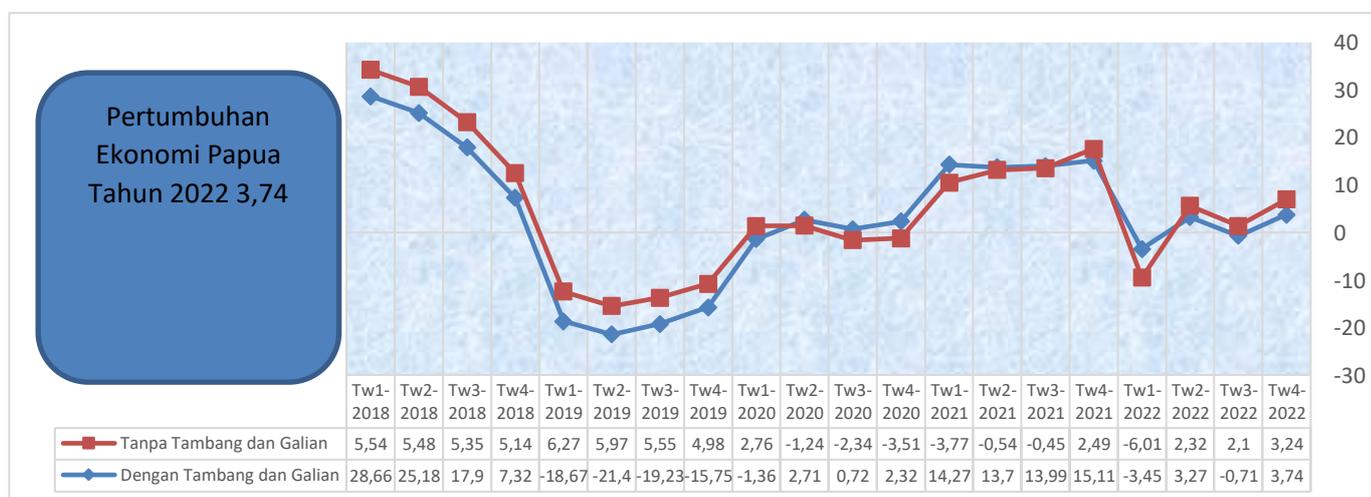
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung menggunakan dua pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB menurut lapangan usaha memiliki 17 lapangan usaha. Dirinci berdasarkan total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB berdasarkan pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen terdiri komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.



PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Untuk Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 3.1  
**Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Tiap Triwulan Pada Tahun 2018 - 2022**



Sumber Data : Papua Dalam Angka – BPS Papua tahun 2022

Dari tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 perekonomian Provinsi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 3,74 % dengan tambang dan penggalian serta tanpa tambang dan penggalian mencapai 3,24 %. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua ini terutama didorong oleh kinerja Sektor Usaha pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ini juga menunjukkan semakin membaiknya kinerja sektor tersebut yang ditunjukkan dengan peningkatan produktifitas hasil kerja. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian sangat menopang sektor non pertambangan yang masih terus mengalami kontraksi setiap tahunnya.





Tabel 3.2  
**Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Papua  
Tahun 2019 – 2022**

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,76	12,28	10,84	10,3
Pertambangan dan Penggalian	23,56	28,23	36,84	38,6
Industri Pengolahan	2,27	2,08	1,80	1,69
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air ; Pengolahan Sampah, Limbah, dan DaurUlang	0,05	0,05	0,04	0,04
Konstruksi	16,13	15,43	13,80	13,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil danSepeda Motor	10,91	10,51	9,37	9,20
Tranportasi dan Pergudangan	6,77	4,36	3,84	4,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,77	0,67	0,64
Informasi dan Komunikasi	4,32	4,24	3,75	3,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,67	1,52	1,55
Real Estat	3,05	2,90	2,67	2,54
Jasa Perusahaan	1,38	1,23	1,07	1,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,81	11,07	9,35	8,53
Jasa Pendidikan	2,13	2,05	1,67	1,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	1,93	1,70	1,58
Jasa Lainnya	1,22	1,17	1,03	0,97
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Papua Dalam Angka – BPS Papua Tahun 2022



Dari tabel 3.2. menunjukkan distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Terbesar menurut lapangan usaha tahun 2022 di Provinsi Papua dinominasi oleh sector pertambangan dan penggalian 38,6 persen, konstruksi 13,75 persen, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,3 persen.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing 210.600,57 miliar rupiah (2018), 189.510,70 miliar rupiah (2019), 199.232,88 miliar rupiah (2020), 235.343,25 miliar rupiah (2021) dan 262.515,818 miliar rupiah. Sedangkan angka PDRB Papua atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun lima tahun terakhir adalah masing-masing 159.711,85 miliar rupiah (2018), 134.565,89 miliar rupiah (2019), 137.787,29 miliar rupiah (2020), 158.611,04 miliar rupiah (2021) dan 172.904,84 miliar rupiah (2022).

Tabel 3.3  
**Perkembangan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Di Provinsi Papua Tahun 2020 – 2022**

PDRB (%yoy) Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Konsumsi Rumah Tangga	101.038.245,83	104.116.466,53	114.309.102,48
Konsumsi LNPRT	4.545.263,16	4.805.579,89	5.216.278,47
Konsumsi Pemerintah	44.100.358,32	46.758.519,1	47.914.163,87
Pembentukan Modal Tetap Bruto	69.306.443,6	83.270.666,3	83.805.969,17
Perubahan Investasi	(55.928,85)	529.851,3	-2.551.685,67
Eksport Barang Jasa	64.946.449,02	108.687.785,7	93.470.342,58
Import Barang Jasa	84.647.946,63	112.825.618,91	-71.936.003,25
<b>PDRB PAPUA</b>	<b>199.232.884,45</b>	<b>235.343.249,91</b>	<b>262.515.818,48</b>

Sumber Data : Papua Dalam Angka – BPS Papua tahun 2022

Menunjuk pada tabel 3.3. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran di Provinsi Papua pada tahun 2022 yang paling besar menurut jenis pengeluaran adalah



Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 114.309,102 miliar rupiah, diikuti oleh pengeluaran pembentukan modal tetap bruto sebesar 83.805,96 miliar rupiah.

### 3.1.2. Tingkat Inflasi dan Kemiskinan di Provinsi Papua

Tabel 3.4  
Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tahun 2019 – 2022

Inflasi (%oyoy)	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Nasional</b>	2,48	3,28	3,29	2,72	2,96	1,96	1,42	1,69	1,37	1,33	1,60	1,87	2,664	4,35	5,95	5,51
<b>Papua</b>	2,58	2,79	2,69	0,66	1,21	1,03	1,93	1,64	2,47	0,46	-0,4	1,79	1,46	5,59	7,27	5,68
<b>Jayapura</b>	2,98	3	2,63	0,59	0,28	0,14	1,38	0,76	1,86	-0,53	-1,41	1,69	0,38	6,77	8,62	5,81
<b>Merauke</b>	2,13	1,44	2,44	1,06	-0,2	1,94	1,48	1,07	2,51	1,36	0,54	1,67	3,57	3,77	5,36	4,91
<b>Timika</b>	1,98	3,3	3,1	0,53	-0,13	2,48	3,54	4,11	3,88	2,08	1,24	2,09	2,42	4,25	5,61	5,94

Sumber data: BPS Provinsi Papua Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel 3.4 menunjukkan adanya perkembangan Inflasi di provinsi Papua. Nampak tekanan inflasi tahunan Provinsi Papua pada triwulan IV tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun 2021. Inflasi pada triwulan IV 2022 mencapai 5,68% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya pada periode yang sama ditahun sebelumnya 1,79% (yoy). Penyebab utama inflasi tahunan Provinsi Papua pada triwulan IV 2022 adalah kelompok transportasi dengan inflasi tertinggi sebesar 17,03% (yoy) yang memberikan andil inflasi sebesar 2,02% (yoy) kondisi ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga minyak dunia dan tingginya permintaan pada periode tersebut. Sub kelompok yang memberikan sumbangan terbesar pada kelompok tersebut adalah sub kelompok makanan dengan andil sumbangan sebesar 1,54% (yoy), diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya dengan andil sebesar 0,46% (yoy). Sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan menjadi satu-satunya penahan laju inflasi dengan adanya deflasi sebesar 0,40 % (yoy) serta andil deflasi sebesar 0,02% (yoy).

Pada triwulan IV 2022, tingkat inflasi kelompok transportasi mengalami penurunan dari 17,03% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 20,71% (yoy). Inflasi



terutama didorong oleh komoditas bensin dan angkutan udara dengan andil sebesar 0,79% (yoy) dan 0,74% (yoy). Tekanan harga komoditas bensin disebabkan oleh kenaikan harga bensin yang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka mengendalikan subsidi BBM yang berlaku pada bulan September 2022. Selain itu tekanan harga pada angkutan udara didorong oleh kenaikan harga avtur yang mengalami kenaikan harga sebesar 43,52% (yoy). Kenaikan ini juga disebabkan harga minyak global yang masih berlangsung sejak awal tahun 2022.

Tabel 3.5  
**Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tahun 2019 – 2022**

Kelompok Komoditas	2019				2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Makanan, Minuman, Tembakau	0,91	3,41	2,73	1,32	3,95	3,67	2,86	3,94	2,97	-0,34	0,07	1,68	-0,57	7,47	8,14	5,26
Pakaian dan Alas Kaki	0,28	0,43	0,63	0,78	0,65	0,14	0,14	-0,31	-0,13	1,86	1,82	1,92	1,37	-0,03	0,05	0,41
Perumahan, Air Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya	0,64	0,55	0,20	0,10	-0,18	0,1	-0,34	-0,6	-0,48	-0,28	0,35	1,23	2,06	2,89	3,49	2,60
Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin RT	1,54	1,54	1,39	1,33	1,29	1,27	1,03	0,92	1,05	1,48	1,15	1,89	3,09	3,75	4,72	5,20
Kesehatan	0,55	-0,18	2,96	3,73	4,61	4,73	2,93	1,89	1,62	2,48	2,08	1,33	1,85	3,68	2,72	2,72
Transportasi	12,08	6,84	12,82	-0,42	-3,76	-6,6	1,68	-2,25	-5,23	0,71	-5,99	4,46	6,31	12,51	20,71	17,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	6,07	3,05	-1,90	-2,7	-2,87	-0,18	0,0	0,12	0,2	0,39	0,91	0,69	0,24	0,30	-0,68	-0,40
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,88	0,93	1,15	2,81	2,78	2,57	2,88	1,15	0,92	1,13	0,88	0,76	1,40	3,69	5,33	5,86
Pendidikan	3,30	3,28	0,02	0,02	0,06	0,06	3,03	3,03	2,38	2,44	-0,06	0,88	1,47	1,49	8,76	7,74
Penyediaan Makanan dan Minuman	1,93	2,00	1,95	1,35	1,14	1,49	1,85	1,55	1,97	1,83	1,34	2,46	1,88	2,86	4,04	3,59
Perawatan Pribadi dan jasa lainnya	1,52	2,25	1,75	1,85	3,05	3,51	6,53	4,94	4,28	2,17	-1,15	0,30	3,32	5,78	6,92	6,42
<b>UMUM</b>	<b>2,58</b>	<b>2,79</b>	<b>2,69</b>	<b>0,66</b>	<b>1,21</b>	<b>1,03</b>	<b>1,93</b>	<b>1,64</b>	<b>0,93</b>	<b>0,46</b>	<b>-0,40</b>	<b>1,79</b>	<b>1,46</b>	<b>5,59</b>	<b>7,27</b>	<b>5,68</b>



Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2022 diprediksi didorong oleh komoditas beras, bawang merah, dan rokok kretek filter dengan andil masing – masing sebesar 0,29% (yoy), 0,16%(yoy) dan 0,15% (yoy). Peningkatan harga beras dan bawang merah disebabkan oleh kondisi geopolitik yang terjadi sejak februari 2022 yang mengakibatkan krisis global. Selain itu, peningkatan juga terjadi akibat base effect pada triwulan IV 2021 yang terendah. Dalam rangka pengendalian komoditas pangan, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Beberapa hal yang diupayakan adalah mendorong produktivitas melalui pelaksanaan HLM TPID, pelaksanaan pasar murah, pemberian alsintan saprotan, pemberian bibit, penyaluran SPHP dan minyak goreng kita, hingga pemberdayaan kelompok tani dalam rangka mendorong ketersediaan pasokan. Selain itu beberapa langkah seperti peningkatan KAD, Operasi Pasar hingga implementasi digital farming juga didorong untuk peningkatan pasokan komoditas pangan. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya turut menjadi penyumbang inflasi tertinggi di triwulan IV 2022 dengan inflasi sebesar 2,60% (yoy) dan memberikan andil sebesar 0,46% (yoy).

Tabel 3.6  
**Indikator Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Papua**

Tahun	Bulan	Garis Kemiskinan (Rupiah / Kapital / bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2017	Maret	457.541	7.49	2.82	897.690	27.62
	September	464.056	6.24	1.93	910.420	27.76
2018	Maret	499.463	6.73	2.28	917.630	27.74
	September	518.811	5.91	1.82	915.220	27.43
2019	Maret	540.099	7.17	2.60	926.360	27.53
	September	557.236	6.07	1.98	900.950	26.55
2020	Maret	562.992	6.16	2.08	911.370	26.64
	September	580.643	6.90	2.35	912.230	26.80
2021	Maret	591.959	5.60	1.69	920.442	26.86
	September	600.795	6.31	2.05	944.494	27.38

Sumber data : Papua Dalam Angka – BPS Tahun 2022



Dari tabel 3.5 menunjukkan bahwa Jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,06 point yaitu dari 26,80 % pada September 2020 menjadi 26,86 % persen pada Maret 2021. Demikian pula jika dibandingkan dengan presentasi penduduk miskin pada periode Maret 2021 sampai dengan September 2021, mengalami peningkatan 0,52 poin, yakni dari 26,86 % pada Maret 2021 menjadi 27,38 % pada bulan September 2021. Pada periode Maret 2019 sampai dengan Maret 2020, tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada angka 0,93 point; namun pada periode September 2020 sampai dengan September 2021 penduduk miskin di Provinsi Papua sedang mengalami peningkatan sebesar 0,58 point yakni dari 26,80 % pada bulan September 2020 ke 27,38 % atau 944.490 jiwa dari jumlah penduduk Papua secara keseluruhan yaitu 4.30 juta jiwa. Secara nasional dari sisi jumlah; maka penduduk miskin di Provinsi Papua masih relatif sedikit di bandingkan Provinsi lainnya di Indonesia; namun secara persentase masih menjadi Provinsi dengan persentase penduduk miskin urutan 1 terbesar di Indonesia. Sementara itu menurut defenisinya Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin menurut pengeluaran perkapitanya. Dengan demikian penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapitanya setiap bulan dibawah GK; maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan pada periode September 2020, yaitu sebesar Rp 580.643,00 dan mengalami peningkatan Pada bulan Maret 2021 menjadi Rp. 591.959,00 dan bulan September tahun 2021, mengalami peningkatan menjadi Rp. 600.795,00. Perkembangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan di Papua

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam rangka mengukur keberhasilan yang telah dicapai dalam membangun kualitas hidup manusia masyarakat/penduduk) sekaligus dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada Tahun 2021 adalah sebesar 60,62. Angka ini menurun dari 60,44 pada tahun 2020.

### **3.1.3. Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2023**

Secara agregat, prospek perekonomian Papua pada tahun 2023 diproyeksikan tumbuh positif, lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2022. Pada umumnya



peningkatan kinerja ekonomi Papua pada tahun 2023 didorong oleh perbaikan kinerja pertambangan terbesar di Papua dimana produksi tambang berasal dari tambang bawah tanah yang mengalami peningkatan produktivitas sejalan dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi dibandingkan tambang terbuka. Penanganan pandemic COVID-19 di tahun 2022 yang menjadi penentu pemulihan aktivitas perekonomian sepanjang tahun 2023. Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas yang efektif dan proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi salah satu pemicu utama pemulihan perekonomian sepanjang tahun 2023.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah, untuk melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan Aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Arah kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua ditetapkan untuk alokasi Pendidikan 30% ; Kesehatan 35%; dan Ekonomi 35%. Penetapan ini dilakukan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan program kegiatan pemerataan tingkat pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

#### 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Peningkatan kemudahan pembayaran pajak berbasis teknologi (ATM, android, Payment Point)



- b. Peningkatan reward bagi masyarakat taat pajak dan penghapusan denda pajak berdasar tingkat tunggakan
- c. Peningkatan koordinasi dan pemberian penghargaan pada perusahaan wajib pungut
- d. Peningkatan pendataan masyarakat wajib pajak dan sosialisasi pada perusahaan wajib pajak air permukaan.
- e. Peningkatan penagihan pajak secara persuasive (pengumuman melalui media masa, pemberitahuan di tempat umum)
- f. Peningkatan pendataan potensi dan asset provinsi yang dapat menjadi obyek retribusi daerah
- g. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan OPD penghasil
- h. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD penghasil
- i. Identifikasi perusahaan potensial untuk ditanam modal
- j. Peningkatan akses pelayanan samsat, terutama di daerah pedalaman
- k. Penerapan SOP pelayanan dan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat
- l. Pemberian fasilitasi dan penghargaan Samsat untuk bekinerja prima
- m. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
- n. Peningkatan sarana-prasarana perkantoran
- o. Peningkatan kompetensi dan disiplin aparatur

## **2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD penghasil
- c. Identifikasi perusahaan potensial untuk investasi modal
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

## **3. Kebijakan Dana Perimbangan**



Pemerintah provinsi Papua akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian dana hasil pajak dan bukan pajak termasuk perolehan Dana Alokasi Umum (DAU).

### 3.2.1.1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Tabel 3.7  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua  
Tahun 2019 – 2022**

No.	Uraian	2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	Rata- Rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>12.662.509.557.913,50</b>	<b>15.826.765.456.928,80</b>	<b>10.764.787.934.427</b>	<b>-31,98</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.255.685.466.969,77</b>	<b>2.103.322.309.869,82</b>	<b>2.152.707.624.061</b>	<b>2,35</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	986.672.016.100	1.627.364.000.469	1.069.726.272.973	-34,27
1.1.2.	Retribusi Daerah	1.953.733.848,33	18.406.439.197,78	7.410.091.220	-59,74
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.983.026.838	40.489.377.934	766.767.946.987	1793,75
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	217.493.110.183,44	417.062.492.269,04	308.803.312.881	25,96
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>3.402.100.028.906</b>	<b>3.807.733.369.924</b>	<b>7.705.265.682.000</b>	<b>102,36</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	694.866.304.495	1.009.724.770.219	0	-100
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.330.020.003.000	2.314.320.067	3.071.553.835.000	132619,49
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	377.213.721.411	483.088.532.705	841.056.511.000	74,09
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	0	0	0	0
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.004.724.062.037,72</b>	<b>9.915.709.777.135</b>	<b>155.312.522.914</b>	<b>-98,43</b>
1.3.1.	Hibah	1.567.116.824	6.786.105.833	0	-100
1.3.2.	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2022

\*Data Berdasarkan Provinsi Papua sebelum pemekaran di Tahun 2023



Dari tabel diatas terlihat bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan atas realisasi penerimaan PAD tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2020, adapun beberapa penjelasan terkait realisasi kinerja sesuai tabel diatas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

**a. Pajak Daerah**

Peningkatan Pajak Daerah pada tahun 2021 berasal dari penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia sebesar Rp. 504.725.035.487,- (lima ratus empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang merupakan hasil putusan Pengadilan Pajak Sengketa Pajak Air Permukaan (PAP)

**b. Retribusi Daerah**

Target Retribusi Tahun 2021 sebesar Rp. 18.406.439.197,- sedangkan target tahun 2022 sebesar sebesar Rp. 7.410.091.220,- terjadi penurunan sebesar 59 %, yang kemungkinan disebabkan oleh :

1. Dampak masalah nasional yaitu Covid -19 yang menyebabkan sebagian obyek tidak berjalan sesuai dengan harapan;
2. Rumah Sakit Daerah Abepura masih melayani dan merawat pasien covid – 19 sehingga berpengaruh pada penerimaan RSUD ( pengurangan ruang rawat inap, pembatasan pelayanan klinik)

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Kontribusi terbesar pada peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari deviden Bank Papua yang terealisasi di Tahun 2022 sebesar Rp. 766.767.946.987,- (tujuh ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) meningkat sebesar Rp. 726.278.569.000 dari tahun 2021.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.**

Peningkatan Lain-lain PAD yang sah ditahun 2022 sebagian besar berasal dari dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur yang masing – masing sebesar Rp 1.580.796.000.000,- dan Rp 2.211.859.336.000,-.



### 3.2.1.2. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah provinsi Papua

Tabel 3.8  
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 – 2022

No	URAIAN	KINERJA REALISASI PENDAPATAN			
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>100,36</b>	<b>95,97</b>	<b>107,84</b>	<b>102,55</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	98,51	118,41	106,35	<b>103,44</b>
1.1.1	Pajak Daerah	101,48	110,43	103,09	115,49
1.1.2	Retribusi Daerah	91,11	108,51	115,71	115,49
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	97,63	126,39	102,24	239,05
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89,07	175,84	121,36	66,89
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	101,80	82,33	79,85	<b>102,29</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BukanPajak	103,44	108,12	147,74	114,61
1.2.2	Dana Alokasi Umum	100,00	99,86	100,00	100
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	104,96	32,63	27,29	94,17
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	100,04	100,04	125,06	<b>0,00</b>
1.3.1	Hibah	122,40	313,42	1.357,22	0,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
1.3.5	Dana Otonomi Khusus	100,00	100,00	125,00	100
1.3.6	Dana Tambahan Infrastruktur	100,00	100,00	125,00	89,45
1.3.7	Sumbangan Pihak Ketiga	422,58	318,7	344,22	-
1.3.8	Dana Intensif Daerah	0,00	0,00	100,00	100,30

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2022

### 3.2.1.3. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Tabel 3.9  
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 – 2024

No	URAIAN	PROYEKSI 2023 (Rp)	PROYEKSI 2024 (Rp)
----	--------	--------------------	--------------------



No	URAIAN	PROYEKSI 2023 (Rp)	PROYEKSI 2024 (Rp)
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.926.498.854.800</b>	<b>3.145.198.206.876</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>587.427.517.800</b>	<b>599.175966.156</b>
1.1.1	Pajak Daerah	366.773.261.800	374.108.727.036
1.1.2	Retribusi Daerah	14.510.000.000	14.800.200.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.518.763.000	42.349.138.260
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.625.393.000	167.917.900.860
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.559.531.918.000</b>	<b>2.770.892.033.340</b>
1.2.1	Dana Perimbangan	2.339.071.337.000	2.546.022.240.720
1.2.2	Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00
1.2.3	Dana Otonomi Khusus	220.460.581.000	224.869.792.620
1.2.4	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>261.576.434.000</b>	<b>266.807.962.680</b>
1.3.1	Hibah	580.361.077.000	591.968.298.540
1.3.2	Dana Darurat	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaian	0	0
1.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga	580.361.077.000	591.968.298.540

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2022





### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tabel 3.9  
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 s.d 2022 (Rupiah)

No.	URAIAN	REALISASI			
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai	2.364.908.576.164,00	2.215.237.393.876,00	2.275.529.404.599,00	2.413.293.504.407,00
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi			250.000.000,00	
2.1.4	Belanja Hibah	1.613.095.350.495,00	2.694.909.709.238,00	3.695.916.305.303,00	1.634.316.326.641,84
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	60.778.240.000,00	51.843.550.000,00	119.937.333.696,91	43.752.760.076,37
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	828.799.492.988,00	472.573.932.979,00	814.343.316.031,00	650.691.965.709,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintah Desa*	2.290.235.705.220,00	2.603.501.328.399,96	2.050.955.258.463,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.000.848.783,00	188.612.418.360,00	119.120.628.800,00	196.021.127.021,00
2.1.9	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>7.172.818.213.650,00</b>	<b>8.226.678.332.852,96</b>	<b>9.076.052.246.892,91</b>	<b>4.938.075.683.855,21</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
2.2.1	Belanja Pegawai		223.467.808.881,00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.012.305.795.609,79	3.541.109.943.103,40	4.665.313.897.647,17	4.487.048.045.881,96
2.2.3	Belanja Modal	2.236.551.423.150,79	839.209.380.704,20	1.116.373.579.615,73	2.029.533.805.428,66
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>6.248.857.218.760,58</b>	<b>4.603.787.132.688,60</b>	<b>5.781.687.477.262,90</b>	
	<b>Total Jumlah Belanja</b>	<b>13.421.675.432.410,60</b>	<b>12.830.465.465.541,60</b>	<b>14.857.739.724.155,80</b>	<b>6.516.581.851.310,62</b>
					<b>11.454.657.535.165,80</b>

Sumber Data : BPKAD Provinsi Papua, 2022 (data diolah)



Tabel 3.10  
Pagu dan Estimasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 s.d 2023 (Rp)

KODE	U R A I A N	PAGU 2023*	ESTIMASI 2024**
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.274.394.051.899,29</b>	<b>599.175966.156</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.055.541.647.393,48	374.108.727.036
4.1.02	Retribusi Daerah	32.817.037.484,23	14.800.200.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.063.468.420,16	42.349.138.260
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	159.971.898.601,42	167.917.900.860
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>7.936.423.652.460,00</b>	<b>2.770.892.033.340</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.936.423.652.460,00	2.770.892.033.340
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		
4.3.01	Pendapatan Hibah		
	Jumlah Pendapatan	<b>9.210.817.704.359,29</b>	<b>3.145.198.206.876</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.943.890.092.365,46</b>	<b>2.463.660.080.159</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.488.571.372.463,9	866.055.091.615
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.205.847.969.549,56	1.484.718.844.387
5.1.05	Belanja Hibah	1.232.772.455.242	95.625.794.529
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.698.295.110,00	17.260.349.629
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.554.948.221.877,26</b>	<b>530.212.969.042</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000	3.570.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.087.842.894,87	119.930.035.129
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.943.881.016,76	104.531.193.701
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	778.342.937.465,63	300.466.916.212
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.573.560.500,00	694.824.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>56.650.000.000,00</b>	<b>11.060.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	56.650.000.000,00	11.060.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>561.160.855.634,82</b>	<b>140.265.157.674</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	561.160.855.634,82	140.265.157.674
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		
	Jumlah Belanja	<b>10.116.649.169.877,54</b>	
	Total Surplus/(Defisit)	<b>(905.831.465.518,25)</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.008.831.465.518,25</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	699.831.465.518,25	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	309.000.000.000,00	



KODE	U R A I A N	PAGU 2023*	ESTIMASI 2024**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.008.831.465.518,25	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	103.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	103.000.000.000,00	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	103.000.000.000,00	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	905.831.465.518,25	
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>		
	<b>TOTAL APBD</b>	10.219.649.169.877,54	

Sumber data: \*Ringkasan APBD- SIPD 2022 ; \*\*proyeksi 3% data diolah

Penyusunan anggaran belanja tahun 2022 berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2023, yang tentunya didasarkan pada beberapa hal yaitu : (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBD; (4) Teknis penyusunan APBD; dan (5) Hal khusus lainnya.

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 6 (enam) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 6 (enam) prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dimaksud, meliputi:

1. Peningkatan akses kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan/ SDM
2. Penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi;





3. Mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan di luar sektor tambang;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi;
5. Pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas teknologi dan informatika antar wilayah
6. Meminimalkan tingkat kerentanan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing- masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD provinsi Tahun 2022. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip- prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan Mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,



bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (HIS), serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2022 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2020–2024, RKP 2021 dan RKP 2022;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial;
9. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas dalam rangka memenuhi janji politik dan program piritas kepala daerah;



10. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di jabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
12. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada tabel 3.9 juga memuat tentang Pembiayaan Daerah karena sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tampilan dan tabel dijadikan satu antara Pembelanjaan dan Pembiayaan. Dalam pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang memuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan yang memuat tentang penyertaan modal daerah.

Arah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembiayaan daerah tahun 2022 diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

### 3.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021, merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif,



transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut dibangun dengan konstruksi yang bersumber dari dua elemen, yaitu:

- (1) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- (2) kristalisasi penggalan aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua.

Kebijakan otsus menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
2. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan
3. Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 pasal 34 ayat 3 huruf e dan f, yaitu :

**Pertama**, Dana Otsus Block Grant (setara 1% dari DAU Nasional) digunakan untuk :

1. Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik;
2. Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan adat;
3. Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

**Kedua**, Dana Otsus Specific Grant (setara 1,25% dari DAU Nasional) digunakan untuk :

1. Belanja pendidikan paling sedikit 30%;
2. Belanja kesehatan paling sedikit 20% ; dan
3. Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Tabel 3.12  
**Realisasi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari  
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2022 ( Dana Otsus 1%)**

Uraian	Realisasi 2022	Capaian (%)
<b>Belanja Administrasi Pemerintahan</b>	589.292.568.518	99,70
<b>Belanj Infrastruktur</b>	9.645.081.150	100,00
<b>Belanja Infrastruktur Air Bersih</b>	352.500.000	100,00
<b>Belanja Kesehatan</b>	3.162.092.606	100,00
<b>Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	1.817.735.250	100,00
<b>Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat</b>	1.485.226.315	100,00
<b>Belanja Sosial</b>	484.200.000	90,00
<b>Total</b>	<b>606.239.403.839</b>	<b>99,70</b>

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua 2023



Tabel 3.13  
**Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua yang Bersumber dari  
Dana Otonomi Khusus Tahun 2022 (Dana Otsus 1,25%)**

Uraian	Realisasi 2022	Capaian (%)
<b>Belanja Administrasi Pemerintahan</b>	521.989.161.779	99,54
<b>Belanj Infrastruktur</b>	9.622.445.650	100,00
<b>Belanja Infrastruktur Air Bersih</b>	352.500.000	100,00
<b>Belanja Kesehatan</b>	188.354.853.722	87,03
<b>Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	7.239.865.456	98,75
<b>Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat</b>	1.549.526.315	100,00
<b>Belanja Pendidikan</b>	12.437.702.734	7,75
<b>Belanja Sosial</b>	1.332.997.060	100,00
<b>Total</b>	<b>742.879.052.716</b>	<b>80,70</b>

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua 2023



## BAB IV

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi sebagaimana yang dituangkan dalam RPD Tahun 2024 - 2026. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024. Disamping harus taat dengan RTRW juga harus berlandaskan RPJPD, dimana rencana pembangunan tahun 2024 ini merupakan bagian perencanaan dari RPD 2024 - 2026 dan merupakan bagian perencanaan tahapan ke lima tahunan dari RPJPD Tahun 2005–2025 Tahap IV, dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk memperkuat Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekoomi dan politik sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Selain itu prioritas pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun 2024.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran dalam RPD



Provinsi Papua juga disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab (IV) empat sebelumnya.

Tabel 4.1

**Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN, dan Isu Strategis Provinsi Papua terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026**

Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025	Agenda Pembangunan RPJMN	Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023 - 2026	Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026
<b>Mewujudkan kemandirian sosial</b>	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing
<b>Mewujudkan kemandirian budaya</b>	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
<b>Mewujudkan kemandirian politik</b>	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
<b>Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah</b>	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar dan Pasar
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur	
<b>Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua</b>	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		

Sasaran merupakan gambaran dampak (impact) keberhasilan pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program pembangunan daerah. Capaian sasaran



pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD dari Provinsi Papua Induk periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2024-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Sasaran Pembangunan RPD merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran.

Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**Tujuan 1 : Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung**

- Sasaran :
1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi
  2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan.
  3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
  4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
  5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
  6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
  7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi
  8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.
  9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah



**Tujuan 2 : Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar**

- Sasaran :
1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
  2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.
  3. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
  4. Menyiapkan papua gerbang ekspor
  5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
  6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
  7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

**Tujuan 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing**

- Sasaran :
1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
  2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat
  3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

**Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

- Sasaran :
1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua.
  2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua.
  3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik





Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka telah dirumuskan dengan 7 (tujuh) tujuan pembangunan, 33 (tiga puluh tiga) sasaran pembangunan beserta target pembangunan Provinsi Papua sampai tahun akhir Periode RPJMD (tahun 2023) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2  
**Matriks Keselarasan Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran**

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD
					2024	2025	2026	
<b>T1</b>	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung							
<b>S1</b>	Pembangunan kampung mandiri ekonomi	Jumlah kampung mandiri yang dikembangkan	Lokasi	1	1	1	1	1
<b>S2</b>	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	90	90.1	90.15	90.2	90.2
		Produktivitas tanaman pangan utama	Ha	45,05	45,5	45,95	46,41	46.41
		Produktivitas perikanan	Ton/Tahun					
		Konsumsi ikan	ton					
		Ketersediaan pangan utama	Ton/Tahun					





Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD
					2024	2025	2026	
<b>S3</b>	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Produksi perikanan	Ton/Tahun	317.329,33	320.502,62	323.707,65	326.944,73	330.214,18
		Nilai tukar petani sub sektor perikanan	indeks	114,55	115,7	116,86	118,03	119,21
<b>S4</b>	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	5.0	5.5	6.0	6.5	6.5
		Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0
		Kontribusi sektor Peternakan terhadap PDRB	Persen	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0
		Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	persen					
<b>S5</b>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	81,46	82,27	83,09	83,92	84,76
		tingkat emisi gas rumah kaca	persen	1.866	1.885	1.904	1.923	1.923
		Indeks Kualitas Udara	indeks	95,32	96,27	97,23	98,2	98,2
		Indeks Kualitas Air	indeks	55,07	55,63	56,18	56,7418	56,7418
		Indeks Kualitas air laut	indeks	87,29	88,16	89,04	89,04	89,04





Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD
					2024	2025	2026	
<b>S6</b>	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	persen					
		Laju Deforestasi	Ha	34.918	34.000	33.500	33.000	33.000
<b>S7</b>	Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	persen	9,37	9.5	10	10.5	10.5
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	1,8	1.9	2	2.1	2.1
		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun	unit					
		Cakupan bina kelompok pengrajin						
		Jumlah Industri rakyat yang dikembangkan	unit					
		jumlah koperasi aktif	unit	583	584	585	586	586
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	15,11	15.5	15.75	16	16
		Jumlah UMKM OAP yang berkembang	unit	3,77	4	4.25	4.5	4.5
<b>S8</b>	Mengoptimalkan peranan sektor	Persentase Pendapatan wilayah	Persen					





Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD
					2024	2025	2026	
	pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	di sektor pertambangan						
		Jumlah unit usaha masyarakat di sektor pertambangan	Unit					
		Persentase tenaga kerja sektor pertambangan	persen					
<b>S9</b>	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp	910,8	950	975	1000	1000
		Jumlah perusahaan PMDN dan PMA	unit	323	324	325	326	326
		Jumlah tenaga kerja	Orang	6.676				
<b>T2</b>	Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar							
<b>S10</b>	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi (%)	Persen					
		Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota	Persen					
<b>S11</b>	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang	Persentase jaringan irigasi	Persen					





Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD
					2024	2025	2026	
	mendukung produktivitas wilayah	provinsi dengan kualitas baik (%)						
<b>S12</b>	Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Cakupan Panjang Jalan	Persen	392,72	394	394	394	394
<b>S13</b>	Menyiapkan papua gerbang ekspor	Tersedianya Papua Gerbang ekspor	Unit	1	1	1	1	1
<b>S14</b>	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	Persen	64,77	65	65.5	66	66
<b>S15</b>	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	persen	44,49	45	45.5	46	46
		Rasio Ketersediaan Daya Listrik	persen	5,77	6	7	8	8
		Jumlah energi Alternatif yang dikembangkan	Unit	1	2	3	4	4
<b>S16</b>	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	60	61	62	63	63
<b>T3</b>	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri dan Berdaya Saing							





Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator kerja	Satuan	Kondisi awal RPD 2023	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD
					2024	2025	2026	
<b>S17</b>	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	tahun	8.21	8.42	8.63	8.84	8.84
		Harapan lama sekolah	tahun	12.0	13.23	14.48	15.69	15.69
<b>S18</b>	Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	Rp/Orang	69.6	70.4	71.2	72	72
<b>S19</b>	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	tahun	70.4	70.4	71.2	72	72
<b>T4</b>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
<b>S20</b>	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua	Nilai SAKIP	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
<b>S21</b>	Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks					
<b>S22</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks					

Sumber: RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026



## 4.2. Perumusan Tema RKPD Tahun 2024

Tema pembangunan tahunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Darah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP 2023, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021.

### 4.2.1. Penyeragaman dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025

**Visi RPJP** : Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik

**Misi RPJP** :

1. Mewujudkan kemandirian sosial
2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua

**Prioritas Pembangunan tahap IV Tahun 2022-2025 :**

Pada periode pembangunan Tahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing.

Pada tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing.





Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua akan memiliki permukiman yang sehat, sistem penyediaan air bersih, jaringan energi listrik terbaharui, sanitasi lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua juga diarahkan untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemampuan pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan menjadi fokus utama pada tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan pada tahap-tahap selanjutnya. Peningkatan infrastruktur, aksesibilitas wilayah serta ketentraman dan ketertiban yang menjadikan keadaan Papua yang kondusif untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal merupakan dasar tema pembangunan pada tahap selanjutnya. Pada tahap berikutnya peningkatan kemampuan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan yang didukung oleh SDM yang berkualitas di seluruh wilayah sudah menjadi dasar pemahaman seluruh masyarakat Papua untuk mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat Papua yang mandiri di segala bidang dalam tata kehidupan yang harmonis dan selaras dengan alam, yang memiliki makna sangat dalam untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Kesejahteraan masyarakat, kemampuan ekonomi lokal yang berdaya saing menjadi tujuan akhir 20 tahun mendatang (tahun 2025), sehingga mampu mencapai visi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.

#### 4.2.2. Penyeragaman dengan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Sesuai RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, fokus pembangunan Provinsi Papua di tahun kelima RPJMD (Tahun 2023) adalah : **Memastikan terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera sebagai dasar pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap terdepat dalam mempertahankan alam dan budaya sebagai aset bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua.**



Pencapaian fokus pembangunan tahun kelima RPJMD 2019-2023 dilakukan berdasarkan evaluasi capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tercapai dari tahun 2019-2021, sehingga prioritas pembangunan tahun 2023 adalah memastikan pencapaian semua tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Tahun 2019-2023 dapat terlaksana sesuai kondisi daerah dan kemampuan keuangan.

Isu strategis Pembangunan Provinsi Papua sesuai RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 yang harus diperhatikan juga yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah;
2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik;
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan;

Selain menelaah dari fokus pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023, perlu juga memperhatikan isu aktual Pembangunan Papua saat ini, antara lain :

1. Perubahan regulasi Otsus yang membutuhkan dasar tata kelola baru yang disesuaikan dengan regulasi Otsus terbaru serta menjamin kesinambungan dengan prioritas otsus yang telah dilaksanakan pada regulasi sebelumnya.
2. Memastikan pencapaian target indikator Pembangunan akhir RPJMD dapat terlaksana di tahun 2023.
3. Pemulihan ekonomi dan adaptasi terhadap pola hidup baru di era pandemi yang belum berakhir.
4. Memastikan momentum keberhasilan ekonomi dan pemanfaatan sarana prasarana PON



yang sudah terbangun secara berkelanjutan untuk pengembangan SDM dan ekonomi Papua.

5. Penyelerasan pembangunan Papua antara semua stackholder dengan berpedoman pada RIPPP.
6. Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan lainnya

#### 4.2.3. Penyelerasan dengan RKP 2024

Tema RKP 2023 **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

**Arah Kebijakan RKP 2024 :**

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (al. Air bersih dan sanitasi)
8. Pembangunan IKN

Tabel 4.3  
**Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024**

NO	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET TAHUN 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,5
2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	1,885
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,50
4.	Rasio Gini (nilai)	0,40



NO	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET TAHUN 2024
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,0
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	24.5

Sumber : RPD 2024-2026 dan RPJPD 2005-2025

#### 4.2.4. Penyelerasan dengan RIPPV Tahun 2022-2041

Visi Pembangunan Papua 2041: "Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera". Upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui **3 (tiga) misi dan sasaran indikator** sebagai berikut:

- Misi-1** : memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
- Misi-2** : memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
- Misi-3** ; meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebelumnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahap I (RAPPP I) tahun 2023-2024 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah Papua di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah.



**Pembangunan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan** diarahkan pada:

- (1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi :
  - a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan akreditasi;
  - b. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan kuantitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan orang asli Papua (OAP).
- (2) Penataan budaya perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan strategi :
  - a. Peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan kabupaten/kota dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
  - b. Peningkatan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
- (3) Penataan budaya dan peningkatan prestasi olahraga, dengan strategi :
  - a. Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat;
  - b. Peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga;
  - c. Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.
- (4) Pembangunan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan diarahkan pada penataan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara merata dengan strategi:
  - a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
  - b. Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan

**Pembangunan ekonomi** diarahkan pada :

- (1) Penataan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi :
  - a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal;





- b. Peningkatan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center).
- (2) Penataan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan strategi :
- a. Peningkatan jangkauan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP;
  - b. Peningkatan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

#### **4.2.5. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (SDGs). Agenda internasional ini untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim yang diupayakan dalam bentuk aksi nyata. Diharapkan agenda ini dapat tercapai di tahun 2030, dengan tujuan dan target meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) meliputi:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;



- 7) Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Agenda SDGs tersebut diatas sangat relevan dengan konteks pembangunan Papua untuk saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu Provinsi Papua juga berupaya sama untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.



Berdasarkan hasil sintesis terhadap 236 indikator TPB kewenangan Provinsi, terdapat 10 (sepuluh) prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi penekanan dan urgensi bagi pembangunan di Provinsi Papua sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
2. TPB 2 : Tanpa Kelaparan
3. TPB 4 : Pendidikan Berkualitas
4. TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
5. TPB 7 : Energi Bersih
6. TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
7. TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan Wilayah
8. TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim
9. TPB 15 : Ekosistem
10. TPB 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Selanjutnya dari hasil KLHS RPJMD, maka TPB yang perlu diperkuat dalam perencanaan program berdasarkan isu strategis yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan masyarakat Papua, khususnya OAP mendapatkan Pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai, Kualitas Sanitasi dan Air Bersih yang layak, Asupan Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang baik, Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang inklusif;
- b. Melakukan perencanaan dan menginternalisasi pembangunan ekonomi hijau dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya masyarakat dan kearifan lokal dalam pembangunan dan tata guna lahan.
- c. Menjaga dan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan koordinasi (tata kelola) Lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam;



#### 4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Provinsi Papua

Perumusan RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena akan menjadi salah satu rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Bagi anggota DPRD penyusunan pokok pikiran ini sekaligus merupakan penyaluran aspirasi masyarakat yang diterima pada saat komunikasi dengan masyarakat. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini telah diupayakan untuk selaras dengan prioritas pembangunan serta ketersediaannya kapasitas anggaran dengan mempertimbangkan asas manfaat, efisien, efektivitas sesuai mekanisme perundangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan nantinya ada kesinambungan program dan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJP 2005 – 2025 dan RPD 2024.

##### 4.2.6.1. Maksud Penyusunan Pokok Pikiran DPRD

✦ **Maksud** disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

- a. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengarahkan penyusunan program pembangunan di Provinsi Papua dengan tujuan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Papua.
- b. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua.

✦ **Tujuan** disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

- a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023;
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA- SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Provinsi Papua melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2023;
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Provinsi Papua dalam pelaksanaan pembangunan



melalui fungsi representasi DPRP;

f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan keterkaitan arahan pembangunan 2024 dari berbagai dokumen rujukan diatas, maka dapat dirumuskan **Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2024** yaitu : “ **Mewujudkan Masyarakat Papua Yang Mandiri Dalam Segala Bidang Dalam Tata Kehidupan Yang Harmonis Dan Selaras Dengan Alam** ”

Tema tersebut mengandung makna bahwa di tahun 2024, pembangunan Provinsi Papua diarahkan untuk memastikan terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan dan Berkelanjutan sesuai visi RPJMD melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Adapun penjabaran tema tersebut dalam beberapa kalimat kunci yang terkandung didalamnya, yaitu :

### **1. Peningkatan Kualitas SDM Papua**

Peningkatan Sumber Daya manusia merupakan tujuan utama pembangunan di Papua, yang pada akhir periode RPJMD 2019-2023 harus mencapai pemerataan akses dan peningkatan kualitas yang signifikan, sekaligus untuk menjawab tuntutan kebutuhan pembangunan Papua yang semakin meningkat, dengan tetap berpegang pada arahan RPJPD yaitu SDM Papua yang berdaya saing dalam kapasitas dan berkarakter dalam budaya.

### **2. Pemantapan Ekonomi Papua**

Pasca pelaksanaan PON XX Tahun 2021, telah membawa berbagai kemajuan ekonomi yang signifikan selain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi lokal serta mulai pulihnya kondisi ekonomi sebagai dampak dari pandemi yang masih berlangsung. Untuk itu Tahun 2023 harus lebih difokuskan untuk memantapkan keberhasilan-keberhasilan ekonomi yang telah dicapai dan pemerataan pengembangan ekonomi di seluruh wilayah Papua.

### **3. Papua yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**



Untuk mengejar ketertinggalan Provinsi Papua dengan Provinsi lainnya di Indonesia, maka diperlukan pendekatan pembangunan Papua yang inklusif sesuai kebutuhan dan kontekstual pembangunan di Papua melalui pembangunan infrastruktur dasar yang memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan serta didukung tata kelola pemerintahan berbasis pendekatan wilayah budaya.

### 4.3. Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 yang telah dirumuskan diatas yaitu: **"Mewujudkan masyarakat Papua yang Mandiri dalam segala bidang dalam Tata Kehidupan yang harmonis dan Selaras"**, maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Prioritas 1** : Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
2. **Prioritas 2** : Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
3. **Prioritas 3** : Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah
4. **Prioritas 4** : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
5. **Prioritas 5** : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kelima Prioritas pembangunan daerah diatas telah selaras dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.4

#### Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2024
I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>• Rendahnya budaya baca pada masyarakat</li> <li>• Rendahnya derajat Kesehatan masyarakat</li> </ul>	1.Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	<b>Peningkatan Kualitas Dan Pemerataan SDM</b>



NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2024
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya Prestasi Olah Raga</li> <li>Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah</li> <li>Belum terinternalisasinya nilai adat dan budaya asli tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat</li> <li>Belum efektifnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP</li> <li>Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan</li> <li>Masih kurangnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan prestasi dan pemanfaatan sarpras olahraga</li> <li>Perlindungan sosial</li> <li>Peningkatan internalisasi adat dan budaya</li> <li>Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak</li> </ol>	
II.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas</li> <li>Belum optimalnya peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan</li> <li>Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim</li> <li>Belum terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif</li> <li>Rendahnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan</li> <li>Kurangnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja</li> <li>Kurangnya daya saing dan realisasi investasi pada sektorsektor andalan daerah</li> <li>Kurang tersedianya pangan yang berkelanjutan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan komoditas unggulan berbasis wilayah adat</li> <li>Implementasi pembangunan berkelanjutan (green growth dan rendah karbon)</li> <li>Peningkatan pemenuhan pangan berkelanjutan</li> </ol>	<p><b>Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan Dan Berkelanjutan</b></p>
III.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah</li> <li>Belum terimplementasinya Rencana Tata Ruang secara konsisten</li> <li>Belum tersedianya sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah</li> <li>Masih kurangnya pemenuhan rumah layak huni dan penataan pemukiman</li> <li>Kurangnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan</li> <li>Minimnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah</li> <li>Rendahnya kualitas pembangunan berbasis kampung</li> <li>Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan</li> <li>Kurangnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Percepatan konektivitas transportasi antar moda</li> <li>Penyediaan infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah (air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi)</li> <li>Percepatan pembangunan infrastruktur kampung, perbatasan dan wilayah terpencil)</li> <li>Ketangguhan dalam adaptasi dan mitigasi bencana</li> </ol>	<p><b>Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah</b></p>



NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2024
IV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum</li> <li>• Kurangnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat</li> <li>• Belum optimalnya Penegakan HAM</li> <li>• Kurangnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi.</li> </ul>	Peningkatan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi papua	<b>Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban</b>
V.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua</li> <li>• Rendahnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>• Rendahnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah</li> <li>• Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan knerja daerah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Perbaikan tata kelola penyelenggaraan Otsus</li> <li>2.Peningkatan pelayanan publik</li> <li>3.Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan</li> </ol>	<b>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan</b>

Adapun keselarasan tema dan prioritas pembangunan daerah RKPD Tahun 2024 dengan Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5  
**Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD 2024 dengan RKP 2024**

RKP 2023	RKPD 2023
Tema : <b>Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>	Tema : <b>Mewujudkan masyarakat Papua yang Mandiri dalam segala bidang dalam Tata Kehidupan yang harmonis dan Selaras</b>
<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan SDM</li> <li>2. Pertumbuhan ekonomi yang iklusif, berkeadilan berkelanjutan</li> <li>3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas</li> </ol>
2. Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan)	Peningkatan Kualitas dan pemerataan SDM
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job	Pertumbuhan ekonomi yang iklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mendorong pemulihan dunia usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ekonomi yang iklusif, berkeadilan dan berkelanjutan</li> <li>2. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban</li> </ol>
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Pertumbuhan ekonomi yang iklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)	Pertumbuhan ekonomi yang iklusif, berkeadilan dan berkelanjutan



RKP 2023	RKPD 2023
Tema : <b>Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>	Tema : <b>Mewujudkan masyarakat Papua yang Mandiri dalam segala bidang dalam Tata Kehidupan yang harmonis dan Selaras</b>
Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (al. Air bersih dan sanitasi)	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas
8. Pembangunan IKN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan berbagai rumusan kebijakan pembangunan dan tema pembangunan di atas, maka prioritas pembangunan daerah dan fokus kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2023 yang diselaraskan dengan prioritas nasional tahun 2023 seperti dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.6  
**Prioritas Pembangunan Dan Fokus Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2024**

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	SKPD
1.	Peningkatan Kualitas dan pemerataan SDM	Akselerasi dan afirmasi pendidikan unggul papua	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah; BPSDM;
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada jenjang SLTA dan SLB	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah;
		Pembangunan dan pengembangan SMK, BLK dan Politeknik berbasis potensi unggulan	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah; Dinas Peridag, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja;
		Penanganan Stunting	Dinas kesehatan, Dinas pertanian dan Pangan; Dinas PUPR; Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah;
		Pengembangan Rumah Sakit Rujukan pada setiap wilayah adat.	Dinas Kesehatan, RSUD Dok 2, RSUD Abepura
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (primer dan rujukan)	Dinas Kesehatan; RSUD Jayapura; RSUD Abepura;
		Pemerataan tenaga kesehatan dan insentif	Dinas Kesehatan; RSUD Jayapura; RSUD Abepura;
		Pengembangan prestasi dan industri olahraga	Dinas Olahraga dan Pemuda; Dinas



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	SKPD
			Pendidikan, perpustakaan dan Arsip Daerah;
		Peningkatan apresiasi dan pemberdayaan lembaga adat dan budaya	Dinas pariwisata dan kebudayaan
2.	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Pengembangan komoditas unggulan masing-masing kabupaten/kota melalui penyediaan perluasan lahan, penyediaan bibit, penyediaan sarpras dan penguatan pendampingan pada petani.	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas KLH
		Pengembangan industri hilirisasi pertanian, peternakan dan perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan;
		Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah dan kabupaten/kota melalui peningkatan produksi dan peningkatan penyediaan sarana prasarna distribusi	Dinas Pertanian dan Pangan; DKP; Dinas Peridag, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan
		Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Peridag, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan
		Penguatan kemandirian kampung berbasis komoditas lokal	DPMK dan OAP; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas KLH; DKP; Dinas Peridag, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja; Badan Perbatasan dan Kerjasama;
		Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Kehutanan dan LH;
		Reformasi kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana melalui pengenalan operasi dan penyediaan sarpras kesiapsiagaan terhadap	Satpol PP dan Penanggulangan Bencana; Dinas PUPR; Diskominfo;



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	SKPD
		bencana serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	
		Perlindungan sosial	Dinas Sosial, Kependudukan, PPPA;
3.	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas	Peningkatan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi dan akses bagi seluruh masyarakat	Dinas Perhubungan, Dinas PUPRKP
		Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Dinas PUPRKP
		Ketersediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan dan air limbah	Dinas PUPRKP
		Penyediaan energi baru dan terbarukan	Dinas ESDM
		Penyediaan dan pengelolaan air baku	Dinas PUPRKP
		Pengendalian banjir dan abrasi pantai	Dinas PUPRKP
		Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah	Diskominfo
		Pengendalian pemanfaatan ruang	Bappeda, Dinas PUPR
4.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Memperkuat peran lembaga adat, keagamaan dalam kemitraan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	Badan Kesbangpol, Sekretariat Daerah, Biro Hukum, Biro Kesra
		Menciptakan dan melembagakan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Badan Kesbangpol, SatpolPP dan penanggulangan Bencana; Diskominfo; Badan Perbatasan dan Kerjasama;
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan tata kelola otsus melalui integrasi perencanaan, pengalokasian dan pelaksanaan anggaran	Bappeda; BPKAD; Inspektorat; Biro Hukum; Biro Layanan Pengadaan; sekretariat MRP; Biro



No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	SKPD
			Tapem dan Otsus;
		Transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pencegahan korupsi	Biro Organisasi; Inspektorat; Sekretariat DPRP;
		Pembinaan kabupaten/kota untuk penguatan kapasitas kelembagaan distrik dan kampung	Biro Tapem dan Otsus;
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem informasi dan aplikasi	Biro Organisasi; Biro Umum dan Protokoler; Biro Tapem dan Otsus; Diskominfo; Sekretariat DPRP;
		Pengelolaan pendapatan daerah	Bapenda
		Penguatan dan peningkatan perijinan	DPM-PTSP
		Penguatan kapasitas penyelenggara pemerintahan dengan berbasis kinerja	Sekretariat Daerah, Biro Organisasi, BKD, BPSDM

Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma **"Money Follow Program Priority"** atau dalam terjemahan "Uang Mengikuti Program Prioritas". Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu **"Money Follow Function"** yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2023, maka ketersediaan anggaran diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023. Oleh karena itu dibutuhkan kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah.



#### 4.4. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas Pembangunan tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPD 2024 dan RPJPD 2005 - 2025. Adapun Sasaran Makro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2024 sebagai perwujudan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025, adalah:

Tabel 4.7  
**Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2023**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET 2024
1.	IPM	Indeks	62	80,0
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	9	5
3.	Gini Rasio	%	0.39	0,40
4.	Pengangguran Terbuka	%	2.00	2.40
5.	Intensitas Emisi GRK	Ton CO2/Juta rupiah	1,886	1,885

Keterkaitan sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2023 dalam mendukung sasaran makro pembangunan nasional tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8  
**Keselarsan Sasaran Makro Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2023**

SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RKP2023	SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI PAPUA 2023
Pertumbuhan Ekonomi <b>(5,3 - 5,9 %)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Pertumbuhan Ekonomi <b>(5 – 6,5%)</b></li> <li> PDRB Perkapita Tanpa Tambang <b>(50 juta rupiah)</b></li> </ul>
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca <b>(27,02 %)</b>	Intensitas Emisi GRK <b>0,282 Ton CO2/Jutarupiah</b>



SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RKP2023	SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI PAPUA 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka <b>(5,3 – 6,0%)</b>	Pengangguran Terbuka <b>(2,57 – 1,75 %)</b>
Rasio Gini <b>(0,375 – 0,378)</b>	Gini Rasio <b>(0,385%)</b>
Indeks Pembangunan Manusia/ IPM <b>(73,29 -73,35)</b>	IPM <b>(65)</b>
Tingkat Kemiskinan <b>(7,0 – 8,0%)</b>	Persentase Penduduk Miskin <b>(20 %)</b>

Adapun keterkaitan antara indikator sasaran prioritas nasional RKP 2023 dengan indikator sasaran prioritas pembangunan Provinsi Papua tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9  
**Keselarasn Indikator Sasaran Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2024**

FOKUS RKP 2024	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2024	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI PAPUA 2024 *)
<b>Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Penghapusan <b>kemiskinan ekstrem 1,5-2,0% (2023) → 0-1% (2024)</b></li> <li>✦ Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial <b>91%</b></li> <li>✦ Nilai Tukar Petani /Nelayan <b>103-105/105-107</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ NTP perikanan budidaya 100</li> <li>✦ Cakupan penanganan daerah rawan pangan 65%</li> <li>✦ Cakupan warga KAT yang meningkatkan kesejahteraannya (diberdayakan) 50 KAT</li> <li>✦ Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial</li> </ul>
<b>Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14% (2024)</li> <li>✦ Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk</li> <li>✦ Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%</li> <li>✦ Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %</li> <li>✦ Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%</li> <li>✦ Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun</li> <li>✦ Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,2 tahun</li> <li>✦ Harapan Lama Sekolah 12 tahun</li> <li>✦ Penduduk yang berusia &gt;15 Tahun melek huruf 80%</li> <li>✦ Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3 : 60%</li> <li>✦ Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah 300 org/hari</li> <li>✦ Angka Harapan Hidup 69,59%</li> <li>✦ Angka Kematian Bayi (AKB) 4 per 1000 penduduk</li> <li>✦ Angka Kematian Ibu (AKI) 183,3</li> <li>✦ Prevelensi Stunting ..??</li> <li>✦ Angka Kesakitan 3%</li> </ul>



FOKUS RKP 2024	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2024	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI PAPUA 2024 *)
<p><b>Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %</li> <li>✦ Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%</li> <li>✦ Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang</li> <li>✦ Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional dan internasional 100 atlet</li> <li>✦ Persentase organisasi pemuda yang aktif 75%</li> <li>✦ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 80%</li> <li>✦ Tingkat Kesempatan Kerja 98,34</li> </ul>
<p><b>Mendorong pemulihan dunia usaha</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Pertumbuhan Wirausaha 3,50%</li> <li>✦ Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 %</li> <li>✦ Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar</li> <li>✦ Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%</li> <li>✦ Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan 22,8%</li> <li>✦ Jumlah UMKM yang berkembang 4000 UMKM</li> <li>✦ Jumlah Kunjungan Wisatawan 1500 orang</li> <li>✦ Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB 10%</li> </ul>
<p><b>Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4- 5,9 %</li> <li>✦ Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6%</li> <li>✦ Produk Inovasi dan Produk Prioritas Nasional yang Dihasilkan 10 Peringkat Global Innovation Index 75-80</li> <li>✦ Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas <b>5,55-6,08%</b></li> <li>✦ Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 4%</li> <li>✦ Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan : 4 kawasan</li> </ul>
<p><b>Pembangunan rendah karbon dan transisi energi(respon terhadap perubahan iklim)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %</li> <li>✦ Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT- kumulatif 1.778,2 GW</li> <li>✦ Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan</li> <li>✦ Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Indeks Kualitas Udara 95%</li> <li>✦ Indeks Kualitas Air 80%</li> <li>✦ Indeks Kualitas Tutupan Lahan 85%</li> <li>✦ Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 30%</li> <li>✦ Intensitas Emisi GRK 0,282 Ton CO2/Juta rupiah</li> </ul>
<p><b>Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (al. Air bersih dan sanitasi)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Volume tampungan air per kapita 54,50m3/det</li> <li>✦ Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman <b>(82,07 layak, termasuk 11,5 aman)</b></li> <li>✦ Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%</li> <li>✦ Masyarakat Pengguna Internet 80,7%</li> <li>✦ Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 65%</li> <li>✦ Persentase luas cakupan layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik 65%</li> <li>✦ Presentasi pengendalian dayarusak air <b>80%</b></li> <li>✦ Cakupan rumah tangga dengansanitasi baik <b>40%</b></li> <li>✦ Cakupan rumah tangga dengan airbersih layak <b>45%</b></li> <li>✦ Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan <b>??</b></li> <li>✦ Cakupan layanan telekomunikasi</li> </ul>





FOKUS RKP 2024	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2024	INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI PAPUA 2024 *)
		<b>60%</b> ✦ Proporsi rumah tangga dengan akses internet <b>10%</b>
<b>Pembangunan IKN</b>	✦ Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A ✦ Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*	

Sedangkan keterkaitan Prioritas Daerah dan Program Pembangunan Tahun 2023 dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :





Tabel 4.10

**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan Program Prioritas Provinsi Papua Tahun 2023**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD	
<b>PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMERATAAN SDM</b>	<b>Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan</b>	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,76	8,21	1. Akselerasi dan afirmasi pendidikan unggul Papua 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada jenjang SLTA & SLB. 3. Pembangunan dan pengembangan SMK, BLK dan Politeknik berbasis potensi unggulan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Arsip Daerah	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,11	12				
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	78,89	80				
	<b>Meningkatnya Budaya Baca Pada Masyarakat</b>	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang per hari			300	Perluasan dan peningkatan sarana prasarana perpustakaan dan minat baca masyarakat	1. Program Pembinaan Perpustakaan 2. Program Pengelolaan Arsip	Dinas Pendidikan, Perpustakaan & Arsip Daerah
	<b>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,93	69,59	1. Penanganan Stunting 2. Pengembangan Rumah Sakit Rujukan pada setiap wilayah adat. 3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan	Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 penduduk		4				
		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1000 kelahiran hidup		183,3				
		Prevalensi Stunting	Persen	29,5-26,2	25				





Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
		Angka Kesakitan	Persen		3	(primer & rujukan) 4. Pemerataan tenaga kesehatan dan insentif	Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bdadng Kesehatan	
	<b>Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah</b>	Persentase organisasipemuda yang aktif	Persen	14,75	75	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan terutama bidang kewirausahaan	1. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 2. Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Dinas Olahraga & Pemuda
		Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	Persen	n/a	22,8			
	<b>Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli tanah Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat</b>	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	Jumlah		1	1. Peningkatan apresiasi adat dan budaya di berbagai bidang 2. Penguatan pemberdayaan lembaga adat dan budaya	1. Programn Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 3. Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual 4. Program Pengembangan sumber daya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan





Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
							pariwisata dan ekonomi kreatif	
	<b>Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	97,54	73	Percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur didasrah tertinggal, perbatasan, terluar dan tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatam Kesejahteraan Orang Asli Papua</li> <li>2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li> </ol>	Badan Pembangunan kampung & OAP
	<b>Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan</b>	Rata-rata lama sekolah wilayah perbatasan	Tahun	8,17	12	Percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur didasrah tertinggal, perbatasan, terluar dan tertentu.	Program Pengelolaan Perbatasan	Badan Perbatasan & Kerjasama
Angka harapan hidup wilayah perbatasan		Tahun	65,88	68				
Pengeluaran perkapita wilayah perbatasan		Rp.juta perkapita	8,85	13,12				
		Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun		50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan sosial</li> <li>2. Perluasan aksesibilitas penanganan kesejahteraan sosial yang terpadu dan komprehensif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</li> </ol>	Dinas Sosial, Kependudukan, PPPA





Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Realisasi 2023	Target 2024	Penjabaran Fokus Pembangunan	Program Prioritas	SKPD
	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang pertahun	3,432	50		3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penanganan Bencana 6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	



Adapun keterkaitan antara prioritas daerah dan program pembangunan daerah RPKD Provinsi Papua Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11  
**Keterkaitan Arah Kebijakan RKP dengan Program Prioritas RKPD Provinsi Papua Tahun 2024**

Arah Kebijakan RKP2024	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Program Prioritas RKPD2024
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM</li> <li>2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan</li> <li>3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatam Kesejahteraan Orang Asli Papua</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)</li> <li>• Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>• Program Pengelolaan Perbatasan</li> <li>• Program pengembangan perumahan</li> </ul>
Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan)	Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>• Program Penanganan kerawanan pangan</li> </ul>



Arah Kebijakan RKP2024	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Program Prioritas RKPD2024
Penanggulangan penganggurandisertai peningkatan decent job	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>• Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</li> <li>• Program Pengembangan iklim penanaman modal</li> </ul>
Mendorong pemulihan duniausaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjuta</li> <li>2. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, perkebunan, peternakan</li> <li>• Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual</li> <li>• Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>• Program Pengelolaan Hutan</li> <li>• Program Pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>• Program Perikanan tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan perikanan budidaya</li> <li>• Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</li> <li>• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>• Program Pengelolaan SistemInformasi Industri</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> <li>• Program Pemberdayaan UMK, UMKM</li> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> </ul>



Arah Kebijakan RKP2024	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Program Prioritas RKPD2024
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistem</li> <li>• Program Perencanaan lingkungan hidup</li> <li>• Program Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>• Program Pengelolaan keanekaragaman hayati</li> <li>• Program Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup</li> </ul>
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (al. Air bersih dan sanitasi)	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyelenggaraan jalan</li> <li>• Program pengelolaan pelayaran</li> <li>• Program pengelolaan penerbangan</li> <li>• Pengelolaan Ketenagaan Kelistrikan</li> <li>• Program pengelolaan dan</li> <li>• Program Pengembangan sistem penyediaan air Minum</li> <li>• Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional</li> <li>• Program pengembangan permukiman</li> <li>• Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</li> </ul>
Pembangunan IKN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh program kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai sektor pembangunan</li> </ul>



Tabel 4.12  
**Keterkaitan Arah Kebijakan RIPP dengan Program Prioritas RKPD  
Provinsi Papua Tahun 2024**

Arah Kebijakan RIPP	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Program Prioritas RKPD2024
<b>PAPUA SEHAT</b>		
1. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>
3. Membudayakan hidup sehat & tatakelola pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>• Program Penanganan kerawanan pangan</li> <li>• Peningkatan diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat</li> <li>• Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</li> </ul>
4. Meningkatkan pembudayaan & prestasi olahraga	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</li> </ul>
<b>PAPUA CERDAS</b>		
Menumbuhkan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua secara merata	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ul>



Arah Kebijakan RIPP	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Program Prioritas RKPD2024
<b>PAPUA PRODUKTIF</b>		
1. Meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>• Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</li> <li>• Program Pengembangan iklim penanaman modal</li> </ul>
2. Meningkatkan daya saing, industri, perdagangan dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> <li>• Program Pemberdayaan UMK, UMKM</li> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> </ul>
3. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li> <li>• Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> </ul>
4. Mengembangkan pemerataan kawasan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, perkebunan, peternakan</li> <li>• Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual</li> </ul>



Arah Kebijakan RIPP	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Program Prioritas RKPD2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>• Program Pengelolaan Hutan</li> <li>• Program Pengelolaan kelautanpesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>• Program Perikanan tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan perikananbudidaya</li> <li>• Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</li> </ul>
<b>KONDISI PERLU</b>		
<p>1. Infrastruktur dasar &amp; konektivitas</p>	<p>Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyelenggaraan jalan</li> <li>• Program pengelolaan pelayaran</li> <li>• Program pengelolaan penerbangan</li> <li>• Pengelolaan KetenagaanKelistrikan</li> <li>• Program pengelolaan dan</li> <li>• Program Pengembangan sistempenyediaan air Minum</li> <li>• Program pengembangan sistem danPengelolaan persampahan regional</li> <li>• Program pengembangan permukiman</li> </ul> <p>6. rogram peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</p>
<p>3. Lingkungan Hidup</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi yang inklusif,berkeadilan dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan lingkungan hidup</li> <li>• Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>• Pengelolaan keanekaragamanhayati</li> <li>• Pengendalian bahan berbahaya danberacun</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan perlindungan dan pengolahanlingkungan hidup</li> </ul> <p>5. engakuan keberadaan hukummasyarakat adat, kearifan localyang terkait dengan PPLH</p>



## BAB V

# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

### 5.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan bagian dari arah kebijakan pengembangan wilayah. Pendekatan pengembangan wilayah di Provinsi Papua berdasarkan pendekatan wilayah budaya/adat yang bertujuan untuk memudahkan pendekatan-pendekatan pembangunan sesuai karakteristik budaya dan keunggulan komparatif yang berbeda-beda antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah budaya. Setelah Pemekaran Daerah Otonomi Baru, maka mulai tahun 2021 Provinsi Papua memiliki 2 (dua) Wilayah Adat yaitu Wilayah Adat Mamta/Tabi dan Wilayah Adat Saireri yang meliputi kabupaten/kota sebagai berikut :

- Wilayah Adat Mamta yang terbagi atas kabupaten yang berada disepanjang Sungai Mamberamo hingga Lautan Pasifik yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya dan Sarmi;
- Wilayah Adat Saireri yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di Wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen

#### 5.1.1. Kerangka Pengembangan Wilayah

Dalam 3 (tiga) tahun mendatang pasca pemerakaran wilayah, Arah Kebijakan Utama Pengembangan Wilayah Provinsi Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif. Untuk mewujudkan hal ini, maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan- tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah,





memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat Asli Papua. Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan Karakteristik Wilayah Adat Papua.

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Provinsi Papua (RIPPP), arahan Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua perlu dilakukan upaya Afirmasi untuk Wilayah Adat di Provinsi Papua melalui:

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pembangunan Kampung, dan Pendampingan Masyarakat Adat;
2. Penguatan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam kepemilikan dan pengelolaan Wilayah adat, meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat, melalui:
  - a. Pengalokasian Dana dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara khusus didedikasikan untuk pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat;
  - b. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang khusus bertugas dan bertanggung jawab menyediakan perlindungan, pembelaan, dan pelayanan kepada masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP; dan
  - c. Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP yang berfungsi mendidik dan melatih pemuda/masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP untuk pemetaan wilayah adat, pengorganisasian masyarakat, penguatan kelembagaan adat, pengembangan mata pencaharian, dan peningkatan ekonomi yang berbasis adat pada setiap wilayah adat.
3. Peningkatan Keterlibatan Aktif masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP dalam pembangunan bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan;





4. Penguatan Komunikasi Sosial antar masyarakat/lembaga adat, maupun antara masyarakat/lembaga adat dengan pemangku kepentingan, serta mendorong kerja sama antar daerah;
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
6. Peningkatan Kedewasaan Politik, Literasi Politik, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
7. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Kebijakan Khusus terhadap Masyarakat Adat/OAP yang tidak mempunyai identitas, melalui: SK No 145616 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  - a. Pembangunan Pusat Data Etnografi Masyarakat Adat/OAP yang menyediakan data spasial dan numerik untuk pencatatan dan pengadministrasian keberadaan masyarakat adat/ OAP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada setiap wilayah adat; dan
  - b. Pembangunan Sistem Pendaftaran, Verifikasi, dan Pengadministrasian Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di tingkat Pemerintah Provinsi.
8. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, pusat industri dan jasa, serta simpul utama transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa provinsi, serta sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan, melalui:
  - a. Pemantapan keterkaitan PKN dengan kota-kota utama di Wilayah Indonesia Bagian Timur, Bagian Barat, dan Negara Asia Pasifik melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi;
  - b. Penyediaan Prasarana Perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu;
  - c. Peningkatan Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan;
  - d. Pengembangan Kegiatan Ekonomi (industri, jasa, perdagangan, perbankan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
  - e. Pengembangan kerja sama pembangunan dengan kota-kota lain (Sister City); dan Peningkatan Kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan



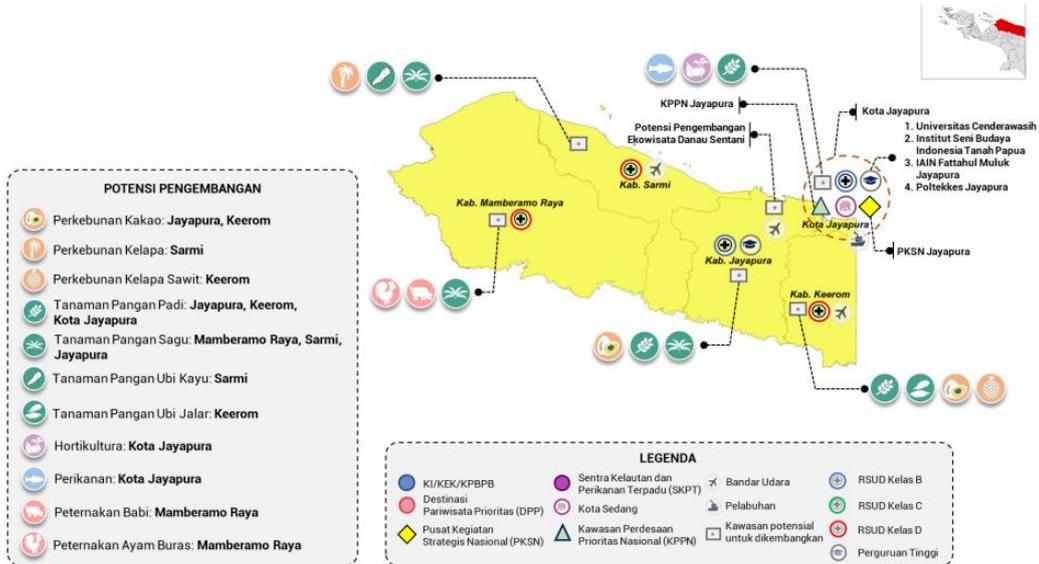
ekonomi utama PKN, terutama jasa, industri, dan perdagangan.

9. Pengembangan Pusat Kegiatan W(PKW) sebagai simpul kedua ekspor impor yang mendukung PKN, pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani Skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota, melalui:
  - a. Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam Provinsi;
  - b. Penyediaan Prasarana Perkotaan sesuai Fungsi Kota dengan Pendekatan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu;
  - c. Peningkatan Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan;
  - d. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
  - e. Penataan Ruang Kota melalui Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota.
10. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai Pusat Industri dan Jasa, serta Simpul Transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa distrik, melalui:
  - a. Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam kabupaten;
  - b. Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya; SK No 145615 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -58-
  - c. Peningkatan Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan;
  - d. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
  - e. Penataan Ruang Kota melalui Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota.

#### **5.1.1.1. Arah Pengembangan Wilayah Adat Tabi**



Gambar 5.1  
**Arah Pengembangan Wilayah Adat Tabi**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Tabi yaitu: Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang terstandar, serta Pengembangan Wilayah Adat Tabi sebagai sentra perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, pusat industri, perdagangan, jasa, serta perkotaan yang berkelanjutan. Arah Kebijakan tersebut dilakukan melalui Strategi :

1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Fasilitas Kesehatan Rujukan;
2. Meningkatkan Akses Pelayanan Pendidikan sesuai Standar;
3. Memperkuat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta mengembangkan Pusat-Pusat Keahlian Ketenagakerjaan (Skill Development Center);
4. Membangun Sarana Prasarana Perhubungan Laut Terpadu, Perhubungan Darat dan Perhubungan Udara sebagai Sarana Distribusi Barang dan Mobilitas Penumpang serta mempercepat Peningkatan Konektivitas Jalan dan Aksesibilitas Telekomunikasi;
5. Mendorong Pemenuhan Ketersediaan Tenaga Listik melalui Pengembangan Pembangkit





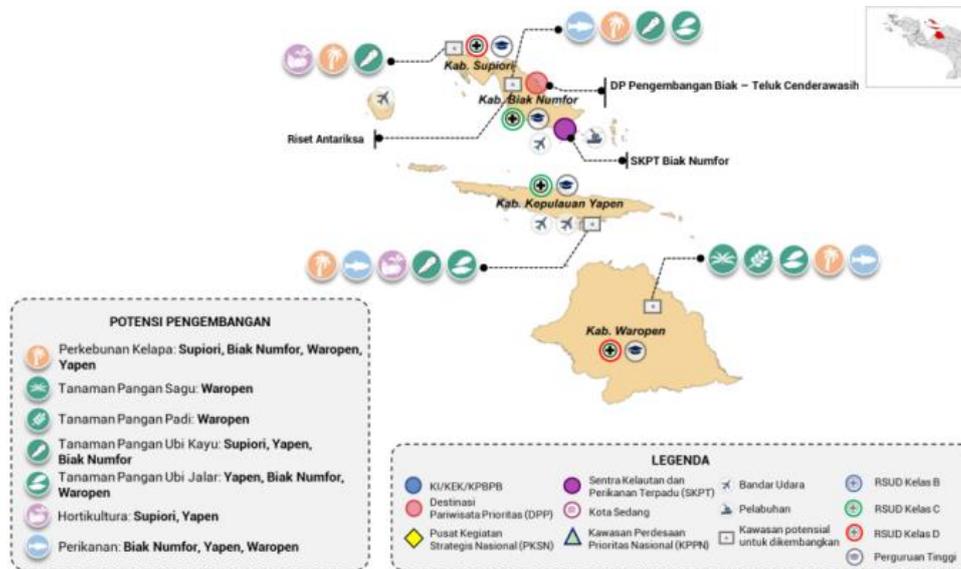
EBT;

6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Dana Kampung untuk memperbaiki Belanja Kampung dan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Kampung;
7. Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan dan Inovasi Pengusaha Muda;
8. Mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
9. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dengan :
  - a. Mengembangkan Sentra Perkebunan dan Peternakan yang didukung Pemanfaatan Teknologi, Sistem Informasi dan Kemitraan Usaha;
  - b. Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Tanaman Pangan, Hortikultura, serta Kelautan dan Perikanan;
  - c. Mengembangkan Pusat Industri, Perdagangan dan Jasa untuk mendukung Pasar Komoditas Unggulan Strategis Papua;
  - d. Mengembangkan Perkotaan yang berkelanjutan untuk mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pusat Pelayanan Primer dan Sekunder serta Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara;
  - e. Mengembangkan Ekowisata Berkelanjutan dan Berorientasi Global serta mendorong Pemberdayaan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara.



### 5.1.1.2. Arah Pengembangan Wilayah Adat Saireri

Gambar 5.2  
Arah pembangunan Wilayah Adat Saireri



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Saireri yaitu: Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang terstandar, serta Pengembangan Wilayah Adat Saireri sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Ekowisata Berkelanjutan dan Berorientasi Global, serta Riset Antariksa. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui Strategi:

1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Fasilitas Kesehatan Rujukan;
2. Meningkatkan Akses Pelayanan Pendidikan sesuai Standar;
3. Mernperkuat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta mengembangkan Pusat-Pusat Keahlian Ketenagakerjaan (*Skill Development Center*);
4. Membangun Sarana Prasarana Perhubungan Laut Terpadu, Perhubungan Darat, dan Perhubungan Udara sebagai Sarana Distribusi Barang dan Mobilitas Penumpang, serta mempercepat Peningkatan Konektivitas Jalan dan Aksesibilitas Telekomunikasi;
5. Mendorong Pemenuhan Ketersediaan Tenaga Listrik melalui Pengembangan Pembangkit





EBT;

6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Dana Kampung untuk memperbaiki Belanja Kampung dan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Kampung;
7. Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan dan Inovasi Pengusaha Muda;
8. Mengembangkan Pusat Riset Antariksa;
9. Mengelola dan melindungi Potensi Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal;
10. Mengembangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
11. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah, dengan:
  - a. Mengembangkan Sentra Kelautan dan Perikanan yang didukung Pemanfaatan Teknologi, Sistem Informasi, dan Kemitraan Usaha;
  - b. Maksimalisasi Pemanfaatan Potensi Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura; serta
  - c. Mengembangkan Ekowisata Berkelanjutan dan Berorientasi Global

### 5.1.2. Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Arahan RTRW Provinsi Papua

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua, Skenario pengembangan wilayah provinsi Papua, dibagi dalam 3 wilayah pengembangan, yang meliputi:

**Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya dengan fokus pengembangan, yaitu (1) Kabupaten Keerom dengan pertanian (*food estate*, tanaman pangan dan perkebunan) dan pertambangan; (2) Kabupaten Sarmi dengan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (*PICHO/Papua Home industri Coconut Oil*); (3) Kabupaten Jayapura dengan pertanian dan industri; serta (4) Kota Jayapura sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata;

**Wilayah pengembangan II**, yaitu (1) Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari; serta (2) Kabupaten Supiori dengan pengembangan perikanan dan pariwisata; dan

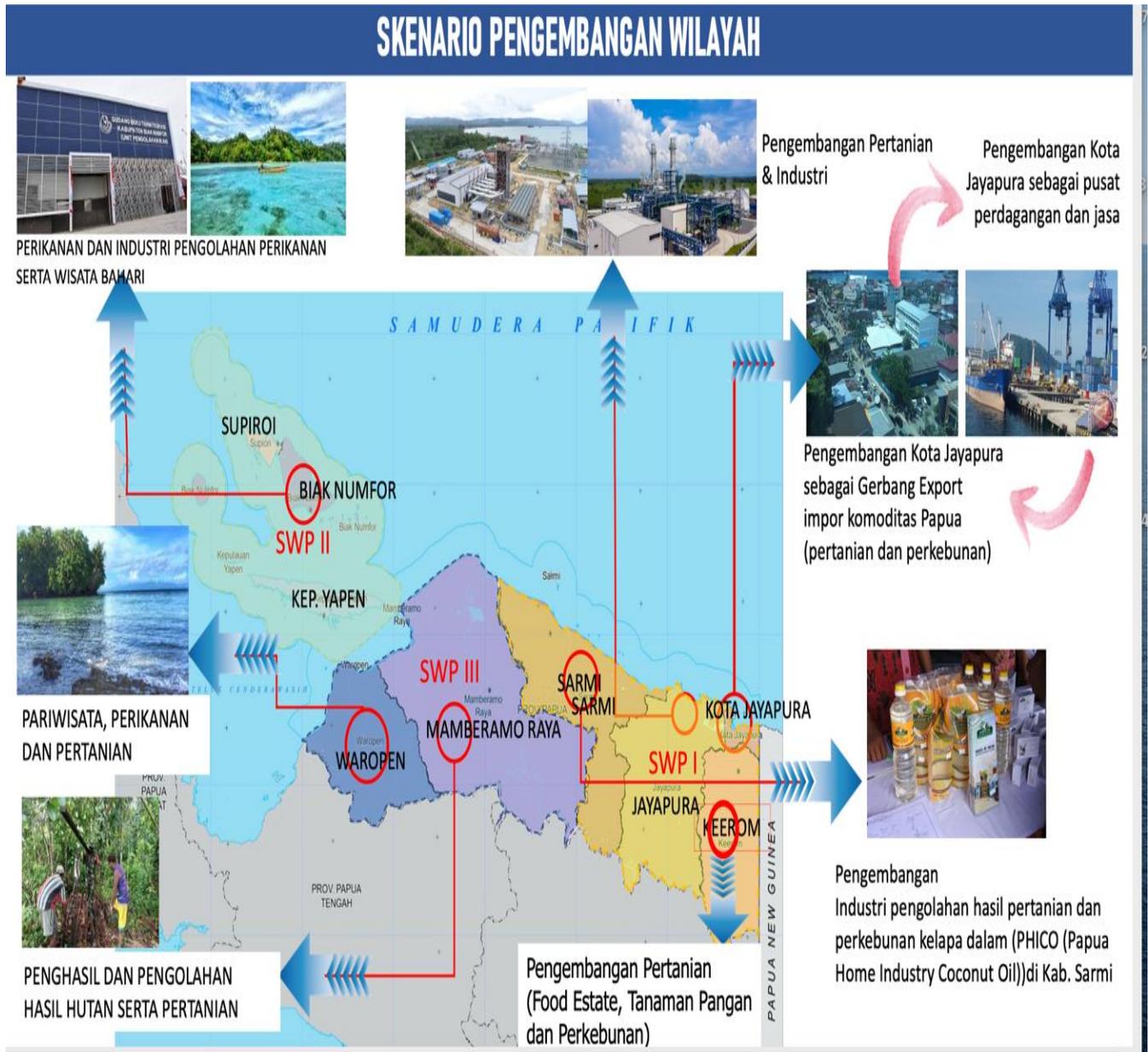
**Wilayah pengembangan III**, yaitu (1) Kabupaten Mamberamo Raya dengan pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta (2) Kabupaten Waropen meliputi pariwisata,





perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.

Gambar 5.3  
**Peta Pengembangan Provinsi Papua**



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022





## BAB VI

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran “money follow function kepada money follow program”, maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan : (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD Tahun 2024, dengan langkahlangkah sebagai berikut : (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang





menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan akhir RKPD Tahun 2024, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra- Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

## 6.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2020-2024. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2024 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 6.1

## 6.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pendanaannya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 6.2 sebagai berikut





## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan yang dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan yang diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut; maka perangkat kerja pemerintah daerah harus mampu menerapkan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pembangunan dalam dinamika serta suasana kerja yang kondusif, sinergi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sejak dimulainya proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Prinsip Good Governance merupakan komitmen yang mutlak diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan profesionalisme, transparansi, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan variabel-variabel pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran serta program kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Variabel-variabel dimaksud, kemudian disebut dengan Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal; maka ditetapkan suatu variabel pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas pada setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman dari pada sasaran prioritas pembangunan pada masing-masing sektor pembangunan.





## 7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menjadi target capaian dalam sebuah periode pembangunan. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu target capaian dari pada program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2020-2024. Berikut masing-masing indikator kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua, dapat dikemukakan pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1  
**Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2024**

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.42
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.23
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	80.8
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.4
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	15
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	76.2





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Target 2024
	pembangunan daerah				
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	Jumlah Kab/Kota	7
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7610
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78.68
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokras	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	50
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program program Otsus yang direncanakan	Persen	100
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB
		9.2	Capaian implementasi e-government	persen	95
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPD	persen	100
	program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.2	Tingkat konsistensi KUAPPS terhadap RKPD	persen	95
		10.3	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RAP	persen	95
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Target 2024
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	14.27
		11.3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	persen	66.1
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	5.5
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	6
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	6
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksimitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	indeks	95
		13.2	Indeks Kualitas Air	indeks	80
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	85
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	persen	12.1
		14.2	Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasi terhadap pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindakop, UMKM)	STC per tahun	40
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	91.62
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	60





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Target 2024
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen	50
19	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	81
20	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	41
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	45.5
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Kampung Membangun	indeks	52
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	73.5
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	12.05
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	68.8
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.1
24	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	60
		24.2	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	60
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	sedang





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Target 2024
26	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	80.1
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	65.1

Sumber : RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Tabel 7.2  
**Target Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2024**

No	Indikator	Satuan	Kondisi 2021	Tahun 2022			Proyeksi		Target Capaian RPD
				Target	Realisasi	Capaian	2023	2024	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	60.22	61.13	61,65		67.67	67.85	
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	27.38	26.21	25.00		25.00		
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	15.11	17.17	5-6,5		5,3-5,9	6,5-6,7	6,9-7,2
4.	PDRB Perkapita	Rp/Juta	41.53	45.34	48,23		48.23		
5.	Gini Rasio	%	0.396	0.395	0,390		0.390		
6.	Tingkat Pengangguran	%	3.33	3.25	3,18		3.18		





Tabel 7. 1  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Tahun 2024-2026**

No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.21	8.42	8.63	8.84	8.84
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.0	13.23	14.48	15.69	15.69
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	80.0	80.8	81.6	82.4	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69.6	70.4	71.2	72	72
3.	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	100	15	30	50	50
4.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	75.0	76.2	77.4	78.6	
5.	Meningkatnya ketersediaan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	Jumlah Kab/Kota	7.0	7	7	6	6





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
	pangan yang berkelanjutan	5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7600.0	7610	7620	7630	7630
6.	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	77.7	78.68	79.68	80.68	80.68
7.	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokras	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95.0	95	95	96	96
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	50.0	50	50	51	51
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60.0				
8.	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program program Otsus yang direncanakan	Persen	100	100	100	100	100
9.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB	BB	BB	BB	
		9.2	Capaian implementasi e-government	persen	95	95	95	95	Regulasi yang berubah
10.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	100	95	95	95	Regulasi yang berubah





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
	pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.2	Tingkat konsistensi KUAPPS terhadap RKPD	persen		95	95	95	Regulasi yang berubah
		10.3	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RAP	persen		95	95	95	Regulasi yang berubah
11.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggung- jawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	13.30	14.27	15.24	16.21	16.21
		11.3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	persen	66.00	66.1	66.2	66.3	66.3
12.	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	5.0	5.5	6.0	6.5	6.5
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0
13.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan	13.1	Indeks Kualitas Udara	indeks	95.0	95	95	95	95





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
	aksimitigasi perubahan iklim	13.2	Indeks Kualitas Air	indeks	80.0	80	80	80	80
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	85.0	85	85	85	85
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	63160.5				
14.	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	persen	12.00	12.1	12.2	12.3	12.3
		14.2	Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasi terhadap pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindakop, UMKM)	STC per tahun	20	40	20	20	20
15.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	98.34	91.62	91.7	91.78	91.78
16.	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	64.93				





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
17.	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	55.00	60.00	65.00	70.00	70
18.	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen	50.00	50	50	50	50
19.	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	80.00	81	82	83	83
20.	Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	40.00	41	42	43	43
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	45.25	45.5	45.75	46	46
21.	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Kampung Membangun	indeks	52.00	52	52.5	52.5	52.5





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
22.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	73.00	73.5	74	74.5	74.5
23.	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	12.00	12.05	12.1	12.15	12.15
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	68.00	68.8	69.6	70.4	70.4
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.00	14.1	14.2	14.2	14.2
24.	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	50	60	70	80	80
		24.2	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	50	60	70	80	80
25.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	tinggi	sedang	rendah	rendah	rendah





No	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD/RPJMD		Target Tahun Ke		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
26.	Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	80.00	80.1	80.2	80.3	80.3
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	65.00	65.1	65.2	65.3	65.3





Tabel 7. 2  
**Target Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2024**

No	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Tahun 2021			Proyeksi			Target RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	60.44	63.27	60.22	98.17	61.13	61.65		
2	Angka Kemiskinan	%	26.80	26.28	27.38	98.65	26.21	25.00		
3	Pertumbuhan Ekonomi (DT)	%	2.39	5.91	15.11	98.90	17.17	19.23		
4	PDRB Perkapita (TT)	Rp/Juta	42.87	30.27	41.53	137.20	45.34	48.23		
5	Gini Rasio	%	0.398	0.390	0.396	99.9	0.395	0.390		
6	Tingkat Pengangguran	%	4.28	2.32	3.33	97.68	3.25	3.18		
7	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2/Rp.								





## 7.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman Outcome pada tingkat OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. IKK merupakan sarana kerja dan sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam merealisasikan setiap target indikator pada masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Kunci masing-masing urusan yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam table 7.3 berikut:

Tabel 7. 3

### Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
		2023	2024	2025	2026		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi</b>							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. Juta	25.00	25.00	25.00	25.00	
1.2	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	Persen	85.00	86.87	88.74	90.61	
1.3	Capaian Implementasi e-government terintegrasi	Persen	95	95	97	100	





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
	(masukan e-planning dll ke program)							
1.5	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen	85.00	1	1	1		
1.6	Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	Persen	50.00	85.00	90.00	95.00		
1.7	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persen	70.00	52.82	56.64	58.48		
1.8	Ketepatan waktu Penetapan APBD	Kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu		
1.9	Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	Jumlah Kab/Kota	7	8	8	9		
1.10	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	6.20	6.44	6.68	6.92		
1.11	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp. Ribu per kapita	1400	14.00	15.00	15.00		
1.12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	B	B	B	A		
1.13	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	B	B	B	A		
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	A	A	A	A		
1.15	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang per hari	300	350	400	450		
1.16	Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	Nilai Indeks	75	75	80	80		
1.17	Tingkat Kerentanan Sosial	Kategori	Rendah					
<b>Kesejahteraan Sosial</b>								
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.1	Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	60.00	63.15	66.15	69.03		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.2	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	12.00	12.00	12.00	12.00		
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	100	100	100	100		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	85.00	85.77	86.54	87.31		
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	60.00	63.87	67.74	71.61		
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	4.00	4.00	4.00	3.00		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	persen	5.50	5.20	4.90	4.60		
<b>3.</b>	<b>Pangan</b>							
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	51.00	53.72	56.44	59.16		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
3.2	Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	30.00	35.30	40.25	45.00		
3.3	Persentase penduduk tahan pangan	persen	60.00	60.40	60.75	60.90		
<b>4.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>							
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2.00	2.40	2.70	4.00		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	80.00	80.30	80.75	80.99		
<b>5.</b>	<b>Pemberdayaan</b>							
5.1	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	25.00	26.00	27.00	28.00		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	60.00	60.30	60.60	60.90		
5.3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.47	0.45	0.442	0.434		
<b>6.</b>	<b>Seni Budaya dan Olahraga</b>							
6.1	Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	60.00					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
6.2	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	2	1	1	1		Kepemudaan dan Olahraga
6.3	Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	5	5	5	5		
6.4	Indeks Pembangunan Olahraga	Tingkatan Status	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang		
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
<b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	NTP perikanan tangkap	Skor	105.00	105.00	105.00	105.00		
1.2	NTP perikanan budidaya	Skor	100.00	100.00	100.00	100.00		
1.3	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	2.46	2.47	2.47	2.47		
1.4	Pendapatan Per Kapita Petani	Rp juta per kapita	13.12	13.13	13.14	13.15		
1.5	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90.00	90.05	90.1	90.15		
1.6	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	65	66	67	68		
1.7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3.50	3.51	3.52	3.53		
1.8	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	3.00	3.1	3.2	3.3		
1.9	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	4	4	5	5		
1.10	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	60.00	61	61	61		
1.11	Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	4000	4010	4020	4030		
<b>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>								
1.	<b>Perhubungan</b>							
1.1	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	93.10	93.2	93.3	93.4		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
<b>2.</b>	<b>Listrik Dan Air Bersih</b>							
2.1	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	45.00	45	45	46		Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	40.00	40.1	40.2	40.3		
2.3	Backlog perumahan layak huni dan sehat	ribu juta	100.00	99	98	97		
<b>3.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
3.1	Laju Deforestasi	ribu hektar	25.00	24	23	22		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, dan Urusan Pilihan Kehutanan
3.2	Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0.282					
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	85.03	85.04	85.05	85.06		
3.4	Persentase penerapan green economy	persen	70.00	70.5	71	71.5		
3.5	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/ Rp	63160.49					
3.6	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	80.00	80	80	81		
3.7	Persentase pengendalian daya rusak air	persen	60.00	61	62	63		
<b>4.</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>							
4.1	Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Kategori	B	B	B	B		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
4.2	Cakupan layanan telekomunikasi	persen	60	61	62	63		
4.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	10	11	12	13		
<b>5.</b>	<b>Iklm Berinvestasi</b>							
5.1	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	147	145	143	141		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman
5.2	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	63.08	63.09	63.1	63.11		
5.3	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	4	5	6		
5.4	Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	20	20	20	15		
5.5	ICOR	nilai	3.21	3.22	3.23	3.24		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
5.6	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	200.00	198	196	194		Modal, Urusan Pilihan Perdagangan
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>1.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>							
1.1.	Pendidikan							Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.1.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0.25	0.21	0.17	0.13	0.13	
1.1.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1.00	0.97	0.94	0.91	0.91	
1.1.3	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	30.00	32.41	34.82	35.23	35.23	
1.1.4	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	30.00	32.43	34.86	35.29	35.29	
1.1.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	25.00	26.4	26.28	26.42	26.42	
1.1.6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	25.00	26.61	27.22	27.88	27.88	
1.1.7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	200.00	204.3	208.8	213.6	213.6	
1.1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	murid per sekolah	200.00	203.3	206.6	209.9	209.9	
1.1.9	Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	100.00	100	100	100	100	
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (SPM Provinsi)	persen	100.00	100	100	100	100	





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.1.11	Angka Putus Sekolah (APTS SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	0.50	0.40	0.30	0.20	0.20		
1.1.12	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA dengan kondisi bangunan baik	persen	39.99	40.00	40.90	41.80	41.80		
1.1.13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/ kejuruan	murid per guru	25.00	25.90	26.80	27.70	27.70		
1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	200.00	199.10	198.20	189.20	189.20		
1.1.15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	80.00	80.00	80.50	95.50	95.50		
1.1.16	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	persen	95.00	95.11	96.32	97.18	97.18		
1.1.17	Jumlah PKBM aktif	unit	448	465					
1.1.18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	75.00	75.50	76.00	76.50	76.50		
1.1.19	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	80.00	80.15	81.05	81.35	81.35		
1.1.20	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	85.00	85.00	85.13	86.32	86.32		
1.1.21	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	83.00	84.13	85.32	87.00	87.00		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.1.22	Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	84.00	85.45	86.25	90.00	90.00		
1.1.23	Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	70.00	70.43	71.33	72.00	72.00		
1.1.24	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	56.00	56.31	56.50	70.00	70.00		
1.1.25	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	20.00	25.00	30.00	30.50	30.50		
1.1.26	Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	5	5	6	6	22		
1.1.27	Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	56.00	56.20	57.10	58.00	58.00		
1.1.28	Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	persen	56.00	56.00	55.10	54.20	54.20		
1.1.29	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	95.00	95.41	95.82	96.23	96.23		
1.1.30	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	70.00	70.30	70.60	70.90	70.90		
1.1.31	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	65.00	65.28	65.56	65.84	65.84		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.1.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	25.00	26.20	27.40	28.70	28.70		
1.1.33	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	250	250	250	250	750		
1.1.34	Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	1500	1500	1515	1625	1625		
1.1.35	Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit	10	10	10	10	30		
1.1.36	Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	10.00	11.23	12.58	13.25	13.25		
1.1.37	Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	20.00	21.90	23.8	25.7	25.7		
1.1.38	APM Pendidikan khusus (SPM Provinsi)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
<b>1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>								Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	30.00	31.30	40.30	41.20			
1.2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	10.62	12.12	14.02	15.92			





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.2.3	Cakupan puskesmas pembantu	per 100,000 penduduk	150.00	150.90	151.40	152.30		
1.2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	70.00	70.00	75.00	80.00		
1.2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	40.00	45.00	50.00	55.00		
1.2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	89.66	90.56	92.46	93.36		
1.2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	75.00	80.00	85.00	90.00	100	
1.2.8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	45.00	45.95	46.80	47.30		
1.2.9	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	41.38	42.57	51.57	60.57		
1.2.10	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	92	95	98	100	385	
1.2.11	Persentase PAK yang diawasi	persen	100	90	95	100	100	
1.2.12	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00	
1.2.13	API Malaria	persen	25.64	25.54	24.60	23.70	23.70	





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.2.14	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	32.64	31.74	30.84	29.95	29.95		
1.2.15	Tingkat prevalensi DBD	persen	60.74	59.84	50.84	49.94	49.94		
1.2.16	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	30.57	29.67	28.77	27.87	27.87		
1.2.17	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1000 penduduk	9.00	8.90	8.00	7.10	7.10		
1.2.18	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1000 penduduk	34.18	26.33	22.78	21.94	21.94		
1.2.19	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00		
1.2.20	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen	100.00						
1.2.21	Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra	kabupaten/kota	16.00						
1.2.22	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00		
1.2.23	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	5.00	5.30	5.61	60.00	60.00		
1.2.24	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	150.00	135.00	121.5	109.35	109.35		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.2.25	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	60.00	54.00	48.60	43.74	43.74		
1.2.26	Cakupan pelayanan nifas	persen	45.00	45.90	46.81	47.69	47.69		
1.2.27	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	65.00	65.47	70.23	70.56	70.56		
1.2.28	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	25.00	22.50	20.25	18.22	18.22		
1.2.29	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	0.65	0.58	0.52	0.47	0.47		
1.2.30	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00		
1.2.31	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 klh	4.00	3.60	3.24	2.91	2.91		
1.2.32	Rasio posyandu yang aktif	persen	70.00	70.91	71.86	80.86			
1.2.33	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	52.00	61.00	61.90	70.90			





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.2.34	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	52.00	52.90	61.90	62.80		
1.2.35	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2300.00	2267.00	2236.00	2204.00		
1.2.36	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	50.00	51.90	52.02	65.54		
1.2.37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	70.00	75.05	80.12	81.02		
1.2.38	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	27.00					
1.2.39	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan	unit	8.00	5.00	5.00	5.00		
1.2.40	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	29.10	29.10	29.10	29.10	30.00	
1.2.41	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	4.50	5.40	6.30	6.81		
1.2.42	Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	30.25	31.15	32.05	32.95		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.2.43	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1.20	1.22	1.25	1.28			
1.2.44	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
1.2.45	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00		
1.2.46	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	60.00	65.00	70.00	75.00			
1.2.47	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	2.00	100	100	200	400		
1.2.48	Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	60.00	61.12	62.62	63.92			
1.2.49	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	40.00	40.91	42.83	44.70			
1.2.50	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00		
1.2.52	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	58.62	61.12	64.30	68.53	68.53		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.2.53	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00		
1.2.54	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	45.00	45.50	46.40	47.72	47.72		
1.2.55	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	58.62	59.53	60.42	61.33	61.33		
1.2.56	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00		
1.2.57	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	persen	73.00	75.10	77.30	79.50	79.50		
1.2.58	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00		
1.2.59	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen	90.00	93.00	95.00	98.00	98.00		
1.2.60	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	40.00	40.00	41.56	47.12			
1.2.61	Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	45.25	47.23	49.25	51.75			





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.2.62	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)	-	100						
1.2.63	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)	-	100						
1.2.65	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)		100	100	100	100	100		
1.2.66	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)		100	100	100	100	100		
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penata Ruang								
1.3.1.	Pekerjaan Umum								
1.3.1.1	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar	5000					Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	
1.3.1.2.	Persentas luas lahan yang terlayani irigasi	persen	95						
1.3.1.3	Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	60.00						
1.3.1.4	Cakupan layanan air minum (SPM Provinsi)	persen	100						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.3.1.5	Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/lokasi	20						
1.3.1.6	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	80						
1.3.1.7	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km	20						
1.3.1.8	Panjang jembatan yang fungsional	m'	500						
1.3.1.9	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	50						
1.3.1.10	Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap	km	60						
1.3.1.11	Panjang jalan dalam kondisi mantap	meq	30						
1.3.1.12	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	persen	30						
1.3.1.13	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	80						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.3.1.14	Cakupan keterlayanan air baku	persen	50						
1.3.1.15	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	50.00						
1.3.1.16	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	persen	80.00						
1.3.1.17	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	50.00						
1.3.1.18	Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00		
1.3.1.19	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100		
<b>1.3.2.</b>	<b>Penata Ruang</b>								
1.3.2.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	100						
1.3.2.2	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	100	100	100	100	100		
<b>1.4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>							Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan	





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.4.1	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	80.00	85.00	90.00	95.00	100	Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
1.4.2	Cakupan rumah layak huni yang terbangun	persen	3000	3000	3000	3000	3000		
1.4.3	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00		
1.4.4	Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	380	440	510	570	570		
1.4.5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100		
1.4.6	Persentase penduduk realokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100		
<b>1.5.</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>							Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1.5.1	Jumlah konflik horisontal	kasus	2.00	1.80	1.62	1.45			
1.5.2	Cakupan penegakan Perda	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
1.5.3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	20.00						
1.5.4	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	1.20						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.5.5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00		
1.5.6	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	78.00						
1.5.7	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	85.00						
1.5.8	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	50.00						
1.5.9	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	65.00						
1.5.10	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali	2	2	2	2	8		
1.5.11	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang	250	250	250	250	1000		
1.5.12	Cakupan fasilitasi Forkompimda	kali	5	5	5	5	20		
1.5.13	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	3.00						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.5.14	Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	50.00						
1.5.15	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen	10.00						
1.5.16	Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	90.00						
1.5.17	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-						
1.5.18	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	90.00						
1.5.19	Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	2	2	2	2	8		
1.5.20	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	80						
1.5.21	Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	2	2	2	2	8		
1.5.22	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	100						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.5.23	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	100						
1.5.24	Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	40						
1.5.25	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	100						
1.5.26	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100		
<b>1.6.</b>	<b>Sosial</b>								Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
1.6.1	Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen	60	50	55	60			
1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	50	55	60	65			
1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	55.00	61.35	67.70	74.05			
1.6.4	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK	200	200	400	600			
1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen	90	90	90	90			





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	85	90	95	100			
1.6.7	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen	100	100	100	100			
1.6.8	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen	50	55	60	65			
1.6.9	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	35	40	45	50			
1.6.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota	9	9	9	9			
1.6.11	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	50	50	50	50			
1.6.12	Persentase anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100			
1.6.13	Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100			
1.6.14	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	80	85	90	100			
1.6.15	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	2	2	2	2			





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
<b>2.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>								
<b>2.1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>								
2.1.1	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	100	100	100	100	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	
2.1.2	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	2	2	2	2	6		
2.1.5	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	90	90	95	100	100		
2.1.6	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	50	50	60	70	70		
2.1.7	Persentase kenaikan UMP	persen	4.00	4.5	5.00	5.5	5.5		
2.1.8	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	60	60	70	80	80		
2.1.9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	80	80	80.52	81.04	81.04		
2.1.10	Tingkat pengangguran terbuka	persen	2.00	1.80	1.62	1.46	1.46		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
2.1.11	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	persen	60	60	65	70	70		
2.1.12	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen	80	80	85	90	90		
<b>2.2.</b>	<b>Pangan</b>							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	
2.2.1	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	25.00	25.00	30.00	35.00			
2.2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	40.00	38.00	36.00	34.00			
2.2.3	Skor PPH	skor	92.67	92.67	92.91	93.00			
<b>2.3.</b>	<b>Pertanahan</b>							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	
2.3.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	80	80.00	85.00	90.00			
2.3.2	Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	60	60.00	70.00	90.00			
2.4.	Lingkungan Hidup							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
2.4.1	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	20	20	20	20	60	Lingkungan Hidup	
2.4.2	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	50/10	50/10	50/10	50/10	50/10		
2.4.3	Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	2.00	2.00	1.09	1.08	1.08		
2.4.4	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	80.00	80.00	85.00	90.00	90.00		
2.4.5	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	12	12	12	12	48		
2.4.6	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi	1	1	1	1	4		
2.4.7	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen	80	80.00	85.00	90.00	90.00		
2.4.8	Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen	40	45.00	50.00	65.00	65.00		
2.4.9	Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen	50	55.00	60.00	65.00	65.00		
2.4.10	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	20	20	20	20	80		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
2.4.11	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	2	2	2	2	8		
2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.5.1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.5.2	Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	85.78	89.74	93.78	98.18	100		
2.5.3	Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	45.67	50.67	56.17	61.67	61.67		
2.5.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	55.34	65.49	75.64	85.79	85.79		
2.5.5	Persentase pasangan berakte nikah	persen	65	70	75	80	80		
<b>2.6.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.6.1	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen	45	50	55	60	60		
2.6.2	Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	unit	75	80	85	90	90		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
2.6.3	Persentase kampung tertinggal	persen	25.00	23.50	22.00	20.50	20.50		
2.6.4	Cakupan kampung mandiri	kampung	3	4	5	6	18		
2.6.5	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	10	20	30	40	100		
2.6.6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	30	35	40	45	45		
<b>2.7.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.7.1	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	100	100	100	100	300		
2.7.2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	persen	2.25	2.25	2.25	2.00	2.00		
2.7.3	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	80	80	85	90	90		
2.7.4	Cakupan kampung KB	persen	40	45	50	55	55		
2.7.5	Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	30	30	30	30	90		
<b>2.8.</b>	<b>Perhubungan</b>							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
2.8.1	Cakupan terintegrasinya antar moda angkutan antar wilayah adat	wilayah adat	3						
2.8.2	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	40	45.00	50	55	55		
2.8.3	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	2000	1900.00	1700	1500	1500		
2.8.4	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	2						
2.8.5	Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	3	-	1	1	4		
2.8.6	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	3	1	1	-	4		
2.8.7	Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	2	-	1	1			
2.8.8	Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	7.0	8.00	8.00	9.00	9.00		
2.8.9	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	4.5	5.00	85.00	90.00	90.00		
2.8.10	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	80	85.00	85.00	90.00	90.00		
<b>2.9.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							Urusan Wajib Bukan	





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
2.9.2	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasama	2	1	1	1	5	Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	
2.9.3	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	40.00	45.00	45.00	50.00	50.00		
2.9.4	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00		
2.9.5	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00		
2.9.6	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	80.00	82.50	85.00	8.75	8.75		
2.10.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
2.10.1	Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	persen	2.25						
2.10.2	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	10000.00	150	300	500	500		
2.10.3	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit	30	10	20	30	30		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
2.10.4	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali	10	5	10	15	15		
2.10.5	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelompok	10	5	6	10	10		
2.10.6	Jumlah usaha dalam bentuk koperasi	Rp milyar	15	5	10	15	15		
2.10.7	Persentase koperasi aktif dan berkembang	unit	75	75	80	85	85		
<b>2.11.</b>	<b>Penanaman Modal</b>							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
2.11.1	Persentase realisasi investasi	persen	100	90	95	100	100		
2.11.2	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	7.5	8.00	8.00	8.5	8.5		
2.11.3	Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	35	25	30	35	35		
2.11.4	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	kali	5	5	5	5	15		
2.11.5	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen	80	80	80	80	80		
2.11.6	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	10	10	10	10	10		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
2.11.7	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor	73.84	75.50	77.26	79.02	79.02		
2.11.8	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	85	85	90	95	95		
<b>2.12.</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>								
2.12.1	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	50	10	10	10	30	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Keperemudaan dan Olah Raga	
2.12.2	Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	95.00	70	75	80	80		
2.12.3	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	40.00	10	15	15	40		
2.12.4	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-						
2.12.5	Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-						
2.12.6	Cakupan venue berstandar internasional	persen	-						
2.12.7	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	250.00	100	100	100	300		
2.12.8	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	59	15	15	15	45		
<b>2.13</b>	<b>Statistik</b>								
2.13.1	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	
2.13.2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen	5	5	5	5	15		
<b>2.14.</b>	<b>Persandian</b>								
2.14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	
<b>2.15.</b>	<b>Kebudayaan</b>								
2.15.1	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu	kurikulum	1.00	2	2	2	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	
2.15.2	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	2	4	4	4	12		
2.15.3	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	1.00	14	15	16	45		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
2.15.4	Frekwensi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali	31	5	5	5	15		
2.15.5	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	2	3	4	5	12		
2.15.6	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	50.00	51.00	52.00	53.00	53.00		
2.15.7	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	5	5	6	6	17		
<b>2.16.</b>	<b>Perpustakaan</b>							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	
2.16.1	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	60.00	65.00	70.00	80.00	80.00		
2.16.2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	90.00	90.00	95.00	100.00	100		
<b>2.17.</b>	<b>Kearsipan</b>							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	
2.17.1	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah Kearsipan dilakukan penyelamatan	jumlah	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00		
2.17.2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepastakaan	persen	4.00	4.50	5.00	5.50	5.50		
<b>3.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>							Urusan Pilihan Pariwisata	
<b>3.1.</b>	<b>Pariwisata</b>								
3.1.1	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	15	16	17	18	51		
3.1.2	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	5	6	7	8	8		
3.1.3	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan	50	50	50	50	150		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
3.1.4	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	250	250	250	250	250		
3.1.5	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	50	50	50	50	150		
<b>3.2.</b>	<b>Pertanian</b>							Urusan Pilihan Pertanian	
3.2.1	Cakupan bina kelompok tani	persen	20	20	20	20	60		
3.2.2	NTP peternakan	persen	100.00	99.97	99.99	100.00	100		
3.2.3	NTP tanaman pangan	persen	100.00	98.00	99.5	100	100		
3.2.5	NTP perkebunan	persen	100.00						
3.2.7	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	10.00	9.65	9.8	100	100		
3.2.8	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	-						
3.2.9	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	4.00	4.29	4.50	4.89			





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
3.2.10	Tingkat swasembada pangan	persen	45	50	55	60			
3.2.11	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	85	90	95	100			
3.2.12	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	persen	50	55	60	65	70		
3.2.13	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	persen	3.0	3.0	3.5	3.5			
3.2.14	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	2	2	2	2	6		
3.2.15	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	15	15	17	20	20		
3.2.16	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	510.00	510.00	512.00	512.70			
3.2.17	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	45	50.00	55.00	60.00			
3.2.18	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	2	2	2	2	6.00		
3.2.19	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	70	75.00	80.00	85.00	85.00		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
3.2.20	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	ton	37,600,000	38,100,000	38,900,000	39,000,000			
3.2.21	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	40	42.00	44.00	46.00			
3.2.22	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	25	30.00	35.00	40.00			
<b>3.3.</b>	<b>Kehutanan</b>								
3.3.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp triliun	2.5	3.20	3.90	4.60	4.60	Urusan Pilihan Kehutanan	
3.3.2	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	30.00	30.76	31.52	32.28	32.28		
3.3.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ribu Ha	5.27	5.39	5.41	5.53	5.53		
3.3.4	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	30	30.00	35.00	40.00	40.00		
3.3.5	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284		
3.3.6	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	50	50.00	55.00	60.00	60.00		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
<b>3.4.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>								Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral
3.4.3	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	100	80	85	90	90		
3.4.4	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	60	60	65	70	70		
3.4.5	Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	100	95	100	100	100		
3.4.6	Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	100	100	100	100	100		
3.4.7	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	70	70	75	80	80		
3.4.8	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	100	100	100	100	100		
3.4.9	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	80	80	80	80	80		
3.4.10	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter	9.5	10.00	10.00	10.00	10.00		
3.4.11	Tingkat elektrifikasi	persen	60.00	80.8	80.16	80.24	80.24		
3.4.12	Persentase kampung terakses listrik	persen	60.00	60.00	65.00	70.00	70.00		
3.4.13	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumah tangga	250.00	250.00	250.00	250.00	750.00		
3.4.14	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumah tangga	500	500	500	500			
3.4.15	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	100	50	50	50	150		
<b>3.5.</b>	<b>Perdagangan</b>								
3.5.1	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	175.00	175.00					
3.5.2	Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	90	90	90	90	90		
3.5.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	100	100	100	100	100		





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
3.5.4	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	3,000.00						
3.5.5	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit	20	5.00	10	15	15		
3.5.6	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	4.00	4.25	4.50	5.00	5.00		
3.5.7	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	150	150	125	100	100		
3.5.8	Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumahtangga	persen	15.25	15.25	15.74	16.23	16.25		
<b>3.6.</b>	<b>Perindustrian</b>								
3.6.1	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	10					Urusan Pilihan Perindustrian	
3.6.2	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha	50						
3.6.3	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan	1						
<b>3.7.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>								
3.7.1	Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan		2.00	2.00	2.10	2.25	2.25	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	
3.7.2	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi		13	13	13	13	13		
3.7.3	Produksi perikanan budidaya	ton	150.00	151.00	154.00	160.00	160.00		
3.7.4	Produksi perikanan tangkap	ton	8,000.00						
3.7.5	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	50,000.00						
3.7.6	Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	8000.00						
3.7.7	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	persen	8	8	8	10	10		
3.7.8	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen	2.50	2.50	2.75	3.00	3.00		
3.7.9	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	80	85	90	95	95		
<b>4.</b>	<b>Layanan Penunjang Urusan</b>								





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
<b>4.1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>								Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
4.1.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	-						
4.1.2	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	20						
4.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100.00						
4.1.4	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	persen	100.00						
4.1.5	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100	100	100	100	100		
4.1.6	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	100.00						
4.1.7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
4.1.8	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
4.1.9	Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
4.1.10	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100						
4.1.11	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	100						
4.1.12	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	90						
4.1.13	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	100.00						
4.1.14	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	100.00						
4.1.15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	100.00						
4.1.16	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah	4	4	4	4	16		
4.1.17	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	100						
4.1.18	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	100						
<b>4.2.</b>	<b>Keuangan</b>								Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
4.2.1	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	100	100	100	100	100		
4.2.2	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan	dokumen	-						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
	pengelolaan keuangan secara baik								
4.2.3	Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	100						
4.2.4	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
4.2.5	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	100						
4.2.6	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	50						
4.2.7	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
4.2.8	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		
4.2.9	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen	100						
4.2.10	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen	100						
4.2.14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP						
4.2.17	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	4.60						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
4.2.18	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	persen	14.00						
4.2.19	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	3.00						
4.2.20	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	3						
<b>4.3.</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	
4.3.1	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	100.00						
4.3.2	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	8						
4.3.3	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	90						
4.3.4	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	90						
4.3.5	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	85						
4.3.6	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	100						
<b>4.4.</b>	<b>Pelatihan dan Pengembangan</b>							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pelatihan dan Pengembangan	
4.4.1	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	10	5	8	10	10		
4.4.2	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	60	60	65	70	70		
<b>4.5.</b>	<b>Penerapan SIDA</b>								





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
4.5.1	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis	1	1	2	1	4		
<b>4.6.</b>	<b>Pengawasan</b>								
4.6.1	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	
4.6.2	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	35	35.00	40.00	45.00	45.00		
4.6.3	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang per tahun	4	2	2	2	6		
4.6.4	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaaan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100		
4.6.5	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaaan	persen	50	50.00	55.00	60.00	65.00		
4.6.6	Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	35	35.00	40.00	45.00	45.00		
4.6.7	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen	60	60.00	70.00	80.00	80.00		
<b>4.7.</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>								
4.7.1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja Pengawasan DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
4.7.2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
<b>ASPEK OTONOMI KHUSUS</b>									
<b>1.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>								
<b>1.1.</b>	<b>Pendidikan</b>							Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
1.1.1	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	56.00						
1.1.2	Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen	100.00						
1.1.3	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen	0.85						
1.1.4	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen	0.25						
1.1.5	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	60.00						
1.1.6	Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP	200						
1.1.7	1 Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen	60.00						
1.1.8	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	85.00						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
1.1.9	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	50.00						
1.1.10	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	2.00						
1.1.11	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	73.00						
<b>1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>							Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
1.2.1	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen	40.00						
1.2.2	Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen	75.00						
1.2.3	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen	70.00						
1.2.4	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	100.00						
<b>1.3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penata Ruang</b>							Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan dan Kawasan Pemukiman	
1.3.1	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen	40.00						
<b>1.4.</b>	<b>Sosial</b>							Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	
1.4.1	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	250						





Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator		Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
<b>1.5.</b>	<b>Pangan</b>								Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
1.5.1	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen	5.00						





## BAB VIII

# PENUTUP

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2024, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2024, RKPD Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, hasil kesepakatan Bersama dengan DPRD Provinsi Papua;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat RENJA- Perangkat Daerah masing-





masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2024;

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
5. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Papua wajib melakukan monitoring pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2024 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPEDA Provinsi Papua;
7. RKPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya.

**Pih. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

**SOFIA BONSAPIA, SH, M.Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001**





# LAMPPIRAN



**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS PENDIDIKAN</b>						<b>160.287.021.945,00</b>							<b>160.968.000.000,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>160.287.021.945,00</b>							<b>160.968.000.000,00</b>	
	<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>160.287.021.945,00</b>							<b>160.968.000.000,00</b>	
1.	<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>115.160.112.170,00</b>						-	<b>115.300.000.000,00</b>	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.225.000.000,00			-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	2.255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	125.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	1.250.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		1.255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	101.950.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	102.017.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				300 Orang/Bulan	101.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		101.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		203.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	865.112.170,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	868.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		501.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	165.112.170,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		166.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.210.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				3 Unit	10.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				300 Paket	480.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		490.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	20.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Vim	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.340.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	3.360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	400.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	400.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.320.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	760.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.100.000.000,00			-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				10 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	-	-			-	<b>41.926.909.775,00</b>						-	<b>42.458.000.000,00</b>	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	29.256.909.775,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	29.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				3 Unit	5.500.000.000,00	Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	200.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				5 Unit	1.123.858.826,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	233.050.949,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun</i>				2 Ruang	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)														
			<i>Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)														
			<i>Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)														
			<i>Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)														
			<i>Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus														
			<i>Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi</i>				5 Ruang	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia</i>				10 Paket	400.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				30 Peserta Didik	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus</i>				20 Orang	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				10 Orang	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				7 Satuan Pendidikan	1.300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				20 Orang	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				1 Konten Digital	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi</i>				10 Orang	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun</i>				5 Unit	3.400.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah</i>				2 Ruang	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				30 Orang	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			<i>Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				3 Unit	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			<i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				5 Ruang	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat</i>				5 Ruang	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				12 Ruang	900.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-			-	1.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.03.0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus</i>				10 Lembaga	1.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04	Pengelolaan Akademi Komunitas	-	-			-	5.050.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	5.183.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun</i>				1 Unit	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun</i>				1 Ruang	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perpustakaan yang Dibangun</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang Tersedia</i>				2 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia</i>				3 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0022	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Akademi Komunitas Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan</i>				1 Pendidikan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Heram, Waena	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi</i>				1 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas														
			<i>Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				20 Peserta Didik	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0025	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Mahasiswa/i Akademi Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i</i>				10 Peserta didik	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan Akademi Komunitas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>				3 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		1.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas														
			<i>Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas yang disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0030	Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja														
			<i>Jumlah Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja yang disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			<i>Jumlah Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang diterbitkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0035	Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Mitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas</i>				20 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				10 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0038	Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten</i>				1 Digital	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				10 Orang	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.04.0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				20 Orang	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.05	Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	-	-			-	4.050.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	4.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.05.0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata</i>				30 Orang	1.050.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.05.0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya														
			<i>Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya</i>				2 Biaya	3.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.06	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	-	-			-	2.570.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	2.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.06.0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi														
			<i>Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan</i>				30 Orang	1.010.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.015.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.3.06.0008	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP														
			<i>Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP</i>				40 Mahasiswa	1.560.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-			-	2.500.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-			-	2.500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			<i>Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya</i>				20 Orang	2.500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	700.000.000,00						-	710.000.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.3.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.3.01.0003	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua yang Tersedia</i>				15 Orang	400.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.3.02	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Papua	-	-			-	10.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.3.02.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.3.03	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	-	-			-	140.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.3.03.0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Yang Mendapatkan Jaminan Keamanan</i>				10 Orang	140.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		<b>DINAS KESEHATAN</b>							<b>71.253.723.030,00</b>							<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>71.253.723.030,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>71.253.723.030,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>40.953.723.030,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	33.723.030,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	23.723.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/Bulan	30.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.510.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>				6 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				6 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.110.000.000,00			-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				30 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				10 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.700.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				15 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya</i>				30 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-			-	<b>28.100.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	7.200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				6 Layanan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				2 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara				3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas</i>				6 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				9 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	11.700.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar</i>				100 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				100 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</i>				9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif</i>				9 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>				9 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				9 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				9 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>				9 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				5 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota</i>				9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas</i>				5 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			<i>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>				10 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.01.0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.														
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.</i>				9 Kabupaten/ Kota	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	7.500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi</i>				5 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya														
			<i>Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya</i>				5 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				9 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	-	-			-	<b>1.100.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				50 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.3.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.3.02.0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik</i>				3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.3.03	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.3.03.0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN														
			<i>Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat</i>				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	300.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			<i>Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan</i>				5 Sarana	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			<i>Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional</i>				3 Sarana	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
5.	<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	-	-			-	<b>650.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>				3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</i>				3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.3.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.3.01.0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan														
			<i>Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun</i>				5 dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
6.	1.02.07	<b>PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	-	-			-	150.000.000,00						-	0,00	
	1.02.07.3.01	Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.07.3.01.0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi</i>				3 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS KESEHATAN
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA</b>								<b>105.247.366.127,00</b>							<b>105.247.366.127,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>105.247.366.127,00</b>							<b>105.247.366.127,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>105.247.366.127,00</b>							<b>105.247.366.127,00</b>	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	73.283.955.700,00						-	73.283.955.700,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	51.744.455.700,00						-	51.744.455.700,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				716 Orang/Bulan	51.744.455.700,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		51.744.455.700,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.618.500.000,00						-	1.618.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	720.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		720.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	798.500.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		798.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.188.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.188.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	1.188.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.188.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.901.020.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	17.901.020.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				5 Laporan	11.480.020.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		11.480.020.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	6.421.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		6.421.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	831.980.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	831.980.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				56 Unit	706.980.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		706.980.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				60 Unit	125.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		125.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
2.	<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-			-	<b>31.163.410.427,00</b>						-	<b>31.163.410.427,00</b>	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	29.159.410.427,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	29.159.410.427,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>				2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit</i>				4 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>				15 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan</i>				3 Unit	450.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		450.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				8 Unit	1.850.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.850.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				8 Paket	23.859.410.427,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		23.859.410.427,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	2.004.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		2.004.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>				2 Unit	1.900.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.900.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>				2 Unit	104.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		104.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	800.000.000,00						-	800.000.000,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				340 Orang	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				4 Orang	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
		<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA (BLUD)</b>						<b>50.000.000.000,00</b>							<b>50.000.000.000,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						50.000.000.000,00							50.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						50.000.000.000,00							50.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	50.000.000.000,00						-	50.000.000.000,00	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	50.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	50.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA (BLUD)
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				20 Unit Kerja	50.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		50.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA (BLUD)
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA</b>								<b>75.683.715.495,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>75.683.715.495,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>75.683.715.495,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>49.843.213.500,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	39.753.213.500,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/Bulan	39.723.213.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.330.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.600.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	5.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
2.	1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-			-	<b>20.840.501.995,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	18.840.501.995,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan</i>				0 Unit	500.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>				12 Unit	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			<i>Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara</i>				12 Unit	340.501.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan</i>				12 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				12 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				12 Paket	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	5.000.000.000,00						-	0,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-	4.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				200 Orang	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				50 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA
		<b>RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA</b>						<b>23.469.839.797,00</b>							<b>0,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.469.839.797,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						23.469.839.797,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	16.441.847.449,00						-	0,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				10 Dokumen	75.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.881.006.949,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/Bulan	9.881.006.949,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.250.000.000,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				500 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				0 Paket	169.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	346.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				0 Paket	131.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				0 Paket	563.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	941.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa ABEPURA
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	840.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa ABEPURA
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	840.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa ABEPURA
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.245.840.500,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT Jiwa ABEPURA
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				10000 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa ABEPURA
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	1.825.840.500,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa ABEPURA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				30 Laporan	1.400.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT Jiwa ABEPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				0 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
2.	<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	-	-			-	<b>6.977.992.348,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	4.710.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit</i>				0 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			<i>Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara</i>				0 Unit	60.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				0 Unit	150.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				0 Dokumen	4.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	2.217.992.348,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>				0 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				0 Dokumen	67.992.348,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan</i>				0 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				0 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
3.	1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	-	-			-	50.000.000,00						-	0,00	
	1.02.03.3.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
	1.02.03.3.02.0009	Penyediaan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan														
			<i>Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia</i>				0 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Awiyo	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
		<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA (BLUD)</b>						<b>40.000.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>40.000.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>40.000.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>40.000.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	40.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA (BLUD)
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	40.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA (BLUD)
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								<b>675.422.088.733,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>675.422.088.733,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>654.822.088.733,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>47.784.463.753,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.900.000.206,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				6 Dokumen	700.000.096,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	500.000.110,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	30.834.643.480,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				447 Orang/Bulan	30.034.643.100,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	500.000.220,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	150.000.135,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	150.000.025,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.300.000.110,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				600 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	700.000.110,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				150 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	7.149.999.957,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.099.999.957,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				50 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.199.820.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	2.499.820.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.000.000.000,00			-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				50 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	-	-			-	<b>94.000.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	92.300.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				33.33 KM	50.000.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Kanal Banjir yang Dibangun</i>				1.50 KM	15.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun</i>				1 KM	10.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun</i>				2 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.700.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun</i>				0.17 KM	500.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi</i>				0.25 KM	500.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 KM	500.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	-	-			-	<b>53.500.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-			-	53.500.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun</i>				100 Liter/Detik	50.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara</i>				2 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	-	-			-	<b>3.100.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-			-	3.100.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA														
			<i>Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi</i>				2 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemasangan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemasangan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA														
			<i>Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan</i>				40 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemasangan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	-	-			-	<b>1.700.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-			-	1.700.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemasangan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi</i>				1 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemasangan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun</i>				10 M <sup>3</sup> /Hari	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>				50 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara</i>				1 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	-	-			-	<b>27.100.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-			-	27.100.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				9 Sistem Drainase Perkotaan	25.000.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0009	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>				2 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				2 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	-	-			-	<b>56.537.624.980,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	4.437.624.980,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0020	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi														
			<i>Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi yang Disediakan</i>				2 Unit	1.937.624.980,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0022	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi														
			<i>Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>				300 Rumah Tangga	500.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				10 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.3.02	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	-	-			-	52.100.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.3.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar</i>				70 Unit	50.000.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.3.02.0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</i>				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.3.02.0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi														
			<i>Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	-	-			-	<b>1.100.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-			-	1.100.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek														
			<i>Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang</i>				50 Lisensi	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>				2 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	-	-			-	<b>1.000.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata</i>				2 Kawasan	1.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	-	-			-	<b>359.000.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-			-	359.000.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan														





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				2 Jembatan	20.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya</i>				20 KM	1.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.	1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	-	-			-	<b>10.000.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	10.000.000.000,00			-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih</i>				1100 Orang	5.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya</i>				1 Lembaga	5.000.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						20.600.000.000,00							0,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	10.000.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	2.000.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-			-	8.000.000.000,00			-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi</i>				10 Unit Rumah	2.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun</i>				3 Unit Rumah	2.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi														
			<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi</i>				3 Unit Rumah	2.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi</i>				3 Unit Rumah	2.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	-	-			-	<b>6.500.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	2.500.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0013	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Tangga Terdampak Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah</i>				3 Rumah Tangga	2.000.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-			-	4.000.000.000,00			-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	2.000.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman</i>				9 Lokasi	2.000.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	98.229.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	68.286.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.069.846.068,00			-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-	-	9.969.830.674,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				84 Orang/ Bulan	8.999.846.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		9.899.830.674,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	451.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				15 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	351.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.364.800.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	2.824.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	127.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	1.547.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	526.719.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	575.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	421.099.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		425.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	105.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.309.637.350,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	1.350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				27 Unit	529.937.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	699.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-	-			-	<b>5.485.779.572,00</b>						-	<b>16.700.000.000,00</b>	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	3.535.779.572,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	11.900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>				2 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			<i>Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia</i>				200 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		3.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</i>				1 Dokumen	585.779.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		4.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>				3 laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia														
			<i>Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja</i>				350 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		3.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				2 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-			-	1.000.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	2.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asa an Berd emokrasi	-		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asa an Berd emokrasi	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asa an Berd emokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>				1 laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asa an Berd emokrasi	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda</i>				1 Dokuman	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asa an Berd emokrasi	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-			-	350.000.000,00			-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asa an Berd emokrasi	-	-	1.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah</i>				1 Dokuman	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS</i>				1 laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.3.05	Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	-	-			-	600.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.3.05.0002	Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.3.05.0003	Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.3.05.0004	Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	-	-			-	<b>1.500.000.000,00</b>						-	<b>7.350.000.000,00</b>	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	-	-			-	1.500.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	7.350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			<i>Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														
			<i>Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi</i>				10 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		5.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait</i>				10 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>							<b>14.274.209.985,00</b>							<b>26.622.645.766,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>14.274.209.985,00</b>							<b>26.622.645.766,00</b>		
	<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>14.274.209.985,00</b>							<b>26.622.645.766,00</b>		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	10.615.812.034,00						-	13.222.645.766,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	196.516.160,00			-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-	-	207.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	98.229.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		17.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	68.286.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.790.295.874,00			-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-	-	7.463.645.766,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				53 Orang/Bulan	6.724.223.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		7.396.645.766,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	31.072.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	481.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	730.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				53 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	351.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.078.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	3.142.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		2.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-	-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	280.000.000,00			-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-	-	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	690.000.000,00			-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-	-	1.230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				17 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Ten tram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	-	-			-	<b>3.658.397.951,00</b>						-	<b>13.400.000.000,00</b>	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	1.300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)														
			<i>Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota</i>				5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	1.150.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	5.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA BARAT [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>				1 Kawasan	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			<i>Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			<i>Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>				25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana</i>				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontinjensi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0018	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				25 Orang	150.000.000,00	Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana														
			Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani				1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				4 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	1.150.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		2.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				200 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi														
			<i>Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis</i>				50 Orang	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	1.158.397.951,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	3.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				20 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
			<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														
			<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan</i>				1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi														
			<i>Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal</i>				1 Lembaga	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)</i>				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemanta pan Rasa Aman, Tentram dan Kedew asaan Berd emokrasi	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan															
			<i>Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen yang dilegalkan</i>				9 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana															
			<i>Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)</i>				1 Dokumen	308.397.951,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota</i>				9 kabupaten/kota	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		<b>DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							<b>29.342.747.782,00</b>							<b>30.712.747.782,00</b>	
	1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>26.042.747.782,00</b>							<b>27.082.747.782,00</b>		
	1.06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>26.042.747.782,00</b>							<b>27.082.747.782,00</b>		
1.	1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>19.542.747.782,00</b>						-	<b>19.822.747.782,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	770.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	15.210.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				201 Orang/Bulan	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		15.100.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				201 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	660.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				50 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				50 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.942.747.782,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.862.747.782,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.742.747.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.642.747.782,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	330.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				25 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	Publik	-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	Publik		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	440.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				40 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi</i>				90 Keluarga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi</i>				1 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota</i>				5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	-	-			-	4.600.000.000,00						-	5.170.000.000,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	-			-	1.100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.320.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	-			-	1.300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.430.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak														
			<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-			-	1.100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.210.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi</i>				18 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				70 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-			-	1.100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.210.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				60 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal</i>				60 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA</i>				60 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	330.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				300 Keluarga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota</i>				30 Keluarga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.	<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi</i>				510 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi</i>				310 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi</i>				6 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi</i>				110 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi</i>				400 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.	<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	-	-			-	<b>300.000.000,00</b>						-	<b>330.000.000,00</b>	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	330.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>				1 Makam	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>3.300.000.000,00</b>							<b>3.630.000.000,00</b>	
	<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>3.300.000.000,00</b>							<b>3.630.000.000,00</b>	
1.	<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	-	-			-	<b>1.000.000.000,00</b>						-	<b>1.100.000.000,00</b>	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admuduk terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admuduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	400.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	440.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	-	-			-	<b>1.200.000.000,00</b>						-	<b>1.320.000.000,00</b>	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak terkait Pencatatan Sipil yang Disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	-	-			-	<b>900.000.000,00</b>						-	<b>990.000.000,00</b>	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan															
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>				1 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	2.12.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>220.000.000,00</b>		
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi															
			<i>Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain															
			<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		<b>DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM</b>							<b>27.855.947.833,00</b>							<b>39.803.451.350,00</b>	
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>23.460.947.833,00</b>							<b>31.963.451.350,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						23.460.947.833,00							31.963.451.350,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	18.323.851.350,00						-	24.853.451.350,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	155.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.180.851.350,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	18.354.851.350,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				186 Orang/Bulan	14.000.851.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.134.851.350,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				10 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	45.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	858.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.238.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				186 Paket	331.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		584.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				20 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				100 Orang	427.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		524.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				35 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.310.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				10 Laporan	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				15 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	875.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	525.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	950.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
2.	<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	-	-			-	<b>2.020.000.000,00</b>						-	<b>2.510.000.000,00</b>	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	1.450.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n</i>				100 Orang	1.450.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-	-			-	170.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi</i>				5 LPK	170.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			<i>Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>				10 Perusahaan	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	235.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah</i>				10 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		235.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
3.	2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	-	-			-	<b>617.096.483,00</b>						-	<b>1.050.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	355.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD</i>				20 Orang	180.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			<i>Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				200 Orang	175.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.04.3.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	262.096.483,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.04.3.01.0007	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan														
			<i>Jumlah OAP Yang Diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan</i>				50 Orang	262.096.483,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
4.	<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	-	-			-	<b>1.600.000.000,00</b>						-	<b>2.550.000.000,00</b>	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online</i>				25 Perusahaan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek</i>				25 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				20 Perkara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				20 Perkara	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	600.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penetapan UMP</i>				1 Surat Keputusan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)														
			<i>Jumlah penetapan UMK</i>				1 Surat Keputusan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
5.	<b>2.07.06</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	-	-			-	<b>900.000.000,00</b>						-	<b>1.000.000.000,00</b>	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	900.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)</i>				75 Perusahaan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			<i>Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan</i>				5 Kasus	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3</i>				75 Perusahaan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.000.000.000,00							7.375.000.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						3.350.000.000,00							6.425.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	2.750.000.000,00						-	5.275.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-			-	1.300.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	3.425.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.1.01.0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri				1 Rekomendasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.3.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	-			-	1.450.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.850.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.3.01.0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP														
			<i>Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan</i>				10 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.3.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.3.01.0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM &amp; industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	-	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
2.	<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	-	-			-	<b>150.000.000,00</b>						-	<b>300.000.000,00</b>	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			0				00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	450.000.000,00						-	850.000.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-			-	450.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	850.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						650.000.000,00							950.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	650.000.000,00						-	950.000.000,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	650.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	950.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>				20 Orang	250.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi															
			<i>Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi</i>				3 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>395.000.000,00</b>							<b>465.000.000,00</b>		
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>395.000.000,00</b>							<b>465.000.000,00</b>		
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>395.000.000,00</b>						-	<b>465.000.000,00</b>		
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	45.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	
		<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						<b>18.637.912.386,00</b>								<b>5.721.500.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.637.912.386,00							5.721.500.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						18.437.912.386,00							5.501.500.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	15.837.912.386,00						-	3.191.500.000,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	601.000.000,00						-	661.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.136.912.386,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				200 Orang/Bulan	13.036.912.386,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				201 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	660.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				225 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				15 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				225 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				225 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				70 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				6 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				90 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				55 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				16 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	700.000.000,00						-	660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi</i>				3 Kebijakan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>				45 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &amp; Pusat Pembelajaran Perempuan &amp; (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi</i>				35 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	-	-			-	<b>600.000.000,00</b>						-	<b>440.000.000,00</b>	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi</i>				9 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat</i>				300 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</i>				6 Layanan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				25 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik</i>				90 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	-	-			-	<b>700.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</i>				1 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>				5 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				45 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				50 Layanan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>220.000.000,00</b>	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>220.000.000,00</b>	
	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>				90 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>220.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						<b>200.000.000,00</b>							<b>220.000.000,00</b>	
1.	<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>220.000.000,00</b>	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			<i>Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>				15 Organisasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN</b>						<b>46.487.621.210,00</b>							<b>84.999.900.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>3.650.000.000,00</b>							<b>6.350.000.000,00</b>	
	<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						<b>3.650.000.000,00</b>							<b>6.350.000.000,00</b>	
1.	<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	-	-			-	<b>2.150.000.000,00</b>						-	<b>4.150.000.000,00</b>	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	750.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														
			<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-			-	850.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara</i>				60 Ton	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>				6 Ton	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>				60 Ton	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-			-	550.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	1.050.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
2.	2.09.04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	-	-			-	<b>700.000.000,00</b>						-	<b>1.100.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi														
			<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
3.	2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	-	-			-	<b>800.000.000,00</b>						-	<b>1.100.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	800.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			<i>Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				35 Sertifikat	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>42.647.621.210,00</b>							<b>78.349.900.000,00</b>	
	<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>42.647.621.210,00</b>							<b>78.349.900.000,00</b>	
1.	<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>27.990.621.210,00</b>						-	<b>28.280.000.000,00</b>	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	24.556.881.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	24.600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				331 Orang/Bulan	24.556.881.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.283.740.210,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.280.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	53.740.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	850.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	850.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		800.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	750.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	850.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				12 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
2.	<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>5.257.000.000,00</b>						-	<b>8.867.400.000,00</b>	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	357.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	767.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>				5 Laporan	357.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		767.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-			-	4.700.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	7.850.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				90 Sertifikat	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.850.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				3 laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak</i>				10000 Batang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji														
			<i>Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji</i>				25000 Gram	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang</i>				10000 Batang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			<i>Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak</i>				51 Ton	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak</i>				1 Ton	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme														
			<i>Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai</i>				6 Varietas Unggul Baru (VUB)	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme														
			<i>Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
3.	3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>2.600.000.000,00</b>						-	<b>29.814.500.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	2.600.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	29.814.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>				4 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani</i>				4 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				6 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.675.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
			<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				6 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.960.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan</i>				6375 Ha	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		15.979.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
			<i>Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				6 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
4.	<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>700.000.000,00</b>						-	<b>2.288.000.000,00</b>	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-			-	700.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	2.288.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				502 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.438.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>				190 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>				100 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			<i>Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
5.	<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>950.000.000,00</b>	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	950.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														
			<i>Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian</i>				27 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota</i>				27 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>				27 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	5.900.000.000,00						-	8.150.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	2.800.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	4.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				5 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>				200 Orang	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		3.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	2.750.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	3.550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>				1009 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				2 Kelompok	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		3.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-			-	350.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN	
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani															
			<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>				6 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN	
	X	NON URUSAN						190.000.000,00							300.000.000,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						190.000.000,00							300.000.000,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	190.000.000,00						-	300.000.000,00		
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	140.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN	
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN	
	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN	
		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT</b>							<b>24.421.038.534,00</b>							<b>24.815.553.626,00</b>	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.421.038.534,00							24.815.553.626,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						24.421.038.534,00							24.815.553.626,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	13.621.038.534,00						-	14.015.553.626,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.600.301.856,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	6.954.816.948,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1020 Orang/Bulan	6.390.301.856,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		6.709.816.948,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				60 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.337.500.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	1.352.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				459 Paket	697.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		697.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				8 Orang	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				85 Orang	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				25 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.332.036.678,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	3.332.036.678,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				50 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				100 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2350 Laporan	332.036.678,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		332.036.678,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	2.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Paket	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.041.200.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.041.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	183.200.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		183.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	358.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		358.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	250.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	2.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.03.3.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-			-	2.000.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan</i>				2 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
3.	2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	-	-			-	<b>1.800.000.000,00</b>						-	<b>1.800.000.000,00</b>	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-			-	1.800.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa														
			<i>jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
4.	2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	-	-			-	<b>2.700.000.000,00</b>						-	<b>2.700.000.000,00</b>	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.700.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	2.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				1 Keluarga	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.13.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA	-	-			-	2.300.000.000,00						-	2.300.000.000,00	
	2.13.06.3.01	Pengembangan Data/Informasi	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.01.0002	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.02	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	-	-			-	900.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.02.0001	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional</i>				1 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.03	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	-	-			-	900.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT
	2.13.06.3.03.0001	Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	18.569.653.930,00						-	0,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.100.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				10 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.149.653.930,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				161 Orang/Bulan	12.149.653.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.900.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.520.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				10 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	900.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.750.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				30 Unit	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	-	-			-	<b>7.700.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	-			-	1.200.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</i>				1 Laporan	1.200.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	5.500.000.000,00			-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</i>				150 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INF RASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>				75 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INF RASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-			-	1.000.000.000,00			-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)</i>				2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	-	-			-	<b>9.300.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	7.000.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun</i>				1 Unit	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	2.300.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun</i>				1 Unit	2.300.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b>	-	-			-	<b>6.000.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.04.3.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	-	-			-	6.000.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.04.3.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara														
			Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia				1 Unit	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>19.267.934.721,00</b>							<b>19.400.000.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>19.267.934.721,00</b>							<b>19.400.000.000,00</b>	
	<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>19.153.000.000,00</b>							<b>19.285.000.000,00</b>	
1.	<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>15.738.000.000,00</b>						-	<b>15.839.000.000,00</b>	
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.900.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	11.910.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/Bulan	11.900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		11.910.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	-	260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.750.000.000,00			-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	-	1.780.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		410.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				80 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		1.010.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	738.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	749.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				5 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				14 Laporan	588.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		589.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00			-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-	-	1.030.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				21 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		510.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemanta pan Infrastr uktur Dasar dan Pemer ataan Pem angunan yang Berkel anjutan	-		310.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	-	-			-	<b>1.250.000.000,00</b>						-	<b>1.270.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	1.250.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	1.270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>				10 Dokumen	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		760.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>				10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		510.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	-	-			-	<b>2.165.000.000,00</b>						-	<b>2.176.000.000,00</b>	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	2.165.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	2.176.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>				5 Unit	665.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		666.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>				5 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		1.510.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						114.934.721,00							115.000.000,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	114.934.721,00						-	115.000.000,00		
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	114.934.721,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi															
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan</i>				3 Dokumen	114.934.721,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							17.803.185.107,00							19.862.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.803.185.107,00							19.862.000.000,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						17.803.185.107,00							19.862.000.000,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	11.640.838.107,00						-	13.002.000.000,00		
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				5 Dokumen	60.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.500.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	5.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				85 Orang/ Bulan	5.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		5.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	222.600.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				5 Dokumen	222.600.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.172.695.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.195.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				80 Orang	1.022.695.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.025.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.148.716.105,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	2.669.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.711.300,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		8.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	24.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	204.500.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		205.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	10.320.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	517.513.950,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		520.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	1.383.670.855,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		1.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	299.740.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				80 Unit	299.740.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.410.300.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	1.448.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				5 Laporan	12.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	362.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		365.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	335.600.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	700.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		720.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	826.787.002,00		-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	1.590.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				19 Unit	460.810.900,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		465.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	120.800.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	245.176.102,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>1.159.200.000,00</b>						-	<b>1.360.000.000,00</b>	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	430.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	530.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				2 Dokumen	430.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		530.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-			-	395.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	495.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</i>				2 Dokumen	395.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		495.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.	-	-			-	334.200.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	335.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.3.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.														
			<i>Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang Dilaksanakan</i>				2 Laporan	334.200.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		335.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>2.475.000.000,00</b>						-	<b>2.700.000.000,00</b>	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	2.475.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	2.700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi</i>				5 Dokumen	2.150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	325.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>1.349.147.000,00</b>						-	<b>1.600.000.000,00</b>	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	660.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				100 Pelaku Usaha	660.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	689.147.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			<i>Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha</i>				50 Kegiatan Usaha	689.147.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>437.165.000,00</b>						-	<b>450.000.000,00</b>	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	437.165.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				50 Kegiatan usaha	437.165.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>741.835.000,00</b>						-	<b>750.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	369.800.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	370.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				2 Dokumen	369.800.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		370.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.3.02	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	-	-			-	372.035.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	380.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.3.02.0001	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi														
			<i>Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi</i>				2 Helpdesk	372.035.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		380.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		<b>DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA</b>						<b>20.722.451.521,00</b>							<b>56.232.168.196,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>7.679.805.325,00</b>							<b>16.523.000.000,00</b>	
	<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						<b>7.679.805.325,00</b>							<b>16.523.000.000,00</b>	
1.	<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>4.779.805.325,00</b>						-	<b>6.823.000.000,00</b>	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				10 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				0 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	57.000.000,00			-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	64.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				10 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		25.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				0 Laporan	37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		39.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	475.305.325,00			-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	536.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	340.305.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		400.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				110 Orang	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		136.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.122.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.073.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				10 Dokumen	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.000.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.725.500.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.800.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	1.725.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.800.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	340.000.000,00			-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	350.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				0 Unit	340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
2.	<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	-	-			-	<b>600.000.000,00</b>						-	<b>700.000.000,00</b>	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	700.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			<i>Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</i>				0 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				20 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
3.	<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	-	-			-	<b>2.300.000.000,00</b>						-	<b>9.000.000.000,00</b>	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-			-	0,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.500.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara</i>				5 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.500.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	-			-	1.500.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.500.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			<i>Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan</i>				0 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.500.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	800.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														
			<i>Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi</i>				0 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>13.042.646.196,00</b>							<b>39.709.168.196,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>13.042.646.196,00</b>							<b>39.709.168.196,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>13.042.646.196,00</b>						-	<b>39.709.168.196,00</b>	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.836.396.196,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.445.168.196,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				110 Orang/Bulan	8.836.396.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.445.168.196,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	83.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	84.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				10 Paket	83.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		84.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103.250.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	150.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	103.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.020.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	25.030.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya															
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	
	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	
		<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>							<b>32.387.404.241,00</b>							<b>31.147.183.544,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>12.594.710.570,00</b>							<b>3.900.000.000,00</b>		
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>12.594.710.570,00</b>							<b>3.900.000.000,00</b>		
	<b>1.</b>	<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	-	-		-	<b>1.700.000.000,00</b>						-	<b>1.100.000.000,00</b>		
		2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-		-	500.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan</i>				70 Objek	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-			-	1.200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				1 Objek	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				1 Laporan	700.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	-	-			-	<b>2.000.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.000.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				4 Kegiatan Orang	1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				1 Lembaga	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	2.22.04	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	-	-			-	<b>1.729.484.530,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-			-	1.729.484.530,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>				1 Kegiatan Orang	208.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah</i>				3 Unit	1.520.939.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	2.22.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	-	-			-	<b>2.723.771.040,00</b>						-	<b>2.800.000.000,00</b>	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	1.800.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>				1 Objek	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>				5 Objek	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	923.771.040,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				1 Kegiatan Orang	923.771.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	-	-			-	<b>4.441.455.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-			-	4.441.455.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya</i>				6 Kegiatan Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
			<i>Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum</i>				11 Kegiatan Unit	3.441.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						19.792.693.671,00							27.247.183.544,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						19.792.693.671,00							27.247.183.544,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	14.946.326.350,00						-	27.247.183.544,00	
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.030.597.550,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	26.704.083.550,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	11.980.597.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		26.559.583.550,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	28.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		94.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	21.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.200.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				400 Paket	640.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				19 Orang	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				170 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.238.988.800,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	192.158.430,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				22 Paket	427.771.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		19.198.430,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				600 Paket	35.667.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		3.960.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1450 Laporan	140.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				300 Laporan	634.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		99.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	444.240.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	158.441.564,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				5372 kwh Laporan	172.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		74.441.564,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	272.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		84.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.500.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	32.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				14 Unit	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		32.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	-	-			-	<b>1.200.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi														
			<i>Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi</i>				8 Lokasi	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan</i>				350 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				2 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	3.26.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	-	-			-	<b>1.000.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	1.000.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah														
			<i>Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah</i>				90 Lembaga	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	-	-			-	<b>2.146.367.321,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-	-			-	1.581.897.780,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>				100 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>				30 Orang	581.897.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	564.469.541,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif															
			<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>				200 Orang	564.469.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>						<b>30.198.320.319,00</b>							<b>30.211.434.225,00</b>		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>30.198.320.319,00</b>							<b>30.211.434.225,00</b>		
	<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						<b>28.459.976.319,00</b>							<b>28.473.090.225,00</b>		
	1.	<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-		-	<b>26.586.886.094,00</b>						-	<b>26.600.000.000,00</b>		
		2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	25.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	25.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				150 Orang/ Bulan	25.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		25.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		1.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	86.886.094,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	86.886.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	-	-			-	<b>1.772.640.225,00</b>						-	<b>1.772.640.225,00</b>	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	1.109.513.750,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.109.513.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya</i>				1 Perpustakaan	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan</i>				5 Eksemplar	109.250.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		109.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			<i>Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>				8 Perpustakaan	176.946.025,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		176.946.025,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan</i>				2 Perpustakaan	98.042.725,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		98.042.725,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi</i>				12 Orang	155.300.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		155.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi</i>				3 Layanan	225.075.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		225.075.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit														
			<i>Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan</i>				3 Perpustakaan	111.490.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		111.490.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			<i>Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK</i>				1 Perpustakaan	103.100.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		103.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan</i>				1 Dokumen	80.310.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		80.310.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	663.126.475,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	663.126.475,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				2 Lokus	529.054.975,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		529.054.975,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan</i>				2 Perpustakaan	134.071.500,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		134.071.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3.	<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	-	-			-	<b>100.450.000,00</b>						-	<b>100.450.000,00</b>	
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	100.450.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	100.450.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi</i>				2 Eksemplar	100.450.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		100.450.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>1.738.344.000,00</b>							<b>1.738.344.000,00</b>	
1.	<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	-	-			-	<b>1.190.000.000,00</b>						-	<b>1.190.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			<i>Jumlah Daftar Arsip Dinamis</i>				1500 Arsip	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-			-	290.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	290.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			<i>Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi</i>				1 Arsip	290.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		290.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi</i>				2 Laporan	600.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	-	-			-	<b>548.344.000,00</b>						-	<b>548.344.000,00</b>	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-	-			-	248.344.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	248.344.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			<i>Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>				1000 Arsip	248.344.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		248.344.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang														
			<i>Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan</i>				1 Arsip	300.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>29.786.070.588,00</b>							<b>31.750.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>28.986.070.588,00</b>							<b>30.800.000.000,00</b>	
	<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>28.986.070.588,00</b>							<b>30.800.000.000,00</b>	
1.	3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>15.036.070.588,00</b>						-	<b>16.400.000.000,00</b>	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.086.070.588,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				30 Dokumen	586.070.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				10 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.000.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	10.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				116 Orang/Bulan	9.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		10.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				116 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				10 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.750.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	2.750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	800.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	-	-			-	<b>3.400.000.000,00</b>						-	<b>3.850.000.000,00</b>	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	1.500.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			<i>Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola</i>				1500 Ha	600.000.000,00	Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi</i>				20 Ha	600.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</i>				60 Orang	200.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	350.000.000,00		-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi														
			<i>Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut														
			<i>Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-			-	1.000.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.050.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				90 Orang	600.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>				8 Kelompok	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>				60 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			<i>Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Kelompok	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.04	Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.04.0001	penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku														
			<i>Jumlah Dokumen penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.05	Pencadangan kawasan konservasi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.05.0001	Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi</i>				20000 Ha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.3.06	Pelibatan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut.	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.06.0001	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut														
			<i>Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut</i>				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.07	Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.07.0001	Fasilitasi perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan														
			<i>Jumlah komunitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi perlindungan, penguatan dan penetapannya dalam pengelolaan perikanan dan kelautan</i>				10 Komunitas	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.08	Pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai dengan karakteristik dan budaya asli Papua berdasarkan kebijakan yang ditetapkan	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.3.08.0001	Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua														
			<i>Jumlah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua yang ditetapkan</i>				1 Perkada	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	-	-			-	<b>5.000.000.000,00</b>						-	<b>5.000.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-			-	1.700.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			<i>Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				20 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				30 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				30 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				20 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan</i>				20 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.04.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan</i>				20 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-			-	1.200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan														
			<i>Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan</i>				1 Pelabuhan Perikanan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia</i>				10 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			<i>Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana</i>				30 Layanan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.07.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.07.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				10 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT														
			<i>Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.3.11	Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.11.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.11.0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan														
			<i>Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.11.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.12	Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.12.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.12.0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi														
			<i>Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.12.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.13	Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.13.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.13.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi														
			<i>Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.14	Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.14.0001	Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan.</i>				5 rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.15	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.15.0001	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang diremajakan</i>				1 unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.16	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.3.16.0001	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.														
			<i>Jumlah usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan yang diberdayakan</i>				10 Unit Usaha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	-	-			-	<b>2.000.000.000,00</b>						-	<b>2.000.000.000,00</b>	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>				10 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-			-	1.100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>				10 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>				10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Pembudidaya</i>				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0008	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi</i>				300 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0009	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				10 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				10 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	-	-			-	<b>1.700.000.000,00</b>						-	<b>1.700.000.000,00</b>	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-			-	1.350.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil</i>				10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil</i>				10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			<i>Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif</i>				10 Kelompok	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.3.03	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.3.03.0001	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan														
			<i>Jumlah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terawasi</i>				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.3.04	Pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.3.04.0001	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin di wilayah provinsi														
			<i>Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani</i>				5 perkara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.3.04.0002	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani</i>				5 perkara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.3.04.0003	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi														
			<i>Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani</i>				5 perkara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	-	-			-	<b>1.850.000.000,00</b>						-	<b>1.850.000.000,00</b>	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				5 Rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko</i>				10 Unit Usaha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing</i>				10 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas</i>				5 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.04	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.04.0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri														
			<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri</i>				5 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.05	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.05.0001	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri														
			<i>Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya</i>				5 Sampel	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.3.06	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	-	-			-	600.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.06.0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar														
			<i>Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar</i>				65 kg/kap/tahun	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.07	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.07.0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar														
			<i>Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan</i>				10 unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.08	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.08.0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar														
			<i>Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan</i>				10 rekomendasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.3.09	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.3.09.0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar														
			<i>Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar yang direvitalisasi</i>				5 unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X	NON URUSAN						800.000.000,00							950.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						800.000.000,00							950.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	800.000.000,00						-	950.000.000,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		<b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>						<b>30.217.787.652,00</b>							<b>26.084.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>30.217.787.652,00</b>							<b>26.084.000.000,00</b>	
	<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>30.217.787.652,00</b>							<b>26.084.000.000,00</b>	
1.	<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>12.532.787.652,00</b>						-	<b>12.440.000.000,00</b>	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.524.378.200,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				120 Orang/Bulan	10.524.378.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	950.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	940.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		750.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	258.409.452,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	258.409.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>9.145.000.000,00</b>						-	<b>6.824.000.000,00</b>	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	645.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	660.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		105.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				1 laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		505.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas</i>				3 Orang	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-			-	8.500.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	6.164.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>				2 laporan	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		5.414.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		750.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>5.000.000.000,00</b>						-	<b>3.000.000.000,00</b>	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-			-	5.000.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>				5 Unit	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		3.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	2.540.000.000,00						-	2.820.000.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.250.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.405.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan														
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-			-	80.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	85.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-			-	1.060.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	1.165.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan														
			<i>Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner</i>				1 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		65.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			<i>Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		1.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	30.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi</i>				2 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	-	-			-	120.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	135.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya														
			<i>Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani</i>				1 Kasus	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			<i>Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</i>				2 Sertifikat	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		75.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
5.	<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	-	-			-	<b>1.000.000.000,00</b>						-	<b>1.000.000.000,00</b>	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	1.000.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			<i>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				5 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
<b>DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>								<b>74.582.481.710,00</b>							<b>76.937.170.890,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.700.000.000,00							4.390.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3.700.000.000,00							4.390.000.000,00	
1.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	1.800.000.000,00						-	2.060.000.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-			-	600.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	670.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		270.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi														
			<i>jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi</i>				1 Dokuman	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.170.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan</i>				9 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.3.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.3.01.0003	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota														
			<i>Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan RPPLH kabupaten/kota</i>				9 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.3.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.3.02.0001	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota														
			<i>Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaedah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	-	-			-	<b>950.000.000,00</b>						-	<b>1.150.000.000,00</b>	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	850.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.040.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan</i>				5 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)</i>				3 Lokasi	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
			<i>Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			<i>Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	-	-			-	<b>100.000.000,00</b>						-	<b>110.000.000,00</b>	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati														
			<i>Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</i>				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	-	-			-	<b>100.000.000,00</b>						-	<b>150.000.000,00</b>	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				10 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	-	-			-	<b>350.000.000,00</b>						-	<b>450.000.000,00</b>	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	350.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	450.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat</i>				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>250.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				5 Entitas	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>220.000.000,00</b>	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota														
			<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>70.882.481.710,00</b>							<b>72.547.170.890,00</b>	
	3.28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>70.882.481.710,00</b>							<b>72.547.170.890,00</b>	
1.	3.28.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>60.102.170.890,00</b>						-	<b>60.637.170.890,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	270.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	285.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		12.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		12.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		12.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		12.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		12.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	54.297.170.890,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	54.312.170.890,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				439 Orang/Bulan	54.227.170.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		54.227.170.890,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	375.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	405.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				20 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		270.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.260.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	2.510.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		60.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				10 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	80.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		85.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		35.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		30.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		120.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	170.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	275.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		25.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.260.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	2.320.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		650.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	420.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	475.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				15 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				57 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		75.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	<b>3.28.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>250.000.000,00</b>					-		<b>300.000.000,00</b>	
	3.28.02.3.05	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.02.3.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>7.730.310.820,00</b>						-	<b>8.530.000.000,00</b>	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	750.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	800.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi</i>				1 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		800.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	680.310.820,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	700.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	680.310.820,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		700.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-			-	2.000.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	2.200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	1.250.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.470.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				5 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				5 Ha	500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			<i>Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi</i>				15 Ha	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Raveni Rara, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		270.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	1.250.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.360.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan</i>				100 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		260.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	-			-	1.300.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	1.450.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi</i>				5 Unit Managemen	500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu														
			<i>Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH</i>				5 Unit Managemen	800.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		900.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-			-	500.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-			-	1.500.000.000,00						-	1.550.000.000,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	-			-	1.500.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			<i>Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola</i>				200 Ha	1.500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	750.000.000,00						-	830.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	750.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	830.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan														
			<i>Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas</i>				20 Orang	250.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		280.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				5 Kelompok	500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	3.28.08	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT</b>	-	-			-	<b>550.000.000,00</b>						-	<b>700.000.000,00</b>	
	3.28.08.3.01	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.08.3.01.0001	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Dilaksanakan</i>				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.08.3.02	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.08.3.02.0001	Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi														
			<i>Jumlah SDM Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Ditingkatkan</i>				10 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.08.3.03	Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.08.3.03.0001	Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan</i>				5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		<b>CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>	
	<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>	
1.	<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>450.000.000,00</b>						-	<b>480.000.000,00</b>	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	320.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				3 Ha	150.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				3 Ha	150.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan															
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA	
2.	<b>3.28.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	-	-			-	<b>150.000.000,00</b>						-	<b>160.000.000,00</b>		
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA	
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS</i>				25 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA	
		<b>CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI</b>							<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>		
	<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>		
1.	<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>450.000.000,00</b>						-	<b>480.000.000,00</b>		
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	320.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI	
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				3 Ha	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara															
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				3 Ha	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan															
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI	
2.	<b>3.28.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	-	-			-	<b>150.000.000,00</b>						-	<b>160.000.000,00</b>		
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI	
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS</i>				25 Orang	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI	
		<b>CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM</b>							<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						600.000.000,00							640.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						600.000.000,00							640.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	450.000.000,00						-	480.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	320.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				3 Ha	150.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				3 Ha	150.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
2.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-			-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS</i>				25 Orang	150.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM
		<b>CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>	
	<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>640.000.000,00</b>	
1.	<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>450.000.000,00</b>						-	<b>480.000.000,00</b>	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	320.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				3 Ha	150.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				3 Ha	150.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan															
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	
2.	<b>3.28.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	-	-			-	<b>150.000.000,00</b>						-	<b>160.000.000,00</b>		
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS</i>				25 Orang	150.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		160.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA	
		<b>KPHP UNIT XVII WAROPEN</b>							<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>		
	<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>		
1.	<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>		
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN	
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	220.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
2.	3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	-	-			-	<b>100.000.000,00</b>						-	<b>110.000.000,00</b>	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				2 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XVII WAROPEN
		<b>KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA</b>							<b>600.000.000,00</b>						<b>660.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
	<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
1.	3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	220.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan															
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA	
2.	3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	-	-			-	<b>100.000.000,00</b>						-	<b>110.000.000,00</b>		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				2 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA	
		<b>KPHP UNIT XXIII SARMI</b>							<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>		
	<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>		
1.	3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>		
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	220.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
2.	3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	-	-			-	<b>100.000.000,00</b>						-	<b>110.000.000,00</b>	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				2 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIII SARMI
		<b>KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN</b>							<b>600.000.000,00</b>						<b>660.000.000,00</b>	
	3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
	3.28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
1.	3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun</i>				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	220.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan															
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN	
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				2 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XIX KEPULAUAN YAPEN	
		<b>KPHL UNIT XX BIAK</b>							<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>		
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-			-	500.000.000,00						-	550.000.000,00		
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun</i>				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	220.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
2.	3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	-	-			-	<b>100.000.000,00</b>						-	<b>110.000.000,00</b>	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				4 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHL UNIT XX BIAK
		<b>KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA</b>							<b>600.000.000,00</b>						<b>660.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
	<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
1.	3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	220.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan															
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA	
2.	3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	-	-			-	<b>100.000.000,00</b>						-	<b>110.000.000,00</b>		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				4 Kelompok	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA	
		<b>KPHP UNIT XXIX KEEROM</b>							<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>	
	3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>		
	3.28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>660.000.000,00</b>		
1.	3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>500.000.000,00</b>						-	<b>550.000.000,00</b>		
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			<i>Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	220.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				2 Ha	100.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan															
			<i>Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM	
2.	3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	-	-			-	<b>100.000.000,00</b>						-	<b>110.000.000,00</b>		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				4 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		110.000.000,00	KPHP UNIT XXIX KEEROM	
		<b>UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO</b>							<b>850.000.000,00</b>							<b>950.000.000,00</b>	
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>850.000.000,00</b>							<b>950.000.000,00</b>		
	2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>850.000.000,00</b>							<b>950.000.000,00</b>		
1.	2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	-	-			-	<b>850.000.000,00</b>						-	<b>950.000.000,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	850.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	950.000.000,00	UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO
	2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya														
			<i>Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi</i>				150 Ha	500.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Koya Koso	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		550.000.000,00	UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO
	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragam Hayati														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola</i>				1 Unit	350.000.000,00	Kota Jayapura, Abepura, Koya Koso	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		400.000.000,00	UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO
		<b>BPTH PAPUA</b>						<b>850.000.000,00</b>							<b>1.050.000.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>850.000.000,00</b>							<b>1.050.000.000,00</b>	
	<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>850.000.000,00</b>							<b>1.050.000.000,00</b>	
1.	<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	-	-			-	<b>850.000.000,00</b>						-	<b>1.050.000.000,00</b>	
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-			-	850.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	1.050.000.000,00	BPTH PAPUA
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan</i>				2 Sertifikat	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		250.000.000,00	BPTH PAPUA
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan</i>				2 Sertifikat	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Vim	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	BPTH PAPUA	
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit															
			<i>Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan</i>				2 Sertifikat	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Vim	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		250.000.000,00	BPTH PAPUA	
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit															
			<i>Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	BPTH PAPUA	
		<b>UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK</b>							<b>850.000.000,00</b>							<b>450.000.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>850.000.000,00</b>							<b>450.000.000,00</b>		
	<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>850.000.000,00</b>							<b>450.000.000,00</b>		
1.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	<b>850.000.000,00</b>						-	<b>450.000.000,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	850.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	450.000.000,00	UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK
	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragam Hayati														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola</i>				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Biak Timur, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya														
			<i>Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi</i>				1 Unit	450.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Biak Timur, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK
		<b>UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>650.000.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>650.000.000,00</b>	
	<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>650.000.000,00</b>	
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	600.000.000,00						-	650.000.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	600.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	650.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		650.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA
<b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>								<b>46.678.306.760,00</b>							<b>41.698.600.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>5.562.835.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						<b>5.562.835.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>1.159.200.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	430.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				2 Dokumen	430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-			-	395.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</i>				2 Dokumen	395.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.	-	-			-	334.200.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.3.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.														
			<i>Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang Dilaksanakan</i>				2 Laporan	334.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>2.475.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	2.475.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi</i>				5 Dokumen	2.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>1.341.470.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	660.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				100 Pelaku Usaha	660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	681.470.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			<i>Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha</i>				50 Kegiatan Usaha	681.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>437.165.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-			-	437.165.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				50 Kegiatan usaha	437.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	-	-			-	<b>150.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.3.02	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.3.02.0001	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi														
			<i>Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi</i>				2 Helpdesk	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>41.115.471.760,00</b>							<b>41.698.600.000,00</b>	
	<b>3.29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						<b>41.115.471.760,00</b>							<b>41.698.600.000,00</b>	
1.	<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>15.716.444.835,00</b>						-	<b>16.173.600.000,00</b>	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	380.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.892.806.000,00			-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	11.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/ Bulan	9.892.806.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		11.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.250.000.000,00			-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>				0 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				40 Orang	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		900.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.824.178.835,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.825.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				126 Paket	240.773.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	28.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	79.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		80.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	50.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	139.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		140.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.085.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	750.000.000,00			-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	870.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		20.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				120 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	472.800.000,00			-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	472.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	352.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		352.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	126.660.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		225.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				21 Unit	72.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				40 Unit	54.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		150.800.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN</b>	-	-			-	<b>2.525.000.000,00</b>						-	<b>3.075.000.000,00</b>	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	1.450.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		1.775.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		275.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>				3 Dokumen	1.175.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.04	Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	-	-			-	225.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.04.0001	Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	225.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.09	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	-	-			-	175.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.09.0001	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi</i>				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.10	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	-	-			-	200.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.10.0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah														
			<i>Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.12	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	-	-			-	175.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.02.3.12.0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi														
			<i>Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia</i>				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	3.29.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	-	-			-	<b>3.050.000.000,00</b>						-	<b>2.400.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-			-	600.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			<i>Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														
			<i>Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-			-	400.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	500.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.12.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-	-			-	400.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)</i>				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan	-	-			-	650.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam</i>				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	-	-			-	500.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.03.1.24.0007	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan														
			<i>Jumlah laporan hasil pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	3.29.04	<b>PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI</b>	-	-			-	<b>2.275.000.000,00</b>						-	<b>2.000.000.000,00</b>	
	3.29.04.3.11	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua	-	-			-	1.000.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.04.3.11.0001	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.04.3.12	Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua	-	-			-	1.275.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.04.3.12.0001	Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua														
			0				10	1.275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	3.29.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	-	-			-	<b>3.940.000.000,00</b>						-	<b>3.850.000.000,00</b>	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-			-	3.740.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		3.650.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT														
			<i>Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi</i>				2 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.05.1.07.0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT														
			<i>Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasikan infrastruktur aneka EBT</i>				6 orang	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT														
			<i>Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara</i>				1 unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		2.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR [DTI]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.05.3.09	Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi.	-	-			-	200.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.05.3.09.0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi														
			<i>Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	-	-			-	<b>13.609.026.925,00</b>						-	<b>14.200.000.000,00</b>	
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-			-	200.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														
			<i>Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	13.409.026.925,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	14.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			<i>Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				1 Keluarga	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			<i>Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				2 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				4 Unit	11.509.026.925,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA [DTI]	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		12.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, PENANAMAN MODAL DAN PTSP
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>								<b>33.336.643.355,00</b>							<b>45.634.851.350,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>28.644.851.350,00</b>							<b>38.984.851.350,00</b>	
	<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						<b>28.644.851.350,00</b>							<b>38.984.851.350,00</b>	
1.	<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>19.544.851.350,00</b>						-	<b>26.434.851.350,00</b>	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	108.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				6 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	58.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.039.851.350,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.254.851.350,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				150 Orang/Bulan	14.934.851.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.134.851.350,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				2 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				4 Laporan	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				5 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	950.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.365.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				150 Paket	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				30 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				50 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.367.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.975.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				15 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				50 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	730.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	940.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 laporan Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	815.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	-	-			-	<b>550.000.000,00</b>						-	<b>700.000.000,00</b>	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				35 Unit Usaha	250.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				50 Unit Usaha	300.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	-	-			-	<b>400.000.000,00</b>						-	<b>450.000.000,00</b>	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				100 Unit Usaha	400.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	800.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	800.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	800.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	1.450.000.000,00						-	1.700.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.450.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>				30 Unit Usaha	450.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				300 Keluarga	400.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya</i>				50 Unit Usaha	250.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya</i>				100 Unit Usaha	350.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
6.	2.17.07	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	-	-			-	<b>4.800.000.000,00</b>						-	<b>6.600.000.000,00</b>	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	4.700.000.000,00			-	4. Pember dayaan Ekonomi Masyarakat dan Pening katan Investasi.	-	-	6.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>				300 Unit Usaha	2.500.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		3.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi</i>				80 Unit Usaha	150.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata</i>				350 Unit Usaha	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>				350 Orang	1.700.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				30 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				100 Unit Usaha	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.3.03	Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.3.03.0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</i>				60 UMKM	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	-	-			-	<b>850.000.000,00</b>						-	<b>1.450.000.000,00</b>	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-			-	650.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				100 Unit Usaha	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			<i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i>				80 Orang	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang														
			<i>Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi</i>				2 Lembaga	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
			<i>Wirausaha yang Difasilitasi</i>				100 Orang	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.3.02	Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.3.02.0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar														
			<i>Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar</i>				80 UMKM	200.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.	2.17.09	<b>PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI</b>	-	-			-	<b>250.000.000,00</b>						-	<b>650.000.000,00</b>	
	2.17.09.3.01	Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.09.3.01.0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi</i>				10 Kelompok Pra Koperasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.09.3.02	Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.09.3.02.0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi														
			<i>Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris</i>				50 Koperasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>4.541.792.005,00</b>							<b>6.450.000.000,00</b>	
	<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>4.541.792.005,00</b>							<b>6.450.000.000,00</b>	
1.	<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	-	-			-	<b>300.000.000,00</b>						-	<b>500.000.000,00</b>	
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.02.0008	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik														
			<i>Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik</i>				2 laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.3.05	Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan	-	-			-	150.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.3.05.0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan														
			<i>Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Dilaksanakan</i>				100 Kegiatan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>300.000.000,00</b>	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	-			-	200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	-	-			-	<b>1.891.792.005,00</b>						-	<b>2.500.000.000,00</b>	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i>				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-			-	1.141.792.005,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	290.792.005,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				8 Laporan	851.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.3.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	650.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.3.01.0003	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi</i>				10 Unit	300.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.3.01.0005	Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua														
			<i>Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua</i>				4 Kegiatan	350.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	-	-			-	<b>600.000.000,00</b>						-	<b>900.000.000,00</b>	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-			-	600.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				4 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>				5 Produk	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	-	-			-	<b>1.100.000.000,00</b>						-	<b>1.600.000.000,00</b>	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			<i>Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>				2 BPSK	150.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														
			<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>				10 Pengaduan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	850.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i>				50 Sertifikat	350.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>				50 laporan	350.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>				1 Produk	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-			-	450.000.000,00						-	650.000.000,00	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	-	-			-	350.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri</i>				100 UMKM	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [SPESIFIC GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	100.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>				4 Laporan	100.000.000,00	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	X	NON URUSAN						150.000.000,00							200.000.000,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						150.000.000,00							200.000.000,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	150.000.000,00						-	200.000.000,00		
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		SEKRETARIAT DAERAH							138.578.019.026,00							231.450.130.140,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						135.578.019.026,00							227.450.130.140,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						135.578.019.026,00							227.450.130.140,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	135.578.019.026,00						-	227.450.130.140,00		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	38.715.341.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	38.715.341.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/Bulan	38.715.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		38.715.341.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.500.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				15 Paket	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	15.882.760.950,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	22.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	382.760.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	18.684.789.140,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	22.284.789.140,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	1.584.789.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.584.789.140,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	17.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	40.272.627.936,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	40.272.627.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	10.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				1 Laporan	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	10.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan															
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>				1 Laporan	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>3.000.000.000,00</b>							<b>4.000.000.000,00</b>		
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>3.000.000.000,00</b>							<b>4.000.000.000,00</b>		
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				30 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BIRO UMUM</b>							<b>24.321.447.757,00</b>							<b>26.586.447.757,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>24.321.447.757,00</b>							<b>26.586.447.757,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>24.321.447.757,00</b>							<b>26.586.447.757,00</b>		
1.	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>22.421.447.757,00</b>							<b>24.386.447.757,00</b>		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	BIRO UMUM	
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				10 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO UMUM	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				10 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	12.200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				230 Orang/Bulan	10.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	310.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				3 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.550.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.505.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	655.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		655.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				200 Dokumen	145.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		145.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				5 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				7 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				50 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.171.447.757,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.171.447.757,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				10 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	5.071.447.757,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.071.447.757,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.800.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.800.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				145 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				80 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	1.900.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.900.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				385 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BIRO UMUM
2.	<b>4.01.07</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	-	-			-	<b>1.900.000.000,00</b>						-	<b>2.200.000.000,00</b>	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	1.900.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				10 Laporan	1.900.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.200.000.000,00	BIRO UMUM
		<b>BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>							<b>18.822.150.860,00</b>						<b>28.777.150.860,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>18.622.150.860,00</b>							<b>28.527.150.860,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>18.622.150.860,00</b>							<b>28.527.150.860,00</b>	
1.	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>13.522.150.860,00</b>						-	<b>19.127.150.860,00</b>	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.027.150.860,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	15.027.150.860,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/Bulan	11.027.150.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.027.150.860,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.100.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.650.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			<i>Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				5 Unit	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	-	-			-	<b>1.000.000.000,00</b>						-	<b>1.400.000.000,00</b>	
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	4.01.03	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	-	-			-	<b>3.000.000.000,00</b>						-	<b>4.600.000.000,00</b>	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-			-	1.500.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.800.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-			-	1.200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				10 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			<i>Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.	<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	-	-			-	<b>1.100.000.000,00</b>						-	<b>2.400.000.000,00</b>	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>				3 Lembaga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	700.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
5.	4.01.09	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA</b>	-	-			-	<b>0,00</b>						-	<b>1.000.000.000,00</b>		
	4.01.09.3.02	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus	-	-			-	0,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.09.3.02.0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.09.3.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>200.000.000,00</b>							<b>250.000.000,00</b>		
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>200.000.000,00</b>							<b>250.000.000,00</b>		
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>200.000.000,00</b>						-	<b>250.000.000,00</b>		
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	250.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>							<b>20.215.099.275,00</b>							<b>41.600.000.000,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						20.215.099.275,00							41.600.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						20.215.099.275,00							41.600.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	13.015.099.275,00						-	21.750.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	360.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	60.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.140.099.275,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.220.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				74 Orang/Bulan	2.000.099.275,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				50 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	120.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	636.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.750.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	56.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	250.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	6.144.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.250.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	70.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		70.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	1.200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1.344.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.700.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			-				-	350.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	250.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.775.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	75.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.700.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	<b>4.01.07</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	-	-			-	<b>7.200.000.000,00</b>						-	<b>19.850.000.000,00</b>	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	4.200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.700.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	3.200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	1.500.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.750.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik															
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</i>				1 Laporan	900.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa															
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	400.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa															
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	1.500.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.400.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa															
			<i>Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa</i>				50 Orang	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		<b>BIRO HUKUM</b>							<b>17.440.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
<b>4</b>		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>17.440.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						17.440.000.000,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	8.040.000.000,00						-	0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/Bulan	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.150.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
2.	<b>4.01.05</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	-	-			-	<b>9.400.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	-	-			-	7.400.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i>				1 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun</i>				1 Dokumen	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi</i>				1 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-			-	2.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			<i>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</i>				30 Kasus	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO HUKUM
		<b>BIRO ORGANISASI</b>						<b>17.188.376.000,00</b>							<b>18.042.560.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>13.116.526.000,00</b>							<b>13.292.560.000,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>13.116.526.000,00</b>							<b>13.292.560.000,00</b>	
1.	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>3.516.526.000,00</b>						-	<b>3.442.560.000,00</b>	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	24.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	568.200.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	407.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				38 Paket	114.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		57.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				14 Orang	454.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.387.116.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.387.316.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				8 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				38 Paket	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1320 Dokumen	19.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				56 Paket	211.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		211.416.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				2471 Laporan	312.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		312.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				56 Laporan	1.759.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.759.900.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	162.966.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				17 Unit	162.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	176.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	176.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		66.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	178.244.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	178.244.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				16 Unit	178.244.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		178.244.000,00	BIRO ORGANISASI
2.	<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	-	-			-	<b>9.600.000.000,00</b>						-	<b>9.850.000.000,00</b>	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-			-	6.400.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.400.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>				42 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.400.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan</i>				42 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	3.200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.450.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</i>				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan</i>				1 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</i>				1 Dokumen	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		900.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>4.071.850.000,00</b>							<b>4.750.000.000,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>4.071.850.000,00</b>							<b>4.750.000.000,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>4.071.850.000,00</b>						-	<b>4.750.000.000,00</b>	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				38 Orang/Bulan	3.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	771.850.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	750.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				14 Paket	771.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		750.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		<b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>							<b>15.627.544.481,00</b>						<b>0,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>15.627.544.481,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>15.627.544.481,00</b>							<b>0,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	15.627.544.481,00						-	0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/Bulan	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.700.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	27.544.481,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	27.544.481,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			<i>Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	6.300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan															
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>				1 Laporan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		<b>BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>							<b>11.150.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>11.150.000.000,00</b>							<b>0,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>11.150.000.000,00</b>							<b>0,00</b>		
1.	<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>6.750.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	800.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.100.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/Bulan	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	800.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel					1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	<b>4.01.06</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	-	-			-	<b>2.000.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	-			-	600.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					1 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-			-	400.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.	<b>4.01.08</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	-	-			-	<b>2.400.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	900.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-	-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA</b>						<b>227.278.784.647,00</b>							<b>920.700.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>226.778.494.647,00</b>							<b>920.700.000,00</b>	
	<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						<b>226.778.494.647,00</b>							<b>920.700.000,00</b>	
1.	<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>127.610.795.157,00</b>						-	<b>920.700.000,00</b>	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	837.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	920.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	837.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		920.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	18.582.268.614,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/Bulan	13.483.868.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	4.644.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	252.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	201.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.625.038.704,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1.625.038.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.830.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				100 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				100 Orang	2.330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				30 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	11.743.559.480,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	300.054.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.482.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	201.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.529.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.323.194.104,00		-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.285.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	5.537.594.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.228.120.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				90 Unit	727.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				25 Unit	7.000.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	74.441.614.255,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>				69 Orang/Bulan	73.751.614.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				69 Orang	690.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	0,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
2.	<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	-	-			-	<b>96.367.699.490,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	-			-	2.000.700.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				11 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda</i>				11 Dokumen	1.000.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	527.650.500,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				1 Dokumen	104.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>				1 Dokumen	100.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>				1 Dokumen	100.000.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD</i>				1 Dokumen	100.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				1 Dokumen	122.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	4.557.600.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				1 Laporan	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	842.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				1 Laporan	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				1 Dokumen	300.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>				1 Dokumen	722.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	352.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	12.522.020.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>				0 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				1 Dokumen	3.891.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				35 Orang	1.560.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				35 Orang	4.882.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				1 Dokumen	303.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				1 Dokumen	885.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	22.209.589.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				69 Laporan	2.982.589.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				69 Dokumen	19.227.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	361.200.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>				1 Dokumen	361.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	54.188.939.990,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				69 Dokumen	27.360.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				1 Dokumen	2.973.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				20 Dokumen	20.855.039.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i>				14 Dokumen	3.000.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
3.	<b>4.02.03</b>	<b>PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA</b>	-	-			-	<b>2.800.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	4.02.03.3.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-	-			-	2.800.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.03.3.01.0001	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama</i>				20 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.03.3.01.0002	Penyusunan LKPJ dan Rencana Kerja														
			<i>Jumlah Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.03.3.01.0003	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus														
			<i>Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus</i>				20 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	4.02.03.3.01.0004	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua</i>				12 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>500.290.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>500.290.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>500.290.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500.290.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				80 Unit	500.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	0,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				20 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</b>						<b>50.294.659.499,00</b>							<b>25.555.113.647,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>950.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>950.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	1.	<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	-	-		-	<b>950.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
		1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-		-	950.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi													
			<i>Jumlah Perda RTRW Provinsi</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi														
			<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														
			<i>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi</i>				1 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>49.344.659.499,00</b>							<b>25.555.113.647,00</b>	
	<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>						<b>47.444.659.499,00</b>							<b>25.555.113.647,00</b>	
1.	<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>21.935.215.984,00</b>						-	<b>24.305.113.647,00</b>	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.023.375.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	45.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	677.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.401.840.984,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	24.255.113.647,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				185 Orang/Bulan	15.716.290.984,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.255.113.647,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	155.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	220.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.990.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.050.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	430.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	820.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	14.439.443.515,00						-	1.250.000.000,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	7.689.443.515,00			-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	530.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	1.739.443.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	3.000.000.000,00	Kab. Jayapura, Sentani, Sentani Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	2.800.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>				100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>				100 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>				2 Buku	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	3.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya</i>				10 Kerja Sama	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	950.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	-	-			-	<b>11.070.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	3.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	3.200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	4.870.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	840.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	830.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>1.900.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	-	-			-	<b>1.900.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	1.250.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	400.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	100.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	150.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET</b>								<b>249.703.533.933,00</b>							<b>249.703.533.933,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						249.703.533.933,00							249.703.533.933,00	
	5.02	KEUANGAN						249.703.533.933,00							249.703.533.933,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	79.931.632.960,00						-	79.931.632.960,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.180.240.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	3.180.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.052.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.052.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	442.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		442.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	442.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		442.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.242.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.242.140.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	42.917.063.100,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	42.917.063.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/Bulan	41.760.243.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		41.760.243.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	514.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		514.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	642.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		642.420.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.313.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	1.313.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				0 Dokumen	1.313.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.313.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	3.004.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	3.004.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				340 Paket	723.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		723.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				35 Orang	2.280.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		2.280.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.748.272.190,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	19.748.272.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				50 Paket	4.178.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		4.178.814.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				150 Paket	1.592.448.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.592.448.990,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				80025 Paket	1.935.759.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.935.759.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				100 Dokumen	333.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		333.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				0 Laporan	4.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		4.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	6.785.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		6.785.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				0 Dokumen	723.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		723.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	108.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	108.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	108.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		108.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.975.057.770,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	4.975.057.770,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1600 Laporan	2.529.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		2.529.960.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	1.467.097.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.467.097.770,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0 Laporan	978.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		978.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.685.099.900,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	4.685.099.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					88 Unit	2.633.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		2.633.620.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					60 Unit	305.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		305.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100 Unit	1.027.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.027.080.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3 Unit	719.199.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		719.199.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	165.726.500.973,00						-	165.726.500.973,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	20.813.710.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	20.813.710.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	1.525.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.525.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				0 Dokumen	3.453.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		3.453.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				0 Dokumen	1.916.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.916.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				60 Dokumen	1.740.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.740.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				60 Dokumen	607.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		607.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				60 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				60 Dokumen	3.242.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		4.242.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				60 Dokumen	3.094.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		3.094.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				0 Dokumen	3.132.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		3.132.480.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi</i>				0 Orang	501.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		501.880.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.999.695.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		3.999.695.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</i>				9 Laporan	1.831.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.831.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				9 Laporan	1.146.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.146.370.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah</i>				9 Dokumen	1.021.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.021.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	5.999.808.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	5.999.808.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				0 Dokumen	668.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		668.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>				0 Dokumen	532.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		532.560.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				0 Dokumen	645.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		645.184.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>				0 Dokumen	806.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		806.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>				0 Laporan	1.307.254.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.307.254.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				0 Dokumen	852.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		852.576.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>				0 Dokumen	565.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				0 Orang	622.194.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		622.194.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	6.500.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	6.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				3 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				3 Laporan	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		2.400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi</i>				5 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				10 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	121.551.487.973,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	121.551.487.973,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				0 Laporan	121.551.487.973,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		121.551.487.973,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	6.861.800.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	6.861.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi</i>				0 Orang	6.861.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		6.861.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
3.	<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	-	-			-	<b>4.045.400.000,00</b>						-	<b>4.045.400.000,00</b>	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	4.045.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	4.045.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	649.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		649.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah															
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	800.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		800.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah															
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	294.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		294.870.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1.099.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		1.099.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	
		<b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>68.482.342.636,00</b>							<b>79.962.452.276,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>68.482.342.636,00</b>							<b>79.962.452.276,00</b>		
	<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>						<b>68.482.342.636,00</b>							<b>79.962.452.276,00</b>		
1.	<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>57.414.956.007,00</b>						-	<b>62.179.793.436,00</b>		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	372.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	699.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		327.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	172.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		172.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	27.533.339.936,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	27.533.339.936,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				231 Orang/Bulan	27.383.339.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		27.383.339.936,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.194.750.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.397.170.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				13 Dokumen	886.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		88.620.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				8 Laporan	357.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		357.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	951.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		951.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4.551.590.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.079.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				225 Paket	337.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		690.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				4 Dokumen	1.064.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.061.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan</i>				8 Orang	95.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		122.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				184 Orang	3.003.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.154.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	7.389.405.153,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.509.261.975,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				11 Paket	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	1.114.021.553,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.165.775.375,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	1.057.073.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.020.423.600,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	32.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		32.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		276.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	4.432.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.429.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	403.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		445.288.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	6.453.020.400,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.129.049.200,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				5 Unit	108.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		760.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				166 Paket	1.131.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		981.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				295 Unit	2.351.617.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.510.270.200,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2.862.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.477.679.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.050.380.518,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.861.522.325,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.177.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.919.918.807,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.505.926.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.512.270.200,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.366.979.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.429.333.318,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.870.470.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.971.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				73 Unit	1.579.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.674.830.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	558.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		564.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				141 Unit	442.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		442.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				9 Unit	1.290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		290.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-			-	<b>11.067.386.629,00</b>						-	<b>17.782.658.840,00</b>	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	11.067.386.629,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.782.658.840,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1.181.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.081.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				5 Laporan	140.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		656.822.840,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				5 Laporan	324.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		628.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				1 Laporan	3.198.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.688.395.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen Ketetapan	526.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		526.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				5 Laporan	1.976.907.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.664.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</i>				2 Dokumen	275.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				1 Dokumen SSPD	805.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		805.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti</i>				1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	936.365.029,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		975.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				8 Laporan	936.461.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.555.676.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Laporan	663.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		951.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						<b>31.443.882.046,00</b>							<b>44.323.880.000,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>31.443.882.046,00</b>							<b>44.323.880.000,00</b>	
	<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>31.443.882.046,00</b>							<b>44.323.880.000,00</b>	
1.	<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>23.317.468.022,00</b>						-	<b>26.331.880.000,00</b>	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	801.868.831,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	835.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	95.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	84.269.981,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	90.629.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	80.769.950,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	450.609.900,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		460.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.442.832.020,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.730.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				14 0	14.729.119.540,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	562.327.295,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		570.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	77.477.275,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	73.907.910,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	26.761.340,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	26.761.340,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.858.449.380,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.895.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				4 Paket	250.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		585.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				24 Orang	1.022.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.025.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	336.449.380,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		340.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.294.899.935,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.397.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	160.761.160,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		161.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	134.138.775,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.051.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	347.944.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				7 Unit	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	347.944.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	994.712.516,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	39.055.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	455.657.516,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		460.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	744.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				15 Unit	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		244.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				22 Unit	400.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	-	-			-	<b>8.126.414.024,00</b>						-	<b>17.992.000.000,00</b>	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	1.714.428.364,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.305.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK														
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		885.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				1 Dokumen	301.340.400,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN														
			<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>				2 Lembaga	163.087.964,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		195.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.915.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.265.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	3.950.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.438.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola</i>				1 Dokumen	3.000.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.184.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN</i>				300 Orang	300.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		745.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		276.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			<i>Jumlah Fungsional ASN yang Dibina</i>				100 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		357.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		876.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	1.461.985.660,00			-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.334.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				80 Orang	1.111.985.660,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.484.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>				200 Orang	150.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>				70 Orang	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR</b>						<b>36.705.175.460,00</b>							<b>21.812.507.350,00</b>		
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>36.705.175.460,00</b>							<b>21.812.507.350,00</b>		
	<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>36.705.175.460,00</b>							<b>21.812.507.350,00</b>		
1.	<b>5.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>25.867.257.350,00</b>						-	<b>21.812.507.350,00</b>		
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	505.245.200,00					3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	405.245.200,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	405.245.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		405.245.200,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	
	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	21.407.262.150,00					3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	21.057.262.150,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				92 Orang/Bulan	20.807.262.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.807.262.150,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.211.750.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	1.137.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	215.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.928.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.428.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
2.	5.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	-	-			-	<b>10.837.918.110,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	3.190.520.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				120 Orang	1.990.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi</i>				2900 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	7.647.398.110,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi</i>				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi</i>				220 Orang	1.284.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				3 Laporan	914.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				2 Dokumen	3.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				220 Orang	1.448.948.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				42 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
		<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>							<b>18.699.734.760,00</b>						<b>0,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>18.099.734.760,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>18.099.734.760,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>5.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>11.999.734.760,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				0 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.700.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				50 Orang/Bulan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				50 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	540.000.000,00			-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				0 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemanta pan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				0 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>				0 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	940.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				0 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>				0 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>				0 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan</i>				0 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				0 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				0 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				0 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				0 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				0 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.689.734.760,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				6 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				2 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>				0 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Paket	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	99.734.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				0 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.330.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				0 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				0 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				0 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizihannya</i>				0 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				0 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</i>				1 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	-	-			-	6.100.000.000,00						-	0,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	2.700.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi</i>				2 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa</i>				0 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola</i>				4 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan</i>				1 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang														
			<i>Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan</i>				1 Rekomendasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	1.100.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.02.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	1.300.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>				2 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>				0 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>600.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>600.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				5 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		<b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA</b>							<b>17.585.193.158,00</b>						<b>1.520.844.193.158,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>17.585.193.158,00</b>							<b>1.520.844.193.158,00</b>	
	<b>5.06</b>	<b>PENGELOLAAN PERBATASAN</b>						<b>17.585.193.158,00</b>							<b>1.520.844.193.158,00</b>	
1.	<b>5.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>9.385.193.158,00</b>						-	<b>1.512.944.193.158,00</b>	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	40.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.390.472.100,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.390.472.100,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				51 Orang/Bulan	3.340.472.100,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.340.472.100,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	755.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	760.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				10 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	150.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	450.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	155.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		160.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.198.721.058,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.506.723.721.058,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	75.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	325.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		330.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	328.721.058,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		328.721.058,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	90.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	90.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	700.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.505.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
							-	515.000.000,00		-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		515.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	290.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		290.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	225.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	371.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	385.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	135.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		140.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	216.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		220.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	955.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	970.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	610.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		615.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	115.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	230.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		235.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
2.	<b>5.06.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	-	-			-	<b>8.200.000.000,00</b>						-	<b>7.900.000.000,00</b>	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-	-			-	2.200.000.000,00			-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				2 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-	-			-	5.000.000.000,00			-	5. Pemantauan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		4.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara</i>				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan</i>				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	-	-			-	1.000.000.000,00			-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemertanian Pembangunan yang Berkelanjutan	-		1.700.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Laporan	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
	5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan Pembangunan yang Berkelanjutan	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
		<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>							<b>14.697.310.834,00</b>						<b>22.330.000.000,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>14.697.310.834,00</b>							<b>22.330.000.000,00</b>	
	<b>5.07</b>	<b>PENGLOLAAN PENGHUBUNG</b>						<b>14.697.310.834,00</b>							<b>22.330.000.000,00</b>	
1.	<b>5.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>10.847.310.834,00</b>						-	<b>17.880.000.000,00</b>	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.541.872.329,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.700.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/Bulan	2.466.872.329,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miliik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	550.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				70 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		850.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.450.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		850.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.750.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	750.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.004.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.390.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		700.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	504.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.206.438.505,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.750.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	406.438.505,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	120.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</i>				1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	-			-	120.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</i>				1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	<b>5.07.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	-	-			-	<b>3.850.000.000,00</b>						-	<b>4.450.000.000,00</b>	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-			-	3.850.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan</i>				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHU SUS-PROVINSI PAPUA-UMUM [BLOCK GRANT]	-	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	-		3.250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		<b>INSPEKTORAT</b>							<b>34.849.784.713,00</b>							<b>39.447.227.813,00</b>	
	<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>34.849.784.713,00</b>							<b>39.447.227.813,00</b>		
	<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>34.849.784.713,00</b>							<b>39.447.227.813,00</b>		
1.	<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		-	-		-	<b>11.880.541.713,00</b>						-	<b>15.999.259.813,00</b>		
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.500.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.100.447.813,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				95 Orang/Bulan	6.500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.100.447.813,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	871.500.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.935.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	0,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		276.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				95 Orang	871.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.659.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.031.146.313,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.505.916.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	360.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		260.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	502.400.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		502.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	525.946.313,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		470.266.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	42.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	450.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.150.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.790.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	999.515.400,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	999.515.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	10.725.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.725.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	203.990.400,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		203.990.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	784.800.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		784.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	478.380.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	458.380.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	98.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		98.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	279.880.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		279.880.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	-	-			-	<b>16.113.493.000,00</b>						-	<b>16.144.018.000,00</b>	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	13.748.443.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.005.168.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				52 Laporan	3.674.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.383.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				4 Laporan	3.188.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.302.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				1 Laporan	88.750.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		88.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				48 Laporan	2.420.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.420.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota</i>				13 Laporan	748.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		748.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				1 Kesepakatan	258.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		258.268.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				58 Dokumen	3.369.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.803.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	2.365.050.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.138.850.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				1 Laporan	465.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		465.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>				11 Laporan	1.899.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.673.250.000,00	INSPEKTORAT
3.	<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	-	-			-	<b>6.855.750.000,00</b>						-	<b>7.303.950.000,00</b>	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	400.000.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	446.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		446.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	6.455.750.000,00			-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.857.450.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				2 Perangkat Daerah	645.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		645.080.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				35 Perangkat Daerah	701.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		701.780.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				28 Kegiatan	5.108.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Pemantauan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.510.590.000,00	INSPEKTORAT
		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>18.356.619.758,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>17.886.619.758,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>17.886.619.758,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>8.825.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.030.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				50 Orang/ Bulan	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	860.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Ten tram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				70 Orang	800.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.955.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				80 Laporan	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	190.000.000,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	70.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	-	-			-	<b>1.700.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.700.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				140 Orang	400.000.000,00	Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>				2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>				2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	-	-			-	<b>4.161.619.758,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	4.161.619.758,00			-	2. Pemantauan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				400 Orang	2.161.619.758,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				300 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	600.000.000,00						-	0,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	600.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				210 Orang	600.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	1.000.000.000,00						-	0,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	1.000.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				140 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	1.600.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	1.600.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				210 Orang	800.000.000,00	Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				210 Orang	800.000.000,00	Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	<b>X</b>	<b>NON URUSAN</b>						<b>470.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>X.XX</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						<b>470.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-			-	<b>470.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		<b>SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA</b>							<b>41.356.556.931,00</b>							<b>0,00</b>	
	<b>9</b>	<b>UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN</b>						<b>31.136.392.181,00</b>							<b>0,00</b>		
	<b>9.02</b>	<b>KEKHUSUSAN PAPUA</b>						<b>31.136.392.181,00</b>							<b>0,00</b>		
1.	<b>9.02.02</b>	<b>PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA</b>	-	-			-	<b>31.136.392.181,00</b>						-	<b>0,00</b>		
	9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	-	-			-	1.428.383.581,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	
	9.02.02.3.01.0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.01.0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.01.0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.01.0005	Penyusunan Peraturan MRP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan MRP yang Disusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.01.0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.01.0007	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	-	-			-	29.708.008.600,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota														
			<i>Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan</i>				0 Orang	28.598.008.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	9.02.02.3.02.0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasid dan Pergub														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasidan Pergub				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0007	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdikan kepada Masyarakat Papua														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdikan kepada Masyarakat Papua</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0008	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan kehidupan Beragama</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	9.02.02.3.02.0012	Peningkatan Kapasitas MRP														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP</i>				1 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X	NON URUSAN						10.220.164.750,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.220.164.750,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	10.220.164.750,00						-	0,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.028.164.750,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	ASN	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				46 Orang/Bulan	7.028.164.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	ASN		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	110.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.182.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				2 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	669.990.000,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	69.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-	-	0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				25 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningka tan kualitas SDM dan P emenuhan Kualitas Dasar	-		0,00	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
	<b>JUMLAH</b>							<b>2.842.483.986.685,00</b>							<b>3.309.103.300.464,00</b>	